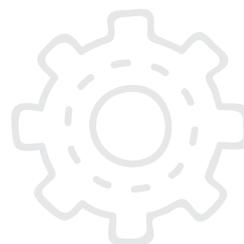


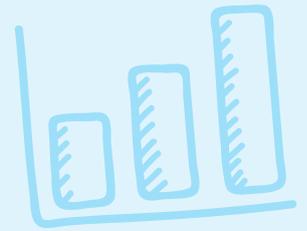


KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

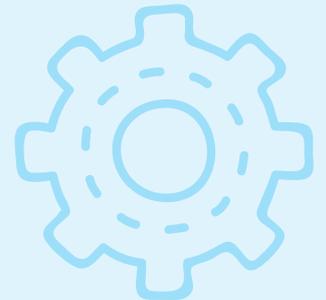
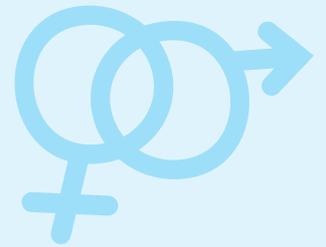


INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA INDONESIA 2019





INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA INDONESIA 2019



**Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga
Kementerian PP/Bappenas
Jakarta**

INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA INDONESIA 2019

ISBN

978-602-52416-1-1

© 2020 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Subandi Sardjoko

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan
Kementerian PPN/ Bappenas

Ketua Tim Pelaksana

Woro Srihastuti Sulistyaningrum

Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga
Kementerian PPN/ Bappenas

Anggota

Mahendra Arfan Azhar | Yosi Diani Tresna | Sri Rahayu | Rati Handayani | Ulin Nafi'ah

Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga
Kementerian PPN/ Bappenas

Diterbitkan oleh

Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga

Kementerian PPN/ Bappenas

Editor

Wiwin Purbaningrum

Didukung oleh

Tim Badan Pusat Statistik

UNFPA Indonesia:

Margaretha Sitanggang | Mercy Panggabean | Rizky Ashar

The SMERU Research Institute:

Ridho Al Izzati | Dyan Widyaningsih | Nina Toyamah | Rika Kumala Dewi

Ilustrasi dan Layout: **Arief Nazary**

Email:

kpapo@bappenas.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
SAMBUTAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	x
SAMBUTAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS	xii
SAMBUTAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA	xiii
KATA PENGANTAR DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	xv
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	xvii
RANGKUMAN EKSEKUTIF	xviii
I. Pendahuluan: Konteks Pengukuran Pembangunan Pemuda	1
1.1. Pengukuran Pembangunan Pemuda Indonesia melalui Sebuah Indeks.....	2
1.2. Pemuda di Indonesia dalam Deskripsi Statistik Umum	6
1.3. Sistematika Laporan.....	8
II. Dinamika Capaian Pembangunan Pemuda Indonesia dalam Periode 2015–2018	9
2.1. Capaian IPP secara Umum.....	10
2.2. Dinamika Domain IPP	13
III. Profil Indeks Pembangunan Pemuda 34 Provinsi di Indonesia	27
3.1. Provinsi Aceh	28
3.2. Provinsi Sumatra Utara	29
3.3. Provinsi Sumatra Barat	30
3.4. Provinsi Riau	32
3.5. Provinsi Jambi	33
3.6. Provinsi Sumatra Selatan.....	34
3.7. Provinsi Bengkulu	35
3.8. Provinsi Lampung	37
3.9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	38
3.10. Provinsi Kepulauan Riau	39
3.11. Provinsi DKI Jakarta	41
3.12. Provinsi Jawa Barat	42
3.13. Provinsi Jawa Tengah.....	43
3.14. Provinsi DI Yogyakarta	45
3.15. Provinsi Jawa Timur	46
3.16. Provinsi Banten	47
3.17. Provinsi Bali	49
3.18. Provinsi NTB	50
3.19. Provinsi NTT	51
3.20. Provinsi Kalimantan Barat	52
3.21. Provinsi Kalimantan Tengah	54
3.22. Provinsi Kalimantan Selatan	55
3.23. Provinsi Kalimantan Timur	56
3.24. Provinsi Kalimantan Utara	58

3.25. Provinsi Sulawesi Utara	59
3.26. Provinsi Sulawesi Tengah	60
3.27. Provinsi Sulawesi Selatan	62
3.28. Provinsi Sulawesi Tenggara	63
3.29. Provinsi Gorontalo	64
3.30. Provinsi Sulawesi Barat	66
3.31. Provinsi Maluku	67
3.32. Provinsi Maluku Utara.....	68
3.33. Provinsi Papua Barat	70
3.34. Provinsi Papua	71
IV. Fokus Khusus: Analisis Pembangunan Pemuda di Provinsi Jawa Barat	73
4.1. Pendahuluan	74
4.2. Metodologi	75
4.3. Analisis dan Diskusi	76
4.4. Benang Merah Langkah Ke Depan	90
V. Penutup	91
5.1. Potret Kinerja Pembangunan Pemuda Indonesia	92
5.2. Membangun Kerangka Analisis Situasi dan Tantangan Pembangunan Pemuda di Tingkat Daerah	94
Daftar Pustaka	95
Lampiran 1	98
Lampiran 2	102
Lampiran 3	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kerangka kerja IPP Indonesia	3
Gambar 2.	Perkembangan nilai IPP dalam periode 2015–2018	10
Gambar 3.	Korelasi antara nilai IPP dan IPM tingkat provinsi pada 2018	10
Gambar 4.	Nilai IPP antarprovinsi di Indonesia pada 2015 dan 2018	11
Gambar 5.	Perubahan relatif nilai IPP antarprovinsi pada 2015 dan 2018	12
Gambar 6.	Perkembangan nilai indeks domain IPP dalam periode 2015–2018	13
Gambar 7.	Sebaran nilai indeks domain pendidikan tingkat provinsi pada 2015 dan 2018	14
Gambar 8.	Sebaran nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan tingkat provinsi pada 2015 dan 2018	16
Gambar 9.	Sebaran nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja tingkat provinsi pada 2015 dan 2018.....	18
Gambar 10.	Sebaran nilai indeks domain partisipasi dan kepemimpinan tingkat provinsi pada 2015 dan 2018.....	20
Gambar 11.	Sebaran nilai indeks domain gender dan diskriminasi tingkat provinsi pada 2015 dan 2018	21
Gambar 12.	Korelasi antara angka perkawinan usia anak dan prevalensi <i>stunting</i>	23
Gambar 13.	Korelasi antara rata-rata lama sekolah dan angka perkawinan usia anak	24
Gambar 14.	Korelasi antara angka perkawinan usia anak dan tingkat partisipasi kerja pemuda perempuan di sektor formal	24
Gambar 15.	Perbandingan antara persentase pemuda perempuan dan persentase pemuda laki-laki yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas	25
Gambar 16.	Perbandingan antara persentase pemuda perempuan dan persentase pemuda laki-laki yang bekerja di sektor formal	25
Gambar 17.	Akses terhadap pendidikan dan pekerjaan formal berdasarkan status disabilitas dan jenis kelamin	26
Gambar 18.	Capaian pembangunan pemuda Provinsi Aceh pada 2018	28
Gambar 19.	Capaian pembangunan pemuda Provinsi Sumatra Utara pada 2018	30
Gambar 20.	Capaian pembangunan pemuda Provinsi Sumatra Barat pada 2018	31
Gambar 21.	Capaian pembangunan pemuda Provinsi Riau pada 2018	32
Gambar 22.	Capaian pembangunan pemuda Provinsi Jambi pada 2018	33
Gambar 23.	Capaian pembangunan pemuda Provinsi Sumatra Selatan pada 2018	34
Gambar 24.	Capaian pembangunan pemuda Provinsi Bengkulu pada 2018	36
Gambar 25.	Capaian pembangunan pemuda Provinsi Lampung pada 2018	37
Gambar 26.	Capaian pembangunan pemuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2018	39
Gambar 27.	Capaian pembangunan pemuda Provinsi Kepulauan Riau pada 2018	40
Gambar 28.	Capaian pembangunan pemuda Provinsi DKI Jakarta pada 2018	41
Gambar 29.	Capaian pembangunan pemuda Provinsi Jawa Barat pada 2018	43
Gambar 30.	Capaian pembangunan pemuda Provinsi Jawa Tengah pada 2018	44
Gambar 31.	Capaian pembangunan pemuda Provinsi DI Yogyakarta pada 2018	45
Gambar 32.	Capaian pembangunan pemuda Provinsi Jawa Timur pada 2018	47
Gambar 33.	Capaian pembangunan pemuda Provinsi Banten pada 2018	48
Gambar 34.	Capaian pembangunan pemuda Provinsi Bali pada 2018	49
Gambar 35.	Capaian pembangunan pemuda Provinsi NTB pada 2018	50

Gambar 36. Capaian pembangunan pemuda Provinsi NTT pada 2018	51
Gambar 37. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Kalimantan Barat pada 2018	53
Gambar 38. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Kalimantan Tengah pada 2018	54
Gambar 39. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Kalimantan Selatan pada 2018	55
Gambar 40. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Kalimantan Timur pada 2018	57
Gambar 41. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Kalimantan Utara pada 2018	58
Gambar 42. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Sulawesi Utara pada 2018	60
Gambar 43. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Sulawesi Tengah pada 2018	61
Gambar 44. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Sulawesi Selatan pada 2018	62
Gambar 45. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Sulawesi Tenggara pada 2018	63
Gambar 46. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Gorontalo pada 2018	65
Gambar 47. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Sulawesi Barat pada 2018.....	66
Gambar 48. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Maluku pada 2018	67
Gambar 49. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Maluku Utara pada 2018	68
Gambar 50. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Papua Barat pada 2018.....	70
Gambar 51. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Papua pada 2018.....	71
Gambar 52. Rata-rata lama sekolah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada 2018	77
Gambar 53. APK sekolah menengah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada 2018	78
Gambar 53. APK perguruan tinggi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada 2018.....	78
Gambar 55. Angka kesakitan pemuda kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada 2018	79
Gambar 56. Proporsi pemuda yang merokok di tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat pada 2018	80
Gambar 57. Korelasi antara proporsi pemuda yang merokok dan angka kesakitan pemuda berdasarkan data tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada 2018	81
Gambar 58. Tingkat pengangguran pemuda di Provinsi Jawa Barat berdasarkan kategori wilayah, tingkat pendidikan, dan gender pada 2018	82
Gambar 59. Tingkat pengangguran pemuda di Provinsi Jawa Barat berdasarkan usia pada 2018	83
Gambar 60. Tingkat pengangguran pemuda di Provinsi Jawa Barat berdasarkan kabupaten/kota pada 2018	83
Gambar 61. Korelasi antara perubahan tingkat upah minimum kabupaten/kota dan perubahan tingkat pengangguran pemuda dalam periode 2012–2018	84
Gambar 62. Proporsi pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi pada 2018	88
Gambar 63. Proporsi pemuda perempuan berusia 16–30 tahun yang bekerja di sektor formal	89
Gambar 64. Korelasi antara rata-rata lama sekolah dan proporsi perempuan yang bekerja di sektor formal	89

DAFTAR KOTAK

Kotak 1. Istilah-Istilah Penting untuk Memahami Laporan Ini	5
Kotak 2. Kesetaraan Pembangunan Pemuda menurut Status Disabilitas	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Dinamika Perubahan Nilai IPP Provinsi dalam Periode 2015–2018	11
Tabel 2.	Rangkuman Capaian dan Ketimpangan Nilai Indikator Penyusun Domain Pendidikan Antarprovinsi.....	14
Tabel 3.	Nilai Indikator Penyusun Domain Pendidikan Beserta Nilai Transformasinya dalam Periode 2015–2018	15
Tabel 4.	Rangkuman Capaian dan Ketimpangan Indikator Penyusun Domain Kesehatan dan Kesejahteraan Antarprovinsi	16
Tabel 5.	Nilai Indikator Penyusun Domain Kesehatan dan Kesejahteraan Beserta Nilai Transformasinya dalam Periode 2015–2018.....	17
Tabel 6.	Rangkuman Capaian dan Ketimpangan Indikator Penyusun Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja Antarprovinsi	18
Tabel 7.	Nilai Indikator Penyusun Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja Beserta Nilai Transformasinya dalam Periode 2015–2018.....	19
Tabel 8.	Nilai Indikator Penyusun Domain Partisipasi dan Kepemimpinan Beserta Nilai Transformasinya dalam Periode 2015–2018.....	20
Tabel 9.	Rangkuman Capaian dan Ketimpangan Nilai Indikator Penyusun Domain Partisipasi dan Kepemimpinan Antar provinsi	21
Tabel 10.	Rangkuman Capaian dan Ketimpangan Nilai Indikator Penyusun Domain Gender dan Diskriminasi Antarprovins	22
Tabel 11.	Nilai Indikator Penyusun Domain Gender dan Diskriminasi Beserta Nilai Transformasinya dalam Periode 2015–2018.....	22
Tabel 11.	Jumlah dan Distribusi Populasi Pemuda Berdasarkan Jenis Kelamin	74
Tabel 12.	Daftar Provinsi dengan IPP Tertinggi dan Terendah, serta Perbandingannya dengan Provinsi Jawa Barat (2015–2018).....	75
Tabel 13.	Perbandingan Nilai IPP, Indeks Domain, dan Indikator Pembentuk Indeks antara Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Tingkat Nasional	76

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Tabel A1.1	Daftar indikator IPP.....	98
Tabel A1.2	Batas Maksimum dan Minimum Indikator IPP	100

LAMPIRAN 2

Tabel A2.1	Nilai Indikator Penyusun IPP per Provinsi dalam Periode 2015–2018	102
Tabel A2.2	Data Transformasi Penyusun IPP 2015.....	107
Tabel A2.3	Perkembangan Nilai Indeks Domain dalam Periode 2015–2018	112
Tabel A2.4	IPP dan Peringkat Provinsi	113

LAMPIRAN 3

Tabel A11.	Data Awal Indikator IPP Jabar.....	114
Tabel A12.	Proyeksi Nilai Indikator IPP Jabar pada 2024.....	115

SAMBUTAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA



Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Indonesia 2019 dapat disusun dengan baik. Saya menyambut gembira dan menyampaikan apresiasi atas tersusunnya Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)/Youth Development Index (YDI) Indonesia 2019 sebagai dasar/acuan/ukuran dalam pembangunan kepemudaan bagi seluruh pemangku kepentingan secara komprehensif, terintegrasi dan terkoordinir, termasuk bagi para pemudanya. Dengan IPP kita dapat mengukur dan mengetahui sejauh mana kemajuan pemuda di Indonesia, baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, peluang dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta kesetaraan gender dan diskriminasi, sebagai persiapan untuk menjadi pemimpin masa depan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pelayanan/pembangunan kepemudaan difokuskan pada upaya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta vkepeloporan pemuda. Hal ini selaras dengan siklus Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dimana investasi kepada para pemuda (usia 16-30 tahun), dengan jumlah 64,19 juta jiwa Tahun 2019 (Statistik Pemuda, BPS), dititikberatkan pada sector pendidikan/keterampilan, kesehatan, pembangunan mental/karakter (integritas, etos kerja, dan gotong-royong), serta kepemimpinan dan kepeloporan sebagai bekal untuk fase selanjutnya (bekerja dan berkeluarga). Investasi pada peningkatan kualitas pemuda tersebut merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

Menyadari bahwa pemenuhan kebutuhan pembangunan pemuda merupakan hal strategis dan sangat penting bagi Indonesia, maka dibutuhkan pemetaan dan pengkajian tentang kemajuan yang telah dicapai dalam rangka memberi perhatian lebih pada area yang perlu ditingkatkan. Salah satu cara untuk melakukan pemetaan dan pengkajian itu dilakukan melalui penyusunan indeks yang dapat menggambarkan capaian terhadap isu-isu kepemudaan. Keberadaan indeks ini akan memudahkan untuk mengambil langkah-langkah yang lebih terarah dan terpadu di tingkat nasional maupun daerah.

Indonesia akan menghadapi era penting di mana working age population jauh melebihi angka dependency ratio. Fase sangat penting yang diperkirakan terjadi di Indonesia pada kurun waktu 2010 sampai dengan 2030 akan memberikan kesempatan (opportunity) yang sangat strategis dalam bentuk bonus demografi dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan dengan membangun pemuda Indonesia berkarakter, bermoral tinggi, berpendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi agar dapat memanfaatkan the windows of opportunity. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, momentum bonus demografi justru akan berakhir dengan windows of disaster. Alih-alih menjadi penggerak produktivitas, penduduk usia kerja yang jumlahnya sangat besar malah akan menjadi beban social dan ekonomi di masa mendatang.

Saya sangat senang mengetahui bahwa nilai IPP Indonesia relatif meningkat selama empat tahun terakhir (dari 48,67 Tahun 2015 menjadi 51,5 Tahun 2018). Meningkatnya nilai IPP ini mengindikasikan

adanya kemajuan pembangunan pemuda yang terjadi dalam periode 2015-2018. Namun, capaian ini belum memuaskan. Selain baru berada pada angka 51,5 (dari nilai maksimum 100), tren kenaikan IPP juga fluktuatif. Kondisi ini menunjukkan diperlukannya upaya lebih besar agar capaian pembangunan di Indonesia dapat terus meningkat secara konsisten.

Semoga dengan terbitnya Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Indonesia 2019 ini. Pembangunan kepemudaan di masing-masing wilayah di Indonesia lebih terukur. Hal ini akan memudahkan sinergi dan integrasi program pembangunan kepemudaan dari berbagai pemangku kepentingan dalam rangka percepatan pembangunan kepemudaan. Selain itu, pembangunan kepemudaan di masing-masing daerah dapat disesuaikan dengan karakteristik dan permasalahan di masing-masing ddaerah, sehingga program pembangunan kepemudaan yang dilakukan tepat sasaran dan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Jakarta, September 2020

Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



MUHADJIR EFFENDY

SAMBUTAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BAPPENAS



Upaya peningkatan kualitas pemuda menjadi salah satu agenda strategis untuk mendapatkan manfaat bonus demografi. Pembangunan kualitas pemuda tertuang dalam RPJMN 2020-2024 sebagai bagian dari Prioritas Nasional ke-3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. Kerangka pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing ditujukan untuk menciptakan manusia yang sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil dan bermartabat. Secara khusus, kebijakan dan strategi peningkatan kualitas pemuda diarahkan pada tiga hal, yaitu: (1) Penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi, termasuk memfasilitasi ruang-ruang kreasi positif bagi pemuda; (2) Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, diantaranya melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda, dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan; dan (3) Pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.

Pemuda dalam konteks ini didefinisikan berusia 16 sampai 30 tahun (Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009). Menurut data Susenas 2019, Indonesia merupakan rumah bagi 64,19 juta jiwa atau seperempat dari total penduduk Indonesia, dan 55,28 persen pemuda terkonsentrasi di Pulau Jawa (Susenas 2019). Untuk mengetahui gambaran pembangunannya di Indonesia, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) telah dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan pemuda pada RPJMN 2020-2024. IPP akan menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah kebijakan serta rumusan strategi pembangunan pemuda serta acuan dalam rangka koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah memiliki peran penting untuk mewujudkan pembangunan kepemudaan yang berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, terutama pemuda itu sendiri. Upaya ini diamanatkan secara spesifik dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Optimalisasi potensi pemuda akan memberikan implikasi positif terhadap proses pembangunan sebagai motor penggerak dan agent of change dalam pembangunan. Keterlibatan pemuda tidak hanya menjadi obyek yang dikonsultasikan, namun juga menjadi penggerak dan mitra yang setara dalam berbagai proses perencanaan kebijakan serta terlibat dalam pembangunan yang berdampak bagi Indonesia.

Akhirnya, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan buku IPP Indonesia tahun 2019. Semoga buku ini menjadi acuan kita bersama untuk berkomitmen dengan sungguh melakukan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda yang berjenjang dan berkelanjutan.

Jakarta, September 2020

Menteri PPN/Kepala Bappenas

Dr. (H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa

SAMBUTAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA



Pembangunan pemuda, sejalan dengan amanat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, harus benar-benar bermanfaat bagi pemuda Indonesia yang menurut data BPS (2019) berjumlah sekitar 64,19 juta jiwa. Setiap rupiah anggaran pemerintah, baik yang dipergunakan oleh jajaran pemerintah pusat maupun daerah harus jelas output-outcome dan manfaat atau dampak positifnya untuk sebesar-besarnya kualitas dan daya saing pemuda.

Berkaitan dengan indikator outcome (hasil) pembangunan, Indonesia memasuki babak baru dunia pembangunan pemuda. Pada tanggal 13 Juli 2018 telah diluncurkan buku Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 2017 bertempat di Bappenas. Rumusan IPP Indonesia versi pertama ini mempunyai 5 dimensi/domain: Pendidikan, Kesehatan/Kesejahteraan, Peluang Ekonomi, Partisipasi dan Kepemimpinan, Gender dan Diskriminasi. Kelima dimensi ini masing-masing dijabarkan lagi sehingga memiliki 15 indikator. Formulasi ini diidentifikasi oleh tim riset pada kurun waktu tahun 2016 hingga 2018. Institusi yang terlibat selain Bappenas dan Kemenpora adalah BPS, UNFPA, Kemenko PMK, organisasi kepemudaan, Universitas Indonesia dan Univeritas Andalas. Adapun kajian sebelumnya diinisiasi oleh Kemenpora bersama IPB.

Kami berpandangan bahwa IPP ini sangat penting. Pertama, Sebagaimana halnya makna hakiki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di bangku kuliah, IPP juga menunjuk pada indikator keberhasilan pembangunan pemuda. Tidak mungkin kita lulus dan mendapat gelar akademik di kampus tanpa memiliki IPS atau IPK yang di bawah standar kelulusan. Demikian juga dengan IPP yang secara kuantitatif dan komparatif dapat dibandingkan nilai capaiannya antar negara dan antar provinsi, bahkan antar kota/kabupaten.

Kedua, spirit pembangunan pemuda yang bersifat cross cutting issue, ditandai pula dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Peraturan ini meniscayakan eksistensi Tim Koordinasi Nasional, melalui implementasi Rencana Aksi Nasional, dan Tim Koordinasi Daerah melalui implementasi Rencana Aksi Daerah. Dalam kaitan ini, IPP menjadi indikator keberhasilan koordinasi dimaksud.

Ketiga, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, IPP telah memiliki base line 55,33 (2020). Adapun target IPP nasional pada tahun 2024 adalah sebesar 57,67. Perangkaan ini adalah komitmen nasional dengan dukungan daerah karena secara matematis IPP nasional merupakan kompilasi dari IPP yang dicapai oleh 34 provinsi. Komitmen ini sekaligus mendukung agenda global Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditargetkan tuntas pada tahun 2030. Terkonfirmasi bahwa Bappenas bersama UNFPA dan BPS, telah menelaah bahwa dari 241 indikator SDGs, terdapat 70 indikator yang kiranya relevan dengan pembangunan remaja dan pemuda Indonesia. Untuk itu, secara konseptual, tahun ini Kemenpora bertekad kuat guna merampungkan grand design atau peta jalan pembangunan kepemudaan Tahun 2020-2030.

Merujuk pada pola pikir strategis tersebut di atas, dengan terbitnya buku ini, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bappenas dan Kemenko PMK yang telah mengelaborasi dinamika capaian pembangunan pemuda Indonesia dan implikasi/rekomendasi kebijakannya di 34 provinsi dalam periode 2015 – 2018. Pada dimensi kewilayahan, sangat direkomendasikan jika setiap provinsi perlu mereplikasi analisis situasi dan tantangan pembangunan pemuda seperti yang dilakukan terhadap Provinsi Jawa Barat sebagai lokus piloting project dalam buku laporan ini.

Apresiasi yang tinggi setulusnya kami sampaikan pula kepada institusi pendukung riset analisis deskriptif yang luar biasa ini: BPS, UNFPA Indonesia, dan The Smeru Research Institute. Sebagai leading sector dan memang sudah seharusnya, Kemempora akan mengambil prakarsa lanjutan guna melakukan pendataan IPP tahun 2019 dan tahun-tahun berikutnya sebagai bagian dari knowledge management dan continuous improvement.

Semoga buku ini bermanfaat dalam mengakselerasi peningkatan kinerja pembangunan pemuda secara komperhensif dan terukur, selaras dengan visi dan misi negara Indonesia sebagaimana termaktub pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam ridha Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa.

Jakarta, September 2020
Menteri Pemuda dan Olahraga



Dr. H. Zainudin Amali, M.Si

KATA PENGANTAR DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS



Pembangunan pemuda merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta berperan penting untuk memetik bonus demografi. Keberhasilan pembangunan pemuda dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan telah menjadi indikator didalam RPJMN 2020-2024. Pada tahun 2018, Pemerintah telah meluncurkan Laporan IPP 2017 yang kemudian diperbaharui dengan Laporan IPP 2019. Laporan ini disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan dukungan United Nations Population Fund (UNFPA).

IPP 2019 menunjukkan adanya peningkatan angka IPP dari 48,67 pada tahun 2015 menjadi 51,50 pada tahun 2018. Peningkatan terjadi di kelima domain, yaitu: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan dan Kesejahteraan; (3) Lapangan dan Kesempatan Kerja; (4) Partisipasi dan Kepemimpinan; dan (5) Gender dan Diskriminasi. Peningkatan tertinggi dicapai oleh domain pendidikan yang mencapai 66,67 pada tahun 2018. Namun demikian, masih terdapat domain yang membutuhkan kerja keras untuk mencapai hasil yang optimal, khususnya pada Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja (40,00).

Penyusunan Laporan IPP 2019 telah memperhatikan adanya beberapa penyesuaian rumusan penghitungan indikator terkait SDGs dengan menggunakan metadata global, yaitu pada indikator Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi dan Perkawinan Usia Anak. Lahiran IPP yang disusun saat ini menggambarkan capaian nasional pembangunan pemuda yang ditopang oleh capaian provinsi, sehingga provinsi dengan perubahan IPP yang besar memperbaiki peringkat relatifnya terhadap provinsi-provinsi lain. Pada saat yang sama, perubahan IPP yang besar juga menunjukkan adanya akselerasi pembangunan pemuda. Untuk memberikan gambaran capaian pemuda yang lebih representatif sampai dengan tingkat kabupaten/kota, telah dilakukan pengembangan IPP melalui pilot project di Provinsi Jawa Barat.

Seluruh data dalam laporan IPP 2019 disediakan oleh BPS di bawah arahan Deputi Bidang Statistik Sosial, Bapak Margo Yuwono, serta dikoordinasikan secara teknis oleh Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Bapak Gantjang Amanullah. Proses diskusi dan konsultasi dengan berbagai Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah serta komunitas dan/atau organisasi pemuda telah dilakukan Bappenas di bawah koordinasi teknis Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Ibu Woro Srihastuti Sulistyaningrum. Pengembangan IPP Indonesia 2019 melalui pilot project di Provinsi Jawa Barat difasilitasi oleh pemerintah provinsi dengan melibatkan Bappeda Kabupaten/ Kota. Sementara itu, proses penyusunan laporan IPP 2019 didukung oleh tim konsultan dari SMERU Research Institute.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan terlibat aktif dalam seluruh rangkaian proses penyusunan IPP 2019. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak terutama yang fokus pada pembangunan kepemudaan. Temuan, interpretasi dan kesimpulan dalam publikasi ini merupakan pandangan dan rekomendasi dari berbagai pihak. Untuk itu, kritik dan saran diharapkan sebagai masukan perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, September 2020

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan
Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas



Dr. Ir. Subandi Sardjoko, M.Sc

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

APK	: Angka Partisipasi Kasar
Balita	: (Anak) Bawah Lima Tahun
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUM desa	: Badan Usaha Milik Desa
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i> (diskusi kelompok terfokus)
GenRe	: Generasi Berencana
Integra	: Indeks Prestasi Pembangunan Ketenagakerjaan
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
IPP	: Indeks Pembangunan Pemuda
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
KB	: Keluarga Berencana
kejar	: Kelompok Belajar
KEK	: Kekurangan Energi Kronis
Kementerian PPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian PPN/Bappenas	: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NTT	: Nusa Tenggara Timur
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
perbup	: Peraturan Bupati
Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Sakernas	: Survei Angkatan Kerja Nasional
SD	: Sekolah Dasar
SDKI	: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
SDM	: Sumber Daya Manusia
Sekoper Cinta	: Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SOP	: Prosedur Operasi Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>)
Susenas	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
Susenas MSBP	: Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
UBM	: Upaya Berhenti Merokok
WHO	: <i>World Health Organization</i>

RANGKUMAN EKSEKUTIF

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 mengategorikan pemuda sebagai warga negara berusia 16 hingga 30 tahun. Hal ini berarti bahwa sebanyak 63,82 juta orang atau hampir seperempat dari jumlah penduduk Indonesia pada 2018 merupakan pemuda (BPS, 2018).

Investasi pada peningkatan kualitas pemuda merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Untuk memantau kemajuan pembangunan pemuda yang dihasilkan dari investasi ini, perlu ada Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang diperbarui secara berkala.

Sebagai laporan kedua, laporan ini merupakan pembaruan dari Laporan IPP 2017. Laporan ini menyajikan analisis deskriptif terhadap kondisi IPP Indonesia dalam periode 2015–2018 di tingkat nasional dan provinsi, serta capaiannya pada tiap domain. Secara khusus, laporan ini memotret capaian pembangunan pemuda di Provinsi Jawa Barat sebagai studi kasus. Tujuannya adalah membangun kerangka analisis situasi, tantangan, dan rumusan kebijakan untuk mendorong perbaikan pembangunan pemuda di tingkat daerah agar lebih progresif.

DINAMIKA CAPAIAN PEMBANGUNAN PEMUDA INDONESIA DALAM PERIODE 2015–2018

Capaian IPP secara Umum

Nilai IPP Indonesia relatif meningkat selama tiga tahun terakhir. Meningkatnya nilai IPP ini mengindikasikan adanya kemajuan pembangunan pemuda yang terjadi dalam periode 2015–2018. Namun, capaian ini belum memuaskan. Selain baru berada pada angka 51,5 (dari nilai maksimum 100), tren kenaikan nilai IPP juga fluktuatif. Kondisi ini menunjukkan diperlukannya upaya lebih besar agar capaian pembangunan pemuda di Indonesia dapat terus meningkat secara konsisten.

Capaian pembangunan pemuda antardaerah di Indonesia bervariasi. Pada 2018, variasi nilai IPP berkisar antara 46,17 dan 70,33. Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Bali secara konsisten menjadi provinsi dengan nilai IPP pada peringkat teratas dalam periode 2015–2018. Sebaliknya, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Kalimantan Selatan selalu berada pada peringkat 20% terbawah dalam periode yang sama.

Capaian pembangunan pemuda tingkat provinsi mengalami fluktuasi seperti capaian nasional. Provinsi dengan nilai IPP melebihi nilai rata-rata provinsi di Indonesia (berdasarkan nilai IPP pada 2015) adalah Aceh, Jambi, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Sumatra Utara. Dengan peningkatan nilai IPP yang pesat, Provinsi DI Yogyakarta bertahan pada peringkat pertama dengan nilai IPP jauh di atas nilai provinsi-provinsi lain.

Provinsi dengan tingkat perkembangan IPP yang masih belum optimal adalah Kepulauan Riau, Papua, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Gorontalo, Riau, Maluku Utara, Bali, Sulawesi Selatan, Papua Barat, Bengkulu, dan DKI Jakarta. Di antara provinsi-provinsi tersebut, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Papua tercatat sebagai provinsi yang mengalami penurunan nilai IPP dalam periode 2015–2018.

Dinamika Domain IPP

Penyusunan IPP mengacu pada tiga lapisan domain pembangunan pemuda, yakni pembangunan individu, pembangunan kehidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Melalui tiga lapisan domain ini, IPP menangkap aspek lintas bidang dari pembangunan pemuda dan mengakomodasi peran pemuda sebagai objek dan subjek pembangunan. Dalam kerangka penyusunan IPP, aspek-aspek pembangunan pemuda tersebut dikelompokkan ke dalam 5 domain dengan 15 indikator penyusunnya.

Kelima domain tersebut adalah (i) domain pendidikan, (ii) domain kesehatan dan kesejahteraan, (iii) domain lapangan dan kesempatan kerja, (iv) domain partisipasi dan kepemimpinan, serta (v) domain gender dan diskriminasi.

Dalam periode 2015–2018, setiap domain pembentuk IPP memiliki capaian yang beragam. Hal ini menandakan bahwa setiap domain pembangunan pemuda belum terbangun secara merata. Keseluruhan domain ini seharusnya terbangun secara simultan agar dapat dihasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

Di antara domain-domain pembentuk IPP, pendidikan merupakan domain dengan capaian terbaik dalam periode 2015–2018. Domain yang cukup tertinggal, dengan nilai indeks masih di bawah 50, adalah domain lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Dengan nilai indeks hanya sebesar 35–40 dalam periode 2015–2018, lapangan dan kesempatan kerja menjadi domain dengan capaian terendah.

Perbaikan capaian setiap domain belum dapat dikatakan memuaskan. Capaian domain partisipasi dan kepemimpinan mengalami stagnasi. Empat domain lain mengalami peningkatan nilai indeks pada 2018, tetapi peningkatannya belum konsisten setiap tahun.

Pendidikan: Domain dengan Capaian Terbaik

Nilai indeks domain pendidikan meningkat dari 63,33 pada 2015 menjadi 66,67 pada 2018. Namun, perbaikan capaian ini tidak terjadi secara merata di semua provinsi. Pada 2018, nilai indeks domain pendidikan tertinggi diraih oleh Provinsi DI Yogyakarta, sementara yang terendah dimiliki Provinsi Papua.

Angka partisipasi kasar (APK) sekolah menengah menjadi penyumbang terbesar capaian domain pendidikan sejak 2015. APK sekolah menengah di tingkat nasional pada 2018 mencapai 86,11%, masih cukup jauh dari nilai ideal (100%). Provinsi Kalimantan Utara sudah mendekati angka ini dengan nilai mencapai 96%. Provinsi yang paling tertinggal adalah Provinsi Papua, dengan nilai APK sekolah menengah hanya sebesar 77,02%.



© Lucky Putra/UNFPA

Proporsi pemuda yang mengenyam pendidikan tinggi masih rendah. APK perguruan tinggi pemuda hanya 30,19%. Disparitas antarprovinsi juga cukup besar dengan nilai terendah sebesar 13,2% (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), sementara nilai tertinggi sebesar 70% (Provinsi DI Yogyakarta).

Angka rata-rata lama sekolah baru mencapai 10,37 tahun. Hal ini berarti bahwa rata-rata lama sekolah di kalangan pemuda Indonesia hanya setara dengan kelas 1 sekolah menengah atas (SMA)/ sederajat. Target wajib belajar 12 tahun—yang dimulai dari sekolah dasar (SD) hingga lulus SMA/ sederajat—belum tercapai dan masih jauh dari target global rata-rata lama sekolah, yaitu 15 tahun (hingga perguruan tinggi). Di Indonesia, satu-satunya provinsi yang telah memenuhi target wajib belajar 12 tahun adalah DI Yogyakarta.

Domain Kesehatan dan Kesejahteraan: Domain dengan Capaian yang Meningkat tetapi Belum Konsisten

Dalam periode 2015–2018, terjadi perbaikan nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan dari 55 menjadi 57,5. Nilai indeks tertinggi (72,5) diraih Provinsi Kalimantan Timur dan nilai indeks terendah (45) diperoleh Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, terjadi perbaikan nilai deviasi indeks. Hal ini berarti bahwa ketimpangan nilai indeks antarprovinsi menurun.

Di antara empat indikator pada domain kesehatan dan kesejahteraan, angka kesakitan pemuda merupakan satu-satunya indikator yang secara konsisten mengalami perbaikan sejak 2015. Provinsi dengan angka kesakitan pemuda terendah adalah Provinsi Sumatra Selatan, sedangkan provinsi dengan angka tertinggi adalah Provinsi Gorontalo.

Upaya meningkatkan ketersediaan ruang publik yang aman bagi pemuda juga masih menjadi tantangan. Hal ini dapat dilihat dari proporsi pemuda yang menjadi korban kejahatan pada 2018 yang angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan angka pada 2015.

Capaian indikator pemuda yang merokok pada 2018 (26,34%) lebih baik daripada capaiannya pada 2015 (27,04%). Namun, perbaikan ini belum memuaskan karena tidak berkontribusi terhadap perbaikan nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan. Proporsi pemuda yang merokok terendah ditemukan di Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan yang tertinggi di Provinsi Lampung.

Capaian indikator persentase remaja yang hamil pada 2018 (16,67%) juga lebih baik daripada capaiannya pada 2015 (18,92%). Disparitas antarprovinsi pun mengecil. Meski demikian, upaya untuk menurunkan angka kehamilan remaja masih perlu terus dilakukan mengingat kasus kehamilan pada remaja memiliki dampak yang kompleks. Angka kehamilan remaja terendah ditemukan di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi DI Yogyakarta, sedangkan yang tertinggi di Provinsi Jambi.

Lapangan dan Kesempatan Kerja: Domain dengan Capaian Terendah

Secara nasional, domain lapangan dan kesempatan kerja memiliki nilai indeks terendah dibandingkan dengan empat domain lain. Capaian domain ini juga fluktuatif dari tahun ke tahun. Meski demikian, masih terdapat perbaikan nilai indeks domain dari 35 menjadi 40 dalam periode 2015–2018.

Ketimpangan capaian domain antarprovinsi mengalami peningkatan dalam periode 2015–2018. Provinsi dengan nilai indeks tertinggi pada 2018 adalah Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi ini juga merupakan provinsi yang mengalami peningkatan signifikan nilai indeks domain dari 40 pada 2015 menjadi 75 pada 2018. Sebaliknya, provinsi dengan nilai indeks domain terendah adalah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Kepulauan Riau merupakan satu-satunya provinsi yang mengalami penurunan nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja, dari 50 menjadi 30 dalam periode yang sama.

Tantangan pada domain lapangan dan kesempatan kerja adalah tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) pemuda, serta kecilnya proporsi pemuda wirausaha kerah putih. Pada 2018, TPT pemuda mencapai 13,47%; angka ini lebih tinggi sekitar 2,5 kali lipat daripada angka pengangguran nasional. TPT pemuda tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Barat (19,6%), sedangkan yang terendah di Provinsi Bali (4,05%). Sementara itu, proporsi pemuda wirausaha kerah putih hanya 0,39%, masih jauh dari angka ideal 2%. Provinsi dengan proporsi pemuda wirausaha kerah putih yang cukup mendekati angka ideal adalah Provinsi Kalimantan Utara

(1,41%), sedangkan provinsi dengan proporsi pemuda wirausaha kerah putih terkecil adalah Provinsi Maluku Utara (0,02%).

Domain Partisipasi dan Kepemimpinan: Capaian yang Mengalami Stagnasi

Capaian domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda mengalami stagnasi dalam periode 2015–2018; nilainya tetap berada pada angka 46,67. Provinsi DI Yogyakarta merupakan provinsi yang secara konsisten meraih nilai indeks tertinggi sejak 2015, dengan nilai mencapai 70 pada 2018. Sebaliknya, Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan provinsi dengan nilai indeks terendah pada 2018, yaitu 33,33.

Di antara ketiga indikator penyusun domain partisipasi dan kepemimpinan, indikator partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan memiliki capaian tertinggi dengan nilai 81,36 pada 2018. Provinsi dengan persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan tertinggi adalah NTB (92,85%) dan provinsi dengan persentase terendah adalah Papua Barat (66,95%). Walaupun demikian, capaian indikator partisipasi pemuda dalam organisasi masih tergolong rendah dengan angka nasional hanya sebesar 6,36%. Pada 2018, Provinsi Bali merupakan provinsi dengan persentase tertinggi (17,68%), sedangkan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan yang terendah (2,15%). Rendahnya partisipasi dalam organisasi ini sejalan dengan rendahnya persentase pemuda yang memberikan saran dalam rapat, yaitu hanya 6,72%, pada 2018. Di antara semua provinsi, persentase tertinggi ditemukan di Provinsi DI Yogyakarta (19,22%) dan persentase terendah di Provinsi Maluku (2,53%).

Domain Gender dan Diskriminasi: Tantangan menuju Kesetaraan

Penilaian terhadap domain gender dan diskriminasi ditujukan untuk memastikan terwujudnya kesetaraan pembangunan bagi kelompok pemuda marginal, terutama pemuda perempuan. Secara rata-rata, nilai indeks domain gender dan diskriminasi meningkat dari 43,33 pada 2015 menjadi 46,67 pada 2018. Ketimpangan antarprovinsi juga mengecil. Nilai indeks tertinggi pada 2018 diraih Provinsi DI Yogyakarta (66,67) dan nilai terendah diperoleh Provinsi Papua (33,33).

Angka perkawinan usia anak turun dari 12,14% pada 2015 menjadi 11,21% pada 2018, tetapi perbaikan ini belum cukup signifikan untuk berkontribusi terhadap peningkatan nilai indeks domain gender dan diskriminasi. Provinsi dengan angka perkawinan usia anak tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Barat (19,43%) dan provinsi dengan angka terendah adalah Provinsi DKI Jakarta (4,06%). Prevalensi kondisi pendek (stunting) pada umumnya lebih tinggi di provinsi dengan tingkat perkawinan usia anak yang tinggi. Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan bukti bahwa di antara perempuan berusia 15–24 tahun yang hamil, 85% mengalami anemia dan 30% mengalami kekurangan energi kronis (KEK). Implikasinya adalah bahwa perempuan yang hamil pada usia remaja berisiko melahirkan bayi dengan permasalahan gizi.

Salah satu hal yang dapat menjelaskan fenomena perkawinan usia anak adalah tingkat pendidikan. Provinsi dengan rata-rata lama sekolah pemuda yang lebih tinggi memiliki angka perkawinan usia anak yang relatif lebih rendah. Hal ini berarti bahwa sekolah memperkecil kemungkinan terjadinya pernikahan usia muda atau usia anak.

Indikator lain dalam domain partisipasi dan diskriminasi adalah akses pemuda perempuan terhadap pendidikan. Pemuda perempuan yang menempuh pendidikan tingkat SMA dan perguruan tinggi meningkat sebesar 2,06 poin dari 36,61 menjadi 38,67 dalam periode 2015–2018. Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas juga ditemukan lebih tinggi daripada persentase pemuda laki-laki. Provinsi DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan capaian tertinggi se-Indonesia (61,15%), sementara Provinsi Papua merupakan provinsi dengan capaian terendah (28,26%).

Indikator terakhir pada domain ini adalah persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal. Pemuda perempuan mengalami ketertinggalan pada indikator ini. Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal lebih rendah daripada persentase pemuda laki-laki. Provinsi Bali merupakan provinsi dengan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal tertinggi (44,45%), sedangkan Provinsi Papua merupakan yang terendah (9,88%).

FOKUS KHUSUS: ANALISIS PEMBANGUNAN PEMUDA DI PROVINSI JAWA BARAT

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemuda terbanyak, yakni mencapai 11,9 juta jiwa atau 18,8% dari jumlah keseluruhan pemuda Indonesia. Namun, nilai IPP Provinsi Jawa Barat berada pada peringkat kelima terendah sejak 2015 dan menjadi yang terendah pada 2018 dengan nilai 46,17. Dibandingkan dengan provinsi lain yang nilai IPP-nya relatif sama pada 2015, nilai IPP Jawa Barat mengalami perubahan yang sangat lambat, yakni hanya sebesar 1% dalam periode 2015–2018.

Pembangunan pemuda di Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan di berbagai bidang. Di antara kelima domain IPP, domain partisipasi dan kepemimpinan adalah satu-satunya domain yang nilai indeksinya sama dengan nilai nasional. Keempat domain yang lain memiliki nilai indeks lebih kecil daripada nilai nasional. Di antara domain-domain ini, domain lapangan dan kesempatan kerja merupakan domain dengan capaian yang tertinggal, bahkan merupakan yang terendah dari semua provinsi di Indonesia.

Pada domain pendidikan, rendahnya partisipasi sekolah di kalangan pemuda disebabkan, antara lain, oleh kurangnya dukungan orang tua terhadap pendidikan anak dan rendahnya tingkat sosial-ekonomi keluarga. Hal ini didorong pula oleh banyaknya anak di lingkungan sekitar yang tidak bersekolah, serta budaya patriarki yang kental dalam masyarakat—orang tua mendorong anak laki-laki untuk bekerja dan anak perempuan untuk menikah sedini mungkin. Kurangnya infrastruktur pendidikan dan penerapan sistem zonasi sekolah juga merupakan faktor-faktor yang menyebabkan banyak pemuda tidak dapat mengakses sekolah.

Tingkat pendidikan pemuda yang rendah dan perkawinan usia anak merupakan faktor-faktor yang membatasi akses pemuda terhadap lapangan kerja. Sistem pendidikan yang ada saat ini juga masih belum mampu menghasilkan pemuda dengan kualifikasi yang dibutuhkan dunia kerja. Program pelatihan kewirausahaan pun belum efektif karena tidak berkelanjutan dan efektivitasnya tidak dievaluasi. Terbatasnya akses pemuda terhadap lapangan kerja di sektor formal juga dipengaruhi oleh ketatnya persaingan kerja di Provinsi Jawa Barat yang terjadi akibat besarnya arus urbanisasi. Lebih tingginya tingkat upah di Provinsi Jawa Barat memperbesar tantangan yang dihadapi pemuda dalam mendapatkan pekerjaan.

Pada domain kesehatan dan kesejahteraan, angka kesakitan pemuda Provinsi Jawa Barat termasuk tinggi. Hal ini diakibatkan, antara lain, oleh pola makan yang belum memenuhi gizi seimbang. Penyebab yang lain adalah kurangnya wawasan dan pemahaman mengenai pola hidup sehat, serta belum membudayanya pemeriksaan kesehatan rutin. Kebiasaan merokok juga ditemukan berkorelasi positif dengan angka kesakitan pemuda.

Capaian domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda juga tetap perlu dimaksimalkan meski nilainya sama dengan nilai nasional. Rendahnya partisipasi dan kepemimpinan pemuda disebabkan oleh hambatan yang berasal dari dalam diri pemuda, seperti kurangnya minat dan kepercayaan diri. Ada pula hambatan yang bersumber dari luar diri pemuda, seperti kurangnya kesempatan yang diberikan penyelenggara rapat kepada pemuda untuk menyampaikan pendapatnya.

Berdasarkan hasil analisis tantangan dalam pembangunan pemuda di Provinsi Jawa Barat, ditemukan beberapa benang merah. Pertama, persoalan pada tiap domain pembangunan pemuda di Provinsi Jawa Barat tidak benar-benar terpisah dari persoalan pada domain lain. Beberapa faktor teridentifikasi memengaruhi capaian lebih dari satu domain. Kedua, perkembangan domain tertentu dapat mendukung domain lain untuk berkembang. Domain ini pada umumnya merupakan domain yang berada pada lapisan pembangunan individu, yaitu domain pendidikan serta domain kesehatan dan kesejahteraan. Intervensi pada domain ini akan sangat mendukung kemajuan domain-domain lain pada lapisan di atasnya (lapisan pembangunan penghidupan layak dan partisipasi). Ketiga, Provinsi Jawa Barat terdiri atas 27 kabupaten/kota yang memiliki dinamika persoalan pembangunan pemuda yang berbeda-beda. Untuk itu, prioritas atau penekanan dalam intervensi pembangunan pemuda di suatu kabupaten/kota akan berbeda dengan daerah lain. Keempat, dengan beragamnya persoalan pembangunan pemuda, setiap pemerintah daerah di Indonesia (baik tingkat kabupaten/kota atau provinsi) perlu mereplikasi analisis situasi dan tantangan pembangunan pemuda Provinsi Jawa Barat, sebagaimana disajikan dalam laporan ini. Analisis situasi dan tantangan perlu dilakukan agar pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk mendorong peningkatan capaian pembangunan pemuda di wilayahnya.

1

PENDAHULUAN: KONTEKS PENGUKURAN PEMBANGUNAN PEMUDA



1.1. PENGUKURAN PEMBANGUNAN PEMUDA INDONESIA MELALUI SEBUAH INDEKS

Investasi pada peningkatan kualitas pemuda merupakan salah satu kegiatan prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Hal ini tidak terlepas dari konteks bonus demografi Indonesia yang akan mencapai puncaknya pada 2025 hingga 2030. Dalam periode ini, Indonesia diharapkan mampu memetik keuntungan dari proporsi populasi kelompok usia produktif yang lebih besar daripada populasi kelompok usia tidak produktif. Dengan jumlah penduduk pemuda mencapai hampir seperempat jumlah keseluruhan penduduk saat ini, Indonesia berpeluang untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang besar. Kualitas pemuda Indonesia akan menjadi salah satu penentu untuk mendapatkan peluang tersebut. Dengan demikian, investasi pada kelompok pemuda saat ini akan menentukan dividen yang diraih Indonesia pada masa mendatang.

Membangun pemuda tidak hanya berarti membangun individu pemuda, tetapi juga membangun lingkungan sekitar yang menjadi sumber penghidupan bagi mereka. Oleh karena itu, pembangunan pemuda harus bersifat lintas bidang yang menyentuh aspek pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, pekerjaan, partisipasi, politik, dan kesetaraan gender. Pembangunan pemuda juga harus berpegang pada prinsip bahwa pemuda adalah objek dan sekaligus subjek pembangunan. Selain itu, mengingat kondisi antarindividu atau kelompok pemuda tidak homogen, perlu dipastikan bahwa hasil dari pembangunan pemuda bisa dinikmati secara merata oleh setiap kelompok, baik laki-laki maupun perempuan.

Untuk memantau kemajuan pembangunan pemuda, perlu ada indikator untuk menilai capaian pembangunan pemuda. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) memang telah menyajikan beragam indikator yang dapat dijadikan acuan untuk menilai capaian pembangunan pemuda. Namun, tidak mudah untuk mengambil kesimpulan umum terkait capaian pembangunan pemuda karena banyaknya indikator yang digunakan dalam TPB. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang secara resmi diluncurkan pada 2018 merupakan langkah untuk memudahkan proses penilaian tingkat keberhasilan pembangunan pemuda di Indonesia. Indeks ini diukur secara statistik oleh Badan Pusat Statistik (BPS).



Investments made now in young people and changes made to the way they are engaged will dramatically shape the future of societies.

(Magdy Martínez-Solimán dalam UNDP¹, 2017)

IPP disusun berdasarkan tiga lapisan domain pembangunan pemuda yang menjadi ruang lingkup IPP, yaitu pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dan diskriminasi terhadap pemuda di berbagai bidang (Gambar 1). Melalui tiga lapisan ini, IPP menangkap aspek lintas bidang dari pembangunan pemuda dan mengakomodasi peran pemuda sebagai objek dan subjek pembangunan. Dalam kerangka penyusunan IPP, aspek-aspek pembangunan pemuda tersebut dikelompokkan ke dalam 5 domain dengan 15 indikator penyusunnya.

a. Lapisan Pembangunan Individu

Peningkatan pendidikan, kesehatan, dan ketersediaan ruang publik yang aman merupakan komponen pembangunan individu pemuda yang penting untuk diperhatikan. Dalam pengukuran IPP, indikator terkait komponen-komponen ini dikelompokkan ke dalam dua domain, yaitu pendidikan serta kesehatan dan kesejahteraan.

¹United Nations Development Programme.

b. Lapisan Pembangunan Penghidupan dan Kesejahteraan

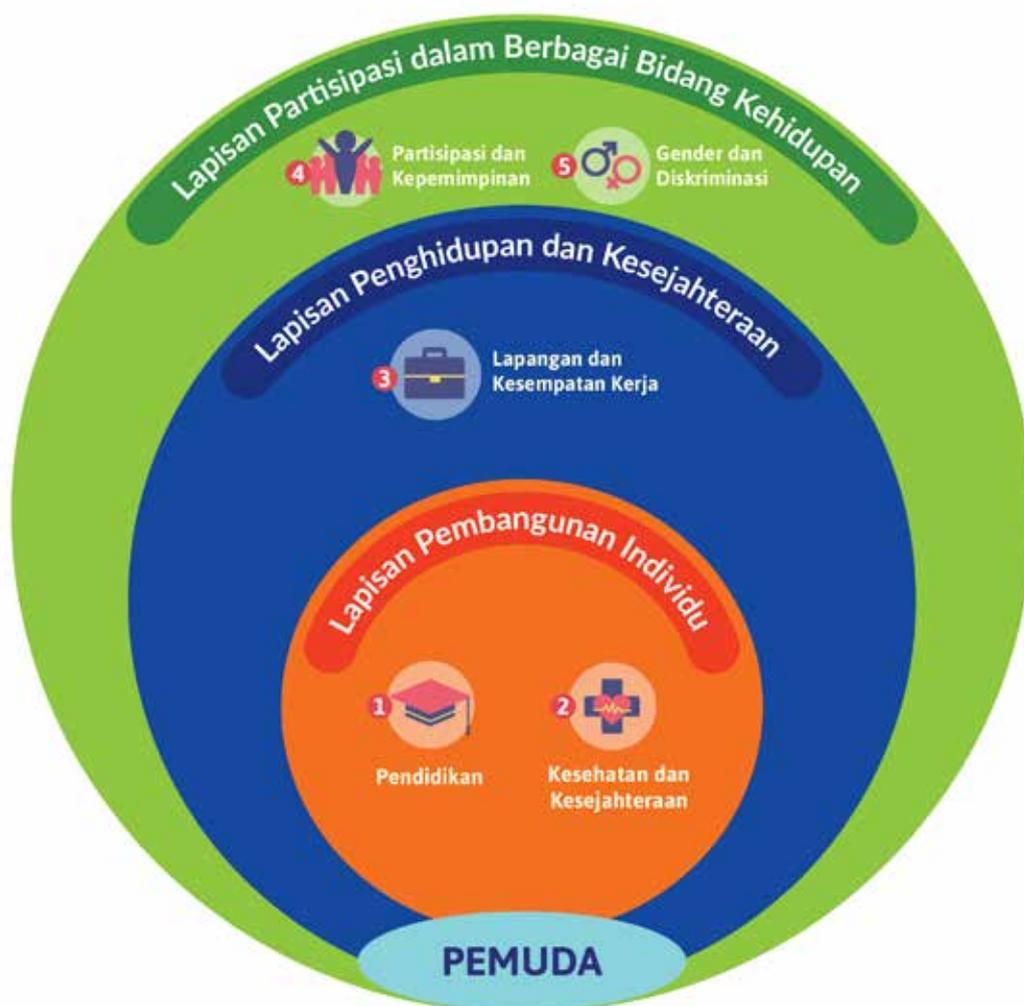
Hal mendasar yang harus dilakukan untuk membangun penghidupan dan kesejahteraan pemuda adalah meningkatkan akses mereka terhadap lapangan dan kesempatan kerja. Terdapat satu domain dalam lapisan ini yang disebut dengan domain lapangan dan kesempatan kerja.

c. Lapisan Partisipasi dalam Berbagai Bidang Kehidupan

Peran pemuda sebagai subjek pembangunan tercermin pada lapisan terluar kerangka kerja IPP yang terdapat dalam domain partisipasi dan kepemimpinan. Lapisan ini juga mencantumkan aspek gender dan diskriminasi untuk memastikan terwujudnya kesetaraan pembangunan bagi kelompok pemuda marginal.²

Sejauh ini, pemerintah telah menjadikan IPP sebagai salah satu indikator pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020. Untuk memastikan relevansi, efektivitas, dan efisiensi kebijakan dan program pengembangan pemuda dalam meningkatkan kapasitas pemuda, perlu ada pembaruan IPP yang dilakukan secara berkala. Selain itu, pembaruan IPP penting untuk menentukan target rencana investasi pembangunan pemuda pada masa depan.

Laporan IPP pertama yang telah dipublikasikan adalah Laporan IPP 2017. Laporan tersebut memuat perkembangan IPP pada 2015 dan 2016. Sementara itu, laporan ini merupakan laporan IPP kedua yang menyajikan analisis deskriptif tentang kondisi IPP Indonesia di tingkat nasional dan provinsi, serta capaiannya pada tiap domain dalam periode 2015–2018.



Gambar 1. Kerangka kerja IPP Indonesia

²Capaian pembangunan pemuda penyandang disabilitas selanjutnya juga menjadi komponen penyusun IPP. Namun, ketersediaan datanya belum memadai sehingga data tentang pemuda penyandang disabilitas belum dapat dimasukkan ke dalam penghitungan IPP.

Format laporan ini mengacu pada format laporan sebelumnya. Hal baru dari Laporan IPP 2019 adalah adanya penyesuaian definisi dua indikator penyusun IPP dengan definisi yang digunakan dalam metadata indikator TPB³. Selain itu, laporan ini secara khusus memotret lebih dalam capaian pembangunan pemuda di salah satu provinsi. Tujuannya adalah menjadikan provinsi ini studi kasus dalam membangun kerangka analisis situasi dan tantangan pembangunan pemuda di daerah sehingga dapat teridentifikasi rumusan kebijakan yang tepat untuk mendorong perbaikan pada pembangunan pemuda pada masa depan. Karena dinamika

permasalahan pemuda di Indonesia beragam, perlu dilakukan analisis permasalahan di setiap daerah untuk mengidentifikasi penyebabnya guna merumuskan kebijakan intervensi yang tepat. Dalam laporan ini, provinsi yang dipilih sebagai studi kasus adalah Provinsi Jawa Barat. Selain karena merupakan provinsi dengan jumlah pemuda terbanyak di Indonesia, Provinsi Jawa Barat dipilih karena secara konsisten menjadi satu dari lima provinsi dengan nilai IPP yang rendah sejak 2015 dan menjadi provinsi dengan nilai terendah pada 2018. Kondisi ini menarik untuk dijadikan bahan pembelajaran bagi berbagai pemangku kepentingan.

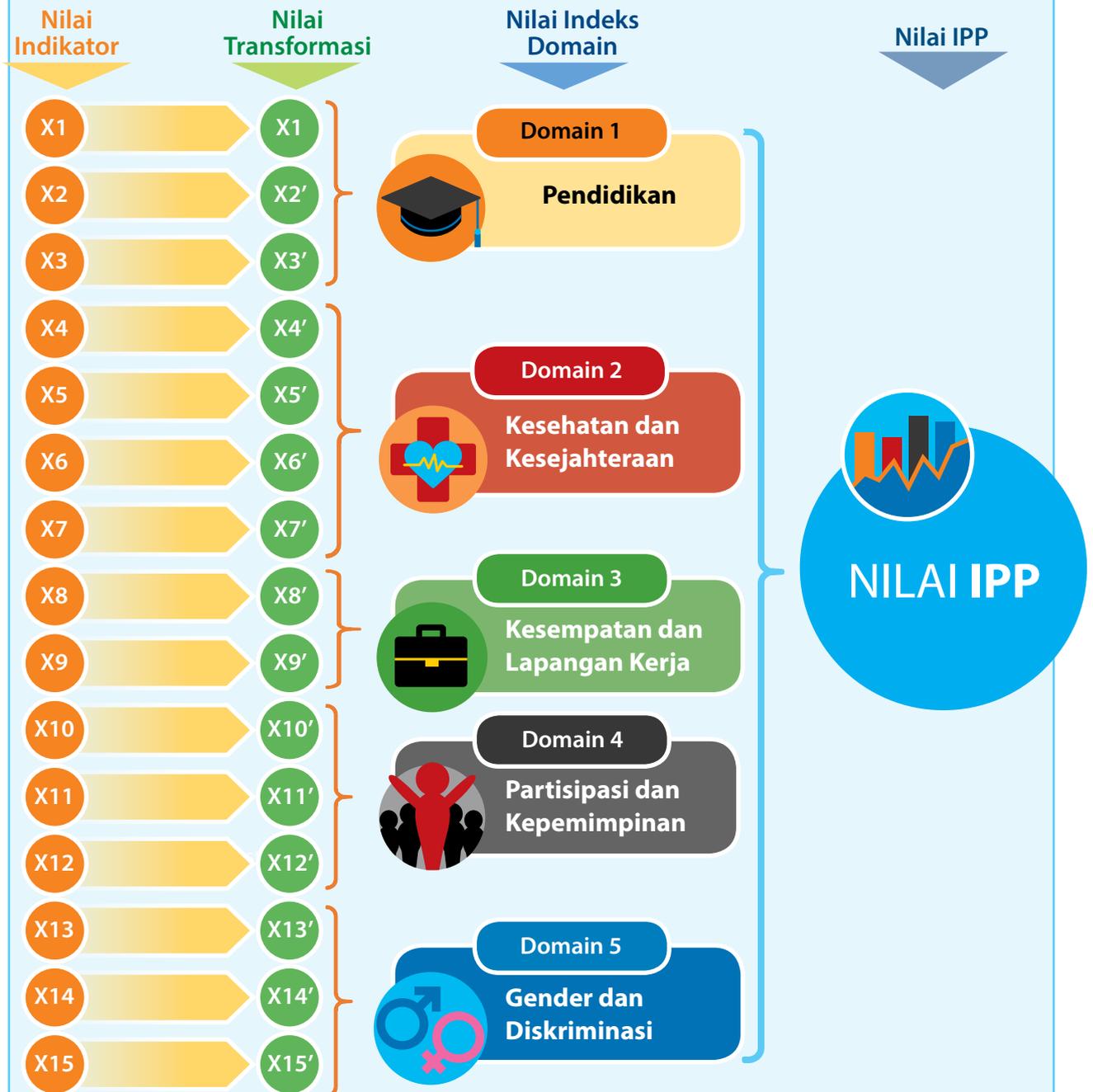


³Keterangan lebih lengkap terkait perubahan definisi indikator tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1.

Kotak 1. Istilah-Istilah Penting untuk Memahami Laporan Ini

Laporan ini menyajikan pembahasan mengenai empat jenis angka statistik, yaitu (i) nilai indikator penyusun IPP, (ii) nilai transformasi indikator penyusun IPP, (iii) nilai indeks domain, dan (iv) nilai IPP. Apa perbedaan istilah-istilah tersebut?

Nilai indikator merupakan nilai awal indikator penyusun IPP. Nilai ini merupakan nilai indikator sebelum diolah menjadi nilai indeks. Sebagai contoh, nilai indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT) pemuda adalah 13,47% dan rata-rata lama sekolah adalah 10,37 tahun. Dalam proses penghitungan IPP, setiap nilai indikator tersebut diubah menjadi nilai subindeks (atau dalam laporan ini disebut dengan **nilai transformasi**) dengan menggunakan rumus yang dijelaskan pada Lampiran 1. Nilai transformasi ini menunjukkan kontribusi tiap indikator dalam membentuk nilai indeks domain dan nilai IPP. Gabungan nilai transformasi tersebut akan menghasilkan **nilai indeks domain**. Nilai indeks domain ini dapat menunjukkan aspek pembangunan pemuda yang secara relatif lebih maju atau tertinggal daripada aspek yang lain. Selanjutnya, nilai indeks domain rata-rata dihitung untuk menghasilkan **nilai IPP**.



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirasaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

1.2. PEMUDA DI INDONESIA DALAM DESKRIPSI STATISTIK UMUM

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 mengategorikan pemuda sebagai warga negara berusia 16 hingga 30 tahun yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini berarti bahwa rentang usia pemuda mencakup masa transisi mereka dari dunia pendidikan ke dunia kerja, serta transisi menuju kemandirian sosial dan politik. Secara demografis, rentang tersebut juga menjadikan pemuda masuk ke dalam kelompok usia produktif. Sebagai generasi yang dihipit oleh generasi di bawah dan di atasnya, pemuda dituntut untuk menanggung beban kelompok usia tidak produktif. Untuk itu, sebagai bagian dari kelompok usia produktif, pemuda dituntut untuk tidak hanya unggul secara kuantitas, tetapi juga harus unggul secara kualitas dan berdaya saing. Berikut profil pemuda Indonesia berdasarkan Laporan Statistik Kepemudaan 2018 yang diterbitkan BPS (BPS, 2018). Untuk memudahkan proses penilaian tingkat keberhasilan pembangunan pemuda di Indonesia. Indeks ini diukur secara statistik oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

IPP disusun berdasarkan tiga lapisan domain pembangunan pemuda yang menjadi ruang lingkup IPP, yaitu pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dan diskriminasi terhadap pemuda di berbagai bidang (Gambar 1). Melalui tiga lapisan ini, IPP menangkap aspek lintas bidang dari pembangunan pemuda dan mengakomodasi peran pemuda sebagai objek dan subjek pembangunan. Dalam kerangka penyusunan IPP, aspek-aspek pembangunan pemuda tersebut dikelompokkan ke dalam 5 domain dengan 15 indikator penyusunnya.

a. Demografi Pemuda

Pada 2018, jumlah pemuda di Indonesia mencapai 63,82 juta orang atau 24,15% dari jumlah keseluruhan penduduk. Berdasarkan proyeksi penduduk 2010–2035, saat rasio ketergantungan Indonesia mencapai titik terendah dalam kurun 2025–2030, proporsi pemuda di Indonesia akan berada pada angka 23,30%–23,70%. Secara kuantitas, jumlah rata-rata pemuda di Indonesia dalam periode tersebut mencapai 68 juta jiwa (BPS, 2013).

Proporsi pemuda laki-laki dan perempuan relatif seimbang, yaitu masing-masing 50,58% dan 49,42%. Dari sisi kelompok usia, 21,38% pemuda berada pada kelompok usia 16–18 tahun dan 78,62% sisanya berusia di atas 18 tahun. Hal ini berarti bahwa mayoritas pemuda di Indonesia berada pada kelompok yang sedang menempuh pendidikan tinggi, bekerja, atau melakukan keduanya.

Terdapat 58,24% pemuda yang berstatus belum kawin, 40,35% berstatus kawin, dan 1,41% sisanya berstatus cerai hidup/mati. Di antara pemuda yang pernah kawin, pemuda perempuan pada umumnya menikah pada usia lebih muda; bahkan, 31,60% pemuda perempuan yang pernah menikah ditemukan menikah pertama kali sebelum usia 19 tahun. Sementara itu, persentase pemuda laki-laki yang menikah pada usia ini hanya 6,77%. Menikah pada usia muda menghadapi pemuda perempuan di Indonesia pada ketimpangan akses terhadap berbagai aspek pembangunan.

Dari sisi sebarannya, sebagian besar pemuda berada di perkotaan (56,68%). Lebih dari 50% pemuda berada di Pulau Jawa, dengan proporsi terbesar berada di Provinsi Jawa Barat. Tren keberadaan pemuda di Pulau Jawa turun sebesar 2,72%, dari 58,25% pada 2004 menjadi 55,53% pada 2018. Sebaliknya, tren keberadaan pemuda di pulau-pulau lain di Indonesia pada 2018 justru meningkat dari trennya pada 2004 meski persentasenya hanya sebesar 0,33%–1,19%.

b. Pemuda dan Pendidikan

Pada umumnya, tidak terdapat perbedaan capaian pendidikan antara laki-laki dan perempuan, baik dari sisi jumlah pemuda yang masih bersekolah, tidak pernah bersekolah, maupun sudah tidak bersekolah. Namun, terdapat perbedaan pada akses terhadap pendidikan yang mencolok antara pemuda dengan disabilitas dan pemuda nondisabilitas. Terdapat 23,08% pemuda dengan disabilitas yang tidak pernah bersekolah, 64,14% yang sudah tidak bersekolah, dan hanya 12,78% yang sedang bersekolah. Capaian ini jauh lebih kecil daripada capaian pemuda nondisabilitas, yaitu 0,59%, 73%, dan 26,40% pada kategori yang



© Lucky Putra/UNFPA

sama. Dari sisi sebarannya, jumlah pemuda di perdesaan yang tidak pernah bersekolah lebih besar (1,45%) daripada di perkotaan (0,35%). Jumlah pemuda dengan disabilitas yang tidak pernah bersekolah (23,08%) juga lebih besar daripada pemuda nondisabilitas (0,59%). Kondisi tersebut mengindikasikan masih timpangnya akses terhadap pendidikan bagi kelompok pemuda dengan disabilitas. Untuk meningkatkan partisipasi pendidikan pemuda dengan disabilitas, pemerintah harus menyediakan lebih banyak sekolah inklusi di setiap jenjang pendidikan dengan tenaga pengajar yang terlatih.

c. Pemuda dan Ketenagakerjaan

Pada 2018, pemuda yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja mencapai 61,10%. Distribusinya cukup merata antara perkotaan dan perdesaan. Namun, terdapat ketimpangan yang cukup besar antarjenis kelamin. Pemuda laki-laki yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja mencapai 74,67%, sedangkan pemuda perempuan hanya 47,07%. Sementara itu, tingkat pengangguran pemuda laki-laki dan perempuan hampir seimbang, yaitu masing-masing 13,40% dan 13,58%. Namun, angka ini hampir tiga kali lipat lebih besar daripada angka pengangguran nasional yang hanya mencapai 5,34%.

Tantangan ketenagakerjaan di perdesaan lebih besar daripada di perkotaan. Selain angka pengangguran yang lebih tinggi, wilayah perdesaan memiliki akses terhadap pekerjaan formal yang lebih terbatas. Pemuda di perkotaan yang bekerja di sektor formal mencapai 72,30%; angka ini jauh lebih besar daripada angka di perdesaan yang hanya sebesar 40,41%. Selain itu, sebagian besar pemuda di perkotaan yang bekerja merupakan lulusan sekolah menengah atas (SMA) atau perguruan tinggi, sedangkan sebagian besar pemuda di perdesaan yang bekerja merupakan lulusan sekolah menengah pertama (SMP) ke bawah. Kondisi ini merupakan salah satu konsekuensi rendahnya rata-rata lama sekolah yang mendorong pemuda di perdesaan untuk masuk ke dalam pasar kerja lebih awal. Selain itu, ditemukannya pemuda berusia 16–18 tahun yang bekerja (19,44%) mengindikasikan adanya kasus putus sekolah pada pemuda yang seharusnya sedang menempuh pendidikan menengah.

d. Kesehatan Pemuda

Sekitar 7 dari 100 pemuda di Indonesia pernah memiliki keluhan penyakit yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Angka kesakitan pemuda lebih tinggi di perdesaan daripada perkotaan dan lebih tinggi pada perempuan (8,30%) daripada laki-laki (7,08%). Tingkat berobat jalan di antara pemuda yang mengalami keluhan sakit tersebut adalah 38,63% dan sebagian besar telah mengakses tenaga dan fasilitas kesehatan.

Enam dari sepuluh pemuda di Indonesia telah memiliki jaminan kesehatan dengan akses

yang hampir setara antara pemuda laki-laki dan perempuan. Terdapat 41,57% pemuda yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan dan 61,93% yang menggunakannya untuk rawat inap. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki di antara pemuda yang memiliki jaminan kesehatan (79%).

Sekitar 5,84% pemuda perempuan pernah melahirkan pada usia 16–19 tahun, dengan persentase yang lebih besar di perdesaan (8,70%) daripada di perkotaan (3,59%). Kehamilan pada usia ini termasuk berisiko tinggi karena fungsi organ reproduksi perempuan belum berkembang dengan sempurna. Kondisi tersebut diperburuk dengan fakta bahwa persentase persalinan pada kelompok pemuda berusia 16–19 tahun yang tidak dibantu tenaga kesehatan (11,54%) hampir dua kali lebih besar daripada kelompok pemuda berusia 20–30 tahun (6,10%).

1.3. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan ini terdiri atas lima bab. Bab I menyajikan konteks pengukuran pembangunan pemuda dalam bentuk IPP dan deskripsi umum yang memberikan informasi statistik singkat tentang pemuda. Bab II menyajikan capaian IPP di tingkat nasional dan provinsi. Bab III memaparkan profil IPP ke-34 provinsi di Indonesia. Bab IV menyajikan analisis situasi dan tantangan pembangunan pemuda di Provinsi Jawa Barat. Bab V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan rekomendasi.

2

DINAMIKA CAPAIAN PEMBANGUNAN PEMUDA INDONESIA DALAM PERIODE 2015–2018



Bab ini berisi tentang capaian IPP di tingkat nasional berdasarkan data capaian dalam periode 2015–2018 dan capaian IPP pada tiap domain. Nilai indeks domain dihasilkan dari nilai indeks indikator yang menjadi komponennya. Nilai indeks indikator merupakan hasil konversi dari data/angka indikator (lihat Lampiran 1. Metodologi Penghitungan IPP).

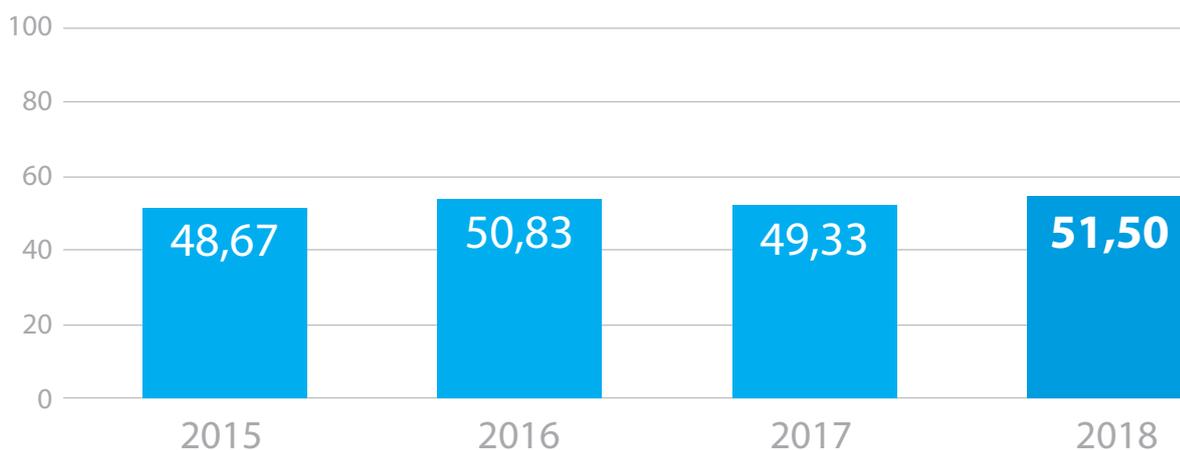
2.1. CAPAIAN IPP SECARA UMUM

Angka IPP Indonesia meningkat selama tiga tahun terakhir. Gambar 2 menunjukkan tren capaian IPP yang meningkat sebesar 2,83 poin, dari 48,67 pada 2015 menjadi 51,50 pada 2018. Peningkatan ini mengindikasikan adanya kemajuan pembangunan pemuda yang terjadi dalam periode 2015–2018.

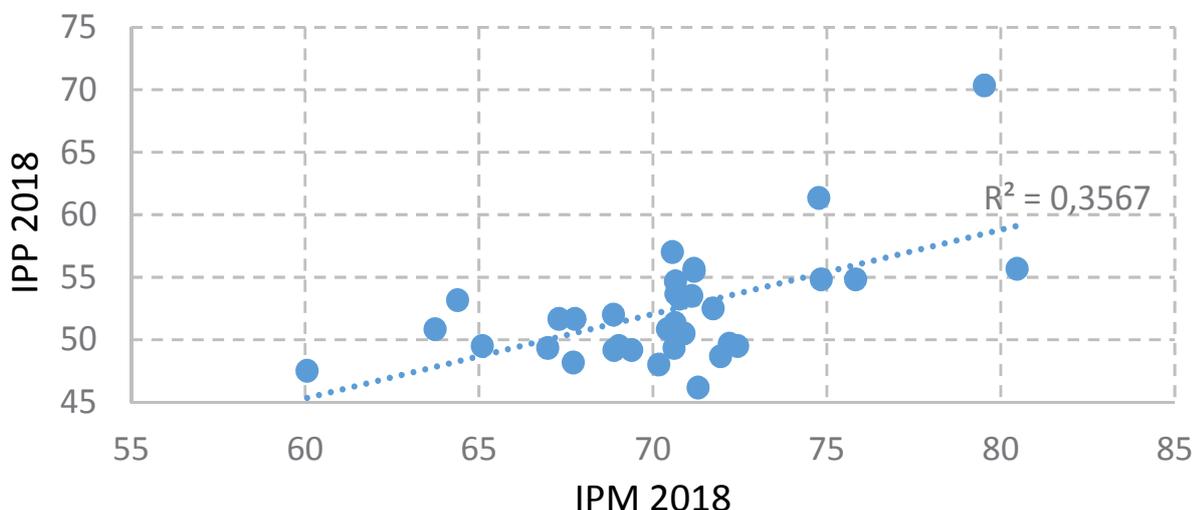
Namun, capaian IPP pada 2018 belum dapat dikatakan memuaskan; nilai IPP sebesar 51,50 masih jauh dari nilai maksimum 100. Kenaikan nilai

IPP antara 2015 dan 2018 juga fluktuatif. Kondisi tersebut menunjukkan diperlukannya upaya lebih besar agar capaian pembangunan pemuda dapat terus meningkat secara konsisten setiap tahun.

IPP dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan dua indeks yang mengukur capaian pembangunan manusia. Keduanya berkorelasi cukup kuat, dengan nilai koefisien korelasi mencapai 60%. Namun, nilai R^2 hanya 0,36, sehingga hanya sekitar sepertiga variasi IPP yang dapat dijelaskan oleh IPM (Gambar 3). Hal ini terjadi karena IPP menangkap aspek pembangunan pemuda secara lebih komprehensif. IPP tidak hanya menangkap aspek pembangunan pendidikan, serta kesehatan dan kesejahteraan—seperti IPM, tetapi juga aspek partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan beserta isu spesifik terkait pemuda, seperti kehamilan remaja dan perkawinan usia anak. Oleh karena itu, IPP tetap diperlukan untuk menggambarkan capaian pembangunan pemuda secara lebih menyeluruh.



Gambar 2. Perkembangan nilai IPP dalam periode 2015–2018

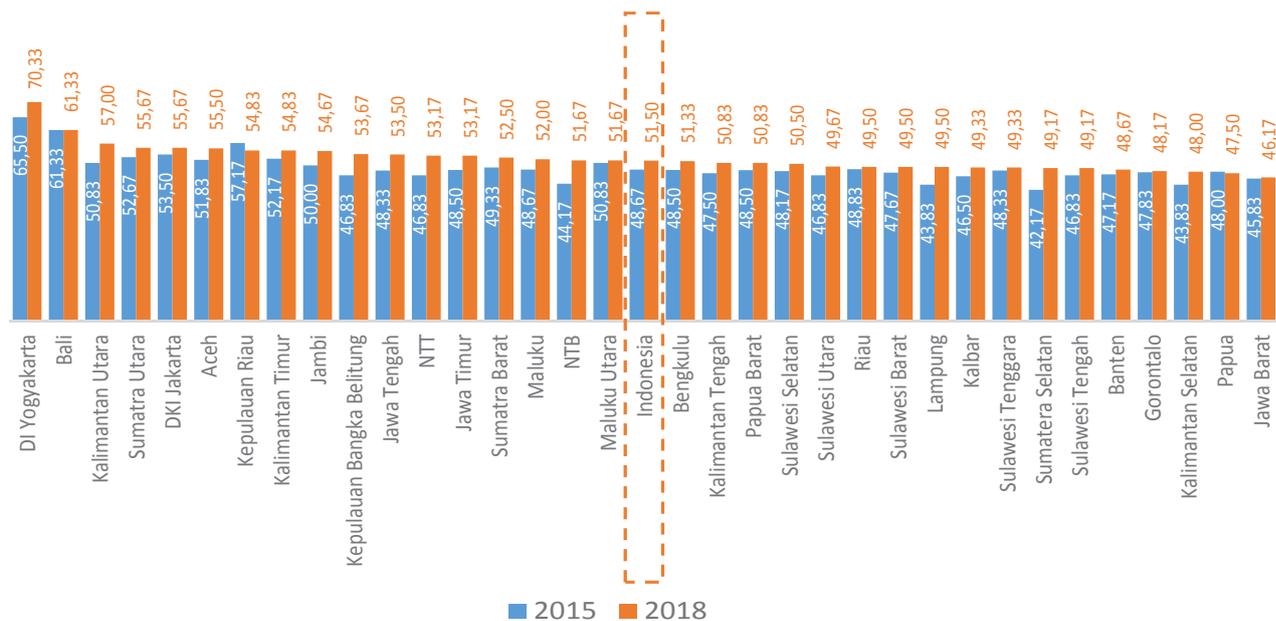


Gambar 3. Korelasi antara nilai IPP dan IPM tingkat provinsi pada 2018

Sumber: Diolah dari BPS, 2018.

Capaian pembangunan pemuda di Indonesia belum merata. Hal ini terlihat dari cukup besarnya perbedaan angka IPP antarprovinsi. Pada 2018, nilai IPP tingkat provinsi berkisar antara 46,17 dan 70,33 (Gambar 4). Capaian IPP tingkat provinsi ini tidak sejalan dengan peningkatan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita provinsi⁴. Hal ini berarti bahwa kemajuan pembangunan pemuda di suatu daerah tidak dipengaruhi oleh kemajuan perekonomian di daerah tersebut.

Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Bali secara konsisten menjadi provinsi dengan nilai IPP yang menduduki peringkat teratas sejak 2015. Sementara itu, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Kalimantan Selatan selalu menduduki peringkat antara ke-30 dan ke-34 (lihat Tabel A2.4 Lampiran 2). Sejalan dengan tren tingkat nasional, nilai IPP tingkat provinsi pada umumnya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dari ke-34 provinsi, hanya 8 provinsi yang nilai IPP-nya meningkat secara konsisten dalam periode 2015–2018 (Tabel 1).



Gambar 4. Nilai IPP antarprovinsi di Indonesia pada 2015 dan 2018

Tabel 1. Dinamika Perubahan Nilai IPP Provinsi dalam Periode 2015–2018

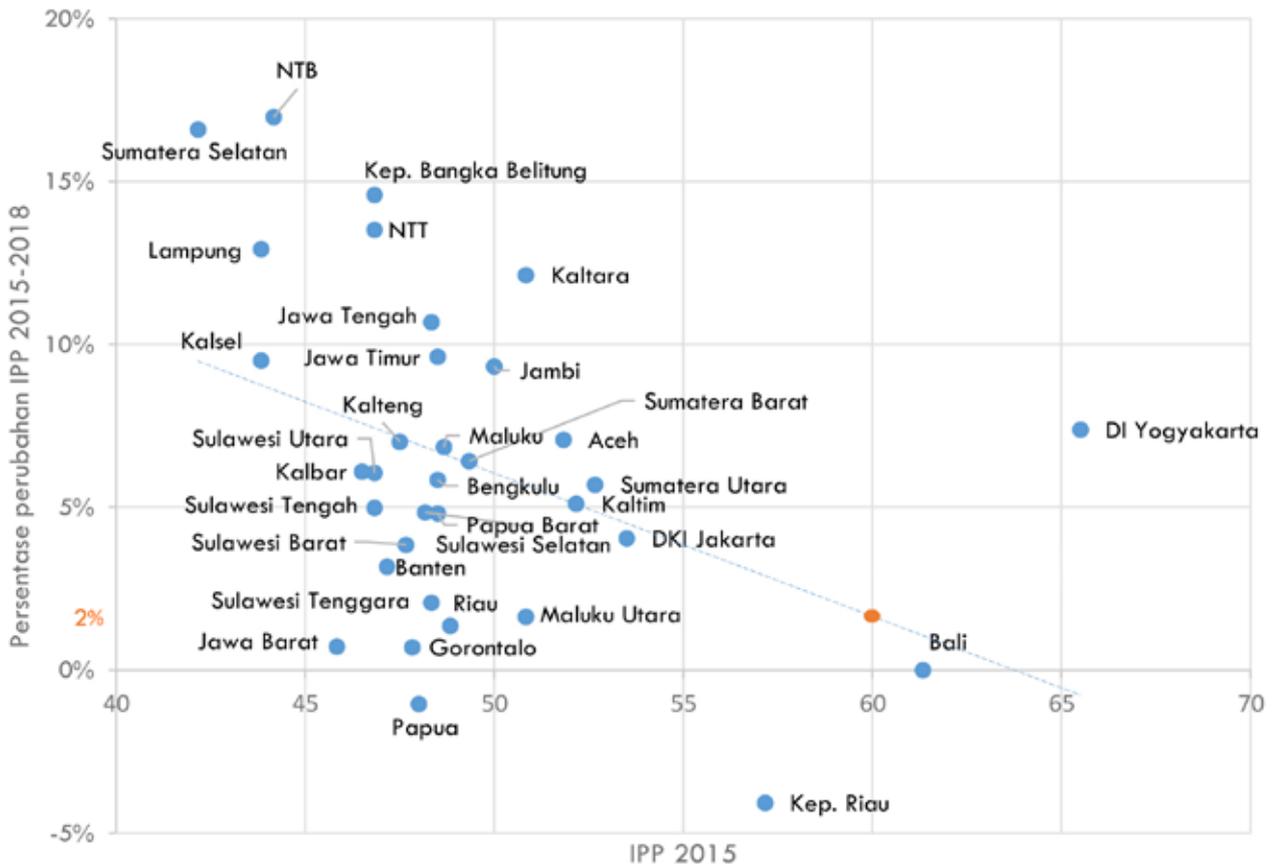
Perubahan Nilai Indeks	2015–2016	2016–2017	2017–2018	Jumlah Provinsi	Nama Provinsi	Persentase Provinsi (%)
Selalu Naik	Naik	Naik	Naik	8	Aceh, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT)	23,53
Dua kali naik	Naik	Naik	Turun	4	Banten, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara	11,76
	Naik	Turun	Naik	14	Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku	41,18
	Turun	Naik	Naik	2	Sumatra Utara, Kalimantan Tengah	5,88
Satu kali naik	Naik	Turun	Turun	5	Riau, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, Papua	14,71
	Turun	Naik	Turun	1	Kepulauan Riau	2,94
	Turun	Turun	Naik	0	-	0
Selalu turun	Turun	Turun	Turun	0	-	0

⁴Berdasarkan analisis data 2018, ditemukan bahwa nilai koefisien korelasi antara tingkat IPP provinsi dan PDRB per kapita provinsi kecil (17,72%), dengan nilai R² 0,03.

Gambar 5 memperlihatkan korelasi negatif antara nilai IPP tingkat provinsi pada 2015 dan perubahan relatif nilainya pada 2015 dan 2018⁵. Provinsi dengan nilai IPP yang rendah pada 2015 pada umumnya mengalami peningkatan nilai IPP lebih cepat daripada provinsi dengan nilai IPP yang lebih tinggi. Korelasi negatif tersebut mengindikasikan adanya penurunan ketimpangan nilai IPP antarprovinsi pada 2018 dibandingkan dengan 2015.

perubahan IPP di atas atau setidaknya berada pada garis putus-putus, provinsi tersebut telah mampu mendorong pembangunan pemudanya secara lebih optimal.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, terdapat 17 provinsi yang masuk ke dalam kategori provinsi dengan tingkat pertumbuhan IPP yang masih belum optimal. Provinsi-provinsi tersebut adalah Kepulauan



Gambar 5. Perubahan relatif nilai IPP antarprovinsi pada 2015 dan 2018

Garis putus-putus pada Gambar 5 menunjukkan ekspektasi tingkat pertumbuhan IPP yang seharusnya dapat diraih suatu provinsi berdasarkan nilai IPP pada 2015. Jika suatu provinsi memiliki nilai IPP pada 2015 sebesar 60 (titik tepat pada garis putus-putus), ekspektasi terhadap angka pertumbuhan IPP provinsi tersebut adalah 2%. Jika suatu provinsi memiliki tingkat pertumbuhan IPP kurang dari 2% (titik di bawah garis putus-putus), provinsi tersebut dapat dianggap sebagai provinsi dengan tingkat pertumbuhan IPP yang masih belum optimal. Sebaliknya, jika suatu provinsi memiliki persentase

Riau, Papua, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Gorontalo, Riau, Maluku Utara, Bali, Sulawesi Selatan, Papua Barat, Bengkulu, dan DKI Jakarta.

Provinsi Riau, dengan nilai IPP sebesar 48,83 pada 2015, seharusnya dapat mewujudkan tingkat pertumbuhan IPP sebesar 8,50%⁶. Namun, nilai IPP provinsi ini hanya tumbuh sebesar 1,36%. Begitu pula halnya dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Papua, keduanya tercatat mengalami

⁵Ditandai dengan garis putus-putus miring dari kiri atas ke kanan bawah.

⁶Pada Gambar 5, angka tersebut merupakan titik pada garis putus-putus untuk provinsi dengan nilai IPP 48,83 pada 2015. Nilai tersebut juga diperoleh dengan menggunakan persamaan $y = -0,004x + 0,280$ (dengan x sebagai nilai IPP pada 2015 dan y sebagai persentase perubahan nilai IPP dalam periode 2015–2018).

penurunan nilai IPP dalam periode 2015–2018. Provinsi Kepulauan Riau seharusnya dapat tumbuh sebesar 5,13% dan Provinsi Papua sebesar 8,80%, tetapi keduanya justru memiliki persentase perubahan nilai IPP yang negatif (-4,08% untuk Provinsi Kepulauan Riau dan -1,04% untuk Provinsi Papua). Hal ini berarti bahwa nilai IPP kedua provinsi tersebut pada 2018 lebih rendah daripada nilai IPP-nya pada 2015. Meskipun demikian, dengan nilai 54,83, IPP Provinsi Kepulauan Riau masih menduduki peringkat ketujuh pada 2018 atau hanya turun dari peringkat ketiga pada 2015. Namun, bagi Provinsi Papua, penurunan tersebut menyebabkan peringkat provinsi ini turun jauh dari peringkat ke-20 pada 2015 menjadi ke-33 pada 2018 (nilai IPP pada 2018 sebesar 47,50). Terlepas dari kondisi dan dampak penurunan tersebut bagi Provinsi Papua dan Provinsi Kepulauan Riau, langkah-langkah pencegahan tetap perlu diambil agar penurunan nilai IPP tidak berlanjut.

Sementara itu, provinsi dengan tingkat perkembangan IPP melebihi tingkat optimalnya adalah Aceh, Jambi, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, NTT, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Sumatra Utara. Hampir semua provinsi yang secara konsisten mengalami pertumbuhan positif setiap tahun (Tabel 1) tercatat sebagai provinsi dengan tingkat pertumbuhan IPP melebihi tingkat optimalnya, kecuali DKI Jakarta. Peningkatan pesat nilai IPP suatu provinsi berhasil meningkatkan peringkat IPP provinsi tersebut secara signifikan. Sebagai contoh, IPP NTB naik dari peringkat ke-31 menjadi ke-16 dan IPP NTT naik dari peringkat ke-35 menjadi ke-12 dalam periode

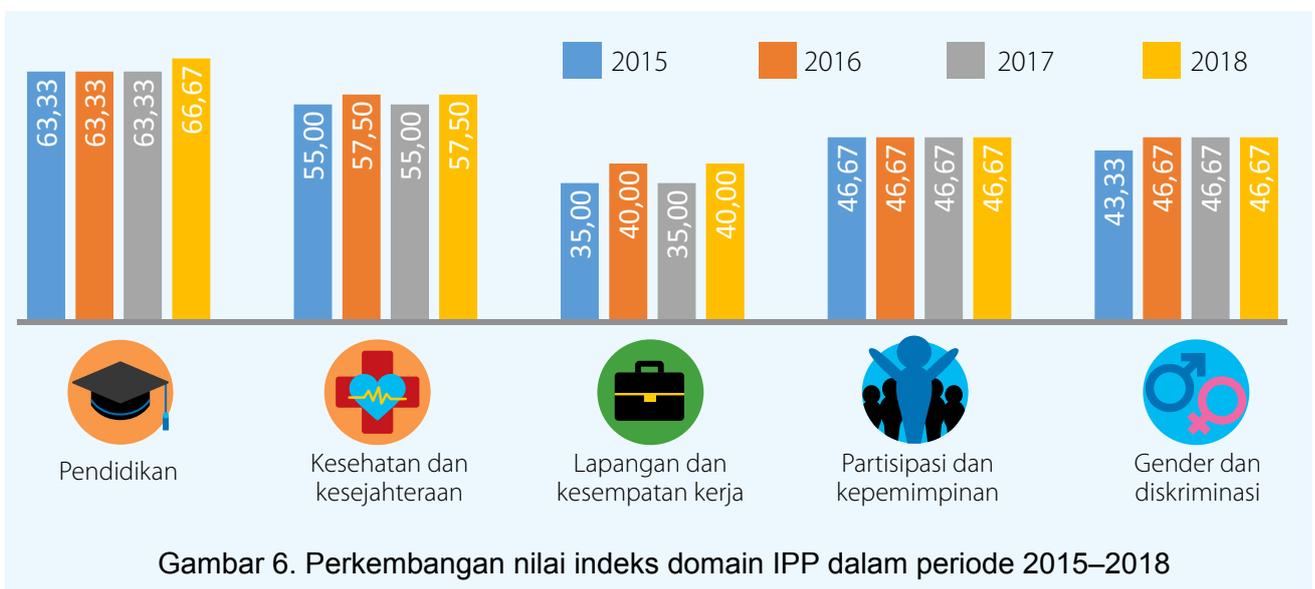
2015–2018. Sementara itu, peningkatan nilai IPP menaikkan posisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari peringkat ke-26 menjadi ke-10 dan membuat IPP Provinsi DI Yogyakarta bertahan pada peringkat pertama dengan nilai yang jauh lebih tinggi daripada provinsi-provinsi lain.

2.2. DINAMIKA DOMAIN IPP

Secara umum, tiap domain pembentuk IPP memiliki capaian yang beragam. Terdapat domain yang capaiannya lebih unggul dari domain lain, tetapi terdapat pula domain yang capaiannya jauh tertinggal. Beragamnya capaian domain-domain IPP tersebut menunjukkan bahwa setiap lapisan domain pembangunan pemuda, seperti pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, belum terbangun secara merata. Semua lapisan domain ini perlu dibangun secara bersamaan guna menghasilkan pemuda yang berkualitas dan berdaya saing sesuai dengan target RPJMN 2020–2024.

Pendidikan merupakan domain dengan capaian terbaik sejak 2015. Domain yang cukup tertinggal, dengan nilai indeks di bawah 50, adalah lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi (Gambar 6). Lapangan dan kesempatan kerja menjadi domain dengan capaian terendah, dengan nilai indeks hanya sebesar 35–40 dalam periode 2015–2018.

Perbaikan capaian tiap domain belum dapat dikatakan memuaskan. Capaian domain partisipasi dan kepemimpinan mengalami stagnasi dengan



nilai indeks sebesar 46,67 sejak 2015. Empat domain lain mengalami peningkatan nilai indeks pada 2018, tetapi peningkatannya belum terjadi secara konsisten setiap tahun. Peningkatan domain pendidikan baru terjadi pada 2018, sedangkan peningkatan domain gender dan diskriminasi hanya terjadi pada 2016 dan kemudian mengalami stagnasi hingga 2018. Sementara itu, domain kesehatan dan kesejahteraan serta lapangan dan kesempatan kerja memiliki capaian yang cenderung fluktuatif. Gambar 6 di bawah ini menyajikan capaian nilai indeks tiap domain IPP dalam periode 2015–2018.

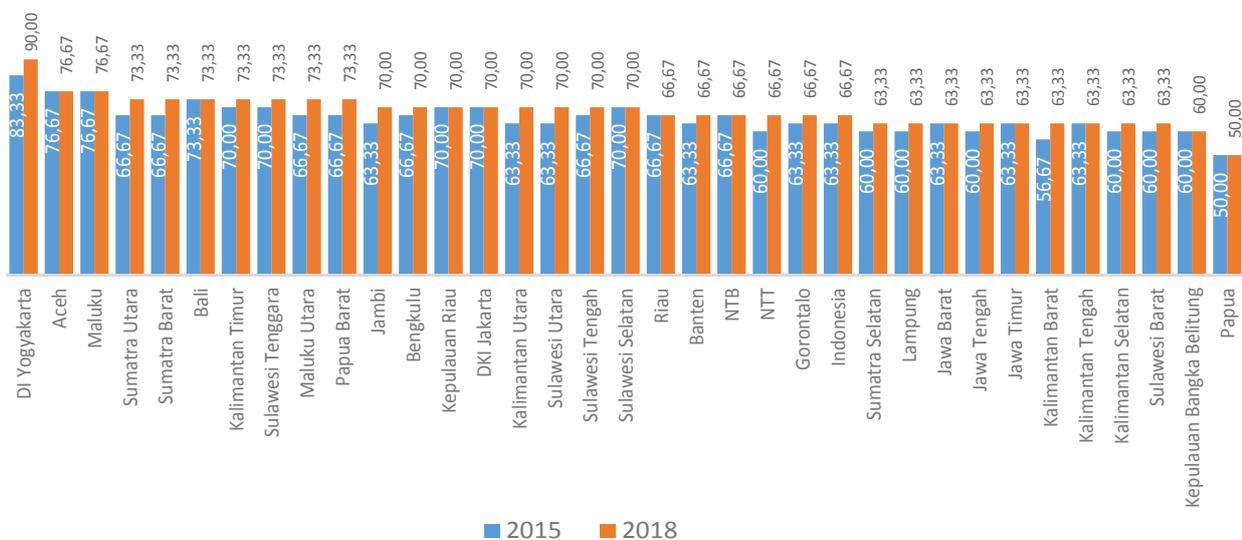
2.2.1. Pendidikan: Domain dengan Capaian Terbaik

Nilai indeks domain pendidikan meningkat dari 63,33 pada 2015 menjadi 66,67 pada 2018. Meski demikian, perbaikan ini tidak secara merata terjadi di semua provinsi. Hal tersebut terlihat dari makin besarnya nilai standar deviasi serta selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum. Tabel 2 memperlihatkan bahwa nilai maksimum naik dari 83,3 menjadi 90 dalam periode 2015–2018, sedangkan nilai minimum tidak berubah (tetap berada pada angka 50). Hal ini menunjukkan bahwa

Tabel 2. Rangkuman Capaian dan Ketimpangan Nilai Indikator Penyusun Domain Pendidikan Antarprovinsi

	2015					2018					Nilai Ideal
	Nilai nasional	Standar deviasi	Min. ^a	Maks. ^b	Selisih maks.–min.	Nilai nasional	Standar deviasi	Min.	Maks.	Selisih maks.–min.	
Nilai indeks domain pendidikan	63,33	6,30	50,00	83,33	33,33	66,67	6,63	50,00	90,00	40,00	100
Rata-rata lama sekolah	10,01	0,90	7,17	11,89	4,72	10,37	0,83	7,49	12,09	4,60	15 tahun
Angka partisipasi kasar (APK) sekolah menengah	85,15	4,89	70,65	94,55	23,90	86,11	4,43	77,02	96,00	18,98	100%
APK perguruan tinggi	25,26	10,60	11,13	64,83	53,70	30,19	10,65	13,20	70,60	57,40	100%

Keterangan: ^aminimum; ^bmaksimum.



Gambar 7. Sebaran nilai indeks domain pendidikan tingkat provinsi pada 2015 dan 2018

beberapa provinsi mengalami peningkatan capaian indikator pendidikan, sedangkan yang lain tidak. Pada 2018, nilai indeks domain pendidikan tertinggi diraih Provinsi DI Yogyakarta (nilai indeks 90), sedangkan nilai indeks terendah diperoleh Provinsi Papua (nilai indeks 50) (Gambar 7).

Tiga indikator penyusun domain pendidikan adalah rata-rata lama sekolah, APK sekolah menengah, dan APK perguruan tinggi. Berikut adalah data perkembangan nilai indikator penyusun domain pendidikan beserta nilai transformasinya.

nilai terendah sebesar 13,30% yang diperoleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nilai tertinggi sebesar 70% yang diraih Provinsi DI Yogyakarta.

Sementara itu, rata-rata lama sekolah masih tetap berkisar pada angka 10; pada 2018, rata-rata lama sekolah baru mencapai 10,37 tahun atau setara dengan kelas 1 SMA/ sederajat. Angka tersebut memang lebih baik daripada angka rata-rata lama sekolah seluruh penduduk berusia di atas 15 tahun pada 2018, yaitu 8,58 tahun. Hal ini menandakan bahwa ada perbaikan akses terhadap pendidikan

Tabel 3. Nilai Indikator Penyusun Domain Pendidikan Beserta Nilai Transformasinya dalam Periode 2015–2018

Domain dan Indikator	Nilai Indikator				Nilai Transformasi			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Rata-rata lama sekolah	10,01	10,21	10,21	10,37	7	7	7	7
APK sekolah menengah	85,15	85,79	86,59	86,11	9	9	9	9
APK perguruan tinggi	25,26	27,98	29,93	30,19	3	3	3	4

Sejak 2015, APK sekolah menengah merupakan penyumbang terbesar capaian domain pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai transformasi data APK sekolah menengah yang mencapai 9 dari nilai maksimum 10; nilai ini jauh mengungguli nilai transformasi dua indikator lainnya, yaitu rata-rata lama sekolah dan APK perguruan tinggi. Nilai APK sekolah menengah pemuda relatif tinggi, yaitu 86,11% pada 2018, meski nilai ini seharusnya bisa mencapai angka 100%. Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan nilai indikator APK sekolah menengah tertinggi (96%), sedangkan Provinsi Papua menjadi provinsi dengan nilai indikator APK sekolah menengah terendah (77,02%).

Nilai indikator ketiga, yaitu APK perguruan tinggi, meningkat sebesar 4,93 poin dalam periode 2015–2018. Walaupun demikian, APK perguruan tinggi pemuda di Indonesia masih rendah, yaitu hanya 30,19% dengan nilai transformasi sebesar 4 poin. Hal tersebut menegaskan bahwa peningkatan akses pemuda terhadap pendidikan tinggi masih menjadi pekerjaan rumah bagi mayoritas pemerintah daerah. Disparitas antarprovinsi juga cukup besar, dengan

bagi penduduk usia pemuda dibandingkan dengan penduduk usia dewasa dan tua. Namun, rata-rata lama sekolah sebesar 10,37 tahun menunjukkan bahwa target wajib belajar 12 tahun, yaitu dari sekolah dasar (SD) hingga SMA/ sederajat, belum tercapai dan masih jauh dari target global rata-rata lama sekolah, yakni 15 tahun (hingga perguruan tinggi). Di Indonesia, satu-satunya provinsi yang telah memenuhi target wajib belajar 12 tahun adalah Provinsi DI Yogyakarta.

Dengan mengamati perkembangan capaian indikator APK dan rata-rata lama sekolah hingga 2018, dapat disimpulkan bahwa upaya meningkatkan partisipasi sekolah pemuda perlu lebih dimaksimalkan. Pada saat yang sama, perbaikan kualitas pembelajaran juga perlu menjadi catatan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa, meskipun terdapat tren positif pada perkembangan akses terhadap pendidikan, kualitas pembelajaran siswa (dilihat dari nilai PISA dan TIMSS⁷) masih rendah—bahkan setelah dua dekade peningkatan investasi pendidikan di Indonesia (Kurniawati *et al.*, 2019; Hastuti, Toyamah,

⁷Programme for International Student Assessment (PISA) merupakan penilaian internasional yang diselenggarakan untuk menilai kemampuan membaca, sementara Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) merupakan penilaian internasional untuk mengetahui kemampuan matematika dan sains anak usia sekolah.

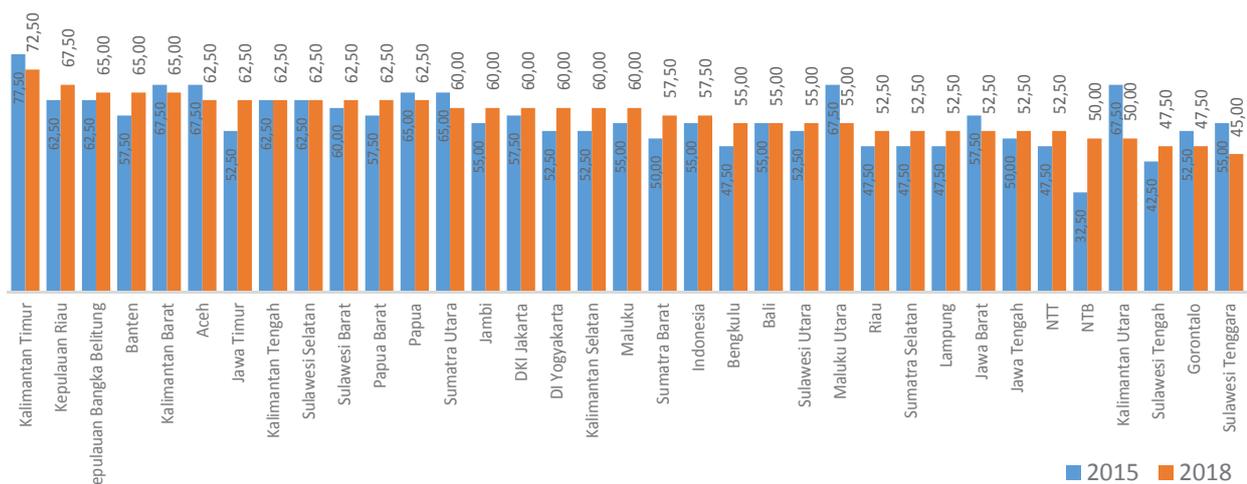
dan Usman, 2018; Suryahadi dan Sambodho, 2013). Perbaikan kualitas pembelajaran ini perlu menjadi perhatian karena pembelajaran yang berkualitas—yang dapat dilihat dari kemampuan kognitif yang tinggi—memiliki korelasi dan hubungan sebab akibat dengan penghasilan, distribusi pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi (Hanushek dan Woessmann, 2008).

2.2.2. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan: Meningkatkan, tetapi Belum Konsisten

Dalam periode 2015–2018, terjadi peningkatan nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan dari 55 menjadi 57,50. Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan tertinggi se-Indonesia pada 2018, yaitu sebesar 72,50. Sebaliknya, Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan provinsi dengan nilai indeks terendah, yaitu sebesar 45 (Gambar 8). Ketimpangan nilai indeks domain kesehatan dan

kesejahteraan antarprovinsi pada 2018 lebih rendah daripada ketimpangan nilai indeks pada 2015. Hal ini ditandai dengan deviasi indeks domain kesehatan dan kesejahteraan yang mengecil, serta selisih antara nilai maksimum dan minimum yang juga mengecil meski terdapat penurunan pada nilai maksimum (Tabel 4).

Tabel 5 menyajikan data perkembangan nilai indikator penyusun domain kesehatan dan kesejahteraan beserta nilai transformasinya. Di antara empat indikator penyusun domain kesehatan dan kesejahteraan, angka kesakitan pemuda merupakan satu-satunya indikator yang secara konsisten mengalami peningkatan sejak 2015. Meski demikian, tantangan untuk terus menurunkan angka kesakitan pemuda makin besar. Pemuda Indonesia saat ini mengalami beban ganda penyakit dan malnutrisi. Mereka tidak hanya rentan terhadap penyakit menular, tetapi juga penyakit tidak menular, seperti hipertensi, anemia, dan obesitas, yang



Gambar 8. Sebaran nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan tingkat provinsi pada 2015 dan 2018

Tabel 4. Rangkuman Capaian dan Ketimpangan Indikator Penyusun Domain Kesehatan dan Kesejahteraan Antarprovinsi

	2015					2018					Nilai Ideal
	Nilai nasional	Standar deviasi	Min.	Maks.	Jarak maks. –min.	Nilai nasional	Standar deviasi	Min.	Maks.	Jarak maks. –min.	
Nilai indeks domain kesehatan dan Kesejahteraan	55	8,84	32,50	77,50	45	57,50	6,39	45,00	72,50	27,50	100
Angka kesakitan pemuda	9,34	2,70	5,47	15,29	9,82	7,68	1,73	5,19	11,96	6,77	0
Persentase pemuda korban kejahatan	1,09	0,37	0,47	2,12	1,65	1,30	0,45	0,55	2,37	1,82	0
Persentase pemuda yang merokok	27,04	2,68	22,07	31,38	9,31	26,34	2,67	20,80	31,02	10,22	0
Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	18,92	8,12	0,80	31,13	30,33	16,67	6,78	0	26,46	26,46	0

Tabel 5. Nilai Indikator Penyusun Domain Kesehatan dan Kesejahteraan Beserta Nilai Transformasinya dalam Periode 2015–2018

Domain dan Indikator	Nilai Indikator				Nilai Transformasi			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Angka kesakitan pemuda	9,34	8,54	8,11	7,68	6	6	6	7
Persentase pemuda korban kejahatan	1,09	1,04	1,44	1,30	7	7	6	6
Persentase pemuda yang merokok	27,04	25,51	26,34	26,34	3	3	3	3
Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	18,92	17,16	16,67	16,67	6	7	7	7

mengindikasikan pola diet pemuda yang cenderung tidak sehat (Yumna *et al.*, akan dipublikasikan). Provinsi dengan angka kesakitan pemuda terendah adalah Provinsi Sumatra Selatan, sementara yang tertinggi adalah Provinsi Gorontalo.

Upaya meningkatkan ketersediaan ruang publik yang aman bagi pemuda juga masih menjadi tantangan. Hal ini dapat dilihat dari proporsi pemuda yang menjadi korban kejahatan, seperti pencurian, penganiayaan, dan pelecehan seksual. Proporsi pemuda korban kejahatan pada 2018 (1,30%) lebih besar daripada proporsinya pada 2015 (1,09%). Pada 2017, proporsi pemuda korban kejahatan meningkat secara signifikan menjadi 1,44%. Peningkatan angka ini menyebabkan turunnya nilai transformasi indikator, dari 7 pada 2016 menjadi 6 pada 2017. Pada 2018, proporsi pemuda korban kejahatan menurun, tetapi masih lebih tinggi daripada proporsinya pada 2015. Namun, penurunan nilai ini belum mendorong penguatan nilai transformasi.

Nilai indikator pemuda yang merokok pada 2018 (25,51%) lebih kecil daripada nilainya pada 2015 (27,04%). Hal ini berarti bahwa capaian indikator ini membaik. Namun, perbaikan ini belum memuaskan karena peningkatan nilai indeks indikator ini tidak berkontribusi terhadap perbaikan nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan yang ditandai oleh nilai transformasi tetap berada pada angka tiga. Selain itu, jika dibandingkan dengan capaian pada 2016 (25,51%), persentase pemuda yang merokok pada 2018 sedikit lebih tinggi. Dalam periode 2015–2018, persentase pemuda yang merokok menurun dari 26,40% menjadi 25,70%. Pada 2018, Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan persentase pemuda yang merokok terendah dan Provinsi Lampung menjadi provinsi dengan persentase tertinggi. Iklan rokok yang menggambarkan perilaku merokok sebagai budaya anak muda, faktor lingkungan (keluarga dan teman), serta kemudahan akses untuk memperoleh

rokok merupakan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap perilaku merokok pada pemuda (Astuti *et al.*, 2019; Prabandari dan Dewi, 2016).

Sementara itu, capaian indikator persentase kehamilan remaja pada 2018 (16,67%) lebih baik daripada 2015 (18,92%). Disparitas antarprovinsi yang mengecil ditandai tidak hanya oleh turunnya nilai standar deviasi dari 8 menjadi 6,70, tetapi juga mengecilnya selisih nilai antara provinsi dengan angka kehamilan remaja tertinggi dan terendah. Angka kehamilan remaja terendah ditemukan pada Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi DI Yogyakarta, sedangkan angka tertinggi pada Provinsi Jambi.

Walaupun terjadi perbaikan capaian pada angka kehamilan remaja, upaya untuk menurunkan angka indikator ini masih perlu terus dilakukan karena kasus kehamilan remaja memiliki dampak yang kompleks. Remaja yang hamil akan lebih rentan terhadap risiko putus sekolah atau memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga mereka hanya bisa mengakses pekerjaan berupah rendah. Risiko kesehatan, termasuk risiko kematian pada ibu dan bayi, juga makin besar. Menurut American Society for Reproductive Medicine, usia paling aman bagi perempuan untuk hamil dan melahirkan adalah 20–29 tahun; pada usia kurang dari 20 tahun, organ-organ reproduksi perempuan belum berfungsi secara sempurna (BPS, 2018). Selain itu, komplikasi kehamilan dan persalinan merupakan penyebab kematian terbesar kedua bagi perempuan Indonesia yang berusia 15–19 tahun. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingginya persentase pemuda berusia 16–19 tahun yang persalinannya tidak dibantu tenaga kesehatan (11,54%); persentase ini hampir dua kali lebih besar daripada persentase pemuda berusia 20–30 tahun (6,10%). Risiko kematian pada bayi berusia sebelum 28 hari yang lahir dari ibu berusia di bawah 20

tahun juga 1,5 kali lebih besar daripada bayi yang lahir dari ibu berusia 20–30 tahun (Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian PPPA, 2020⁸). Kehamilan remaja juga meningkatkan risiko ibu melahirkan bayi *stunting* (lihat Subsubbab 2.2.5 Domain Gender dan Diskriminasi).

2.2.3. Lapangan dan Kesempatan Kerja: Domain dengan Capaian Terendah

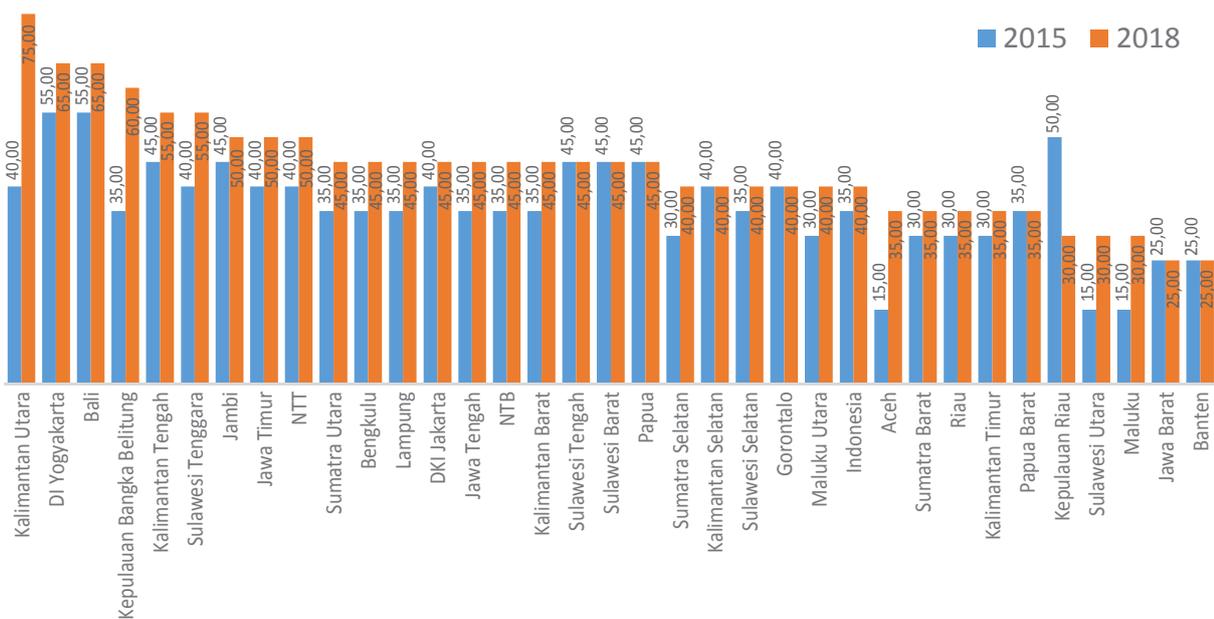
Di tingkat nasional, domain lapangan dan kesempatan kerja memiliki nilai indeks terendah di antara domain yang lain. Capaian domain ini juga fluktuatif dari tahun ke tahun seperti yang terlihat pada Gambar 6. Meski demikian, nilai indeks domain

lapangan dan kesempatan kerja meningkat dari 35 pada 2015 menjadi 40 pada 2018.

Jika diamati dari sebarannya antarprovinsi, ketimpangan capaian domain ini mengalami peningkatan dalam periode 2015–2018 (Tabel 6). Hal ini berarti bahwa perbedaan capaian provinsi dalam menciptakan penghidupan dan kesejahteraan yang layak bagi pemuda makin besar. Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja yang tertinggi se-Indonesia pada 2018. Provinsi ini juga mengalami peningkatan signifikan nilai indeks domain ini dari 40 pada 2015 menjadi 75 pada 2018. Tingginya capaian pembangunan ketenagakerjaan pemuda tersebut

Tabel 6. Rangkuman Capaian dan Ketimpangan Indikator Penyusun Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja Antarprovinsi

	2015					2018					Nilai ideal
	Nilai nasional	Standar deviasi	Min.	Maks.	Selisih maks.-min.	Nilai nasional	Standar deviasi	Min.	Maks.	Selisih Maks.-min.	
Nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja	35	9,83	15,00	55,00	40,00	40,00	11,35	25,00	75,00	50	100
Persentase pemuda wirausaha kerah putih	0,30	0,17	0,03	0,93	0,90	0,40	0,30	0,02	1,41	1,39	2
TPT pemuda	14,10	4,36	5,70	23,86	18,16	11,90	3,84	4,05	19,60	15,55	0



Gambar 9. Sebaran nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja tingkat provinsi pada 2015 dan 2018

⁸Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pendidikan Anak.

terjadi seiring dengan pemberian penghargaan Indeks Prestasi Pembangunan Ketenagakerjaan (Integra) 2018 oleh Kementerian Ketenagakerjaan kepada Provinsi Kalimantan Utara pada 2018 (Bank Indonesia, 2019). Sementara itu, provinsi dengan nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja terendah pada 2018 adalah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat. Satu-satunya provinsi yang mengalami penurunan nilai indeks domain ini adalah Provinsi Kepulauan Riau; nilai indeksnya turun sebesar 20 poin, dari 50 pada 2015 menjadi 30 pada 2018.

Tantangan yang terdapat dalam domain ini adalah tingginya TPT pemuda dan rendahnya persentase pemuda wirausaha kerah putih. Pemuda yang termasuk dalam kategori pengangguran terbuka adalah mereka yang (i) tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha, (ii) tidak bekerja karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), dan (iii) sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja atau sudah mempunyai usaha tetapi belum memulainya. Sementara itu, pemuda wirausaha kerah putih merupakan pemuda yang berusaha sendiri atau berusaha dengan dibantu oleh buruh tetap ataupun buruh tidak tetap dengan jenis pekerjaan tenaga profesional/teknisi, kepemimpinan/ketatalaksanaan, dan pejabat pelaksana/tenaga tata usaha.

Pada 2018, tingkat pengangguran pemuda mencapai 13,47% atau sekitar 2,5 kali lebih tinggi daripada angka pengangguran nasional. Sebagian besar pemuda yang menganggur adalah mereka yang baru lulus sekolah⁹; mereka hampir tidak memiliki pengalaman kerja, sementara mayoritas lowongan kerja mensyaratkan pengalaman kerja. Terdapat pula

fenomena pengangguran terdidik; pemuda lulusan SMA dan perguruan tinggi pada umumnya memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi daripada pemuda lulusan SMP ke bawah¹⁰. Sementara itu, proporsi pemuda wirausaha kerah putih hanya 0,39%; angka ini masih jauh dari angka ideal, yaitu 2%. Di antara dua indikator tersebut, perbaikan terutama terjadi pada tingkat pengangguran pemuda yang, meski fluktuatif, mengalami penurunan dari 15,38% pada 2015 menjadi 13,47% pada 2018. Proporsi pemuda wirausaha kerah putih juga mengalami peningkatan sebesar 0,11 titik persentase, dari 0,28% menjadi 0,39%. Namun, peningkatan ini belum signifikan untuk bisa memengaruhi nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja karena nilai transformasinya sama sekali tidak mengalami perubahan, yaitu 2 poin sejak 2015.

Tingkat pengangguran pemuda tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Barat, yaitu sebesar 19,60%; angka ini jauh lebih tinggi daripada angka nasional (13,47%). Sebaliknya, tingkat pengangguran pemuda terendah terdapat di Provinsi Bali (4%). Sementara itu, proporsi pemuda wirausaha kerah putih terbesar terdapat di Provinsi Kalimantan Utara (1,41%), sedangkan proporsi terkecil terdapat di Provinsi Maluku Utara (0,02 %).

2.2.4. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan: Capaian yang Mengalami Stagnasi

Capaian pembangunan partisipasi dan kepemimpinan pemuda tidak mengalami perubahan sejak 2015. Capaian domain ini tetap berada pada angka 46,67. Dari ke-34 provinsi, hanya ada 12 provinsi yang mengalami peningkatan nilai indeks domain ini. Provinsi DI Yogyakarta secara

Tabel 7. Nilai Indikator Penyusun Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja Beserta Nilai Transformasinya dalam Periode 2015–2018

	Nilai Indikator Nasional				Nilai Transformasi			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Persentase pemuda wirausaha kerah putih	0,28	0,30	0,39	0,39	2	2	2	2
TPT pemuda	15,38	13,44	14,02	13,47	5	6	5	6

Keterangan: Nilai transformasi indikator dihasilkan pada tahap pertama penghitungan IPP yang dijelaskan pada Lampiran 1.

⁹Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2018, dari 2,70 juta pemuda yang baru lulus sekolah (kurang dari satu tahun setelah lulus), ada sekitar 1,10 juta atau 41,42% yang menganggur.

¹⁰Tingkat pengangguran tertinggi ditemukan pada pemuda lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK), diikuti oleh tingkat pengangguran pemuda lulusan SMA dan perguruan tinggi.

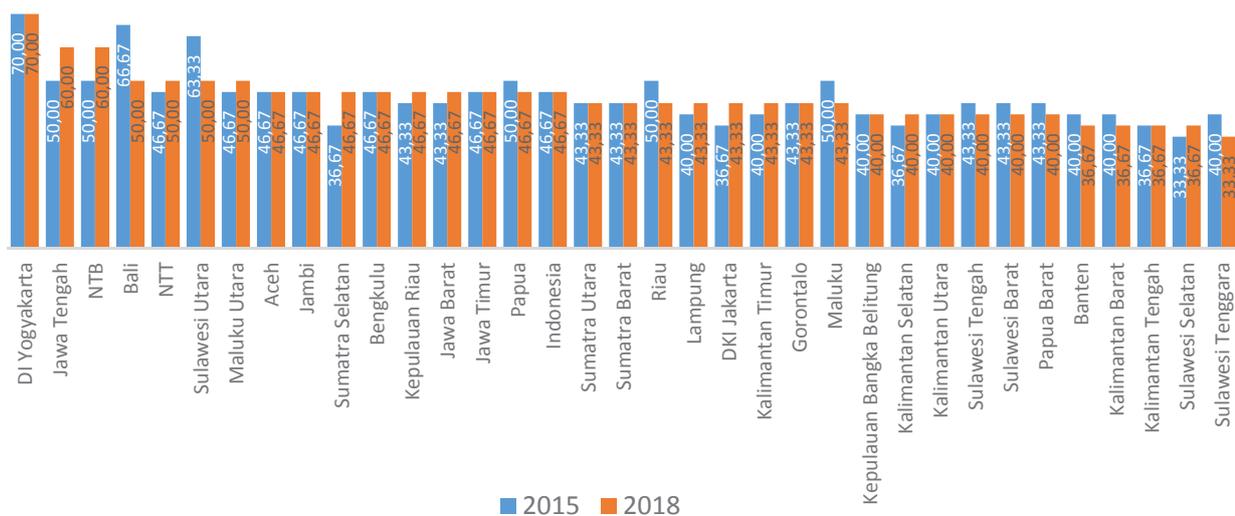
konsisten menjadi provinsi dengan nilai indeks domain partisipasi dan kepemimpinan tertinggi (70) sejak 2015, sedangkan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan provinsi dengan nilai indeks terendah (33,33) pada 2018.

Berikut adalah data perkembangan nilai indikator penyusun domain partisipasi dan kepemimpinan beserta nilai transformasinya.

Di antara ketiga indikator pada domain partisipasi dan kepemimpinan, angka partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan nilai indeks domain dengan nilai transformasi sembilan poin. Partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan berarti melakukan kegiatan bersama anggota masyarakat di lingkungan tempat tinggal yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan ekonomi. Kegiatan ini mencakup kegiatan keagamaan (seperti pengajian), kegiatan

pelatihan/peningkatan keterampilan, olahraga, kerja bakti sosial, arisan, upacara kematian, kegiatan kesenian, dan kegiatan posyandu. Pada 2018, proporsi pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan mencapai 81,36. Provinsi dengan proporsi pemuda yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan terbesar adalah Provinsi NTB (93%), sedangkan provinsi dengan proporsi terkecil adalah Provinsi Papua Barat (67%).

Namun, tingginya tingkat partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan tidak serta-merta diikuti dengan tingginya partisipasi pemuda dalam organisasi dan yang berpendapat dalam rapat kemasyarakatan. Pada 2018, pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi hanya 6,36% dan yang berpendapat saat menghadiri rapat kemasyarakatan hanya 6,72%. Nilai transformasi untuk kedua indikator ini tidak mengalami perubahan sejak 2015; indikator partisipasi dalam



Gambar 10. Sebaran nilai indeks domain partisipasi dan kepemimpinan tingkat provinsi pada 2015 dan 2018

Tabel 8. Nilai Indikator Penyusun Domain Partisipasi dan Kepemimpinan Beserta Nilai Transformasinya dalam Periode 2015–2018

Domain dan Indikator	Nilai Indikator				Nilai Transformasi			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	81,97	81,97	81,97	81,36	9	9	9	9
Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi	5,86	5,86	5,86	6,36	2	2	2	2
Persentase pemuda yang menyampaikan saran/pendapat dalam rapat	5,88	5,88	5,88	6,72	3	3	3	3

Keterangan: Nilai transformasi indikator dihasilkan pada tahap pertama penghitungan IPP yang dijelaskan pada Lampiran 1.

organisasi pemuda memiliki nilai transformasi dua poin, sementara indikator partisipasi pemuda yang berpendapat dalam rapat sebesar tiga poin.

Provinsi Bali memiliki 17,70% pemuda yang aktif dalam organisasi dan persentase ini merupakan yang tertinggi di antara semua provinsi pada 2018. Sebaliknya, Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki persentase terendah (2%). Provinsi DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan persentase pemuda yang berpendapat dalam rapat tertinggi (19,20%) dan Provinsi Maluku merupakan yang terendah (2,50%).

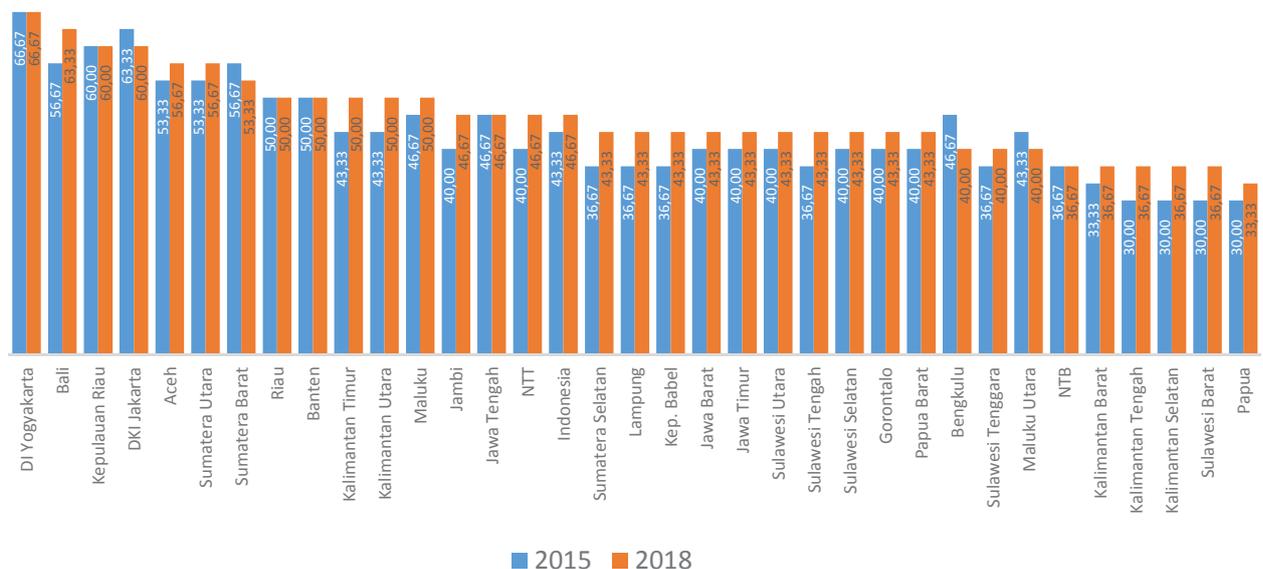
2.2.5. Domain Gender dan Diskriminasi: Tantangan Menuju Kesetaraan

Nilai indeks domain gender dan diskriminasi mengalami kenaikan sebesar 3,34 poin dalam periode 2015–2016 dan mengalami stagnasi hingga dua tahun berikutnya pada angka 46,67 (Gambar 11). Nilai tertinggi pada 2018 (66,67) dicapai Provinsi DI Yogyakarta dan nilai terendah (33,33) diperoleh Provinsi Papua.

Untuk domain ini, terjadi peningkatan pada nilai minimum, tetapi tidak terjadi perubahan pada nilai

Tabel 9. Rangkuman Capaian dan Ketimpangan Nilai Indikator Penyusun Domain Partisipasi dan Kepemimpinan Antarprovinsi

	2015					2018					Nilai Ideal
	Nilai nasional	Standar deviasi	Min.	Maks.	Selisih maks.-min.	Nilai nasional	Standar deviasi	Min.	Maks.	Selisih maks.-min.	
Nilai indeks domain partisipasi dan kepemimpinan	45,20	8,13	33,33	70	36,67	45	7,35	33,33	70	36,67	100
Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial	80,70	5,77	69,57	92,65	23,08	79	6,50	66,95	92,85	25,90	100
Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi	6,80	6,06	2,46	33,55	31,09	6,60	3,30	2,15	17,68	15,53	45
Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat	6,10	2,84	1,68	18,10	16,42	6,60	3,15	2,53	19,22	16,69	25



Gambar 11. Sebaran nilai indeks domain gender dan diskriminasi tingkat provinsi pada 2015 dan 2018

maksimum. Nilai standar deviasi serta selisih antara nilai maksimum dan minimum dalam periode 2015–2018 untuk domain ini juga turun. Hal ini berarti bahwa disparitas antarprovinsi makin kecil.

Perkembangan nilai indikator penyusun domain gender dan partisipasi beserta nilai transformasinya disajikan pada Tabel 11.

Angka perkawinan usia anak turun dari 12,14% pada 2015 menjadi 11,21% pada 2018. Namun, perbaikan capaian ini tidak signifikan karena masih belum cukup sensitif untuk meningkatkan nilai transformasi indikatornya—nilai transformasi tetap

berada pada angka tujuh. Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi dengan angka perkawinan usia anak tertinggi (19,40%) pada 2018 dan Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan angka yang terendah (4%).

Untuk melindungi pemuda Indonesia dari perkawinan usia anak, diperlukan upaya yang berkelanjutan agar capaiannya konsisten. Perkawinan usia anak berpotensi menyebabkan terjadinya kehamilan dan persalinan pada usia dini dengan risiko kematian pada ibu dan bayi yang lebih besar. Usia perkawinan pertama yang terlalu dini juga dapat meningkatkan risiko perempuan untuk terkena infeksi

Tabel 10. Rangkuman Capaian dan Ketimpangan Nilai Indikator Penyusun Domain Gender dan Diskriminasi Antarprovinsi

	2015					2018					Nilai Ideal
	Nilai nasional	Standar deviasi	Minimum	Maksimum	Selisih maksimum	Nilai nasional	Standar deviasi	Minimum	Maksimum	Selisih maksimum	
Nilai indeks domain gender dan diskriminasi	43,33	9,64	30	66,67	36,70	46,67	8,26	33,33	66,67	33,30	100
Angka perkawinan usia anak	12,14	5,09	4,11	23,19	19,08	11,21	4,38	4,06	19,43	15,37	0
Persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas	36,61	7,07	27,24	56,24	29	38,67	6,41	28,26	61,15	32,89	100
Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	22,99	8,18	7,43	46,81	39,38	24,13	7,72	9,88	44,45	34,57	60

Tabel 11. Nilai Indikator Penyusun Domain Gender dan Diskriminasi Beserta Nilai Transformasinya dalam Periode 2015–2018

Domain dan Indikator	Nilai Indikator				Nilai Transformasi			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Angka perkawinan usia anak	12,14	11,11	11,54	11,21	7	7	7	7
Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan di sekolah menengah dan perguruan tinggi	36,61	37,71	38,90	38,67	2	2	2	2
Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	22,99	24,07	24,36	24,13	4	5	5	5

Keterangan: Nilai transformasi indikator dihasilkan pada tahap pertama penghitungan IPP yang dijelaskan pada Lampiran 1.

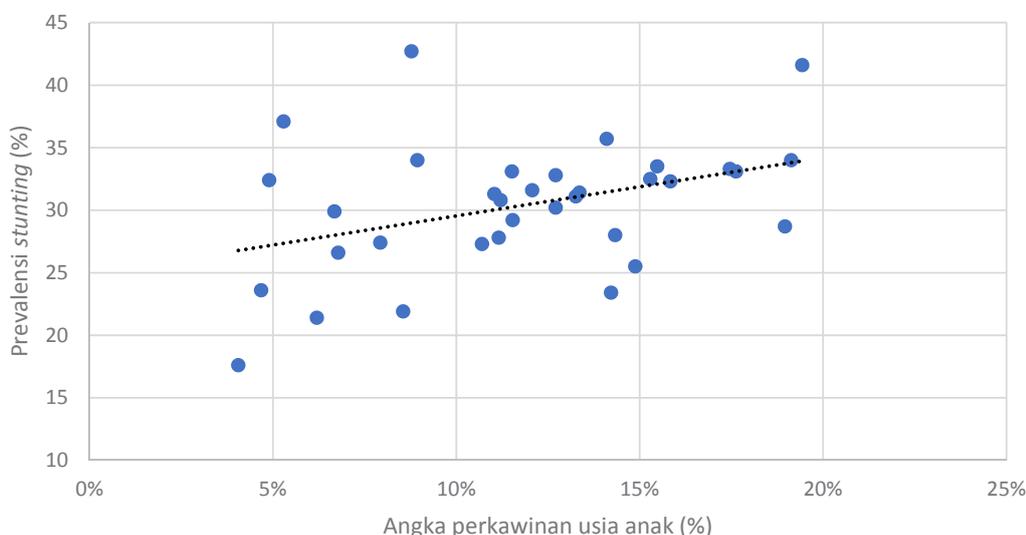
virus papilloma—karena kondisi rahim masih sangat rentan—yang dapat berujung pada kanker rahim (WHO dalam BPS, 2018). Pada kasus pemuda yang telah menikah pada usia dini, upaya mitigasi yang bisa dilakukan adalah menunda kehamilan anak pertama. Namun, pemuda perempuan berusia 16–19 tahun yang pernah kawin justru memiliki tingkat partisipasi yang rendah dalam program keluarga berencana (KB) daripada yang berusia 20–30 tahun. Hampir separuh dari mereka tidak pernah mengikuti program KB (49,09%), padahal mereka justru target utama pemerintah untuk mencegah kematian ibu akibat persalinan pada usia terlalu muda. Dengan berpartisipasi dalam program KB, mereka diharapkan dapat menunda kehamilan hingga mencapai usia ideal untuk hamil dan melahirkan (BPS, 2018).

Selain itu, perkawinan usia anak memiliki konsekuensi pada terjadinya kasus anak bawah lima tahun (balita) yang mengalami *stunting*. Gambar 12 menunjukkan korelasi positif antara proporsi pemuda perempuan berusia 20–24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun dan prevalensi *stunting* pada balita antarprovinsi pada 2018. Hal ini berarti bahwa prevalensi *stunting* cenderung lebih tinggi di provinsi-provinsi dengan angka perkawinan usia anak yang juga tinggi. Salah satu penjelasannya adalah bahwa perempuan yang hamil pada usia remaja berisiko melahirkan bayi dengan permasalahan gizi. Perempuan kelompok usia 15–24 tahun memiliki risiko yang lebih tinggi atau lebih rentan mengalami anemia dan kekurangan energi kronis (KEK). Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan bahwa 85% perempuan yang hamil pada usia 15–24 tahun mengalami anemia. Laporan ini juga menunjukkan bahwa secara rata-

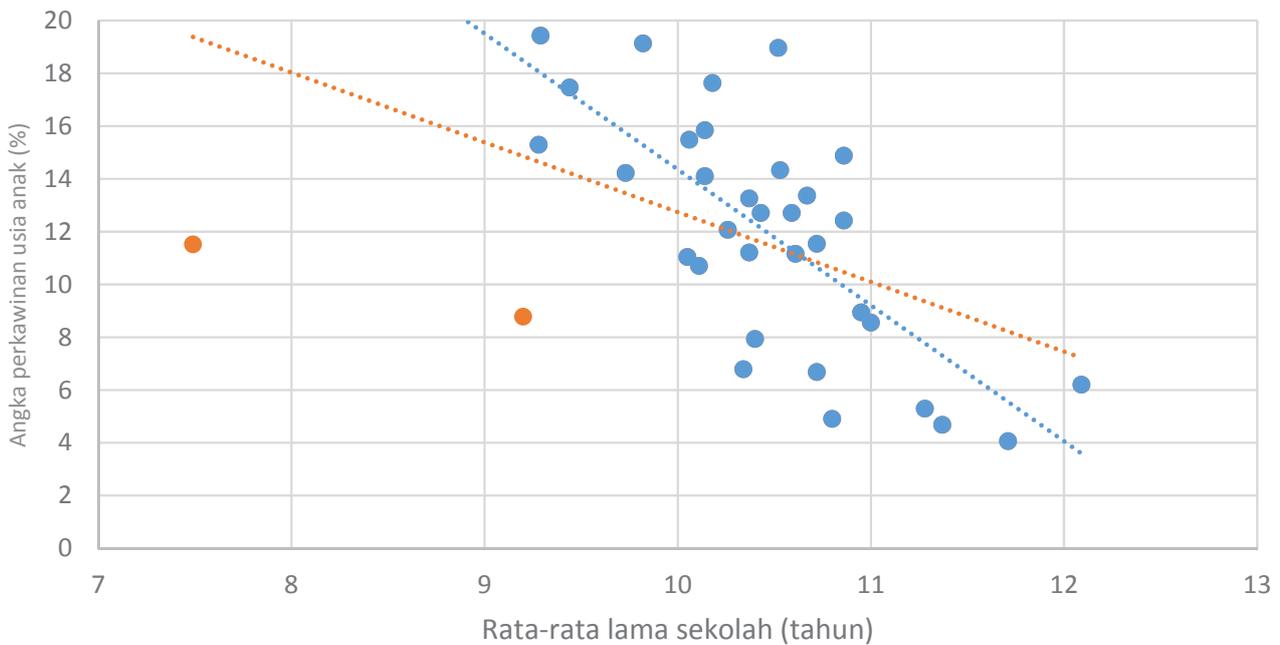
rata 30% perempuan kelompok usia yang sama mengalami KEK (Kementerian Kesehatan, 2019). Kasus anemia dan KEK tersebut mengindikasikan bahwa perempuan yang hamil pada usia muda pada umumnya memiliki permasalahan gizi yang akan berdampak pada generasi selanjutnya.

Salah satu hal yang dapat menjelaskan variasi tingkat perkawinan usia anak adalah perbedaan tingkat pendidikan antarprovinsi yang ditunjukkan oleh rata-rata lama sekolah (Gambar 13). Analisis korelasi pada Gambar 13 menunjukkan adanya korelasi negatif antara rata-rata lama sekolah dan angka perkawinan usia anak dengan koefisien korelasi sebesar 50%. Namun, terdapat dua provinsi *outlier*, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi NTT. Jika keduanya dikeluarkan dari analisis korelasi, koefisien korelasinya menjadi lebih besar, yakni 70%. Korelasi negatif tersebut mengindikasikan bahwa provinsi dengan tingkat pendidikan rata-rata pemuda yang lebih tinggi memiliki angka perkawinan usia anak yang relatif lebih rendah. Pemuda dengan rata-rata lama sekolah lebih tinggi adalah mereka yang menempuh pendidikan lebih lama dan mendapatkan hasil pembelajaran lebih banyak daripada pemuda dengan rata-rata lama sekolah lebih rendah. Secara rata-rata, pemuda dengan tingkat pendidikan lebih rendah menikah pertama kali pada usia yang lebih muda daripada pemuda dengan tingkat pendidikan lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa pendidikan mencegah pernikahan pada usia muda yang berimplikasi pada menurunnya risiko kehamilan pada usia muda dan bayi yang lahir dengan permasalahan gizi. Dengan demikian, secara tidak langsung peningkatan capaian domain pendidikan diharapkan dapat mencegah permasalahan *stunting* di Indonesia.

Pemuda yang menikah pada usia dini cenderung mengalami putus sekolah dan tidak menempuh pendidikan menengah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah, mereka memiliki peluang kerja yang terbatas.



Gambar 12. Korelasi antara angka perkawinan usia anak dan prevalensi *stunting*



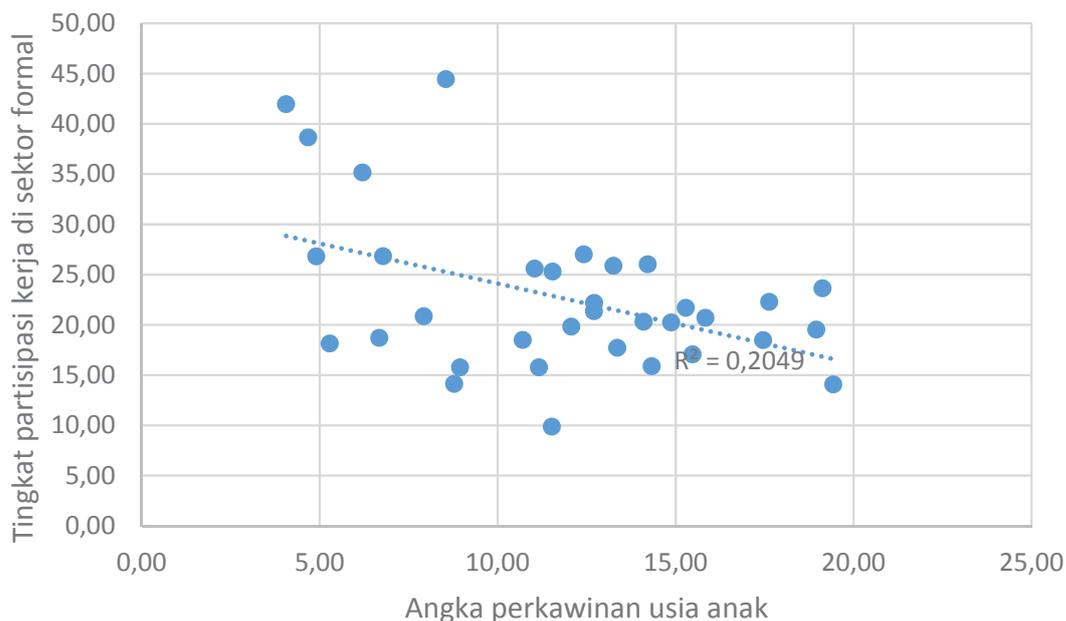
Gambar 13. Korelasi antara rata-rata lama sekolah dan angka perkawinan usia anak

Gambar 14 memperlihatkan korelasi negatif antara angka perkawinan usia anak dan tingkat partisipasi kerja pemuda perempuan di sektor formal dengan koefisien korelasi sebesar 45%.

Salah satu upaya mitigasi yang bisa dilakukan adalah mendorong pemuda yang telanjur menikah pada usia dini untuk melanjutkan pendidikannya melalui mekanisme sekolah terbuka atau kelompok belajar (kejar). Dengan demikian, mereka setidaknya dapat tetap menempuh pendidikan wajib belajar

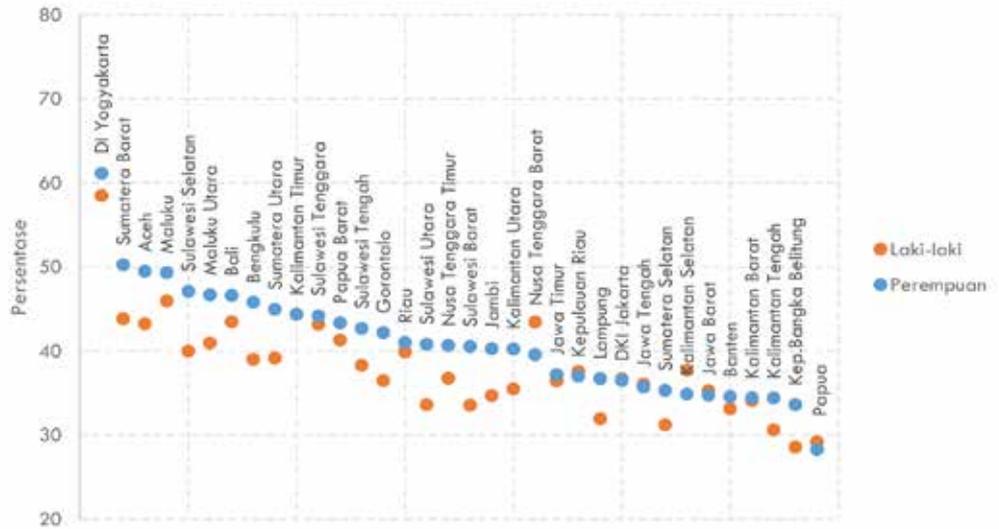
12 tahun dan berpeluang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Mereka juga diharapkan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan dengan ketika hanya memiliki ijazah jenjang pendidikan dasar.

Indikator selanjutnya pada domain gender dan diskriminasi adalah akses pemuda perempuan terhadap pendidikan menengah dan tinggi serta pekerjaan di sektor formal. Pemuda perempuan yang menempuh pendidikan tingkat SMA dan



Gambar 14. Korelasi antara angka perkawinan usia anak dan tingkat partisipasi kerja pemuda perempuan di sektor formal

Gambar 15.
Perbandingan
antara persentase
pemuda
perempuan
dan persentase
pemuda laki-laki
yang sedang
menempuh
pendidikan
tingkat SMA ke
atas

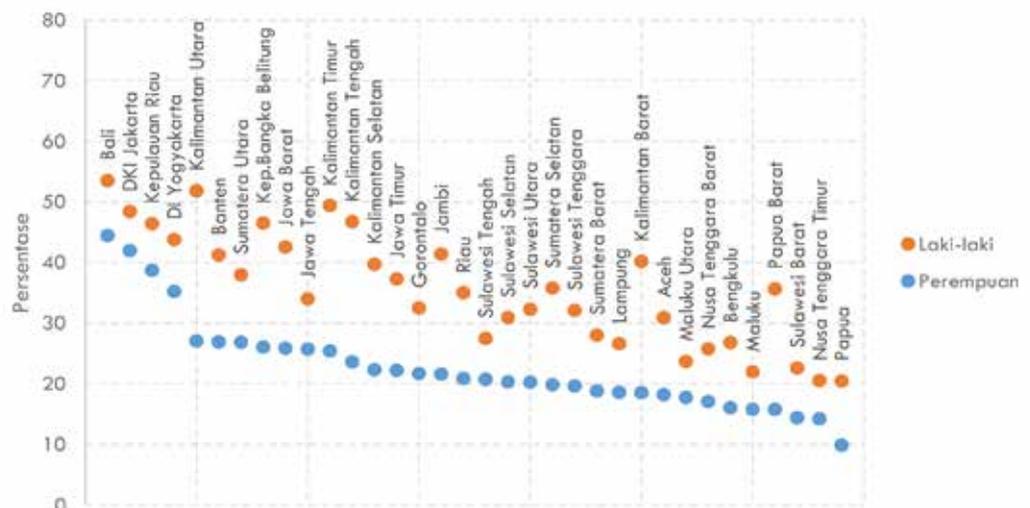


perguruan tinggi meningkat sebesar 2,06 poin antara 2015 dan 2018, sementara pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal meningkat sebesar 1,14 poin dalam periode yang sama. Provinsi DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan proporsi pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan menengah ke atas terbesar (61,20%), sedangkan Provinsi Papua merupakan provinsi dengan proporsi terkecil (28,30%).

Gambar 15 menunjukkan bahwa proporsi pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah ke atas lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pemuda perempuan dalam pendidikan lebih baik daripada laki-laki. Tidak ada perbedaan akses terhadap pendidikan antara pemuda perempuan dan laki-laki di Indonesia.

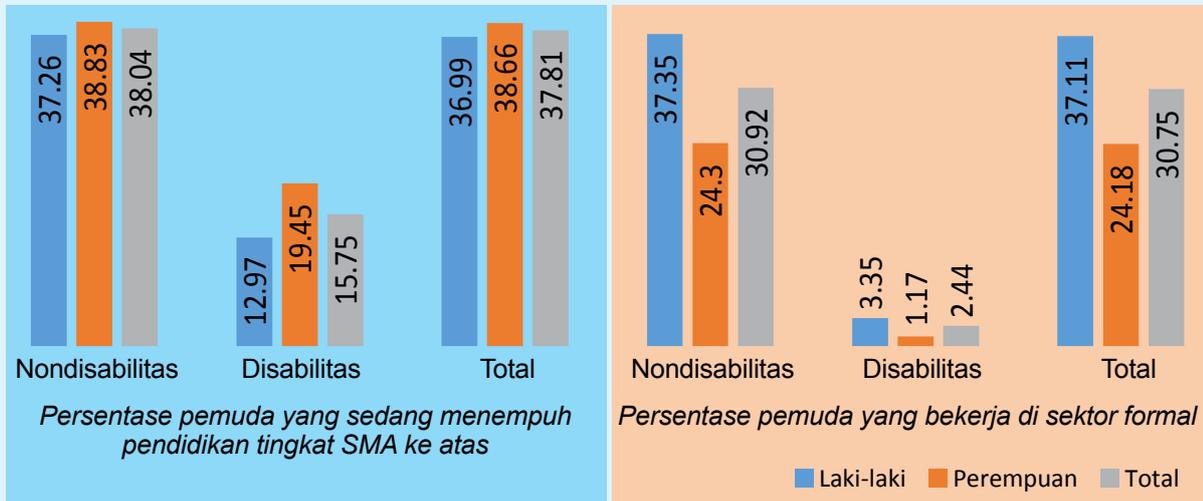
Situasi yang berbeda terjadi pada akses perempuan terhadap pekerjaan di sektor formal. Proporsi pemuda laki-laki yang bekerja di sektor formal lebih besar daripada proporsi pemuda perempuan (Gambar 16). Hal ini disebabkan lebih rendahnya partisipasi pemuda perempuan dalam angkatan kerja dibandingkan dengan laki-laki. Hanya ada setengah pemuda perempuan yang masuk ke dalam angkatan kerja, sedangkan mayoritas sisanya mengurus rumah tangga. Provinsi Bali merupakan provinsi dengan proporsi pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal terbesar (44,50%) dan Provinsi Papua merupakan provinsi dengan proporsi terkecil (9,90%). Capaian provinsi-provinsi di Indonesia terkait proporsi pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal makin konvergen (merata). Hal ini tampak dari turunnya angka standar deviasi indikator tersebut dari 8,18 menjadi 7,72 dalam periode 2015–2018 (Tabel 10).

Gambar 16.
Perbandingan
antara persentase
pemuda
perempuan
dan persentase
pemuda laki-laki
yang bekerja di
sektor formal



Kotak 2. Kesetaraan Pembangunan Pemuda menurut Status Disabilitas

Selain jenis kelamin, disparitas capaian pembangunan dapat dilihat berdasarkan status disabilitas. Meskipun aspek ini belum menjadi bagian dari kerangka penghitungan IPP Indonesia, capaian pembangunan pemuda berdasarkan status disabilitas tetap perlu disajikan. Hal ini adalah upaya untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pemuda pun yang tertinggal dalam pembangunan di Indonesia.



Gambar 17. Akses terhadap pendidikan dan pekerjaan formal berdasarkan status disabilitas dan jenis kelamin

Sumber:

Diolah dari Susenas 2018 (persentase pemuda yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas) dan Sakernas 2018 (persentase pemuda yang bekerja di sektor formal).

Gambar di atas menyajikan gambaran mengenai akses pemuda dengan disabilitas terhadap pendidikan dan lapangan pekerjaan di sektor formal beserta perbandingannya dengan capaian pemuda nondisabilitas. Terlihat bahwa pemuda dengan disabilitas menghadapi hambatan yang lebih besar daripada pemuda nondisabilitas untuk mengakses sekolah dan pekerjaan formal. Hanya ada 15 dari 100 pemuda dengan disabilitas berusia 16–24 tahun yang sedang bersekolah; pada pemuda nondisabilitas, angkanya mencapai 38 dari 100 pemuda.

Marginalisasi pemuda dengan disabilitas tampak lebih jelas pada domain lapangan dan kesempatan kerja daripada pendidikan. Hanya ada 2,44% pemuda dengan disabilitas yang bekerja di sektor formal, sedangkan persentase pemuda nondisabilitas yang bekerja di sektor formal mencapai 30,92% atau 15 kali lipat. Sementara itu, ketimpangan akses terhadap pendidikan antara pemuda dengan disabilitas dan pemuda nondisabilitas 'hanya' sebesar 15,75% berbanding 38,04% atau akses terhadap pendidikan bagi pemuda nondisabilitas sekitar 2,5 kali lebih tinggi daripada pemuda dengan disabilitas.

Ketimpangan akses juga ditemukan antara pemuda dengan disabilitas laki-laki dan perempuan. Akses terhadap pendidikan bagi pemuda perempuan dengan disabilitas lebih baik daripada laki-laki. Namun, ketika memasuki dunia kerja, mereka menghadapi hambatan untuk bisa terserap di sektor formal. Persentase pemuda perempuan dengan disabilitas yang bekerja di sektor formal hanya 1,17%, sementara persentase pemuda laki-laki dengan disabilitas mencapai tiga kali lipatnya.

Hambatan penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan dan lapangan kerja berasal dari luar dan dalam diri mereka. Penyandang disabilitas pada umumnya mendapat perlakuan diskriminatif dan stigma negatif dari unit-unit sosial, mulai dari keluarga, teman/tetangga, institusi pendidikan dan perusahaan, hingga pemerintah. Infrastruktur publik juga tidak ramah terhadap mereka. Pemerintah pun belum secara afirmatif menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas. Di satu sisi, ketakramahan lingkungan tersebut menghalangi penyandang disabilitas untuk mengakses layanan pendidikan dan lapangan kerja. Di sisi lain, hal tersebut menyebabkan internalisasi nilai diskriminatif dan stigma negatif oleh penyandang disabilitas—mereka pada akhirnya menganggap diskriminasi sebagai hal wajar—yang berujung pada penarikan diri mereka untuk mengakses layanan pendidikan dan lapangan kerja (Hastuti, Dewi, dan Pramana, 2020).

3

PROFIL INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA 34 PROVINSI DI INDONESIA



Bab ini memaparkan capaian IPP dan capaian tiap domain pembangunan pemuda di tiap provinsi. Paparan ini bertujuan memberikan gambaran kepada para pembuat kebijakan di daerah tentang kondisi dan tantangan pembangunan pemuda di tiap provinsi sehingga mereka diharapkan dapat menyiapkan solusi dalam menyikapi permasalahan pembangunan pemuda di daerahnya.

Secara keseluruhan, hampir semua provinsi memiliki angka capaian yang masih jauh dari nilai ideal setiap indikator IPP. Angka nasional digunakan sebagai pembanding untuk melihat posisi relatif sebuah provinsi dari kondisi umum dan kondisi ideal. Jika suatu provinsi memiliki capaian IPP di atas angka nasional, hal ini berarti bahwa secara relatif provinsi tersebut memiliki capaian yang lebih baik daripada sebagian provinsi yang lain di Indonesia dan siap untuk menuju kondisi ideal. Sebaliknya, jika suatu provinsi memiliki capaian IPP di bawah angka nasional, hal ini berarti bahwa secara relatif provinsi tersebut memiliki nilai yang masih rendah dan memerlukan perhatian lebih lanjut untuk mencapai kondisi ideal.

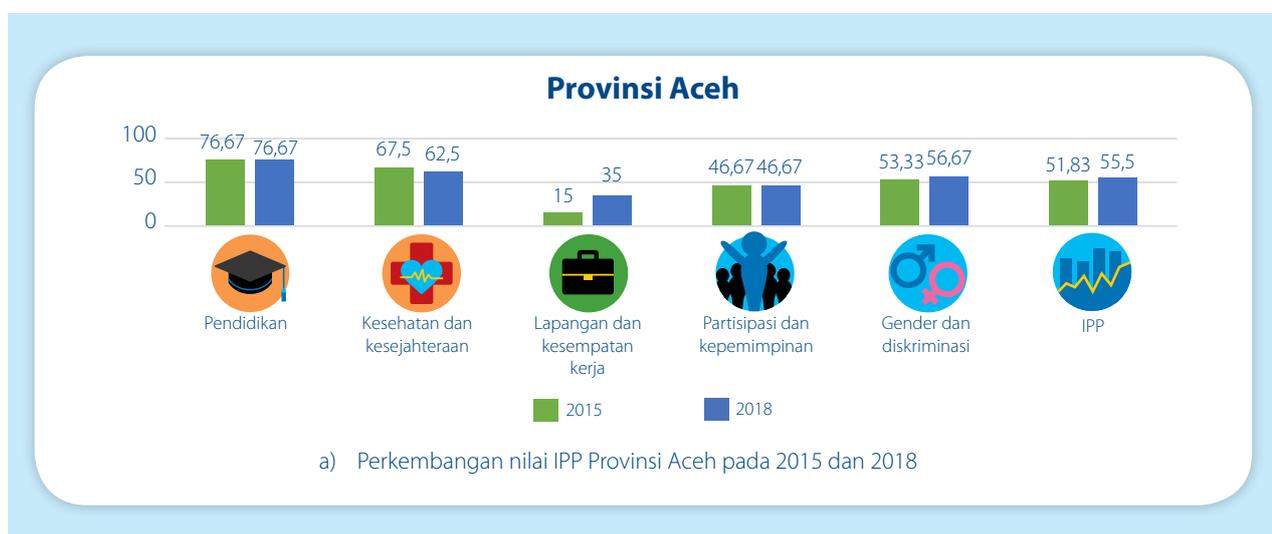
3.1. PROVINSI ACEH

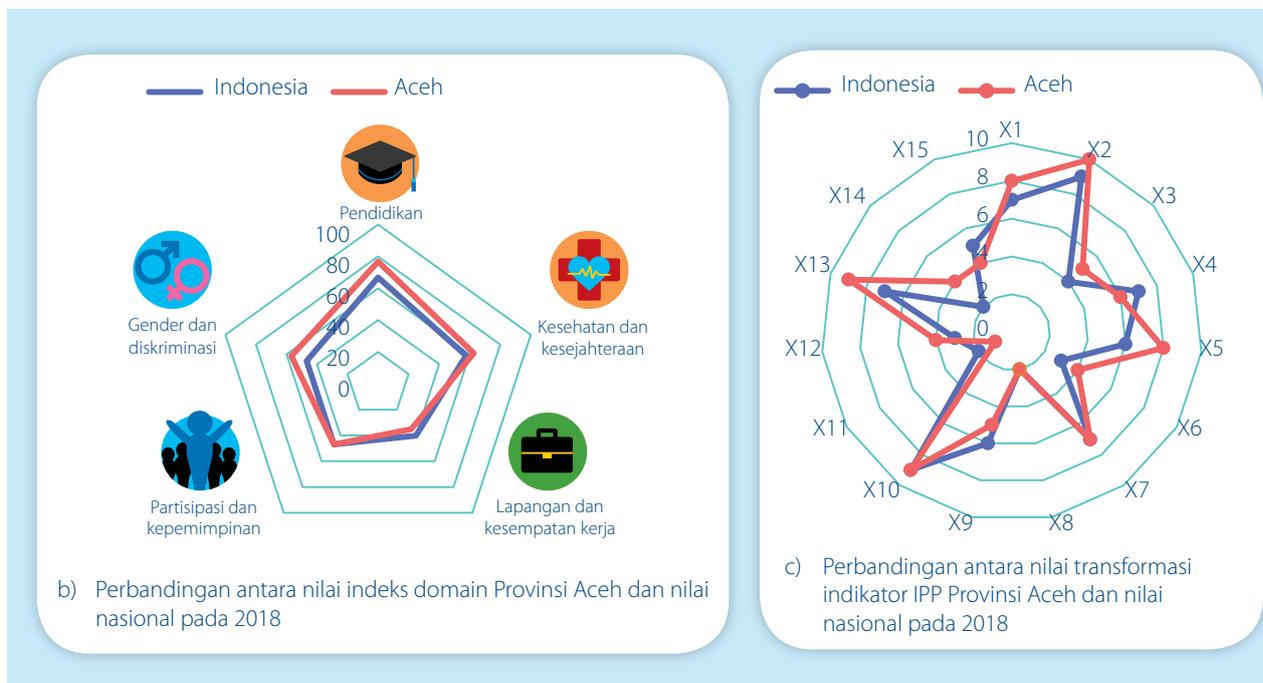
Provinsi Aceh mengalami peningkatan nilai IPP dari 51,83 pada 2015 menjadi 55,50 pada 2018. Peningkatan ini didorong oleh nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja yang meningkat secara signifikan pada saat domain lain tidak banyak berubah atau bahkan mengalami penurunan. Meskipun demikian, lapangan dan kesempatan kerja masih tercatat sebagai domain dengan nilai indeks terendah di Provinsi Aceh pada 2018. Di antara lima

domain, domain dengan capaian yang relatif lebih baik daripada capaian nasional adalah pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, serta gender dan diskriminasi.

Nilai indeks domain pendidikan yang relatif baik ditopang oleh angka rata-rata lama sekolah yang mencapai 11,28 tahun, APK sekolah menengah 91,92%, dan APK perguruan tinggi 43,86%. Sementara itu, nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan yang baik ditopang oleh angka pemuda korban kejahatan, pemuda yang merokok, dan pemuda perempuan yang sedang hamil yang lebih rendah daripada angka nasional (Gambar 18c). Walaupun demikian, proporsi pemuda yang merokok perlu mendapat perhatian lebih karena sekitar seperempat pemuda di Provinsi Aceh merupakan perokok. Perhatian juga perlu diberikan pada indikator remaja perempuan yang sedang hamil karena proporsinya meningkat dari 10,33% pada 2015 menjadi 15,34% pada 2018. Angka kesakitan pemuda juga masih menjadi tantangan bagi provinsi ini karena capaiannya lebih buruk daripada capaian nasional. Provinsi Aceh perlu memberikan perhatian lebih pada domain kesehatan pemuda karena nilai indeksnya mengalami penurunan.

Nilai indeks pada domain gender dan diskriminasi menempati peringkat kelima tertinggi secara nasional. Namun, masih ada tantangan untuk meningkatkan proporsi perempuan yang bekerja di sektor formal karena capaiannya (18,15%) berada di bawah capaian nasional (24,13%). Sementara itu, nilai indeks domain partisipasi dan kepemimpinan tidak berbeda dengan nilai indeks tingkat nasional meski proporsi pemuda yang aktif dalam organisasi masih kecil (4,37%).





Gambar 18. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Aceh pada 2018

Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

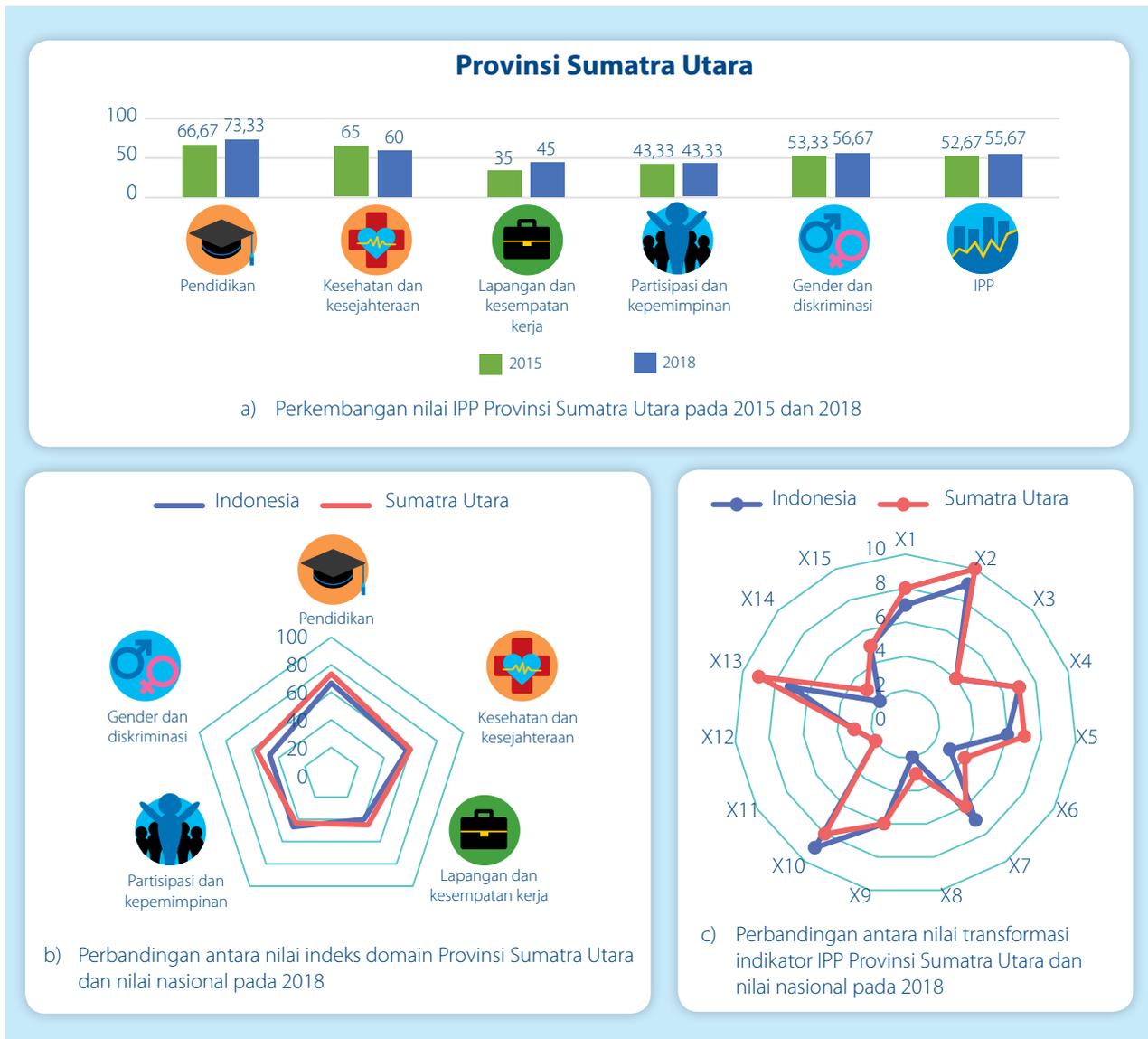
3.2. PROVINSI SUMATRA UTARA

Secara umum, nilai indeks domain pembangunan pemuda Sumatra Utara relatif lebih baik daripada nilai indeks nasional. Setelah mengalami penurunan angka IPP antara 2015 dan 2016, Provinsi Sumatra Utara berhasil meningkatkan pembangunan pemudanya hingga mencapai angka 55,67 pada 2018. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan nilai indeks domain pendidikan, lapangan dan kesempatan kerja, serta gender dan diskriminasi.

Peningkatan nilai indeks domain pendidikan didorong oleh APK perguruan tinggi yang meningkat dari 25,89% pada 2015 menjadi 31,11% pada 2018. Peningkatan nilai indeks domain gender dan diskriminasi didorong oleh akses perempuan terhadap pekerjaan formal yang meningkat dari 19,16% pada 2015 (di bawah capaian nasional) menjadi 26,82% pada 2018 (di atas capaian nasional). Perbaikan pada domain lapangan dan

kesempatan kerja didorong oleh peningkatan capaian kedua indikator pembentuk indeks, yakni naiknya persentase pemuda wirausaha kerah putih dan turunnya tingkat pengangguran pemuda.

Masih ditemukan berbagai tantangan pada domain partisipasi dan kepemimpinan, serta kesehatan dan kesejahteraan. Nilai indeks domain partisipasi dan kepemimpinan tidak meningkat karena kecilnya proporsi pemuda yang aktif dalam organisasi (6,64%) dan pemuda yang berpendapat/memberikan saran dalam rapat (5,12%). Angka partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan juga berada di bawah angka nasional (76%). Sementara itu, nilai indeks pada domain kesehatan dan kesejahteraan turun akibat naiknya angka remaja hamil dari 16,52% pada 2015 menjadi 20,17% pada 2018—lebih tinggi daripada angka nasional (16,67%). Pemerintah Provinsi Sumatra Utara perlu secara serius memperhatikan tantangan pada domain kesehatan karena nilai indeks domain ini menurun.



Gambar 19. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Sumatera Utara pada 2018

Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

3.3. PROVINSI SUMATRA BARAT

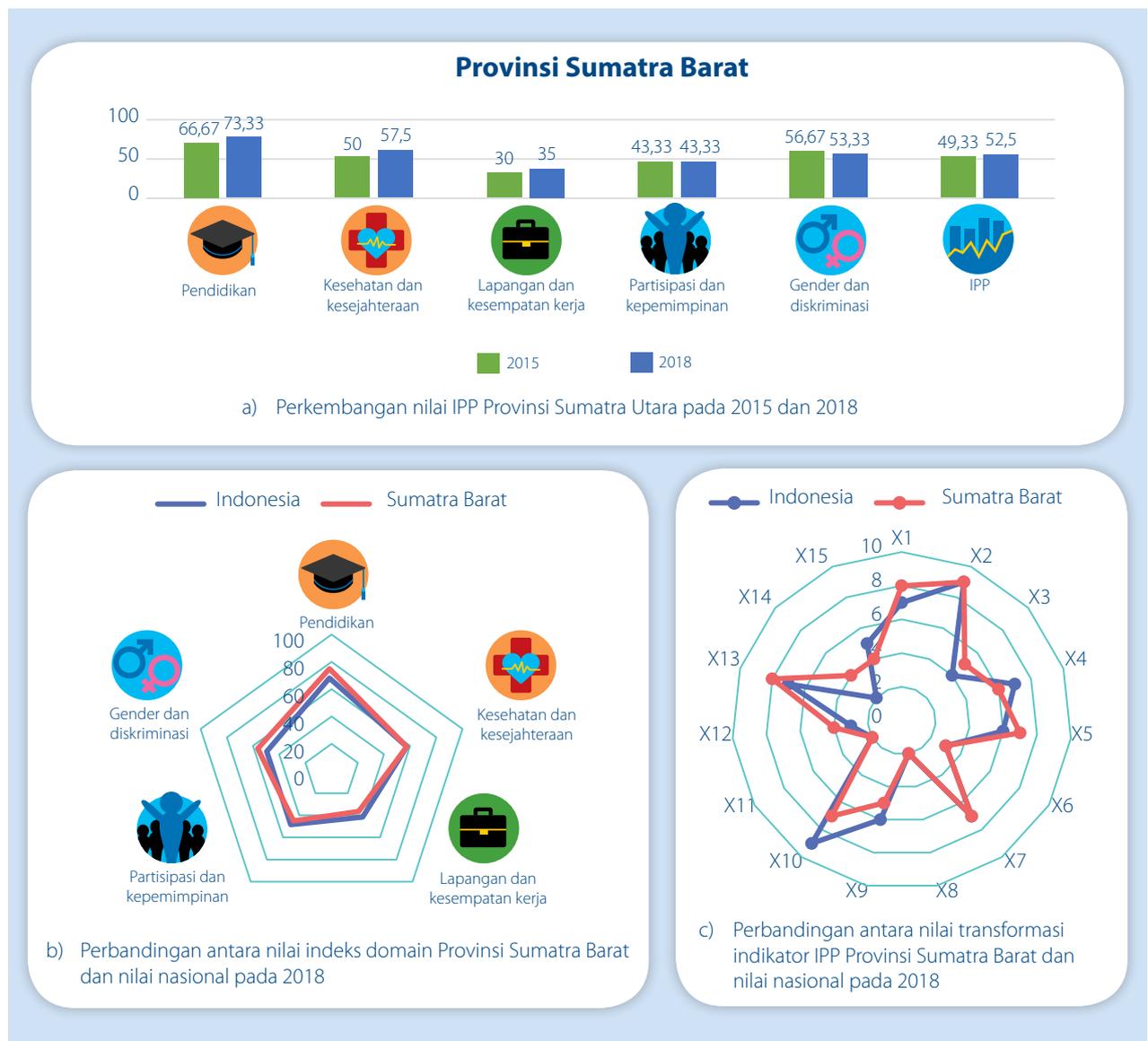
Pada 2018, IPP Provinsi Sumatera Barat berhasil menempati peringkat ke-14 seiring dengan peningkatan nilai indeks dari 49,33 pada 2015 menjadi 52,50 pada 2018. Peningkatan nilai indeks ini didorong oleh peningkatan signifikan pada capaian domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, serta lapangan dan kesempatan kerja. Peningkatan capaian domain pendidikan ditopang oleh kenaikan APK perguruan tinggi dari 38,51% pada 2015 menjadi 44,19% pada 2018. Perbaikan pada domain kesehatan dan kesejahteraan didorong oleh angka kehamilan remaja yang turun secara signifikan

dari 25,50% pada 2015 menjadi 17,80% pada 2018. Namun, proporsi pemuda perokok (28,76%) yang besar dan melebihi angka nasional (26%) pada 2018 menjadi tantangan pada domain ini.

Sementara itu, meski mengalami perbaikan, capaian domain lapangan dan kesempatan kerja masih relatif tertinggal dibandingkan dengan capaian nasional. Domain ini juga memiliki nilai terendah di antara domain-domain yang lain dengan tantangan utama berupa tingginya angka pengangguran pemuda. Domain yang juga relatif tertinggal dibandingkan dengan capaian nasional adalah partisipasi dan kepemimpinan. Tantangan pada domain ini adalah

kecilnya proporsi pemuda yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan—angkanya menempati peringkat kedua terendah setelah Provinsi Papua, rendahnya partisipasi aktif pemuda dalam organisasi (4,68%), dan kecilnya proporsi pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat (9,81%). Perbaikan pada capaian domain lapangan dan kesempatan kerja serta domain partisipasi dan kepemimpinan akan meningkatkan nilai IPP Provinsi Sumatra Barat secara keseluruhan.

Tantangan lain yang dihadapi Provinsi Sumatra Barat adalah domain gender dan diskriminasi yang capaiannya menurun. Penurunan ini disebabkan memburuknya capaian ketiga indikator pembentuk indeks. Tantangan terbesar yang dihadapi Provinsi Sumatra Barat untuk mengatasi ketimpangan gender dalam pembangunan pemuda adalah mendorong partisipasi kerja perempuan di sektor formal. Pada 2018, capaian indikator ini hanya sebesar 18,7%, jauh di bawah angka nasional (24,13%).



Gambar 20. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Sumatra Barat pada 2018

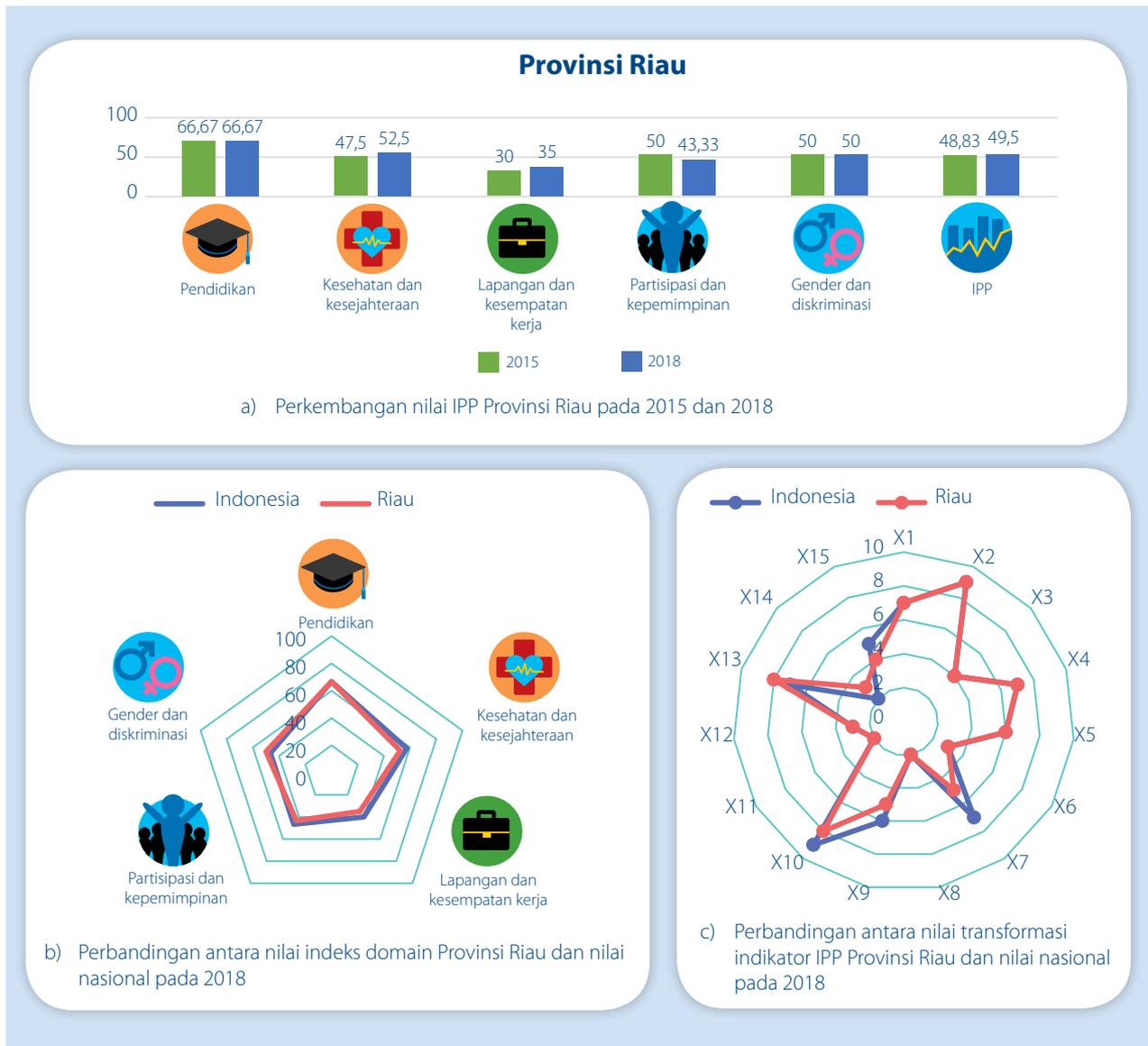
Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

3.4. PROVINSI RIAU

Provinsi Riau tidak mengalami peningkatan nilai IPP yang signifikan, yaitu dari 48,80 pada 2015 menjadi 49,50 pada 2018. Karena nilai IPP provinsi-provinsi lain meningkat secara signifikan, peningkatan yang hanya sebesar 0,70 poin menyebabkan peringkat IPP Provinsi Riau turun dari ke-12 pada 2015 menjadi ke-24 pada 2018. Perbaikan capaian pembangunan pemuda di provinsi ini hanya terjadi pada domain kesehatan dan kesejahteraan serta lapangan dan

kesempatan kerja. Nilai indeks domain partisipasi dan kepemimpinan provinsi ini turun, sedangkan nilai indeks domain pendidikan serta gender dan diskriminasi tidak berubah.

Perbaikan pada domain kesehatan dan kesejahteraan dalam periode 2015–2018 didorong oleh turunnya angka kesakitan pemuda dari 9,29% menjadi 7,04%, serta turunnya angka kehamilan remaja dari 29,95% menjadi 23,81%. Walaupun demikian, angka kehamilan remaja di Provinsi Riau menempati



Gambar 21. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Riau pada 2018

Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

peringkat keenam tertinggi di Indonesia. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi para pemangku kepentingan di provinsi ini. Sementara itu, perbaikan pada domain lapangan dan kesempatan kerja didorong oleh turunnya tingkat pengangguran pemuda dari 17,13% pada 2015 menjadi 14,76% pada 2018. Dalam periode yang sama, proporsi pemuda wirausaha kerah putih meningkat dari 0,23% pada 2015 menjadi 0,38% pada 2018.

Sementara itu, penurunan nilai indeks domain partisipasi dan kepemimpinan disebabkan mengecilnya proporsi pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan proporsi pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat. Pada domain gender dan diskriminasi, tantangan yang dihadapi Provinsi Riau adalah meningkatkan angka partisipasi pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal. Sejak 2015, capaian indikator ini masih terus berada di bawah capaian nasional. Pemerintah Provinsi Riau perlu melakukan upaya lebih serius untuk memperbaiki nilai domain partisipasi dan kepemimpinan agar bisa mendongkrak nilai IPP provinsi ini secara keseluruhan.

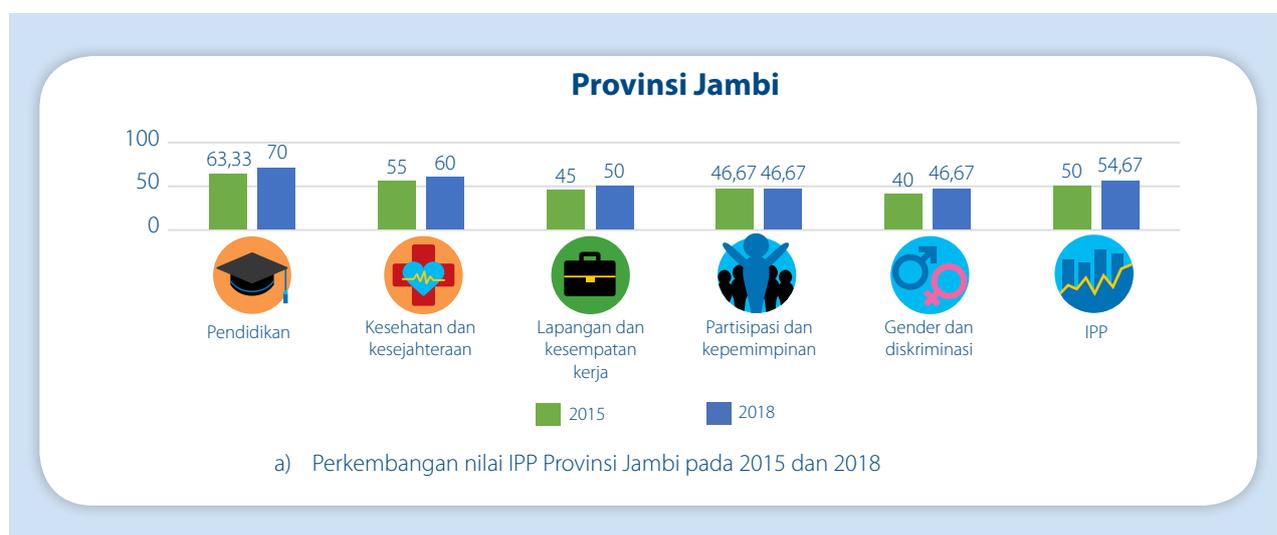
3.5. PROVINSI JAMBI

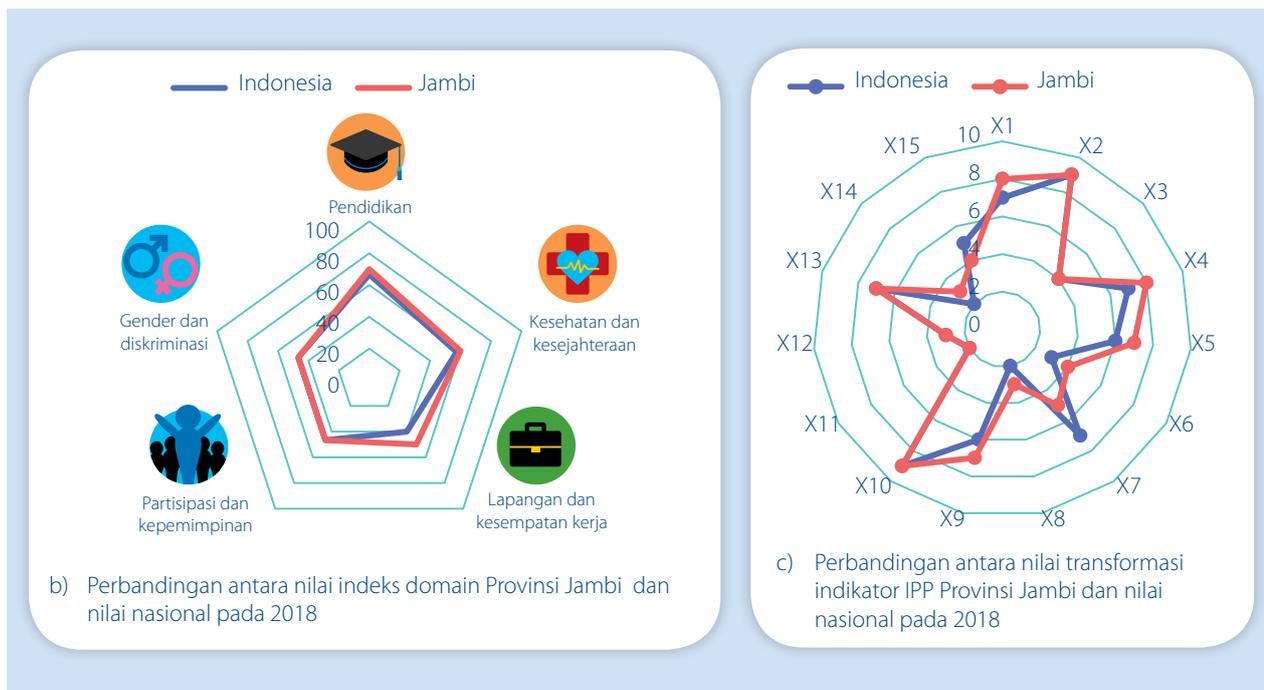
Nilai IPP Provinsi Jambi meningkat sebesar 4,67 poin, dari 50 pada 2015 menjadi 54,67 pada 2018. Dengan peningkatan ini, Provinsi Jambi menempati peringkat kesembilan secara nasional pada 2018. Perbaikan capaian tersebut ditopang oleh peningkatan nilai indeks pada semua domain IPP, kecuali domain

partisipasi dan kepemimpinan. Secara umum, nilai indeks tiap domain IPP Provinsi Jambi hampir sama dengan angka nasional; bahkan, nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja relatif lebih baik daripada angka nasional.

Peningkatan capaian domain pendidikan didorong oleh kenaikan APK perguruan tinggi yang signifikan, yaitu dari 26,33% pada 2015 menjadi 33,78% pada 2018, sedangkan peningkatan capaian domain kesehatan dan kesejahteraan didorong oleh turunnya angka kesakitan pemuda dan berkurangnya proporsi pemuda yang merokok. Sementara itu, peningkatan nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja didorong oleh bertambahnya proporsi pemuda wirausaha kerah putih dari 0,25% pada 2015 menjadi 0,45% pada 2018, sedangkan peningkatan nilai indeks domain gender dan diskriminasi terjadi karena semua indikator mengalami perbaikan dengan besaran rata-rata 2%.

Meskipun hampir semua domain mengalami peningkatan capaian, Provinsi Jambi perlu memperhatikan semua indikator pembentuk domain yang masih menyisakan 'pekerjaan rumah'. Provinsi Jambi menghadapi beberapa tantangan dalam meningkatkan capaian IPP. Pertama, angka remaja perempuan berusia 15–18 tahun yang hamil masih tinggi. Pada 2018, angka ini mencapai 26,50% dan merupakan yang tertinggi di Indonesia. Kedua, angka perkawinan usia anak masih tinggi, yaitu 12,70%, dan berada di atas angka nasional (11,20%). Perbaikan indikator-indikator ini akan membuat nilai IPP Provinsi Jambi secara signifikan lebih baik daripada nilainya pada 2018.





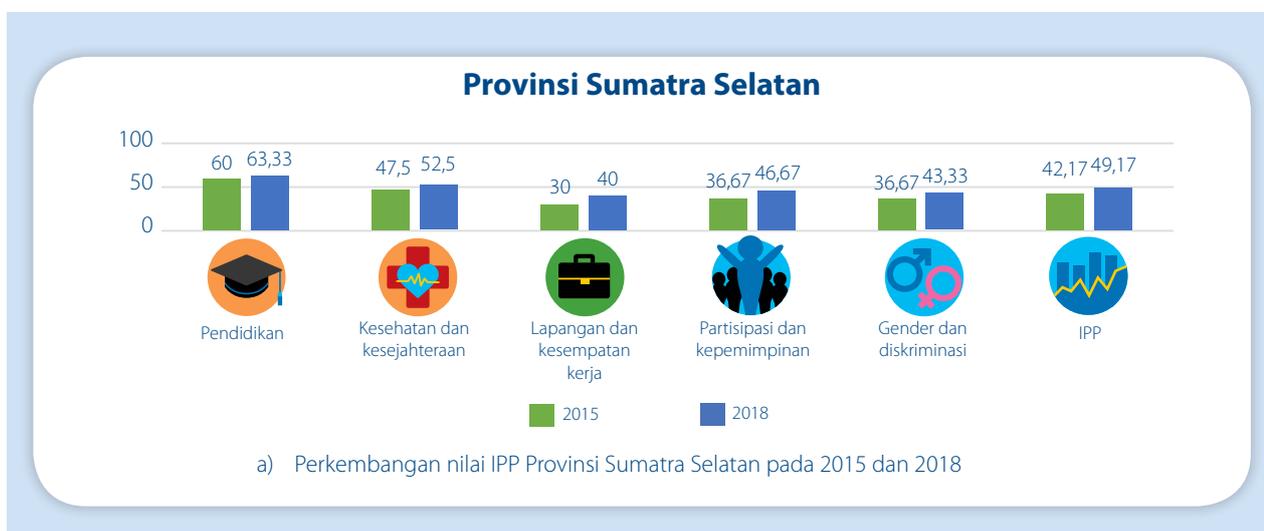
Gambar 22. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Jambi pada 2018

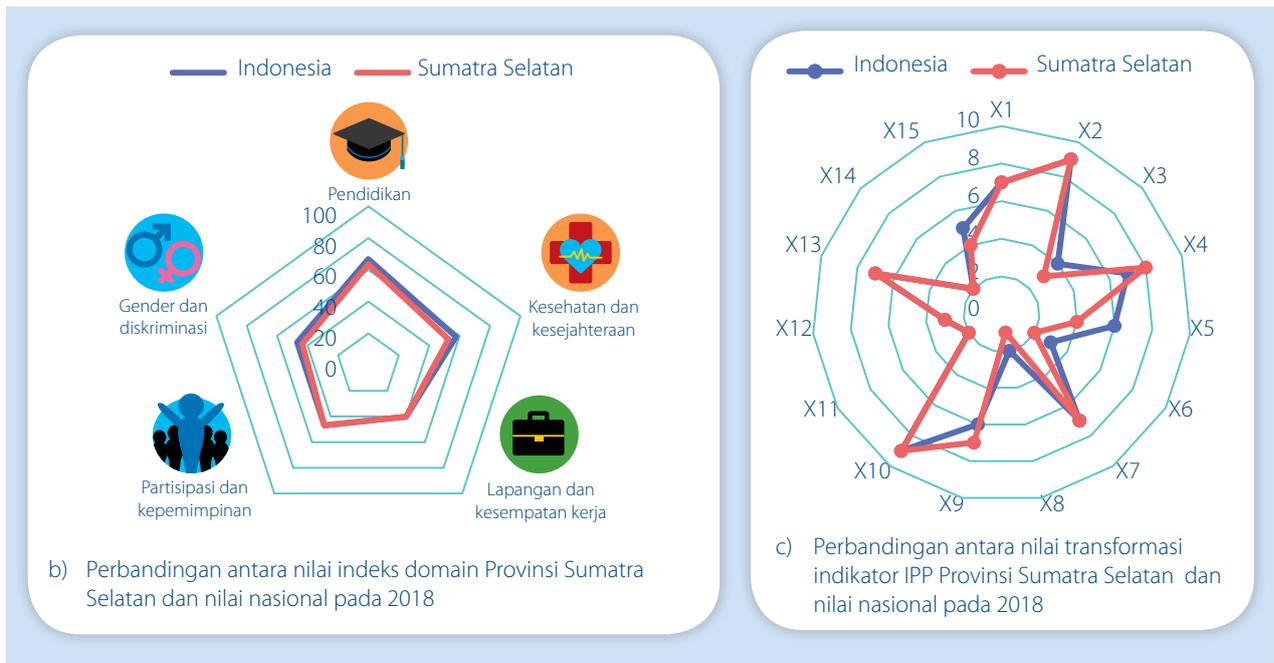
Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

3.6. PROVINSI SUMATRA SELATAN

Nilai IPP Provinsi Sumatra Selatan meningkat sebesar 7 poin, dari 42,17 pada 2015 menjadi 49,17 pada 2018. Peningkatan yang signifikan ini tercatat sebagai peningkatan kedua terbesar di Indonesia setelah NTB. Dengan peningkatan yang cukup signifikan tersebut, IPP Provinsi Sumatra Selatan naik dari peringkat ke-34 (posisi terendah) pada 2015 menjadi ke-29 pada 2018.

Peningkatan nilai IPP Provinsi Sumatra Selatan terjadi karena adanya peningkatan nilai indeks pada semua domain. Nilai indeks domain pendidikan naik terutama karena naiknya APK perguruan tinggi dari 18,60% menjadi 26,23%. Naiknya nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan didorong oleh angka remaja hamil yang turun dari 31,13% menjadi 14,55%. Nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja naik setelah angka pengangguran pemuda turun dari 14,78% menjadi 11,20%. Peningkatan nilai indeks





Gambar 23. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Sumatra Selatan pada 2018

Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial masyarakat), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

pada domain partisipasi dan kepemimpinan serta domain gender dan diskriminasi didorong oleh meningkatnya capaian semua indikator.

Meski nilai indeks semua domain meningkat, pembangunan pemuda di Provinsi Sumatra Selatan masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, proporsi pemuda wirausaha kerah putih masih kecil dan capaiannya turun dari 0,19% pada 2015 menjadi 0,08% pada 2018. Kedua, proporsi pemuda yang merokok masih besar (29%) dan berada di atas angka nasional (26%). Ketiga, walaupun trennya membaik, nilai indeks domain pendidikan pemuda Provinsi Sumatra Selatan masih berada pada posisi ketiga terendah di tingkat nasional. Hal ini berarti bahwa upaya memperbaiki domain pendidikan di Provinsi Sumatra Selatan masih perlu diperkuat, antara lain, dengan meningkatkan APK sekolah menengah yang persentasenya masih 82,18% dan APK perguruan tinggi yang masih sebesar 26,2%.

3.7. PROVINSI BENGKULU

Capaian dan pola perkembangan IPP Provinsi Bengkulu hampir sama dengan tingkat nasional. Pada

2015, nilai IPP Provinsi Bengkulu adalah 48,50, hampir sama dengan nilai nasional (48,67). Nilai keduanya pun sama-sama meningkat sebesar 2,83 poin atau tumbuh sekitar 5,80% antara 2015 dan 2018. Dengan peningkatan nilai tersebut, capaian IPP Provinsi Bengkulu kembali tidak berselisih jauh dengan capaian nasional pada 2018, yaitu masing-masing 51,33 dan 51,50. Walaupun demikian, hal yang perlu menjadi catatan adalah nilai IPP Provinsi Bengkulu yang selalu berada di bawah nilai nasional sejak 2015.

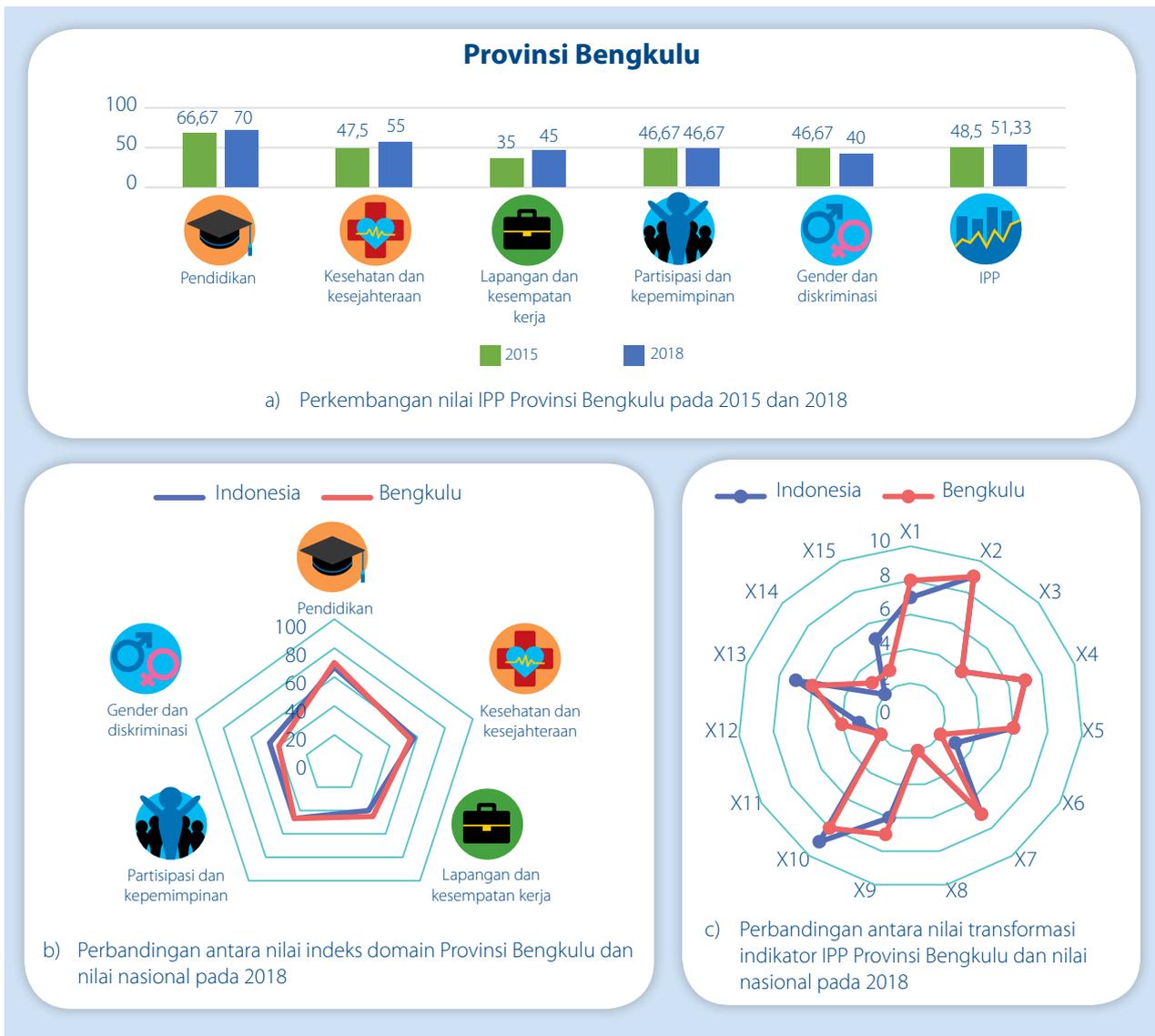
Jika dibandingkan dengan nilai nasional, nilai IPP Provinsi Bengkulu sedikit lebih unggul pada domain lapangan dan kesempatan kerja serta domain pendidikan, tetapi tertinggal pada domain gender dan diskriminasi serta domain kesehatan dan kesejahteraan. Sementara itu, capaian domain partisipasi dan kepemimpinan relatif hampir sama dengan capaian nasional.

Nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja Provinsi Bengkulu meningkat dari 35 pada 2015 menjadi 45 pada 2018 – nilai nasional pada 2018 adalah 40. Peningkatan nilai ini didorong oleh bertambahnya proporsi pemuda wirausaha kerah putih dari 0,18% menjadi 0,21%, serta turunnya tingkat pengangguran

pemuda dari 11,98% menjadi 9,96%. Sementara itu, capaian domain pendidikan di Provinsi Bengkulu pada 2018 adalah 70, meningkat sebesar 3,30 poin dari sebelumnya 66,70 pada 2015. Capaian domain pendidikan di Provinsi Bengkulu pada 2018 lebih besar daripada capaian nasional (66,67). Peningkatan nilai tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya nilai ketiga indikator pembentuk domain.

Ketertinggalan Provinsi Bengkulu dalam domain kesehatan dan kesejahteraan disebabkan besarnya proporsi pemuda korban kejahatan – angkanya selalu lebih besar daripada angka nasional – dan proporsi pemuda perokok yang berada pada peringkat

keempat tertinggi se-Indonesia. Sementara itu, ketertinggalan dalam pembangunan gender dan diskriminasi disebabkan oleh (i) meningkatnya angka perkawinan usia anak dari 12,77% pada 2015 menjadi 14,33% pada 2018, (ii) berkurangnya proporsi pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi sebesar 1% menjadi 45,80% pada 2018, dan (iii) berkurangnya proporsi pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal dari 19,07% pada 2015 menjadi 15,89% pada 2018. Provinsi Bengkulu perlu memberikan perhatian lebih besar pada domain kesehatan dan kesejahteraan serta gender dan diskriminasi karena capaian kedua domain ini masih rendah.



Gambar 24. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Bengkulu pada 2018

Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

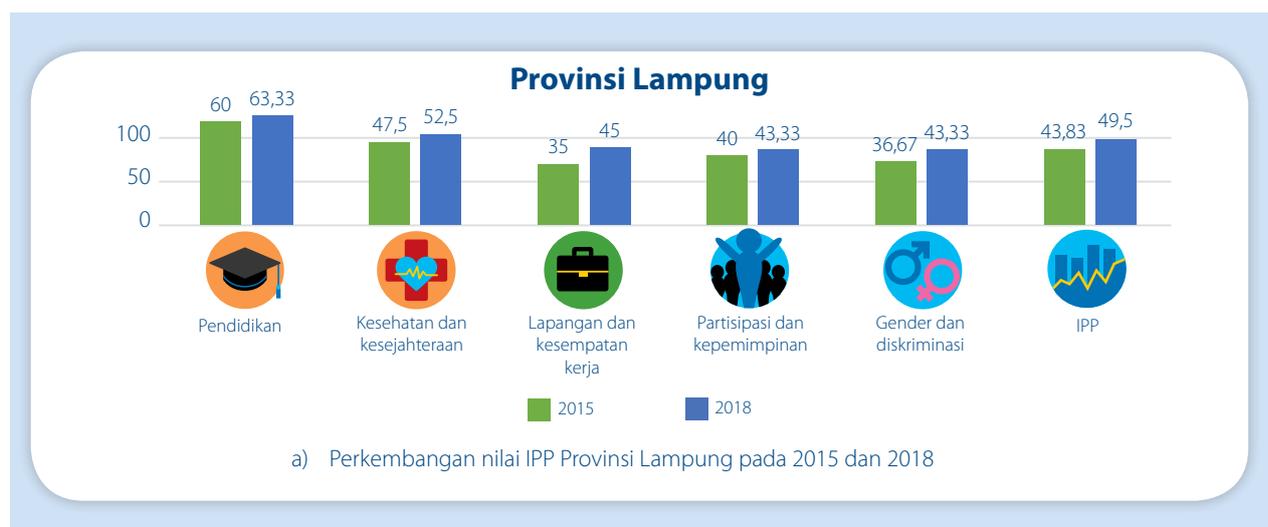
3.8. PROVINSI LAMPUNG

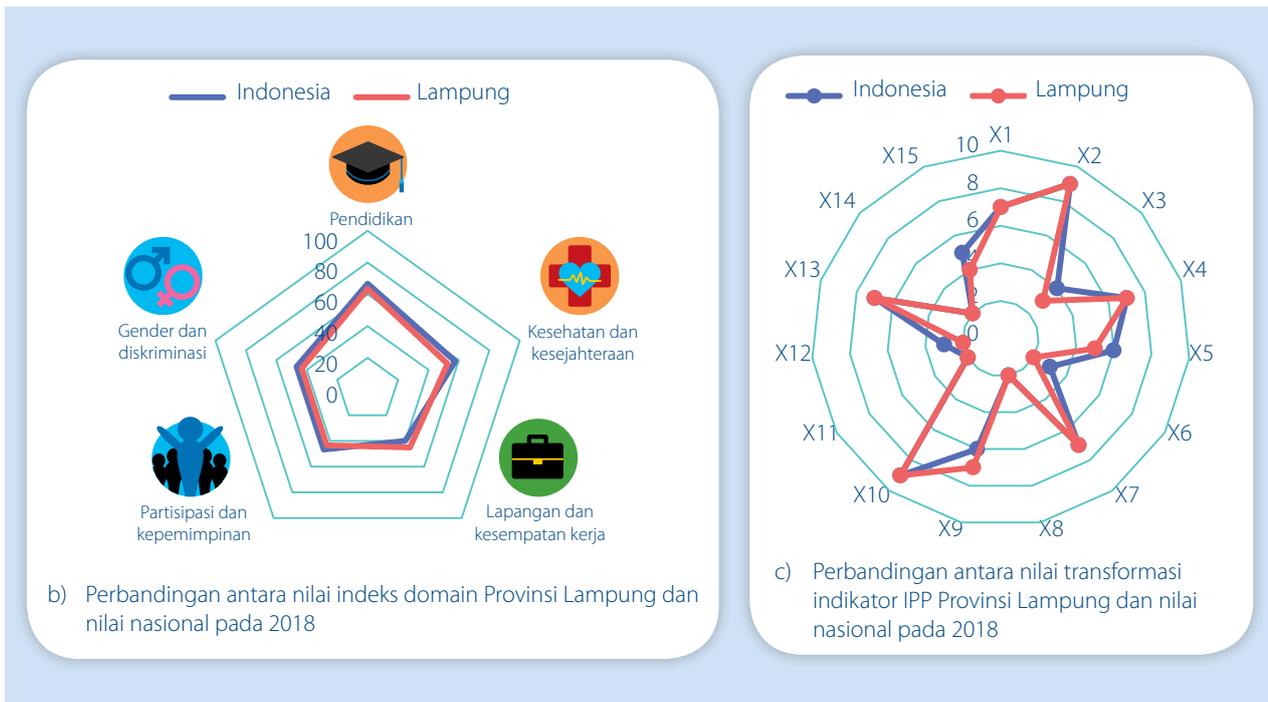
Provinsi Lampung mengalami peningkatan nilai IPP dari 43,83 pada 2015 menjadi 49,50 pada 2018. Peningkatan ini ditopang oleh perbaikan pembangunan pemuda di semua domain. Meskipun demikian, nilai IPP Provinsi Lampung pada 2018 masih belum cukup tinggi. Provinsi Lampung memiliki pola capaian yang hampir sama dengan pola capaian nasional. Namun, capaian provinsi ini sedikit lebih baik pada domain lapangan dan kesempatan kerja, serta lebih rendah pada domain kesehatan dan kesejahteraan. Di antara semua domain, lapangan dan kesempatan kerja menjadi satu-satunya domain dengan capaian di atas tingkat nasional.

Meski tren pada domain pendidikan meningkat, Provinsi Lampung masih menjadi salah satu provinsi dengan capaian domain pendidikan yang rendah. Pada 2018, rata-rata lama sekolah provinsi ini masih

sebesar 10,11 tahun, APK sekolah menengah 87,86%, dan APK perguruan tinggi 21,32%—APK perguruan tinggi provinsi ini menempati posisi ketiga terendah se-Indonesia. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung perlu memasukkan upaya perbaikan capaian domain pendidikan ke dalam agenda pembangunan pemudanya.

Tantangan berikutnya terdapat pada domain kesehatan dan kesejahteraan, yaitu proporsi pemuda korban kejahatan, proporsi pemuda perempuan yang hamil, dan proporsi pemuda perokok, yang capaiannya lebih buruk daripada capaian nasional. Bahkan, angka pemuda yang merokok di Provinsi Lampung merupakan yang tertinggi se-Indonesia (31,02%). Partisipasi aktif pemuda dalam rapat dan organisasi juga perlu didorong. Begitu pula halnya dengan kesetaraan akses antara pemuda perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan dan pekerjaan formal yang perlu ditingkatkan.





Gambar 25. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Lampung pada 2018

Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

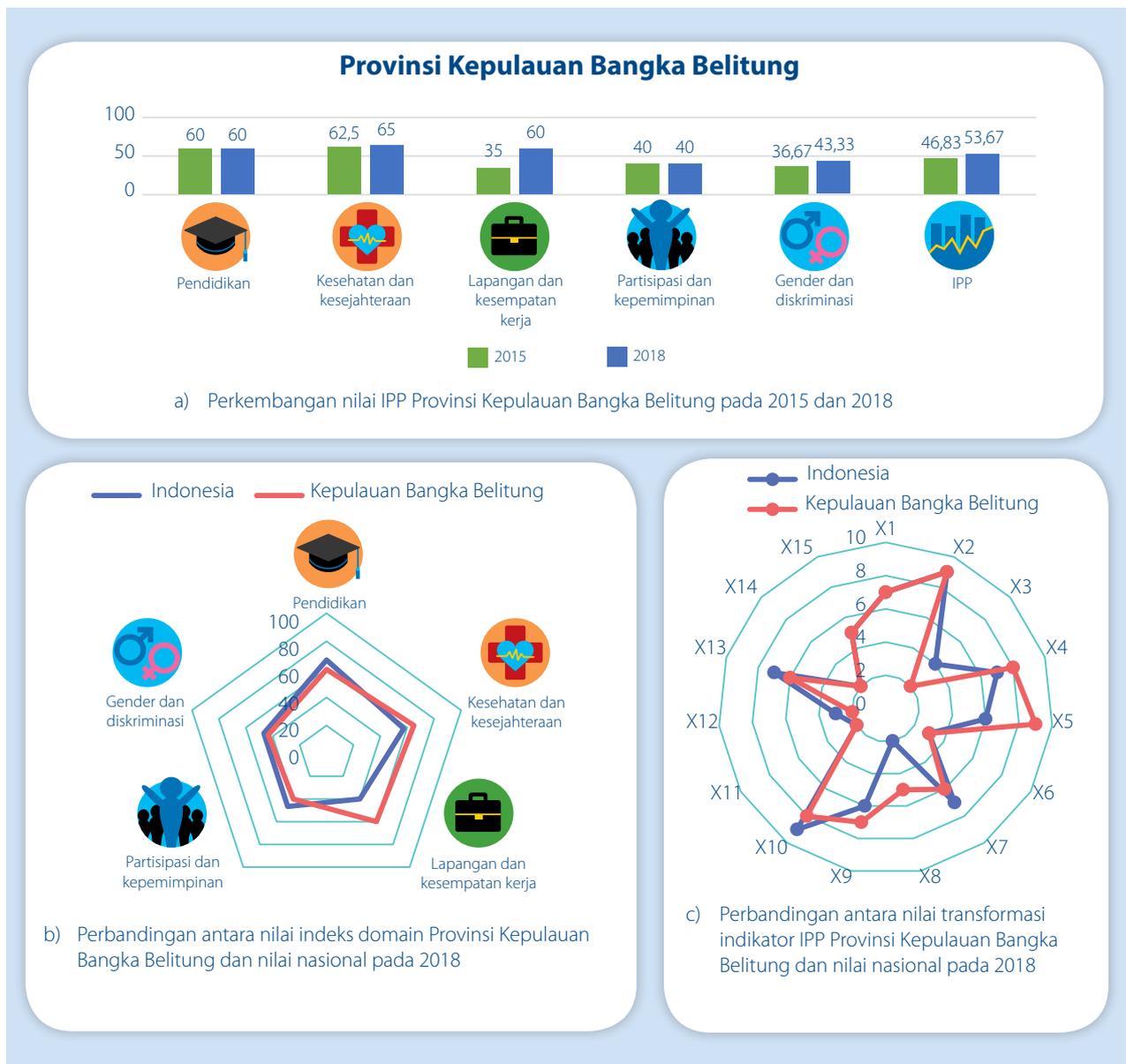
3.9. PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

IPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat sebesar 6,84 poin, dari 46,83 pada 2015 menjadi 53,67 pada 2018. Peningkatan ini didorong terutama oleh domain lapangan dan kesempatan kerja yang capaiannya meningkat secara signifikan. Perbaikan ini terjadi karena bertambahnya proporsi pemuda wirausaha kerah putih dan turunnya tingkat pengangguran pemuda. Capaian domain gender dan diskriminasi serta domain kesehatan dan kesejahteraan juga sedikit meningkat. Namun, kedua domain ini masih menghadapi beberapa tantangan, yaitu (i) angka kehamilan remaja yang meningkat secara signifikan dari 8,44% pada 2015 menjadi 18,80% pada 2018, (ii) angka perkawinan usia anak yang masih tinggi (14,22%) dan melebihi angka nasional (11,21%), serta (iii) proporsi pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah ke atas (33,63%) yang masih kecil dan berada di bawah angka nasional (38,67%).

Sementara itu, capaian domain pendidikan serta partisipasi dan kepemimpinan tidak mengalami

peningkatan. Secara nasional, rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati peringkat keenam terendah (9,73 tahun). Bahkan, APK perguruan tinggi di provinsi ini merupakan yang terendah (13,20%) dan jauh lebih rendah daripada angka nasional (30,19%). Kondisi tersebut menyebabkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati peringkat kedua terendah setelah Provinsi Papua untuk nilai indeks domain pendidikan. Partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan juga masih rendah (76,40%) dan di bawah angka nasional (81,36%). Begitu pula halnya dengan keaktifan pemuda dalam organisasi dan proporsi pemuda yang memberi saran/pendapat dalam rapat, nilai kedua indikator tersebut masih berada di bawah angka nasional.

Secara umum, dibandingkan dengan capaian nasional, capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada domain lapangan dan kesempatan kerja serta domain kesehatan dan kesejahteraan relatif lebih baik. Sebaliknya, capaian pada tiga domain lainnya masih tertinggal dari capaian nasional sehingga diperlukan upaya perbaikan yang lebih besar.



Gambar 26. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2018

Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

3.10. PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dalam periode 2015–2018, hanya ada dua provinsi yang pembangunan pemudanya mengalami kemunduran; salah satunya adalah Kepulauan Riau. Provinsi ini mengalami penurunan nilai IPP sebesar 2,34 poin, dari 57,17 pada 2015 menjadi 54,83 pada 2018, sehingga posisinya turun dari peringkat ketiga menjadi ketujuh.

Penurunan nilai IPP Provinsi Kepulauan Riau sepenuhnya disebabkan memburuknya capaian

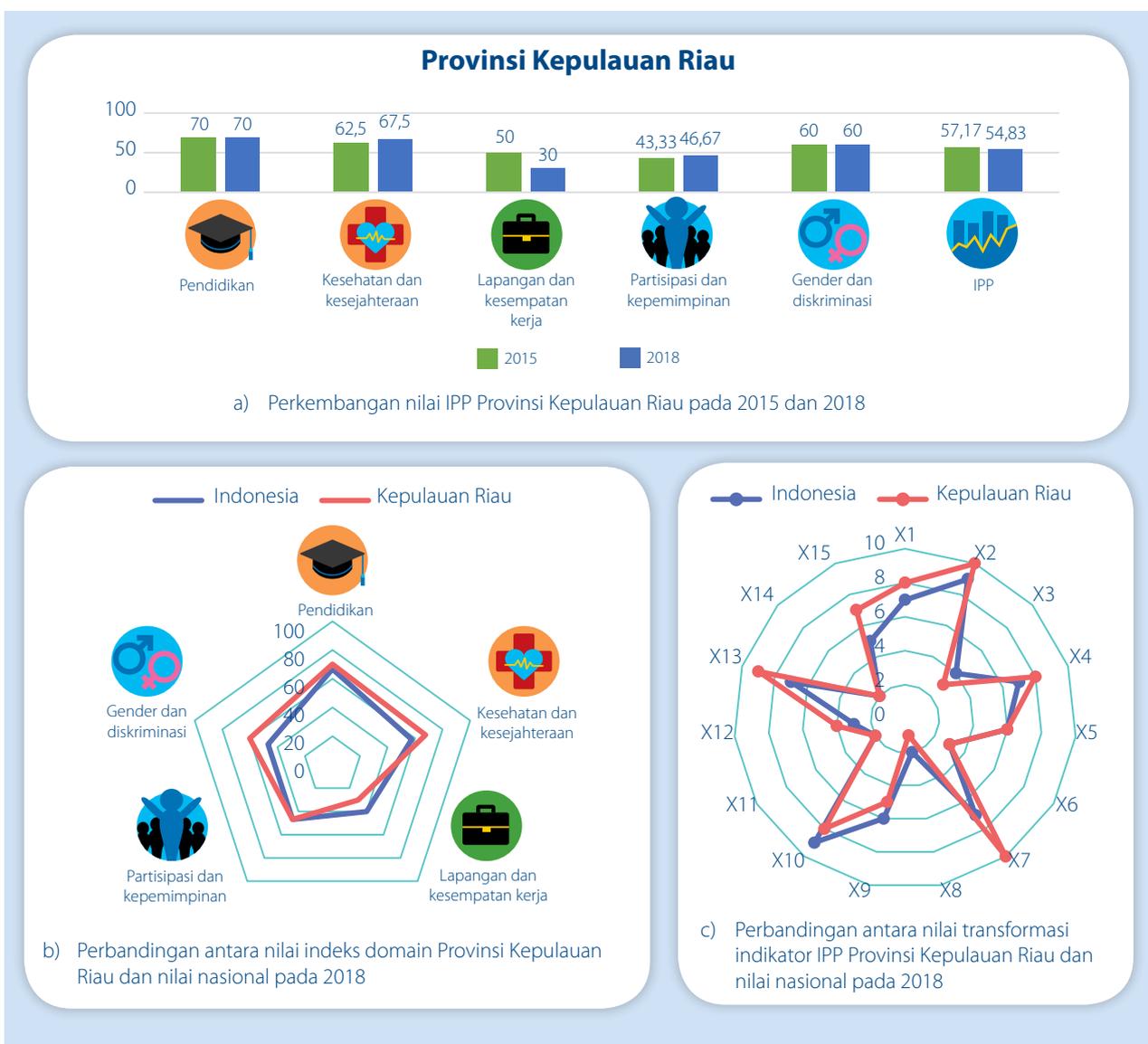
domain lapangan dan kesempatan kerja. Hal ini terlihat dari tingkat pengangguran pemuda yang naik secara signifikan dari 10,50% pada 2015 menjadi hampir 16% pada 2018. Hal ini menyebabkan Kepulauan Riau masuk ke dalam lima provinsi dengan tingkat pengangguran pemuda tertinggi di Indonesia. Sementara itu, proporsi pemuda wirausaha kerah putih di provinsi ini menempati peringkat ketiga terendah secara nasional dengan capaian sebesar 0,05%. Capaian ini jauh lebih rendah daripada capaian nasional pada 2018, yaitu 0,40%. Penurunan nilai pada domain lapangan

dan kesempatan kerja menyebabkan domain ini menjadi domain dengan nilai indeks terendah pada 2018.

Sementara itu, capaian pada domain pendidikan serta domain partisipasi dan kepemimpinan di Provinsi Kepulauan Riau relatif hampir sama dengan capaian nasional. Sementara itu, capaian pada domain gender dan diskriminasi serta domain kesehatan dan kesejahteraan lebih baik daripada capaian nasional.

Meski capaian keempat domain setara dengan capaian nasional, Provinsi Kepulauan Riau masih

menghadapi beberapa tantangan pada beberapa indikator pembentuk domain. Pertama, APK perguruan tinggi (27,64%) berada di bawah angka nasional (30,19%). Kedua, proporsi pemuda perokok masih lebih besar daripada angka nasional (26,55%). Ketiga, tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan (74,99%) berada di bawah angka nasional (80%) dan tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi (4,58%) juga lebih kecil daripada angka nasional (6,36%). Perbaikan capaian indikator-indikator tersebut diperlukan untuk meningkatkan nilai IPP Provinsi Kepulauan Riau.



Gambar 27. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Kepulauan Riau pada 2018

Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

3.11. PROVINSI DKI JAKARTA

Nilai IPP Provinsi DKI Jakarta naik sebesar 2,17 poin, dari 53,50 pada 2015 menjadi 55,67 pada 2018. Peningkatan capaian terjadi pada domain kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, serta partisipasi dan kepemimpinan. Sebaliknya, capaian domain pendidikan mengalami stagnasi dan capaian domain gender dan diskriminasi mengalami penurunan.

Jika dibandingkan dengan nilai IPP nasional, secara umum Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai yang relatif lebih baik terutama pada domain gender dan diskriminasi. Nilai IPP Provinsi DKI Jakarta menempati peringkat keempat tertinggi di antara semua provinsi. Penyumbang terbesar terhadap capaian ini adalah domain pendidikan serta domain gender dan diskriminasi.

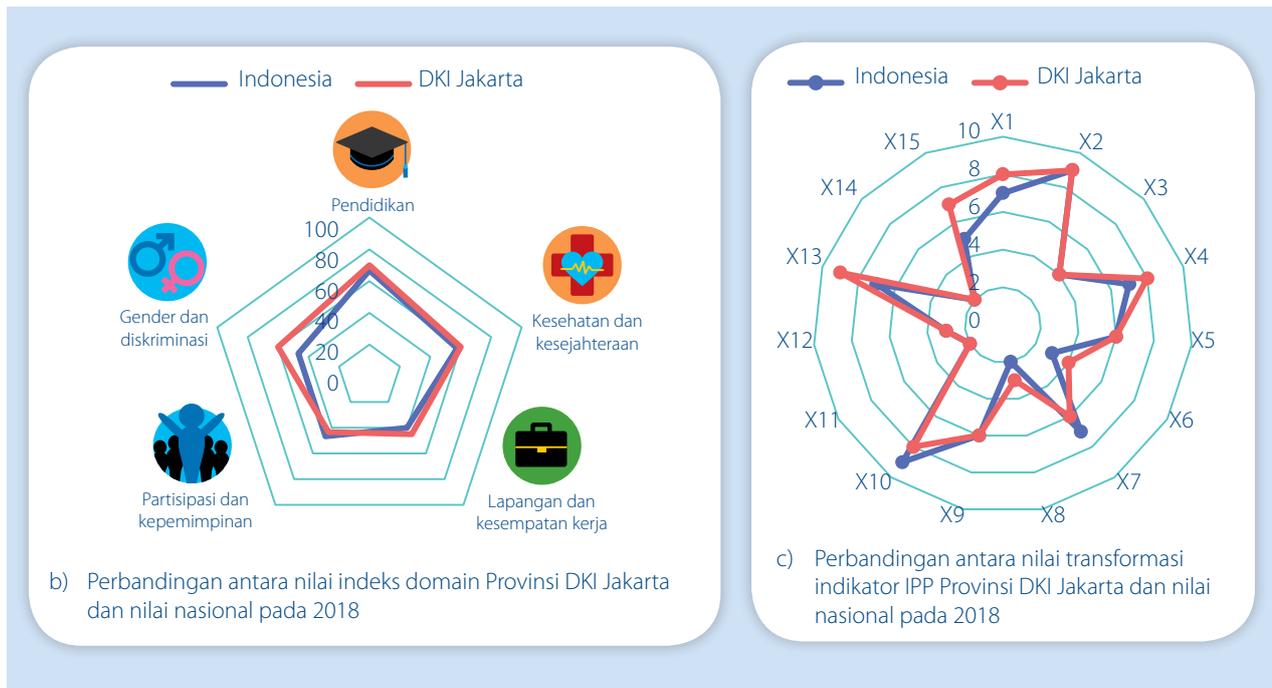
Dilihat dari capaian indikator-indikator penyusun IPP, Provinsi DKI Jakarta memiliki angka perkawinan usia anak terendah secara nasional (4,06%). Hal ini berkorelasi positif dengan rata-rata lama sekolah pemuda yang lebih tinggi (11,71 tahun) daripada provinsi-provinsi lain. Hal ini berarti bahwa pemuda di DKI Jakarta pada umumnya berada di sekolah lebih lama dan menikah pada usia yang lebih tua. DKI Jakarta juga memiliki proporsi perempuan yang bekerja di sektor formal yang relatif besar dan bahkan menempati peringkat kedua tertinggi setelah Provinsi Bali. Hal ini didukung oleh posisi

Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian dengan peluang bekerja di sektor formal yang lebih besar daripada provinsi-provinsi lain.

Walaupun demikian, Provinsi DKI Jakarta menghadapi tantangan berupa capaian domain lapangan dan kesempatan kerja serta partisipasi dan kepemimpinan yang lebih rendah daripada capaian tiga domain yang lain. Tantangan pada domain lapangan dan kesempatan kerja adalah masih tingginya tingkat pengangguran pemuda (13,14%). Tantangan pada domain partisipasi dan kepemimpinan adalah rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan (73,50%) yang menempati peringkat keenam terendah secara nasional. Tantangan lain yang dihadapi Provinsi DKI Jakarta adalah menurunnya capaian pada domain gender dan diskriminasi meski nilai indeks domain ini lebih baik daripada nilai rata-rata nasional. Penurunan nilai indeks domain ini disebabkan oleh berkurangnya proporsi perempuan yang bekerja di sektor formal dari 47% pada 2015 menjadi 42% pada 2018.

Dengan berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memfokuskan pembangunan pemudanya pada beberapa bidang, seperti ketenagakerjaan yang termasuk dalam domain lapangan dan kesempatan kerja serta domain gender dan diskriminasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga perlu meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan pemuda di wilayahnya.





Gambar 28. Capaian pembangunan pemuda Provinsi DKI Jakarta pada 2018

Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

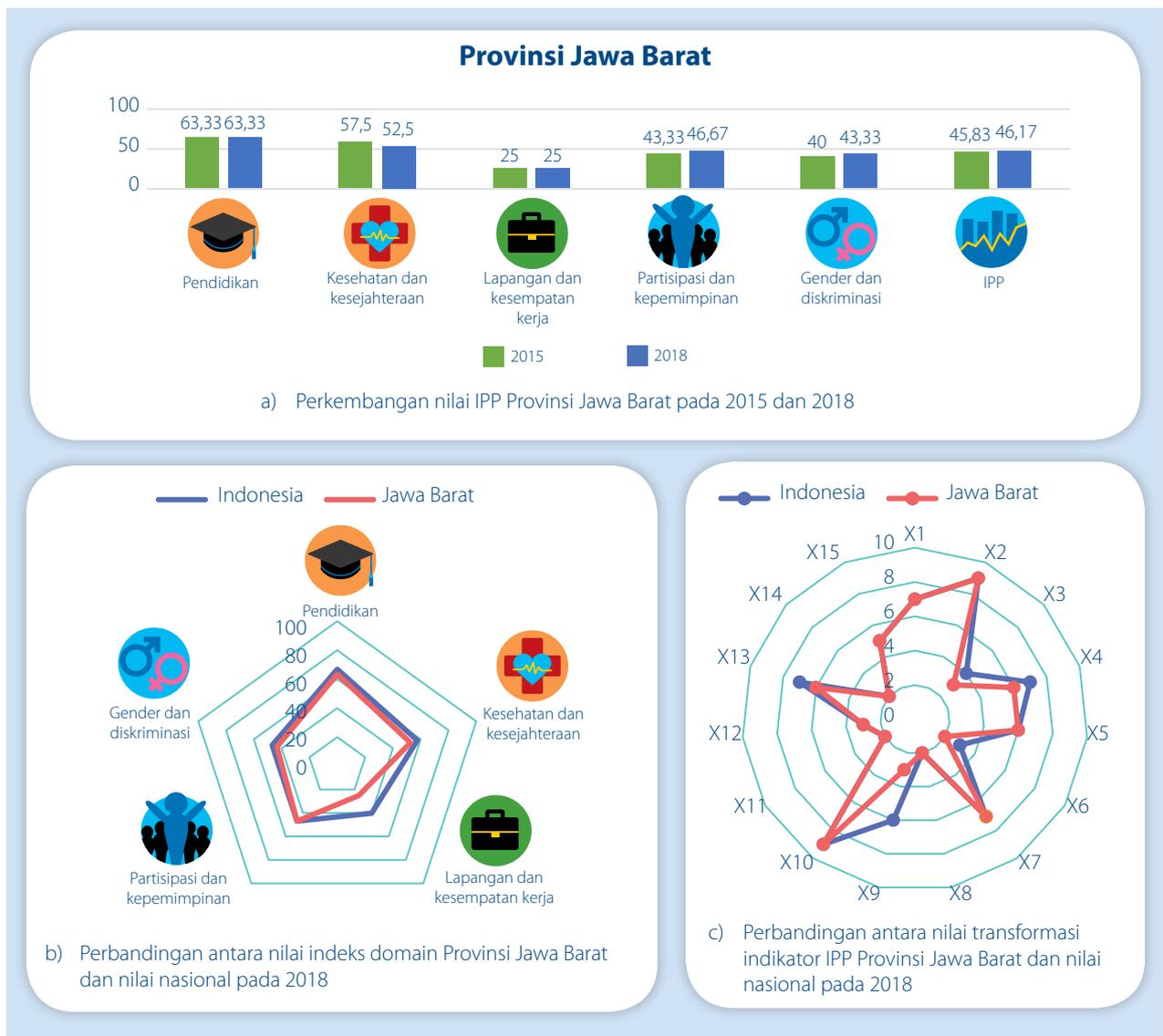
3.12. PROVINSI JAWA BARAT

Pada 2018, IPP Provinsi Jawa Barat berada pada posisi terendah secara nasional. Peningkatan nilai IPP provinsi ini tidak signifikan, yaitu dari 45,83 pada 2015 menjadi 46,17 pada 2018. Peningkatan capaian terjadi pada domain partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Capaian domain pendidikan serta lapangan dan kesempatan kerja mengalami stagnasi, sementara capaian domain kesehatan dan kesejahteraan mengalami penurunan.

Nilai indeks beberapa domain IPP Provinsi Jawa Barat relatif lebih rendah daripada nilai indeks nasional. Bahkan, nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja merupakan nilai indeks terendah di antara ke-34 provinsi, sementara nilai indeks domain pendidikan menempati peringkat kelima terendah.

Jika dilihat dari indikator pembangunan indeks domain, Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan pada setiap domain. Pada domain

lapangan dan kesempatan kerja, misalnya, provinsi ini menghadapi tantangan besar berupa tingkat pengangguran pemuda yang tertinggi se-Indonesia (19,60%). Pada domain kesehatan dan kesejahteraan, tantangan yang dihadapi adalah tingginya proporsi pemuda perokok (hampir 30%) yang menempati peringkat ketiga tertinggi pada 2018. Pada domain pendidikan, Provinsi Jawa Barat juga masih tertinggal dari provinsi lain. Hal ini tampak dari APK sekolah menengah yang baru mencapai 83,09%; angka ini lebih rendah daripada angka nasional (86,11%). Selain itu, APK perguruan tinggi Provinsi Jawa Barat menempati peringkat ketujuh terendah se-Indonesia (25,14%) dan berada di bawah angka nasional (30,19%). Tantangan yang lain ada pada domain gender dan diskriminasi. Angka perkawinan usia anak di provinsi ini (13,26%) lebih tinggi daripada angka nasional (11,21%). Proporsi perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi pun baru mencapai 34,75% dan menempati peringkat keenam terendah secara nasional.



Gambar 29. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Jawa Barat pada 2018

Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

3.13. PROVINSI JAWA TENGAH

Nilai IPP Provinsi Jawa Tengah naik dari 48,33 pada 2015 menjadi 53,50 pada 2018. Kenaikan ini terjadi seiring dengan adanya peningkatan capaian pada hampir semua domain. Peningkatan signifikan terjadi pada domain lapangan dan kesempatan kerja, serta partisipasi dan kepemimpinan. Peningkatan nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja dalam periode 2015–2018 disebabkan bertambahnya proporsi pemuda wirausaha kerah putih, yaitu dari 0,29% menjadi 0,48%, serta

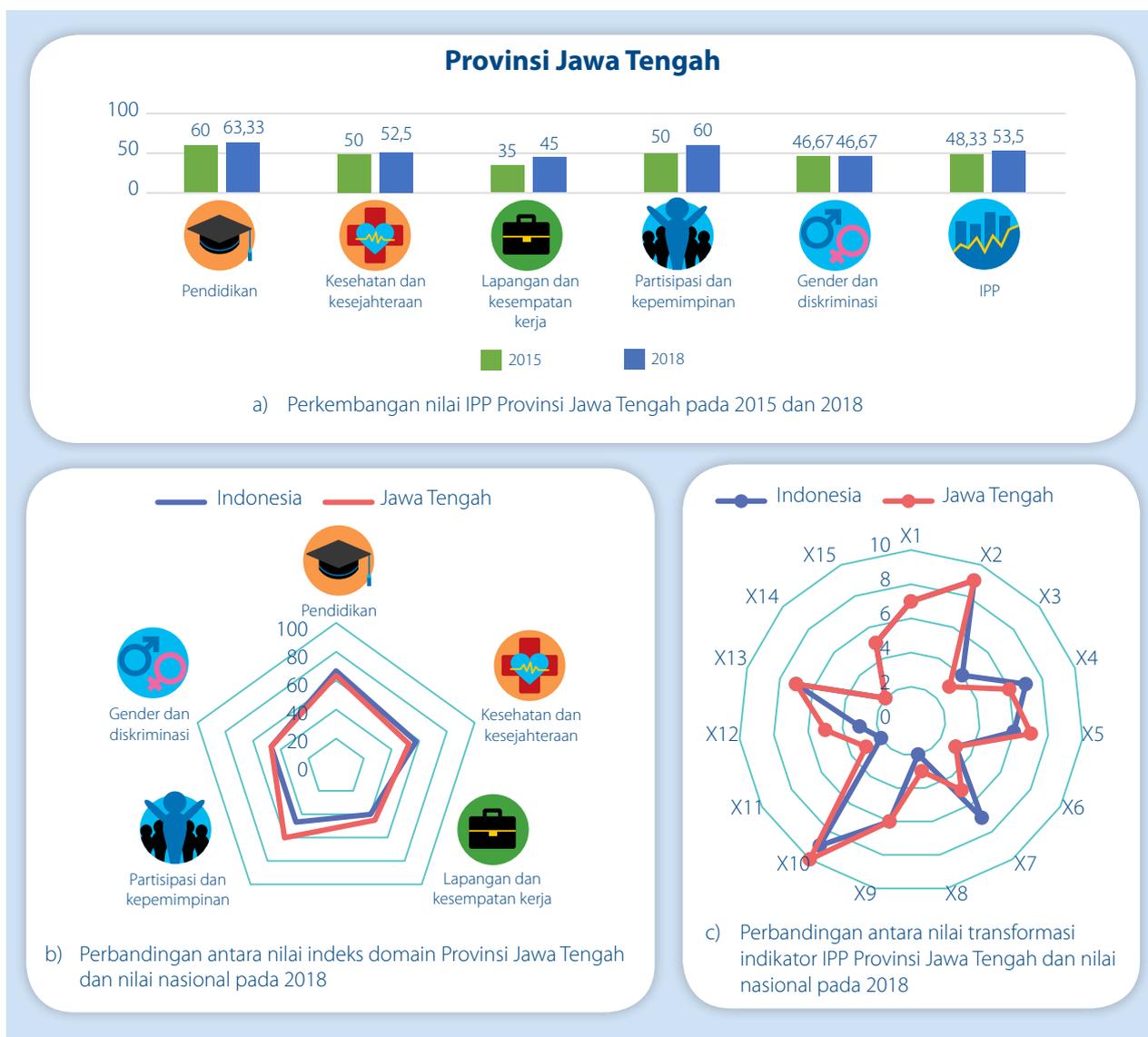
turunnya tingkat pengangguran pemuda, yaitu dari 14% menjadi 12%. Sementara itu, peningkatan nilai indeks domain partisipasi dan kepemimpinan didorong oleh perbaikan pada semua indikator, yakni (i) naiknya angka partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan (90,22%); (ii) bertambahnya proporsi pemuda yang aktif dalam organisasi sebesar 3,40 titik persentase menjadi 9,79%; dan (iii) bertambahnya proporsi pemuda yang memberi saran dalam rapat, dari 7,73% pada 2015 menjadi 10,48% pada 2018. Secara umum, pola capaian Provinsi Jawa Tengah hampir sama

dengan pola capaian nasional, kecuali pada domain partisipasi dan kepemimpinan yang memiliki nilai indeks lebih tinggi.

Sementara itu, nilai indeks domain pendidikan mengalami peningkatan yang kurang signifikan. Rata-rata lama sekolah pemuda meningkat dari 9,82 tahun pada 2015 menjadi 10 tahun pada 2018. APK perguruan tinggi pun meningkat sebesar 2,68 titik persentase, dari 19,28% pada 2015 menjadi 21,96% pada 2018. Perbaikan pada domain kesehatan dan kesejahteraan lebih banyak didorong oleh turunnya angka kesakitan pemuda dari 11% pada 2015

menjadi 8% pada 2018. Nilai indeks domain gender dan diskriminasi juga tidak mengalami peningkatan signifikan.

Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa tantangan dalam pembangunan pemuda yang memerlukan perhatian khusus. Pertama, pada domain pendidikan, provinsi ini perlu meningkatkan APK perguruan tingginya. Meskipun trennya meningkat sejak 2015, APK perguruan tinggi provinsi ini baru mencapai 22% dan menempati peringkat kelima terendah secara nasional pada 2018. Capaian ini juga berada di bawah capaian nasional (30%) dan



Gambar 30. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Jawa Tengah pada 2018

Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

jauh tertinggal dari Provinsi DI Yogyakarta yang menempati posisi tertinggi (70,60%). Tantangan kedua terdapat pada domain kesehatan dan kesejahteraan, yakni angka kesakitan pemuda (8%) yang masih berada di atas angka nasional. Proporsi remaja perempuan hamil pada 2018 yang mencapai 24% menempati posisi kelima tertinggi se-Indonesia dan melebihi angka nasional yang hanya sebesar 16,67%. Tantangan ketiga terdapat pada domain gender dan diskriminasi, yaitu rendahnya proporsi pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi (35,73%); angka ini lebih kecil daripada angka nasional.

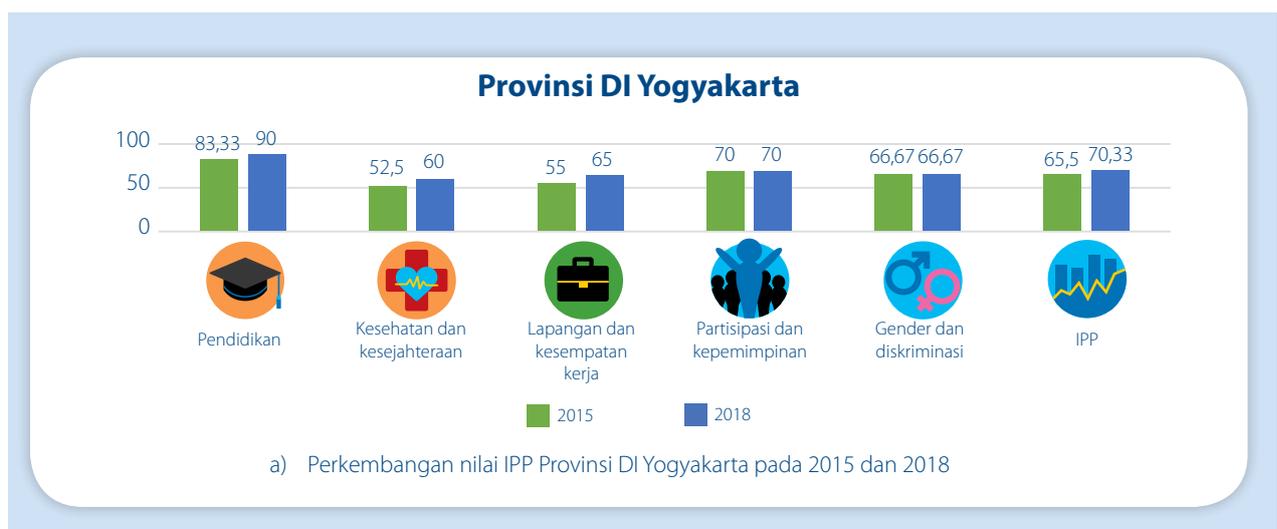
3.14. PROVINSI DI YOGYAKARTA

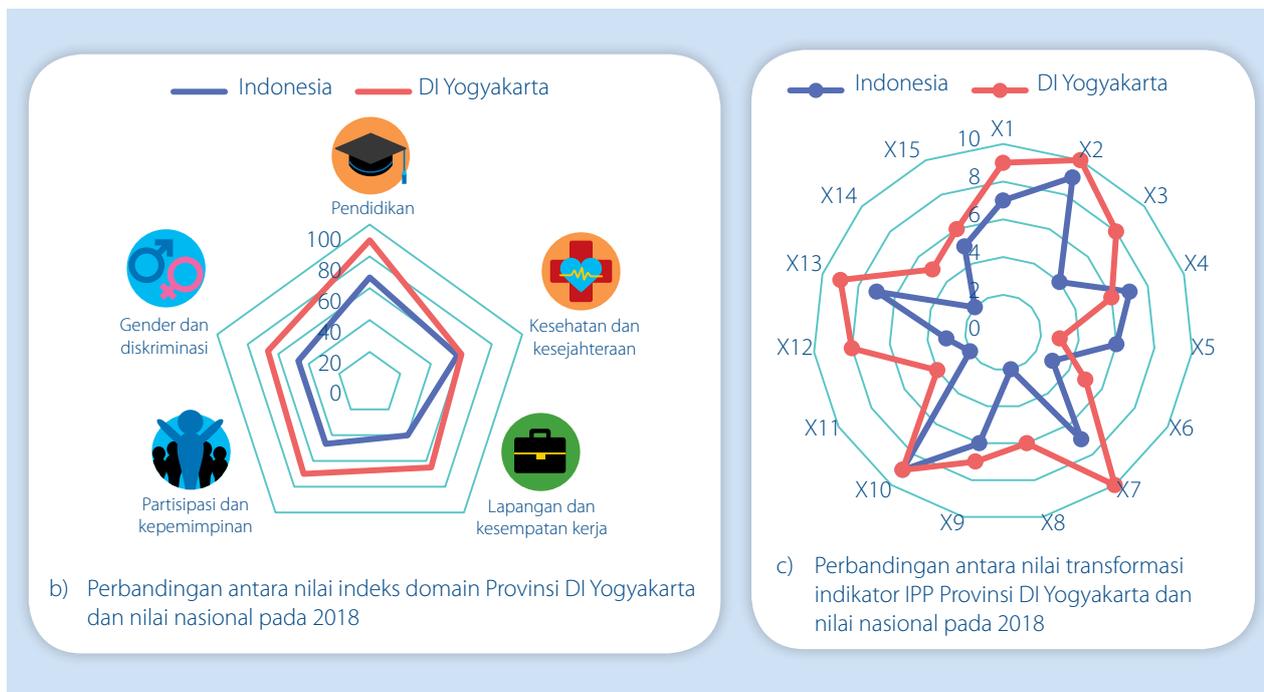
Provinsi DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan capaian pembangunan pemuda terbaik di Indonesia sejak 2015. Nilai IPP provinsi ini meningkat dari 65,50 pada 2015 menjadi 70,33 pada 2018. Sebagai provinsi dengan nilai IPP tertinggi, Provinsi DI Yogyakarta memiliki capaian pada semua domain yang jauh lebih baik daripada capaian nasional. Kemajuan paling besar terjadi pada domain pendidikan. Pada saat angka nasional hanya mencapai 66,67, nilai indeks domain pendidikan Provinsi DI Yogyakarta sudah mencapai 90 yang sekaligus menjadi angka tertinggi se-Indonesia. Begitu pula halnya dengan domain partisipasi

dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi, capaian domain-domain ini menempati peringkat pertama. Provinsi DI Yogyakarta juga memiliki beberapa indikator dengan capaian tertinggi, yakni (i) rata-rata lama sekolah pemuda yang mencapai 12,09 tahun, (ii) APK perguruan tinggi sebesar 70,60%, (iii) proporsi remaja hamil sebesar 0%, (iv) proporsi pemuda yang memberi saran dalam rapat sebesar 19,22%, dan (v) proporsi pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi sebesar 61,15%.

Di antara semua domain, nilai indeks terendah terdapat pada domain kesehatan dan kesejahteraan. Berdasarkan indikator pembentuknya, tantangan terbesar pada 2018 terdapat pada proporsi pemuda korban kejahatan (2,37%) yang merupakan terbesar se-Indonesia. Selain itu, proporsi pemuda yang memiliki keluhan kesehatan (8,83%) berada di atas angka nasional (7,68%).

Provinsi DI Yogyakarta perlu melakukan upaya serius untuk meningkatkan capaian domain kesehatan dan kesejahteraan. Perbaikan capaian domain ini dapat terus mendorong peningkatan nilai IPP Provinsi DI Yogyakarta. Disamping itu, domain lapangan dan kesempatan kerja perlu mendapat perhatian lebih karena sejauh ini masih menjadi domain dengan nilai indeks terendah kedua di antara lima domain pembentuk IPP Provinsi DI Yogyakarta.





Gambar 31. Capaian pembangunan pemuda Provinsi DI Yogyakarta pada 2018

Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

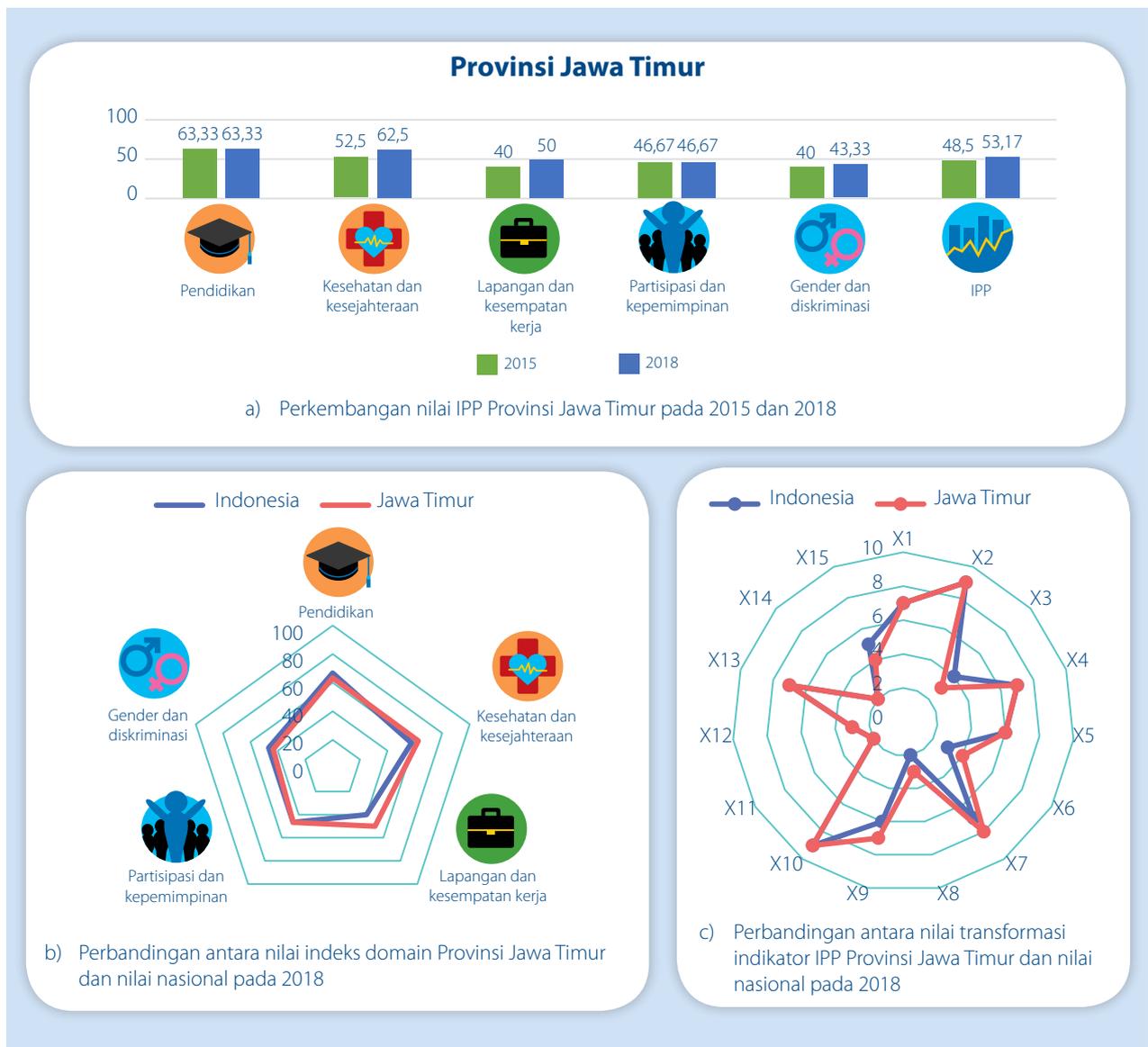
3.15. PROVINSI JAWA TIMUR

Nilai IPP Provinsi Jawa Timur meningkat hampir 5 poin, dari 48,50 pada 2015 menjadi 53,17 pada 2018. Kontributor terbesarnya adalah perbaikan capaian domain kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, serta gender dan diskriminasi.

Perbaikan pada domain kesehatan dan kesejahteraan terjadi seiring dengan menurunnya angka kesakitan pemuda dari 11,09% pada 2015 menjadi 7,70% pada 2018. Perbaikan pada domain lapangan dan kesempatan kerja didorong oleh turunnya tingkat pengangguran pemuda dari 13,27% menjadi 11,13%, serta bertambahnya proporsi pemuda wirausaha kerah putih dari 0,30% menjadi 0,52%. Sementara itu, perbaikan pada domain gender dan diskriminasi

didorong oleh turunnya angka perkawinan usia anak dari 14,68% pada 2015 menjadi 12,71% pada 2018. Walaupun demikian, angka ini masih relatif tinggi dan berada di atas angka nasional (11,21%).

Jika dibandingkan dengan nilai indeks nasional, Provinsi Jawa Timur memiliki nilai yang lebih baik pada domain kesehatan dan kesejahteraan, serta lapangan dan kesempatan kerja. Namun, capaian domain pendidikan serta gender dan diskriminasi berada di bawah capaian nasional. Kedua domain inilah yang menjadi tantangan terbesar pembangunan pemuda di Provinsi Jawa Timur. Tantangan utama pada domain pendidikan adalah meningkatkan capaian indikator APK perguruan tinggi, sedangkan tantangan pada domain gender dan diskriminasi adalah meningkatkan capaian semua indikatornya.



Gambar 32. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Jawa Timur pada 2018

Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

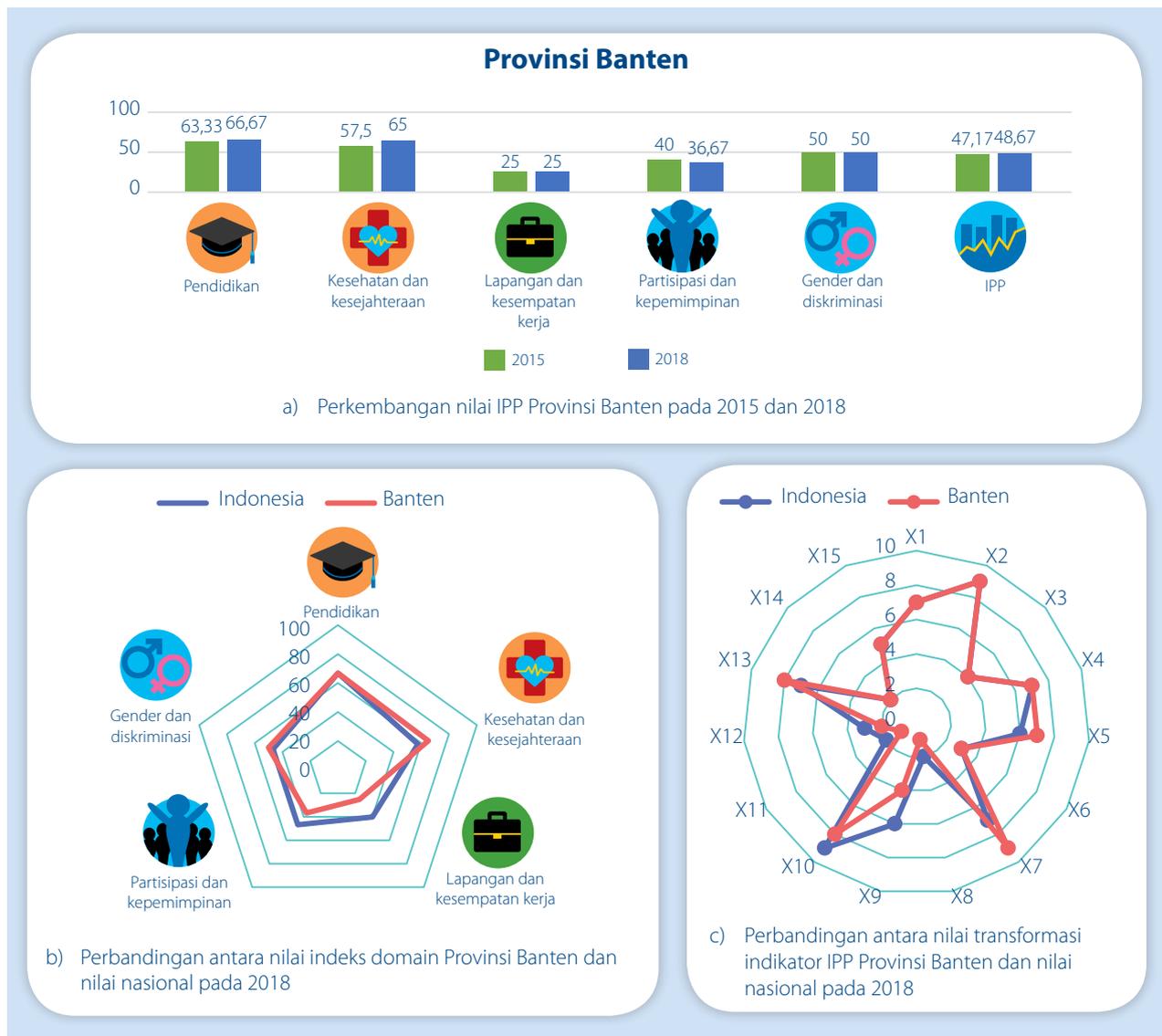
3.16. PROVINSI BANTEN

Nilai IPP Provinsi Banten tidak mengalami peningkatan signifikan, yaitu hanya sebesar 1,50 poin dari 47,17 pada 2015 menjadi 48,67 pada 2018. Capaian domain pendidikan serta kesehatan dan kesejahteraan meningkat. Namun, capaian domain lapangan dan kesempatan kerja serta gender dan diskriminasi tidak berubah, sementara capaian domain partisipasi dan kepemimpinan justru mengalami penurunan. Kondisi tersebut menempatkan nilai IPP Provinsi Banten pada peringkat kelima terendah se-Indonesia.

Perbaikan pada domain pendidikan didorong oleh indikator APK perguruan tinggi yang naik secara signifikan dari 23,60% pada 2015 menjadi 33,40% pada 2018. Perbaikan pada domain kesehatan dan kesejahteraan didorong oleh adanya perbaikan pada semua indikatornya, terutama penurunan angka kehamilan remaja dari 12,25% menjadi 8,11%. Jika dibandingkan dengan nilai indeks nasional, Provinsi Banten tertinggal pada domain lapangan dan kesempatan kerja serta partisipasi dan kepemimpinan. Rendahnya nilai indeks dua domain ini menempatkan Provinsi Banten pada peringkat kedua terendah secara nasional.

Provinsi Banten memiliki tantangan pembangunan pemuda pada semua domain. Tantangan pada domain lapangan dan kesempatan kerja adalah tingginya tingkat pengangguran pemuda yang mencapai 19,39%; angka ini merupakan angka tertinggi kedua se-Indonesia. Sementara itu, proporsi pemuda wirausaha kerah putih (0,18%) berada pada peringkat keenam terendah secara nasional. Tantangan pada domain partisipasi dan kepemimpinan mencakup (i) angka partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang turun dari 80,16% menjadi 74,08%, (ii) tingkat keaktifan pemuda dalam organisasi (2,92%) yang menempati posisi kedua terendah di

antara semua provinsi, dan (iii) proporsi pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat (4%) yang juga menempati posisi terendah keenam secara nasional. Tantangan pada domain kesehatan dan kesejahteraan adalah angka kesakitan pemuda (7,84%) dan proporsi pemuda perokok (28,47%) yang masih berada di atas angka nasional. Tantangan pada domain pendidikan adalah meningkatkan capaian indikator rata-rata lama sekolah dan APK sekolah menengah. Sementara itu, tantangan pada domain gender dan diskriminasi adalah meningkatkan capaian indikator pemuda perempuan berusia 16–24 yang menempuh pendidikan menengah dan tinggi.



Gambar 33. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Banten pada 2018

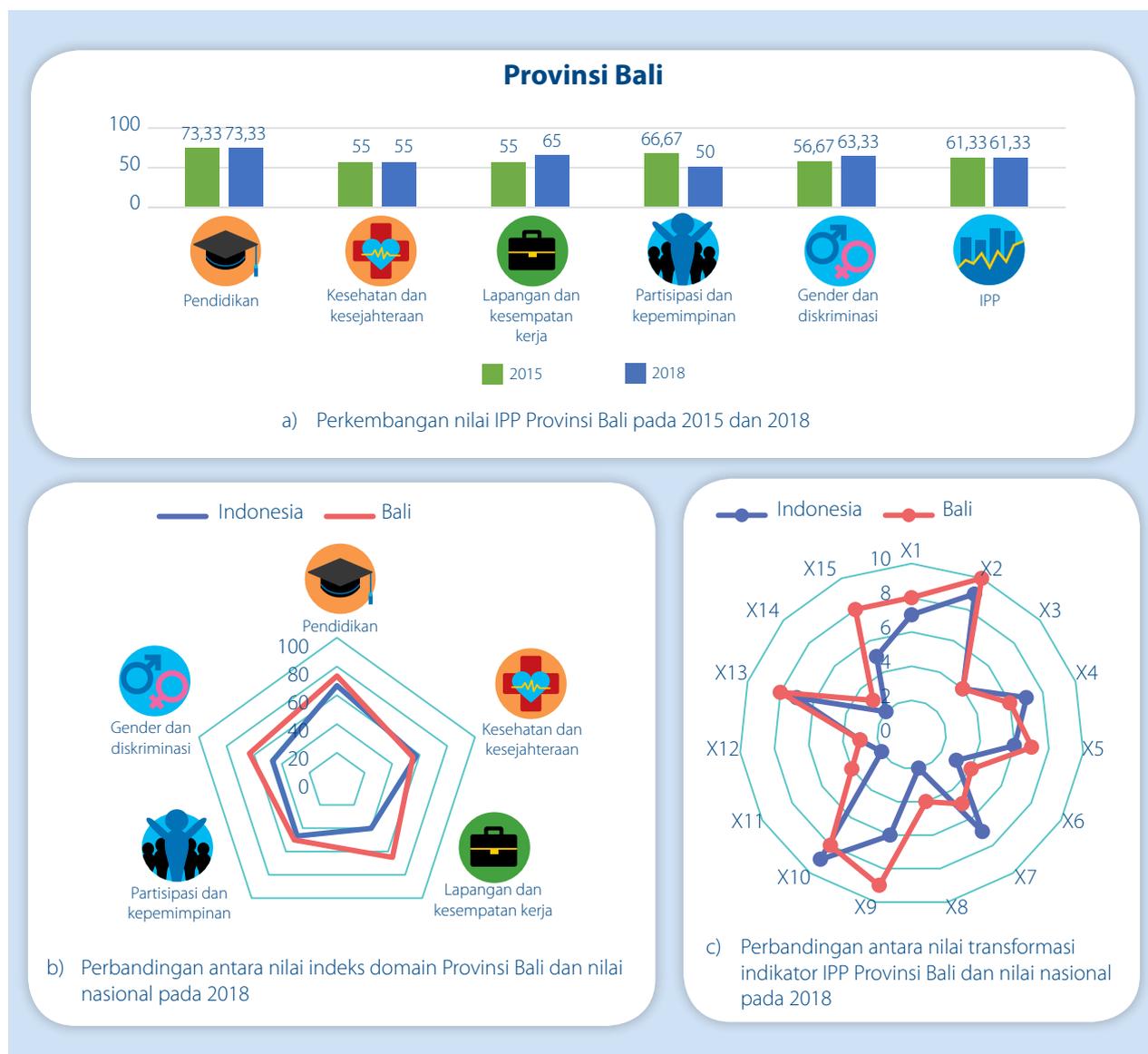
Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

3.17. PROVINSI BALI

Sejak 2015, Provinsi Bali berhasil mempertahankan posisinya sebagai provinsi dengan nilai IPP tertinggi kedua se-Indonesia meski nilai IPP antara 2015 dan 2018 tidak mengalami perubahan. Stagnasi ini terjadi karena, di satu sisi, nilai indeks domain partisipasi dan kepemimpinan turun secara signifikan dan, di sisi lain, nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja serta gender dan diskriminasi meningkat. Sementara itu, semua indikator pembentuk domain pendidikan tidak mengalami perubahan, kecuali APK perguruan

tinggi yang meningkat dari 32,06% pada 2015 menjadi 36,40% pada 2018.

Jika dibandingkan dengan nilai indeks nasional, nilai indeks Provinsi Bali pada sebagian besar domain jauh lebih baik. Secara nasional, Provinsi Bali menempati peringkat kedua tertinggi pada domain lapangan dan kesempatan kerja serta gender dan diskriminasi. Pada domain lapangan dan kesempatan kerja, tingkat pengangguran pemuda di Provinsi Bali merupakan yang terendah di antara semua provinsi, yakni hanya 4,05%; angka ini jauh di bawah angka nasional (13,47%). Untuk domain gender dan



Gambar 34. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Bali pada 2018

Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

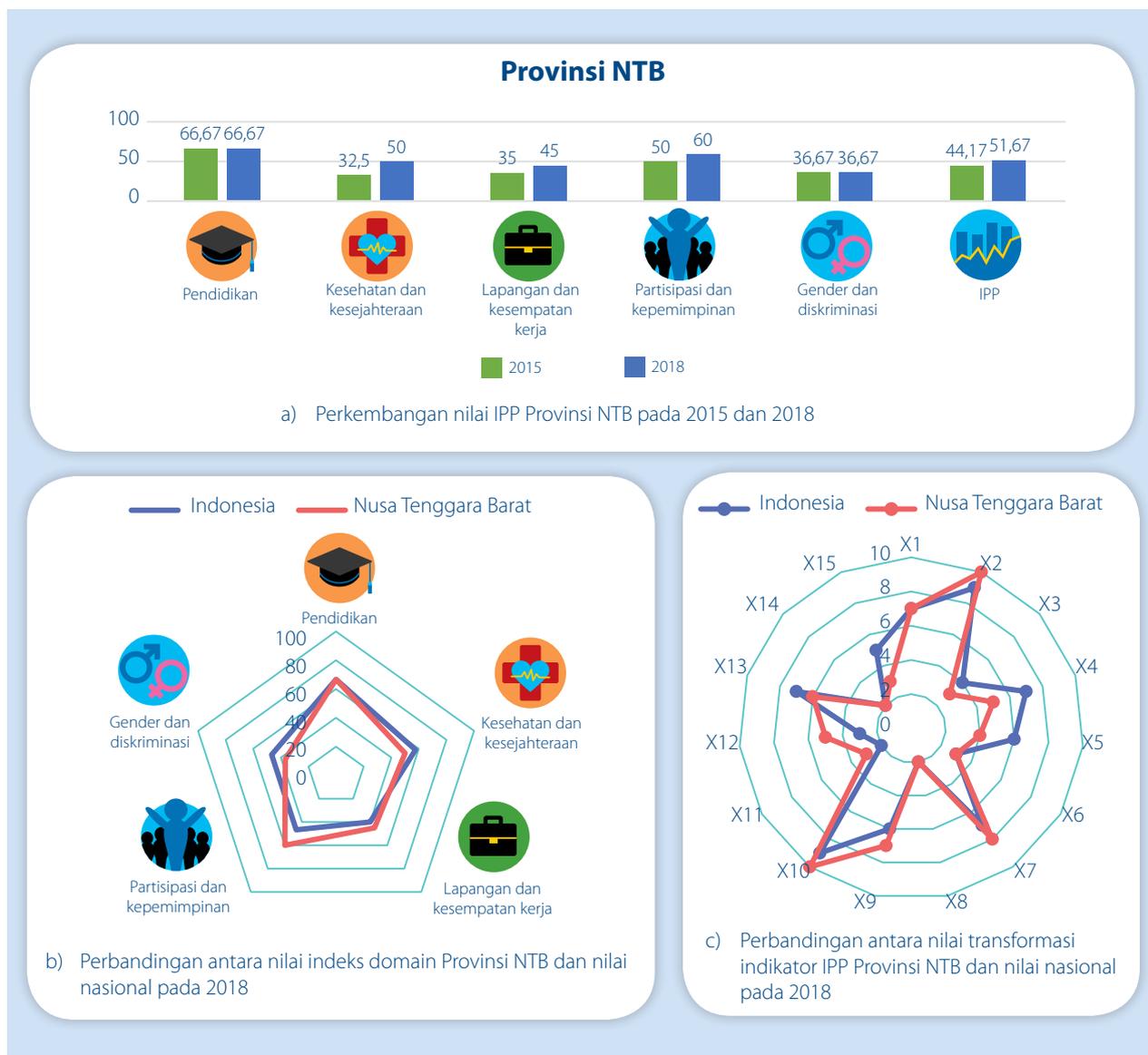
diskriminasi, pada 2018 Provinsi Bali merupakan provinsi dengan proporsi perempuan yang bekerja di sektor formal terbesar, yaitu 44,45%.

Walaupun demikian, Provinsi Bali menghadapi beberapa tantangan pembangunan pemuda yang perlu ditangani secara serius. Pertama, angka kesakitan pemuda (8,11%) masih berada di atas angka nasional (7,68%). Kedua, proporsi remaja berusia 15–18 tahun yang pernah menikah dan sedang hamil (23,40%) relatif besar dan bahkan melebihi angka nasional (16,67%). Ketiga, meski proporsi pemuda yang berpartisipasi dalam

kegiatan sosial kemasyarakatan cukup besar, proporsi pemuda yang aktif dalam organisasi berkurang.

3.18. PROVINSI NTB

Nilai IPP Provinsi NTB meningkat sebesar 7,50 poin atau 16,98% dari 44,17 pada 2015 menjadi 51,67 pada 2018. Dengan peningkatan ini, peringkat Provinsi NTB naik secara signifikan dari peringkat ke-31 menjadi ke-16. Perubahan tersebut didorong oleh meningkatnya nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan,



Gambar 35. Capaian pembangunan pemuda Provinsi NTB pada 2018

Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

lapangan dan kesempatan kerja, serta partisipasi dan kepemimpinan. Sementara itu, nilai indeks domain pendidikan serta gender dan diskriminasi Provinsi NTB tidak berubah.

Peningkatan signifikan pada nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan didorong oleh berkurangnya proporsi remaja perempuan yang menikah dan sedang hamil dari 30,17% pada 2015 menjadi 10,90% pada 2018. Peningkatan nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja didorong oleh indikator tingkat pengangguran pemuda yang turun dari 13,55% pada 2015 menjadi 8,58% pada 2018. Sementara itu, peningkatan nilai indeks domain partisipasi dan kepemimpinan didorong oleh peningkatan capaian semua indikator antara 2015 dan 2018, yakni (i) meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dari 88,77% menjadi 92,85%, (ii) meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi dari 5,02% menjadi 11,21%, dan (iii) bertambahnya proporsi pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat dari 8,76% menjadi 11,07%.

Jika dibandingkan dengan angka nasional, Provinsi NTB unggul pada domain partisipasi dan kepemimpinan serta lapangan dan kesempatan kerja. Sebaliknya, capaian domain gender dan diskriminasi serta kesehatan dan kesejahteraan lebih rendah daripada capaian nasional. Jika nilai indeks antardomain dibandingkan, domain pendidikan merupakan domain dengan capaian paling tinggi, sementara domain gender dan diskriminasi relatif tertinggal.

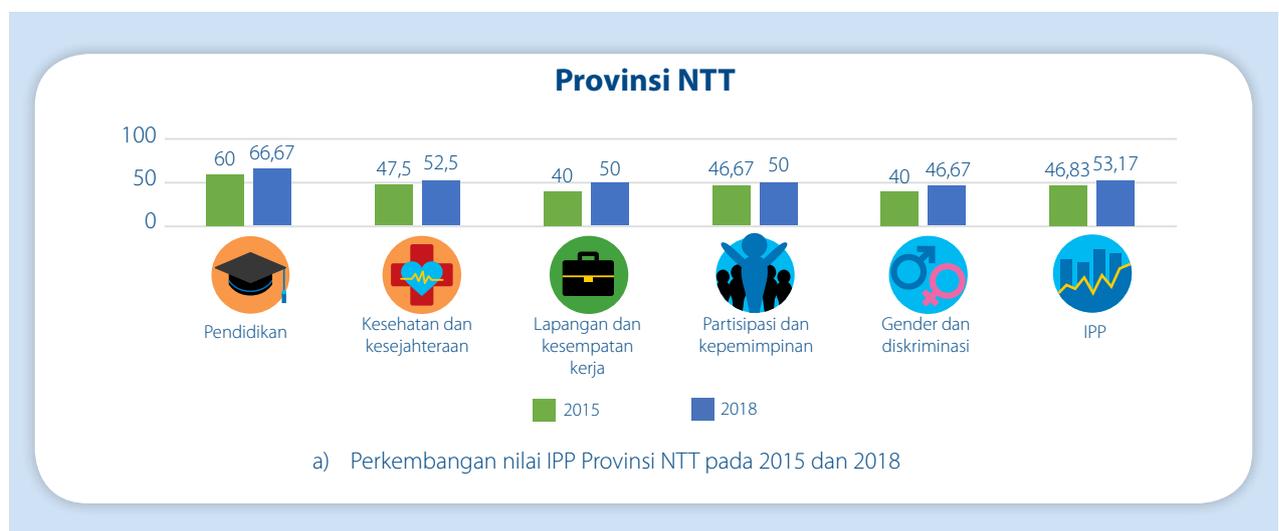
Tantangan terbesar yang dihadapi Provinsi NTB ada pada domain kesehatan dan kesejahteraan, serta gender dan diskriminasi. Pada domain kesehatan dan

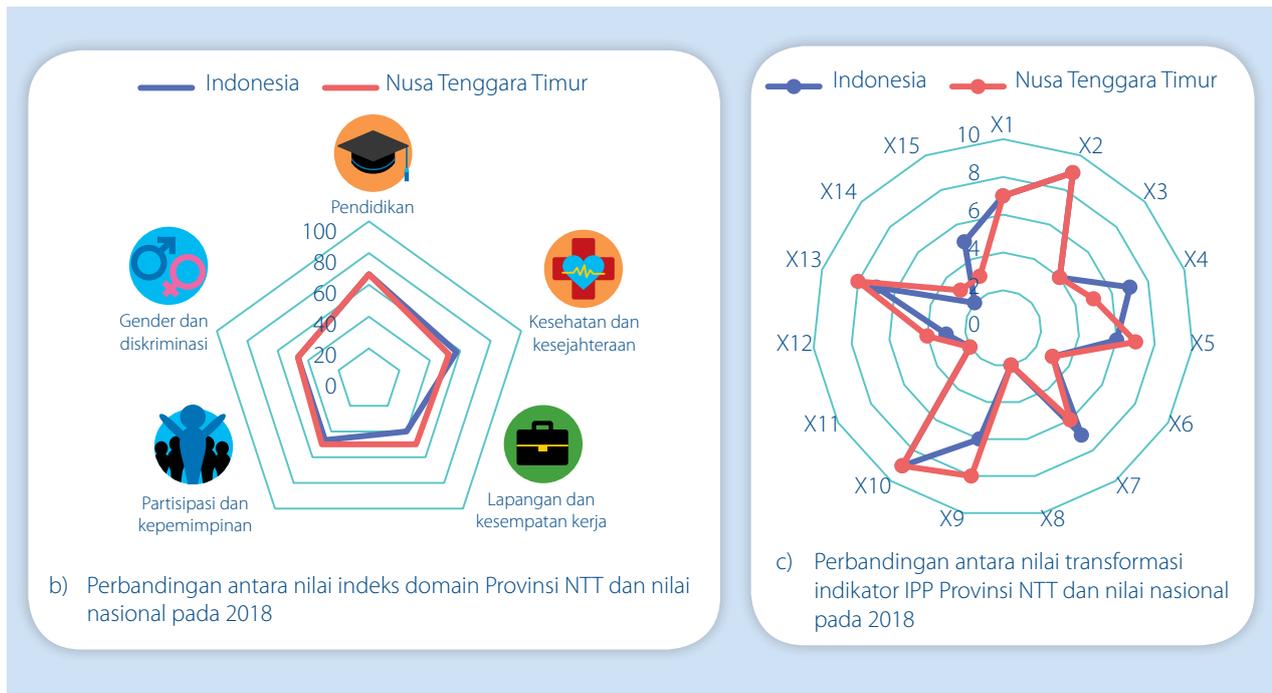
kesejahteraan, tantangan pertamanya adalah proporsi pemuda yang mengalami keluhan kesehatan (11,02%) yang besar dan melebihi angka nasional (7,68%). Tantangan keduanya adalah proporsi pemuda perokok (28,29%) yang besar dan juga melebihi angka nasional (26,34%). Pada domain gender dan diskriminasi, tantangan pertamanya adalah angka perkawinan usia anak (15,48%) yang tinggi dan melebihi angka nasional (11,21%). Tantangan keduanya adalah proporsi perempuan yang bekerja di sektor formal (17,06%) yang rendah dan berada cukup jauh di bawah angka nasional (24,13%). Pemerintah Daerah NTB harus memfokuskan upaya perbaikan pembangunan pemudanya pada indikator-indikator yang masih tertinggal tersebut.

3.19. PROVINSI NTT

Nilai IPP Provinsi NTT juga naik secara signifikan dari 46,83 pada 2015 menjadi 53,17 pada 2018. Peningkatan sebesar 6,30 poin ini merupakan peningkatan terbesar keempat secara nasional. Hal tersebut didorong oleh perbaikan capaian pada semua domain.

Jika dibandingkan dengan angka nasional, Provinsi NTT memiliki nilai indeks yang lebih unggul pada domain lapangan dan kesempatan kerja. Sementara itu, nilai indeks domain pendidikan, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi tidak berbeda jauh dengan angka nasional. Sebaliknya, nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan masih lebih rendah daripada angka nasional. Jika nilai indeks antardomain dibandingkan, domain pendidikan merupakan domain dengan capaian paling baik, sedangkan domain gender dan diskriminasi relatif tertinggal.





Gambar 36. Capaian pembangunan pemuda Provinsi NTT pada 2018

Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

Pemerintah Provinsi NTT perlu terus mengupayakan perbaikan pada pembangunan pemudanya karena provinsi ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, meski trennya membaik sejak 2015, persentase pemuda dengan keluhan kesehatan masih tinggi (11,88%) dan menempati peringkat kedua tertinggi; angka ini bahkan melebihi angka nasional (7,68%). Kedua, meski trennya juga membaik, proporsi remaja yang sedang hamil masih besar (19,75%). Ketiga, proporsi perempuan yang bekerja di sektor formal masih kecil (14,14%); meski trennya membaik, capaian ini menempati posisi ketiga terendah secara nasional. Keempat, hingga 2018, capaian semua indikator pada domain pendidikan masih berada di bawah capaian nasional. Perbaikan pada indikator-indikator tersebut akan meningkatkan nilai IPP Provinsi NTT secara signifikan.

3.20. PROVINSI KALIMANTAN BARAT

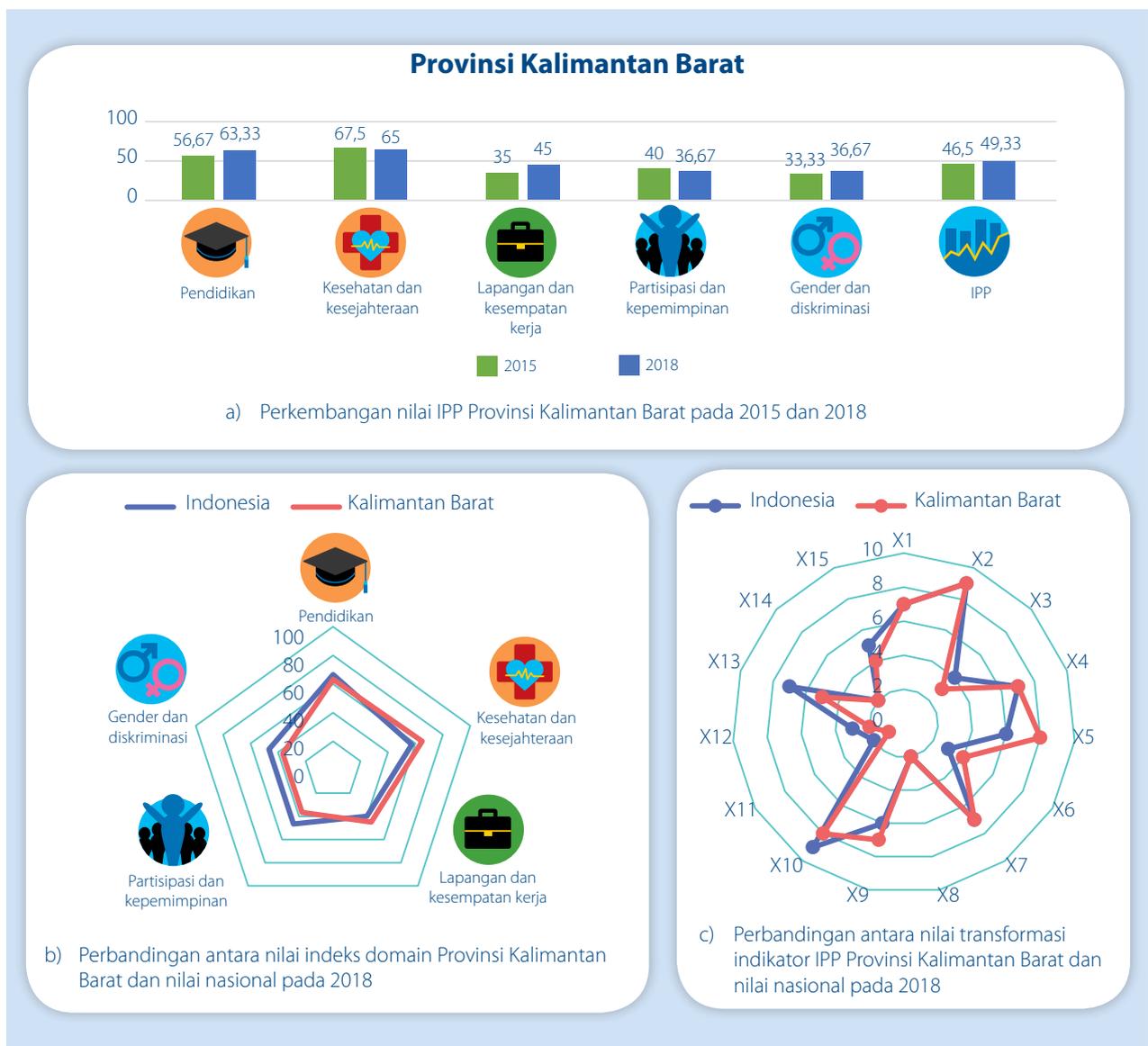
Nilai IPP Provinsi Kalimantan Barat naik hampir sebesar 3 poin dari 46,50 pada 2015 menjadi 49,33 pada 2018. Kenaikan nilai indeks ini didorong oleh peningkatan capaian beberapa domain. Pada domain pendidikan, rata-rata lama sekolah meningkat dari 8,87 tahun

menjadi 9,44 tahun dan APK perguruan tinggi naik dari 19,24% menjadi 22,68%. Pada domain lapangan dan kesempatan kerja, proporsi pemuda wirausaha kerah putih meningkat dari 0,12% menjadi 0,25% dan tingkat pengangguran pemuda turun dari 11,99% menjadi 10,60%. Pada domain gender dan diskriminasi, proporsi perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi naik dari 33,02% menjadi 34,44%. Proporsi perempuan yang bekerja di sektor formal juga naik dari 17,66% menjadi 18,47%.

Sebaliknya, terjadi penurunan nilai indeks pada domain kesehatan dan kesejahteraan yang disebabkan bertambahnya proporsi remaja hamil dari 4,78% menjadi 14,47%. Penurunan serupa juga terjadi pada domain partisipasi dan kepemimpinan akibat berkurangnya proporsi pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat dari 7,04% menjadi 4,79%. Jika dibandingkan dengan nilai indeks nasional, Provinsi Kalimantan Barat memiliki capaian yang lebih baik pada domain lapangan dan kesempatan kerja, serta kesehatan dan kesejahteraan. Namun, provinsi ini masih tertinggal pada tiga domain lainnya.

Tantangan pertama yang dihadapi Provinsi Kalimantan Barat dalam pembangunan pemudanya terdapat pada domain gender dan diskriminasi, yakni (i) angka perkawinan usia anak yang tinggi (17,46%) dan melebihi angka nasional (11,21%), (ii) proporsi pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi (34,44%) yang lebih kecil daripada angka nasional (38,67%), serta (iii) proporsi perempuan yang bekerja di sektor formal (18,47%) yang lebih kecil daripada angka nasional (24,13%). Tantangan keduanya adalah meningkatkan capaian

semua indikator pada domain partisipasi dan kepemimpinan; salah satunya adalah partisipasi pemuda dalam organisasi (3,08%) yang angkanya menempati posisi ketiga terendah secara nasional. Tantangan ketiga yang dihadapi provinsi ini adalah memperbaiki capaian indikator pada domain pendidikan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu memfokuskan perhatiannya pada upaya memperbaiki pembangunan pemudanya pada indikator-indikator tersebut agar nilai IPP provinsi ini dapat meningkat secara signifikan.



Gambar 37. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Kalimantan Barat pada 2018

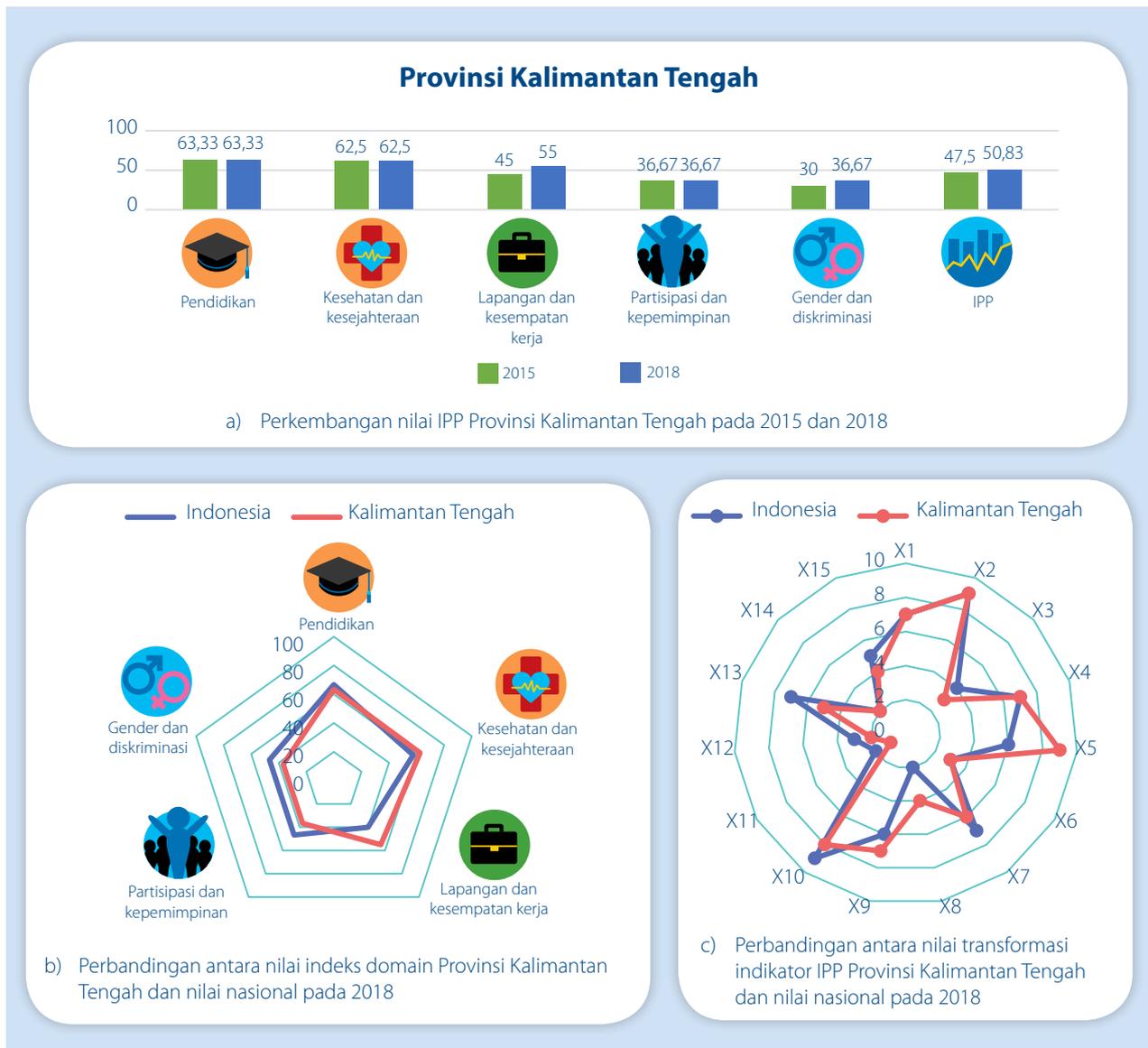
Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

3.21. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nilai IPP Provinsi Kalimantan Tengah meningkat sebesar 3,30 poin, dari 47,50 pada 2015 menjadi 50,83 pada 2018. Peningkatan capaian ini didorong oleh meningkatnya nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja, serta gender dan diskriminasi. Peningkatan capaian pada domain lapangan dan kesempatan kerja didorong oleh bertambahnya proporsi pemuda wirausaha kerah putih dari 0,21% menjadi 0,64% dan turunnya tingkat pengangguran

pemuda dari 9,72% menjadi 9,01%. Sementara itu, peningkatan capaian pada domain gender dan diskriminasi terjadi karena (i) turunnya tingkat perkawinan usia anak dari 21,90% menjadi 19,13%, (ii) bertambahnya proporsi perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi dari 30,76% menjadi 34,43%, serta (iii) bertambahnya proporsi perempuan yang bekerja di sektor formal dari 21,66% menjadi 23,64%.

Nilai indeks Provinsi Kalimantan Tengah pada domain lapangan dan kesempatan kerja, serta kesehatan



Gambar 38. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Kalimantan Tengah pada 2018

Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

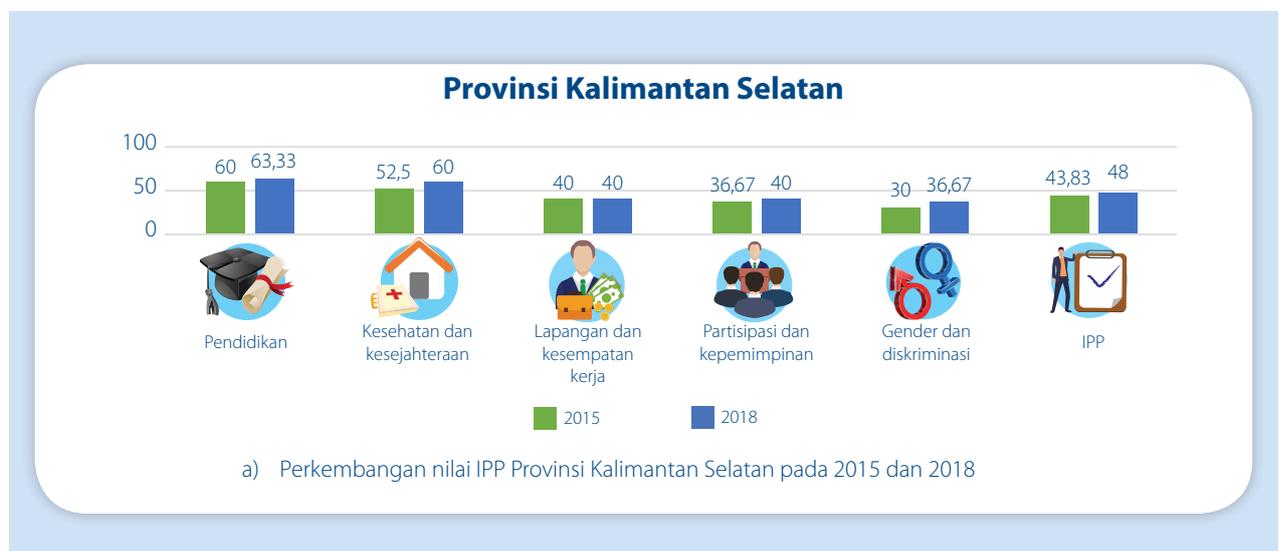
dan kesejahteraan lebih baik daripada nilai indeks nasional. Sebaliknya, provinsi ini masih tertinggal pada domain pendidikan, gender dan diskriminasi, serta partisipasi dan kepemimpinan.

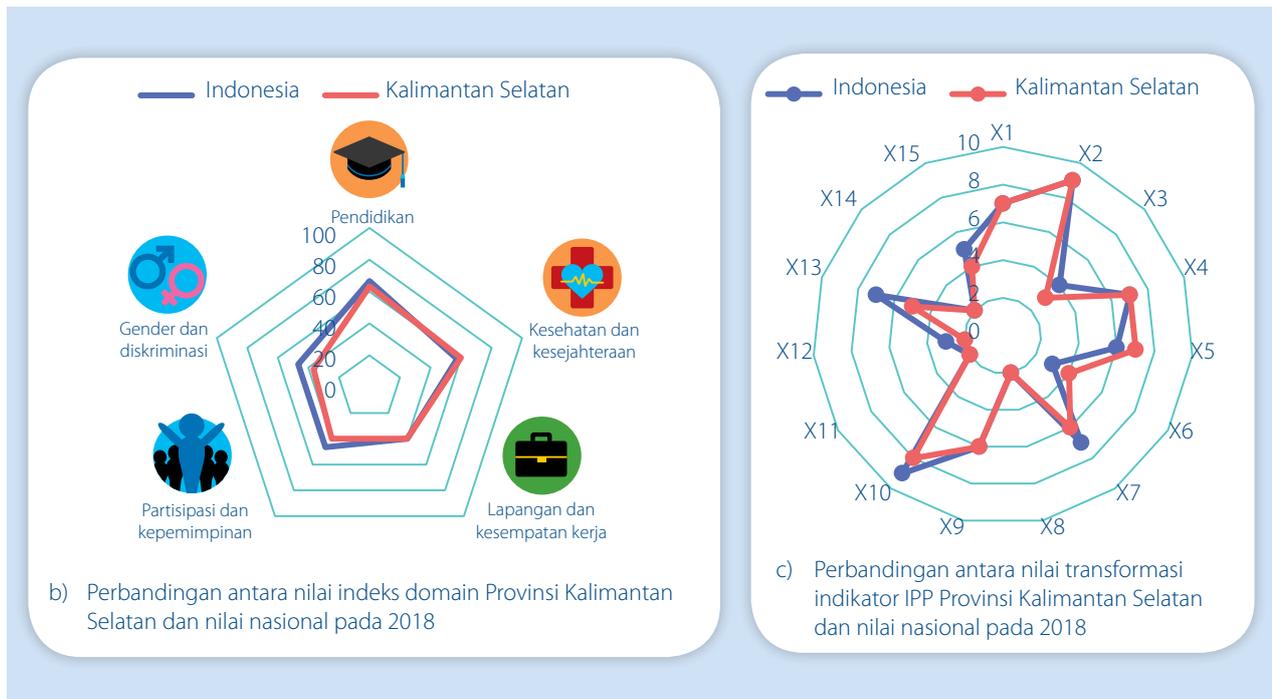
Provinsi Kalimantan Tengah menghadapi beberapa tantangan dalam pembangunan pemudanya pada hampir semua domain. Oleh karena itu, provinsi ini perlu memberikan perhatian pada semua indikator pembentuk domain-domain tersebut. Tantangan pada domain partisipasi dan kepemimpinan adalah (i) proporsi pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan yang lebih kecil daripada angka nasional, (ii) proporsi pemuda yang aktif dalam organisasi (4,33%) yang lebih kecil daripada angka nasional (6,36%), dan (iii) proporsi pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat (4,72%) yang juga masih lebih kecil daripada angka nasional (6,72%). Tantangan pada domain gender dan diskriminasi adalah angka perkawinan usia anak yang masih sangat tinggi (19,13%); meski trennya membaik, angka perkawinan usia anak di Provinsi Kalimantan Tengah menempati posisi kedua tertinggi setelah Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, proporsi pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi serta proporsi pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal masih berada di bawah angka nasional. Tantangan pada domain pendidikan adalah capaian semua indikatornya yang lebih rendah daripada capaian nasional. Sementara itu, tantangan pada domain kesehatan dan kesejahteraan adalah tingginya angka remaja perempuan berusia 15–18 tahun yang sedang hamil, yakni 22,29%. Angka ini jauh lebih tinggi daripada angka nasional (16,67%).

3.22. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nilai IPP Provinsi Kalimantan Selatan meningkat sebesar 4,17 poin dari 43,83 pada 2015 menjadi 48 pada 2018. Meskipun demikian, nilai IPP Kalimantan Selatan masih cukup rendah dan menempati posisi ketiga terendah setelah Provinsi Papua dan Provinsi Jawa Barat pada 2018. Semua domain mengalami sedikit peningkatan nilai, kecuali domain lapangan dan kesempatan kerja yang nilainya mengalami stagnasi. Meningkatnya nilai domain pendidikan didorong oleh naiknya rata-rata lama sekolah menjadi 10,18 tahun. Meningkatnya nilai domain kesehatan dan kesejahteraan dipengaruhi oleh berkurangnya angka keluhan kesehatan pemuda menjadi 6,98%. Penyumbang pada peningkatan nilai domain partisipasi dan kepemimpinan adalah naiknya angka partisipasi pemuda dalam organisasi menjadi 5,02%. Sementara itu, meningkatnya nilai domain gender dan diskriminasi disebabkan oleh turunnya angka perkawinan usia anak menjadi 17,63%. Jika dibandingkan dengan nilai indeks nasional, nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja di provinsi ini sama, nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan lebih tinggi, sedangkan nilai indeks tiga domain yang lain lebih rendah.

Provinsi Kalimantan Selatan menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan pemudanya. Tantangan pertama ada pada domain gender dan diskriminasi yang mencakup semua indikatornya. Salah satunya adalah angka perkawinan usia anak yang masih sangat tinggi (17,63%), bahkan merupakan angka tertinggi keempat secara nasional





Gambar 39. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Kalimantan Selatan pada 2018

Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

meskipun trennya membaik sejak 2015. Tantangan kedua terdapat pada domain partisipasi dan kepemimpinan. Secara umum, partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan memang sudah cukup tinggi. Namun, tingkat partisipasi dalam organisasi sosial dan memberikan saran/pendapat dalam rapat masih rendah dan berada di bawah angka nasional. Tantangan ketiga terdapat pada domain kesehatan dan kesejahteraan. Walaupun capaian domain ini secara rata-rata membaik, ada peningkatan angka remaja perempuan yang hamil dari 18,98% menjadi 21,78%. Tantangan terakhir terdapat pada domain pendidikan; nilai semua indikator pada domain ini masih berada di bawah angka nasional. Dengan berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu memberikan perhatian penuh pada upaya memperbaiki semua aspek pembangunan pemudanya.

3.23. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nilai IPP Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan sedikit dari 52,17 pada 2015 menjadi 54,83 pada 2018. Semua domain mengalami

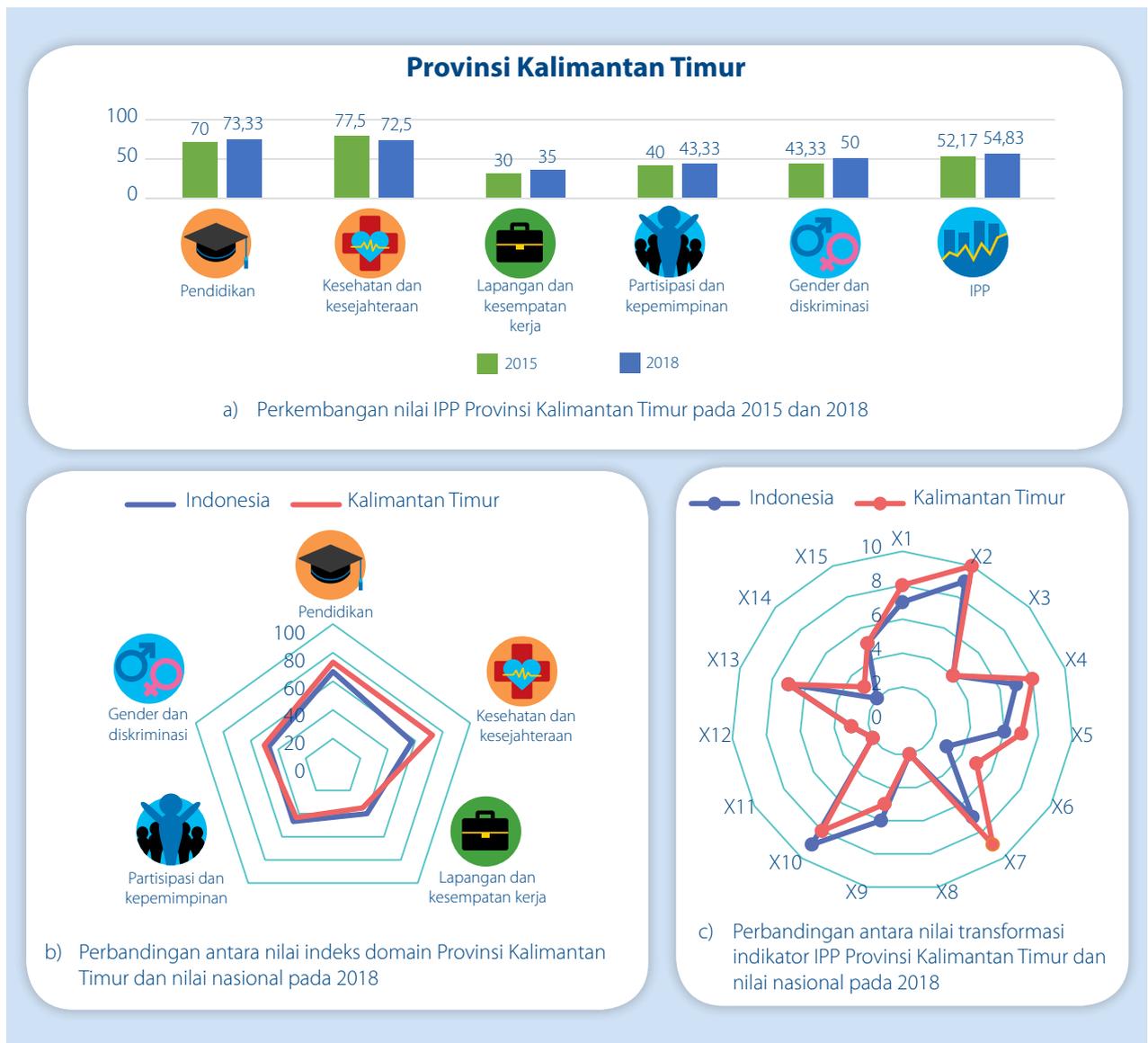
peningkatan capaian, kecuali domain kesehatan dan kesejahteraan. Meskipun demikian, capaian domain kesehatan dan kesejahteraan Provinsi Kalimantan Timur tetap paling tinggi di antara ke-34 provinsi. Hal yang perlu diperhatikan adalah penurunan nilai indeks domain ini yang disebabkan oleh naiknya angka kehamilan remaja dari di bawah 1% menjadi 8%.

Jika dibandingkan dengan nilai indeks nasional, nilai indeks Provinsi Kalimantan Timur relatif lebih tinggi pada domain pendidikan serta kesehatan dan kesejahteraan, tetapi sedikit lebih rendah pada domain lapangan dan kesempatan kerja. Pada domain pendidikan, capaian APK sekolah menengah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebesar 94,35% pada 2018, menempati peringkat kedua tertinggi secara nasional. Begitu pula halnya dengan APK perguruan tinggi (35,64%), nilai indikator ini berada di atas angka nasional (30,19%). Pada domain kesehatan dan kesejahteraan, angka pemuda korban kejahatan (0,93%) dan angka kehamilan remaja (8%) relatif rendah. Bahkan, angka kehamilan remaja Provinsi Kalimantan Timur menempati peringkat keempat terendah secara nasional. Namun, meski angka pemuda korban

kejahatan dan kehamilan remaja rendah, tren kedua indikator tersebut meningkat sehingga keduanya menjadi tantangan bagi provinsi ini.

Tantangan yang lain terdapat pada domain lapangan dan kesempatan kerja. Provinsi Kalimantan Timur perlu memberikan perhatian khusus pada domain ini karena nilai indeksnya paling rendah di antara semua domain. Salah satu tantangan pada domain ini adalah tingkat pengangguran pemuda yang relatif tinggi (15,21%). Meskipun trennya menurun, tingkat pengangguran pemuda di provinsi ini masih lebih

tinggi daripada angka nasional (13,47%). Tantangan berikutnya terdapat pada domain partisipasi dan kepemimpinan, yakni turunnya tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dari 77,25% menjadi 70,55%. Penurunan ini menyebabkan Provinsi Kalimantan Timur berada pada peringkat kelima terendah untuk indikator partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Sementara itu, tantangan pada domain gender dan diskriminasi adalah angka perkawinan usia anak yang masih cukup tinggi (11,54%) dan sedikit lebih tinggi daripada angka nasional.



Gambar 40. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Kalimantan Timur pada 2018

Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirasaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

3.24. PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pada 2018, nilai IPP Provinsi Kalimantan Utara berada pada peringkat ke-3 dari 34 provinsi di Indonesia. Nilai IPP provinsi ini meningkat dari 50,83 pada 2015 menjadi 57 pada 2018. Peningkatan signifikan terjadi pada domain lapangan dan kesempatan kerja, pendidikan, serta gender dan diskriminasi.

Meningkatnya nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja menjadikan Provinsi Kalimantan Utara provinsi dengan nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja tertinggi se-Indonesia. Nilai ini juga paling tinggi di antara semua domain di Provinsi Kalimantan Utara. Peningkatan capaian tersebut disebabkan oleh turunnya tingkat pengangguran pemuda dari 12,34% menjadi 8,89%, serta bertambahnya proporsi pemuda wirausaha kerah putih dari 0,38% menjadi 1,41% dalam periode 2015–2018. Sementara itu, peningkatan nilai indeks domain pendidikan didorong oleh kenaikan (i) rata-rata lama sekolah dari 9,95 tahun menjadi 10,86 tahun, (ii) APK sekolah menengah dari 92,92% menjadi 96%, dan (iii) APK perguruan tinggi dari 18,20% menjadi 21,58%. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa, meskipun trennya membaik, APK perguruan tinggi di Provinsi Kalimantan Utara masih berada di bawah angka nasional (30,19%).

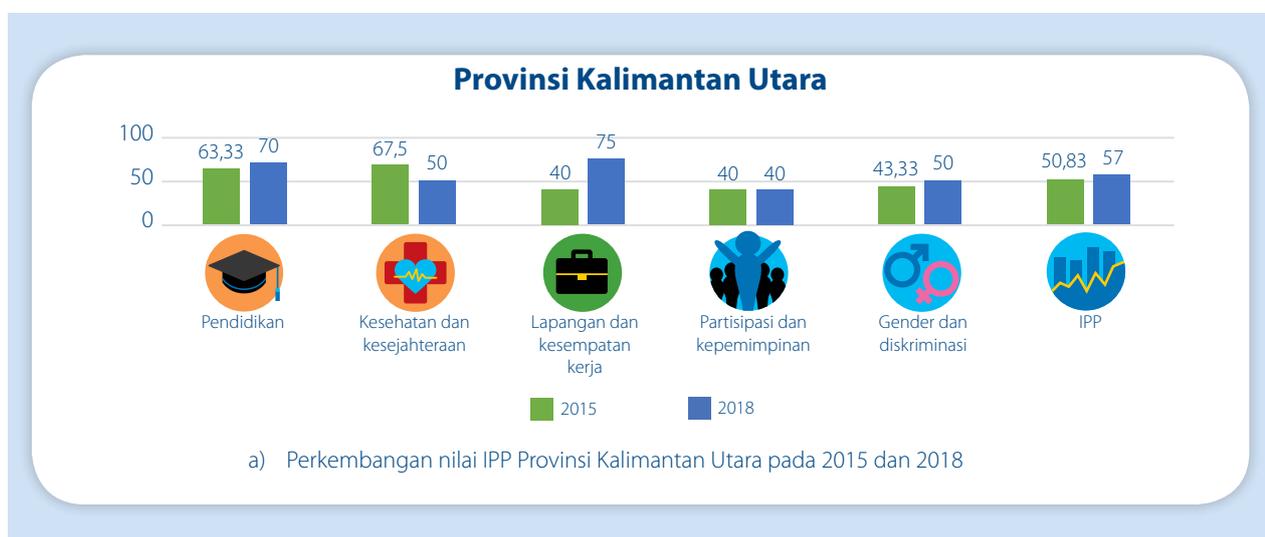
Sementara itu, meningkatnya nilai indeks domain gender dan diskriminasi didorong oleh peningkatan capaian semua indikatornya. Pertama, proporsi pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi meningkat dari 34,83% menjadi 40,26%. Kedua, proporsi pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal meningkat

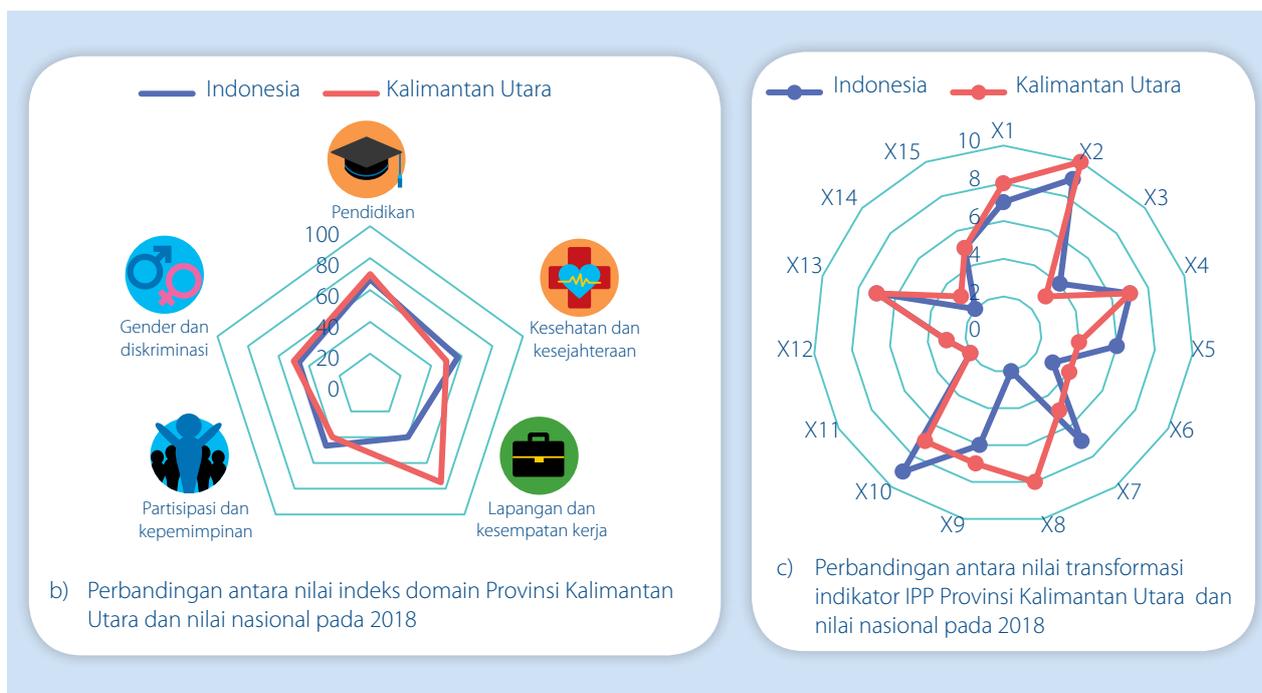
dari 26,17% menjadi 27,02%. Ketiga, angka perkawinan usia anak turun dari 14,93% menjadi 12,42%. Walaupun demikian, perlu dicatat bahwa angka perkawinan usia anak di Provinsi Kalimantan Utara masih berada di atas angka nasional (11,21%).

Provinsi Kalimantan Utara menghadapi tantangan pada domain kesehatan dan kesejahteraan serta partisipasi dan kepemimpinan. Nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan provinsi ini turun dari 67,50 pada 2015 menjadi 50 pada 2018. Penurunan ini disebabkan oleh (i) angka kesakitan pemuda yang naik dari 5,99% menjadi 6,83%, (ii) proporsi pemuda korban kejahatan yang meningkat dari 0,82% menjadi 2,07%, dan (iii) proporsi kehamilan remaja yang naik hampir dua kali lipat dari 13,02% menjadi 24,39%. Sementara itu, nilai indeks domain partisipasi dan kepemimpinan tidak berubah dalam periode 2015–2018. Nilai indeks domain ini juga merupakan nilai indeks terendah di antara semua domain di Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, provinsi ini menempati peringkat ketiga terendah untuk tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang capaiannya turun dari 69,57% menjadi 68,33%. Pemerintah Daerah Kalimantan Utara perlu memberikan perhatian lebih pada domain kesehatan dan kesejahteraan karena nilai indeksnya turun, serta pada domain partisipasi dan kepemimpinan karena nilainya paling rendah dan tidak berubah.

3.25. PROVINSI SULAWESI UTARA

Nilai IPP Provinsi Sulawesi Utara naik sedikit dari 46,83 pada 2015 menjadi 49,67 pada 2018. Peningkatan nilai indeks terjadi pada semua domain, kecuali domain partisipasi dan





Gambar 41. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Kalimantan Utara pada 2018

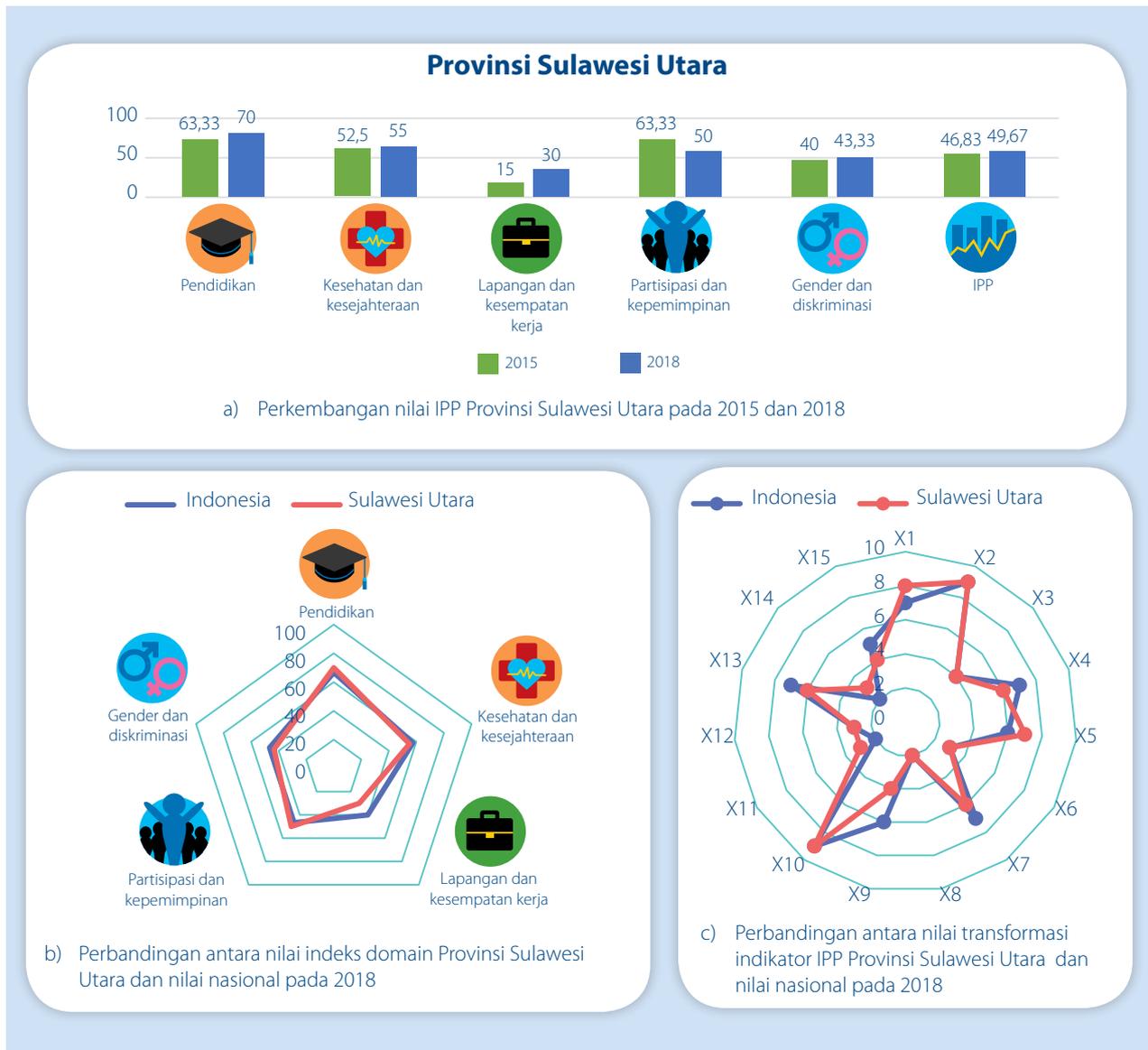
Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

kepemimpinan yang mengalami penurunan drastis. Sementara itu, jika dibandingkan dengan nilai indeks nasional, nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja lebih rendah, sedangkan nilai indeks empat domain yang lain hampir sama dengan nilai nasional.

Peningkatan nilai indeks domain pendidikan didorong oleh peningkatan APK perguruan tinggi dari 27,68% pada 2015 menjadi 35% pada 2018. Peningkatan nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan didorong oleh penurunan angka kesakitan pemuda dari 10,32% menjadi 8,27% dan proporsi remaja hamil dari 24,71% menjadi 21,46%. Namun, angka remaja hamil di Provinsi Sulawesi Utara tetap harus menjadi perhatian karena masih berada di atas angka nasional (16,67%). Sementara itu, peningkatan nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja terjadi seiring dengan turunya tingkat pengangguran pemuda dari 22,73% menjadi 19,02%, serta naiknya proporsi pemuda wirausaha kerah putih dari 0,15% menjadi 0,21%. Walaupun

demikian, nilai indeks domain ini merupakan nilai indeks terendah di antara semua domain. Hal ini terjadi karena tingkat pengangguran pemuda di Provinsi Sulawesi Utara merupakan yang tertinggi ketiga secara nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Sulawesi Utara perlu memberikan perhatian lebih pada upaya menurunkan angka pengangguran pemuda di provinsi ini.

Pada domain gender dan diskriminasi, peningkatan nilai indeks terjadi karena capaian semua indikator pembentuk domain ini mengalami peningkatan meski tidak signifikan. Sementara itu, penurunan nilai indeks domain partisipasi dan kepemimpinan disebabkan oleh turunnya tingkat partisipasi pemuda baik dalam kegiatan sosial kemasyarakatan maupun organisasi, serta tingkat keaktifan memberikan saran dalam rapat. Penurunan nilai indeks domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda ini perlu disikapi oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Utara dengan mengoptimalkan peran pemuda dalam masyarakat.



Gambar 42. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Sulawesi Utara pada 2018

Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

3.26. PROVINSI SULAWESI TENGAH

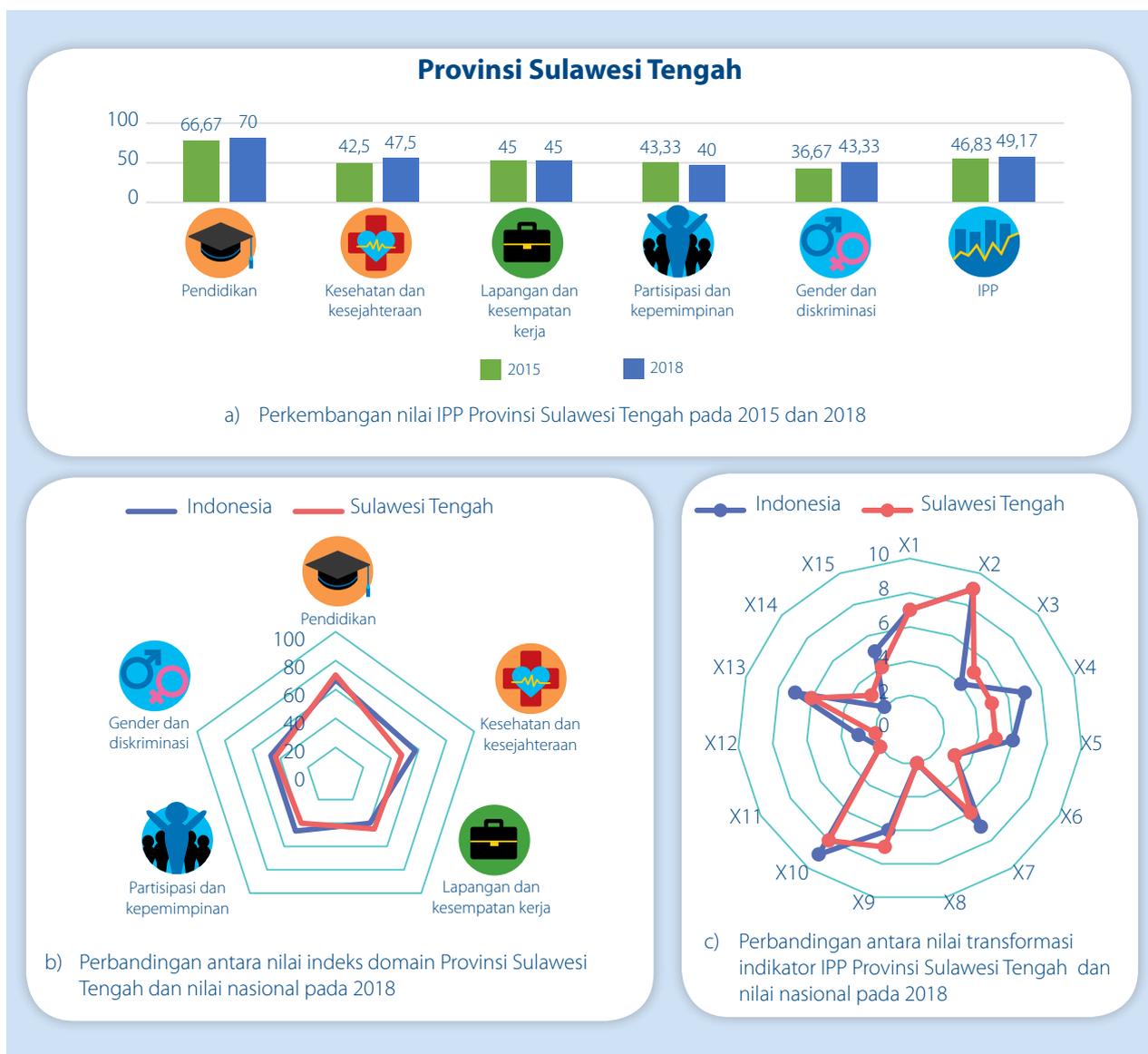
Nilai IPP Provinsi Sulawesi Tengah meningkat dari 46,83 pada 2015 menjadi 49,17 pada 2018. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya nilai indeks domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, serta gender dan diskriminasi. Penyumbang terbesar pada peningkatan nilai indeks domain pendidikan adalah peningkatan APK perguruan tinggi yang cukup signifikan, yakni dari 31,56% pada 2015 menjadi 40,61% pada 2018. Capaian ini melebihi capaian nasional (30,19%). Namun, nilai indeks domain lapangan dan

kesempatan kerja tidak berubah, sementara nilai indeks domain partisipasi dan kepemimpinan justru mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan nilai indeks nasional, capaian Provinsi Sulawesi Tengah pada domain pendidikan serta lapangan dan kesempatan kerja sedikit lebih tinggi, tetapi capaian pada tiga domain yang lain lebih rendah.

Provinsi Sulawesi Tengah menghadapi beberapa tantangan dalam pembangunan pemudanya. Tantangan tersebut ada pada beberapa indikator pembentuk domain. Pertama, tingkat partisipasi pemuda untuk memberikan saran dalam rapat

(4,60%) masih rendah dan berada di bawah angka nasional (6,72%). Kedua, 10,05% pemuda di provinsi ini mengalami keluhan kesehatan yang mengganggu kegiatan sehari-hari mereka. Meskipun trennya menurun, angka kesakitan pemuda di provinsi ini masih berada di atas angka nasional (7,68%) dan menempatkan Sulawesi Tengah pada posisi keempat tertinggi untuk indikator tersebut. Ketiga, proporsi pemuda perokok (27,86%) melebihi angka nasional (26,34%). Keempat, angka kehamilan remaja juga cukup tinggi (20,19%) dan berada di atas angka nasional (16,67%). Kelima, angka perkawinan usia anak masih

relatif tinggi (15,80%) jika dibandingkan dengan angka nasional (11,20%). Keenam, meski trennya meningkat, proporsi perempuan yang bekerja di sektor formal (20,70%) masih lebih rendah daripada angka nasional (24,13%). Perbaikan pada domain pendidikan sebaiknya diikuti oleh perbaikan pada domain kesehatan dan kesejahteraan serta domain lapangan dan kesempatan kerja agar produktivitas pemuda provinsi ini bisa optimal. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah juga harus memberikan perhatian pada upaya memperbaiki domain partisipasi dan kepemimpinan serta domain gender dan diskriminasi.



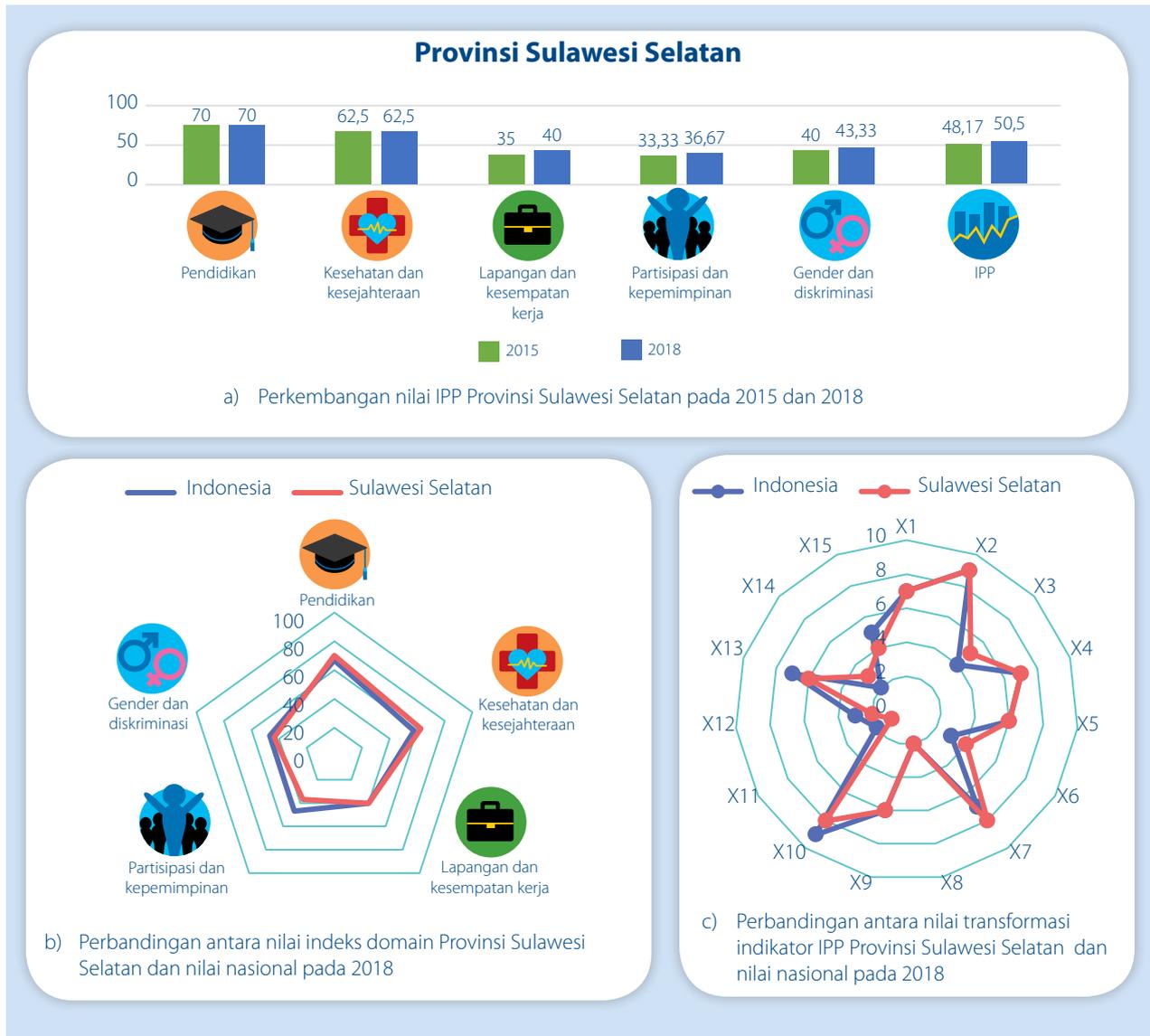
Gambar 43. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Sulawesi Tengah pada 2018

Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

3.27. PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nilai IPP Provinsi Sulawesi Selatan sedikit meningkat dari 48,17 pada 2015 menjadi 50,50 pada 2018. Peningkatan nilai ini didorong, terutama, oleh peningkatan nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Sementara itu, nilai indeks baik domain pendidikan maupun domain kesehatan dan kesejahteraan tidak berubah.

Jika dibandingkan dengan nilai indeks nasional, nilai indeks domain pendidikan serta kesehatan dan kesejahteraan di Provinsi Sulawesi Selatan relatif lebih baik. Sebaliknya, nilai indeks tiga domain yang lain masih rendah. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki rata-rata lama sekolah yang mencapai 10,14 tahun dan APK sekolah menengah 84,39%; angka-angka ini tidak jauh berbeda dengan angka nasional. Bahkan, APK perguruan tinggi di provinsi ini (41,23%) lebih tinggi daripada angka nasional (30,19%). Sementara



Gambar 44. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Sulawesi Selatan pada 2018

Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

itu, pada domain kesehatan dan kesejahteraan, masih terdapat 23,76% pemuda yang merokok dan 12,54% remaja hamil.

Tantangan yang lain adalah meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam organisasi. Pada 2018, capaian indikator ini baru sebesar 3,98% dan merupakan capaian terendah keempat di antara ke-34 provinsi. Selain itu, proporsi pemuda yang memberikan saran dalam rapat masih sebesar 3,70% dan capaian ini merupakan capaian terendah kelima secara nasional. Pada domain gender dan diskriminasi, tantangannya berupa angka perkawinan usia anak yang relatif tinggi (14,10%) dan berada di atas angka nasional (11,21%). Meski trennya meningkat, proporsi perempuan yang bekerja di sektor formal (20,31%) juga masih berada di bawah angka nasional (24,13%).

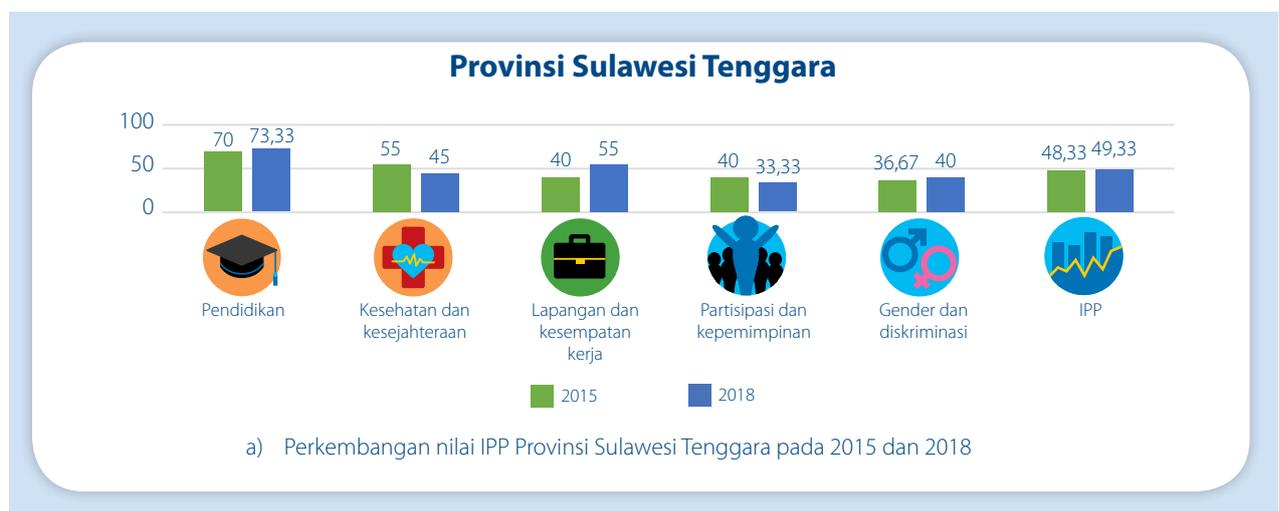
Perbaikan pada domain pendidikan sebaiknya diikuti oleh perbaikan pada domain kesehatan dan kesejahteraan serta domain lapangan dan kesempatan kerja agar produktivitas pemuda provinsi ini bisa optimal. Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan juga harus meningkatkan peran serta pemuda melalui perbaikan pada domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan. Pada saat yang sama, capaian domain gender dan diskriminasi juga perlu ditingkatkan.

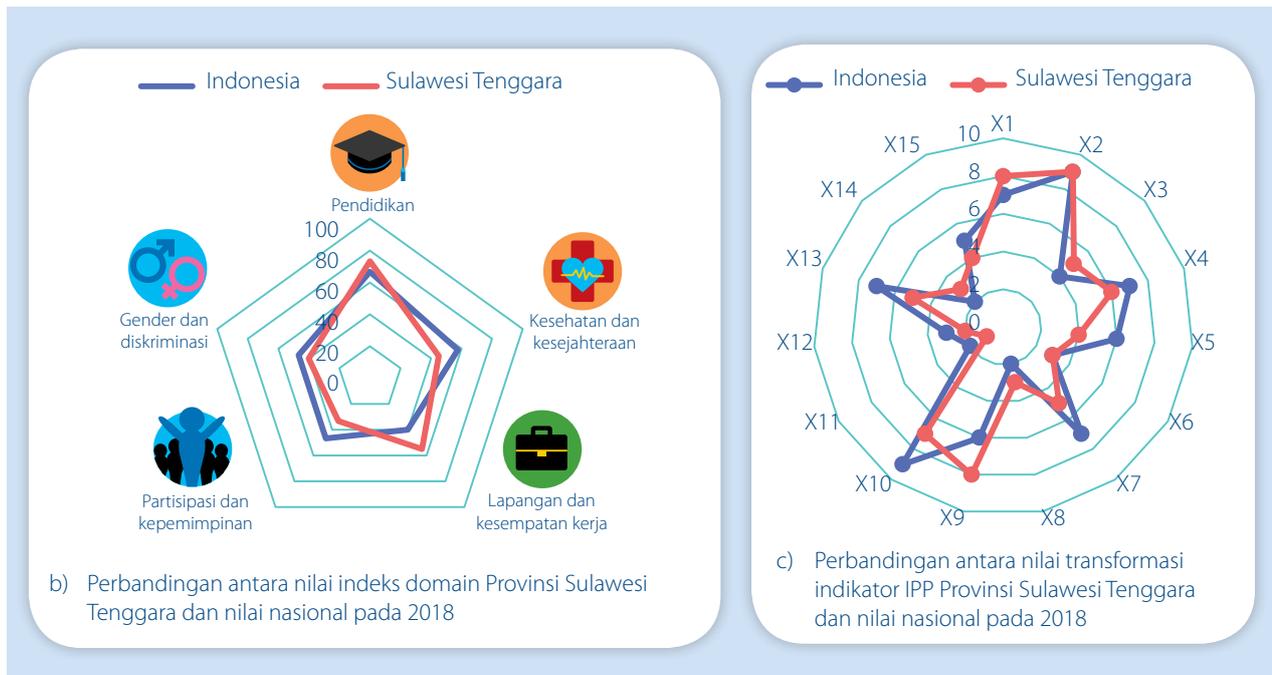
3.28. PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nilai IPP Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan yang sangat kecil, yaitu dari 48,33 pada 2015 menjadi 49,33 pada 2018. Hal ini terjadi karena, meski nilai indeks domain pendidikan, lapangan dan kesempatan kerja, serta gender dan diskriminasi

meningkat, nilai indeks dua domain yang lain mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan nilai indeks nasional, nilai indeks Sulawesi Tenggara relatif lebih baik hanya pada domain pendidikan serta lapangan dan kesempatan kerja. Provinsi ini memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 10,52 tahun, APK sekolah menengah 85,04%, dan APK perguruan tinggi 46,42%. Tingkat pengangguran pemuda di provinsi ini (7,73%) juga lebih rendah daripada angka nasional (13,47%). Dua domain yang harus menjadi perhatian dalam pembangunan pemuda adalah kesehatan dan kesejahteraan serta partisipasi dan kepemimpinan karena keduanya memiliki nilai indeks terendah secara nasional pada 2018.

Tantangan yang dihadapi Provinsi Sulawesi Tenggara pada domain kesehatan dan kesejahteraan ditemukan hampir pada semua indikator. Pertama, terdapat 9,17% pemuda yang mengalami keluhan kesehatan; angka ini lebih tinggi daripada angka nasional (7,68%). Kedua, terdapat 2,08% pemuda yang menjadi korban kejahatan; angka ini juga melebihi angka nasional (1,30%) dan merupakan angka tertinggi ketiga di antara semua provinsi. Ketiga, masih terdapat 25,40% pemuda yang merokok. Pada domain partisipasi dan kepemimpinan, tantangan yang dihadapi adalah rendahnya (i) proporsi pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan (69,07%), (ii) tingkat keaktifan pemuda dalam organisasi (2,15%) yang jauh di bawah angka nasional (6,36%), dan (iii) proporsi pemuda yang memberi saran dalam rapat. Sementara itu, tantangan utama pada domain gender dan diskriminasi adalah tingginya angka perkawinan usia anak. Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan satu dari tiga provinsi dengan proporsi perkawinan usia anak terbesar se-Indonesia, yakni 18,96% dari populasi pemuda perempuan berusia 20–24 tahun. Tantangan lain pada domain tersebut adalah proporsi pemuda





Gambar 45. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Sulawesi Tenggara pada 2018

Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

perempuan yang bekerja di sektor formal (19,53%) yang masih berada di bawah angka nasional (24,13%).

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu memberikan perhatian lebih pada domain yang capaiannya turun, yakni domain kesehatan dan kesejahteraan serta domain partisipasi dan kepemimpinan.

3.29. PROVINSI GORONTALO

Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi dengan perkembangan pembangunan pemuda yang relatif lebih lambat daripada provinsi lain di Indonesia. Hal ini terlihat dari minimnya kenaikan nilai IPP provinsi ini, yaitu dari 47,83 pada 2015 menjadi 48,17 pada 2018. Kondisi ini menyebabkan peringkat IPP Provinsi Gorontalo turun dari peringkat ke-21 menjadi ke-31 meski tren perubahannya masih positif. Secara umum, peningkatan nilai indeks hanya terjadi pada domain pendidikan, serta gender dan diskriminasi. Nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja serta partisipasi dan kepemimpinan tidak berubah, sementara nilai

indeks domain kesehatan dan kesejahteraan justru mengalami penurunan.

Perbaikan pada domain pendidikan terjadi karena APK perguruan tinggi meningkat dari 30,35% menjadi 35,23% dan rata-rata lama sekolah naik dari 8,85 menjadi 9,28 tahun. Namun, meski trennya meningkat, rata-rata lama sekolah pemuda Provinsi Gorontalo menempati posisi ketiga terendah se-Indonesia dan berada di bawah angka nasional (10,37 tahun). Sementara itu, peningkatan nilai indeks domain gender dan diskriminasi didorong oleh meningkatnya akses pemuda perempuan terhadap pendidikan dan lapangan kerja. Walaupun demikian, capaian ini perlu ditingkatkan karena proporsi perempuan yang bekerja di sektor formal masih lebih kecil daripada angka nasional. Angka perkawinan usia anak juga perlu menjadi perhatian karena angkanya masih cukup tinggi (15,29%) dan melebihi angka nasional (11,21%).

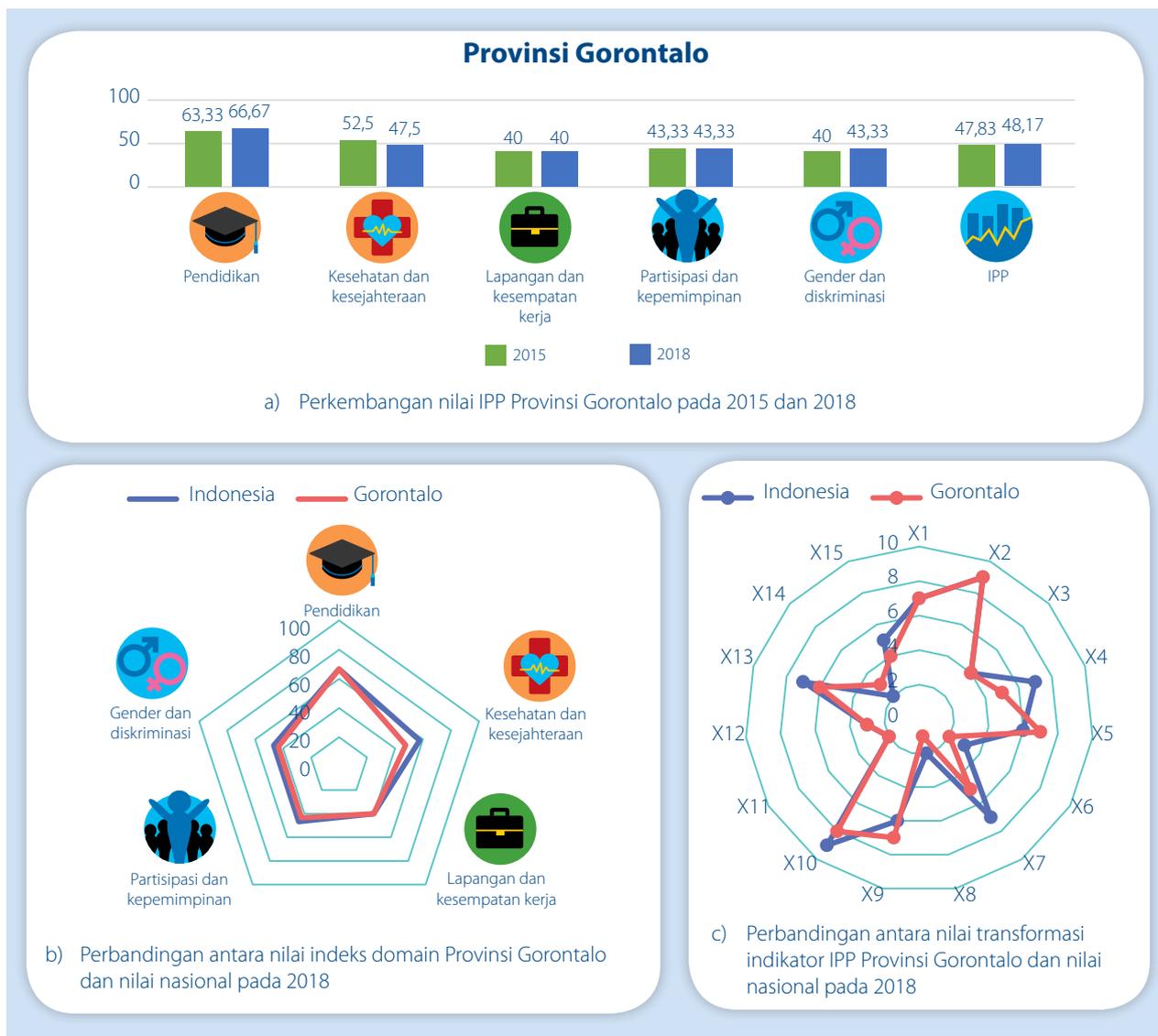
Domain lapangan dan kesempatan kerja mengalami stagnasi. Tantangan pada domain ini adalah kecilnya proporsi pemuda wirausaha kerah putih dengan capaian di bawah angka nasional. Sementara

itu, tantangan pada domain partisipasi dan kepemimpinan adalah capaian semua indikatornya yang masih lebih rendah daripada capaian nasional.

Nilai IPP Provinsi Gorontalo pada semua domain relatif hampir sama dengan nilai nasional, kecuali domain kesehatan dan kesejahteraan yang masih tertinggal. Rendahnya capaian domain ini disebabkan oleh tingginya (i) angka kesakitan pemuda (11,96%) yang merupakan angka tertinggi se-Indonesia, (ii) persentase pemuda perokok (30,17%) yang berada pada posisi

kedua tertinggi, dan (iii) angka kehamilan remaja (24,96%) yang menempati posisi ketiga tertinggi.

Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo perlu memberikan perhatian lebih pada domain yang capaiannya mengalami penurunan, yakni domain kesehatan dan kesejahteraan. Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo perlu memberikan perhatian pada domain yang nilainya tidak berubah dengan meningkatkan capaian indikator-indikator domain tersebut.



Gambar 46. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Gorontalo pada 2018

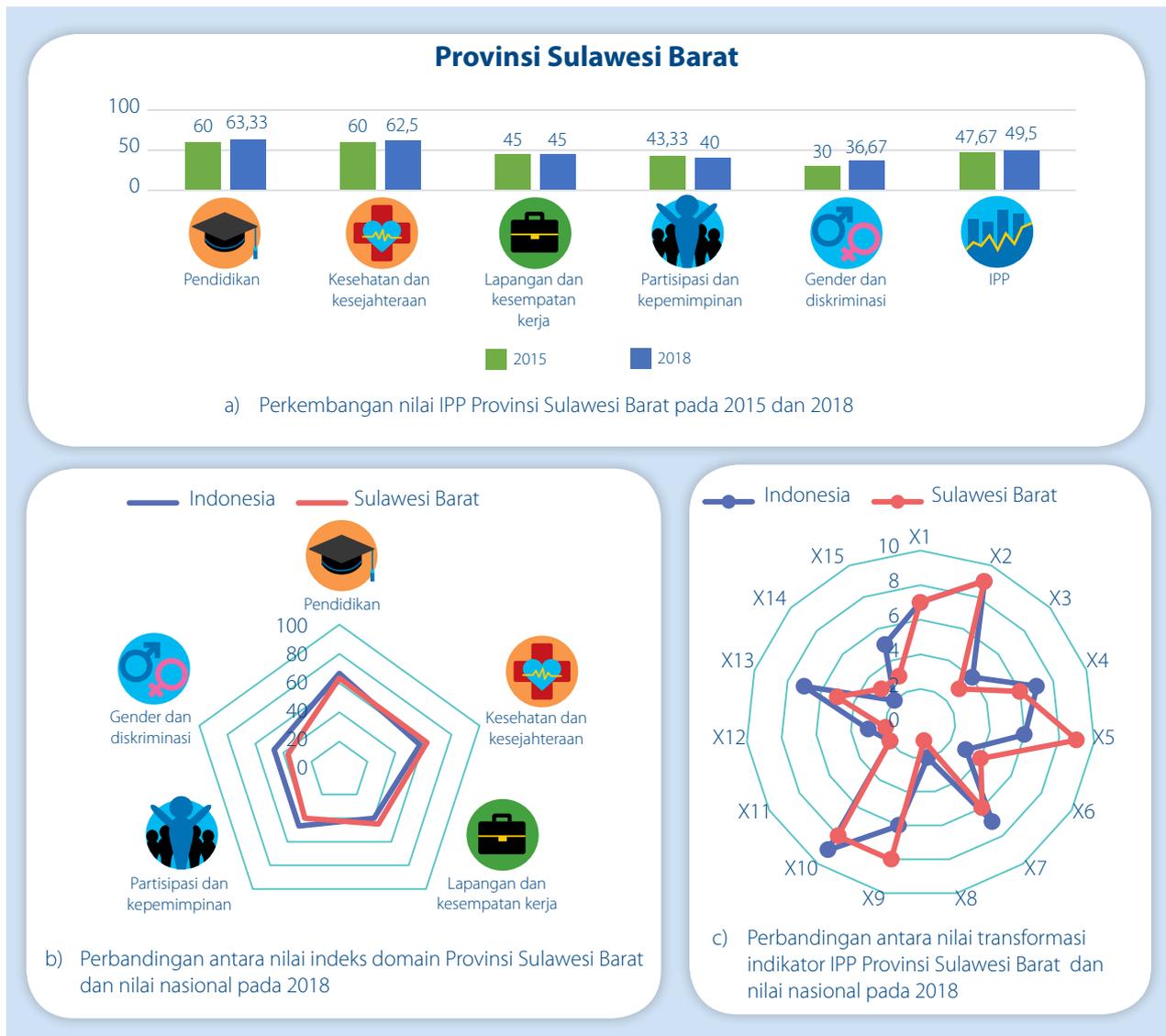
Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

3.30. PROVINSI SULAWESI BARAT

Nilai IPP Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan yang tidak signifikan, yaitu dari 47,67 pada 2015 menjadi 49,50 pada 2018. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan nilai indeks domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, serta gender dan diskriminasi. Perbaikan pada domain kesehatan dan kesejahteraan terjadi seiring dengan turunnya angka kesakitan pemuda dan berkurangnya proporsi pemuda yang menjadi korban kejahatan—proporsi ini merupakan yang terkecil dari semua provinsi. Namun, nilai indeks

domain lapangan dan kesempatan kerja tidak berubah, sementara nilai indeks domain partisipasi dan kepemimpinan justru turun.

Jika dibandingkan dengan nilai indeks domain pada tingkat nasional, Provinsi Sulawesi Barat sedikit lebih baik pada domain kesehatan dan kesejahteraan, serta lapangan dan kesempatan kerja. Secara rata-rata, nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja lebih tinggi daripada angka nasional. Hal ini didorong oleh tingkat pengangguran pemuda (7,29%) yang jauh lebih kecil daripada angka nasional (13,47%). Sebaliknya, tantangan yang besar terdapat pada



Gambar 47. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Sulawesi Barat pada 2018

Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

domain gender dan diskriminasi serta partisipasi dan kepemimpinan karena capaiannya lebih rendah daripada capaian nasional.

Tantangan pada domain pendidikan ditemukan pada semua indikator; di antaranya adalah rata-rata lama sekolah pemuda (9,29 tahun) yang menempati posisi keempat terendah meski trennya positif. Tantangan utama pada domain kesehatan dan kesejahteraan adalah naiknya angka kehamilan remaja dari 15,76% menjadi 22,18%. Tantangan pada domain lapangan dan kesempatan kerja adalah proporsi pemuda wirausaha kerah putih yang masih rendah (0,16%) dan menempati peringkat kelima terendah. Tantangan pada domain partisipasi dan kepemimpinan mencakup masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan kecilnya proporsi pemuda yang memberi saran dalam rapat. Tantangan pada domain gender dan diskriminasi berupa tingginya angka perkawinan usia anak (19,43%); bahkan, angka ini merupakan yang tertinggi se-Indonesia. Proporsi perempuan yang bekerja di sektor formal juga masih kecil (14,07%) dan menempati posisi kedua terendah setelah Provinsi Papua.

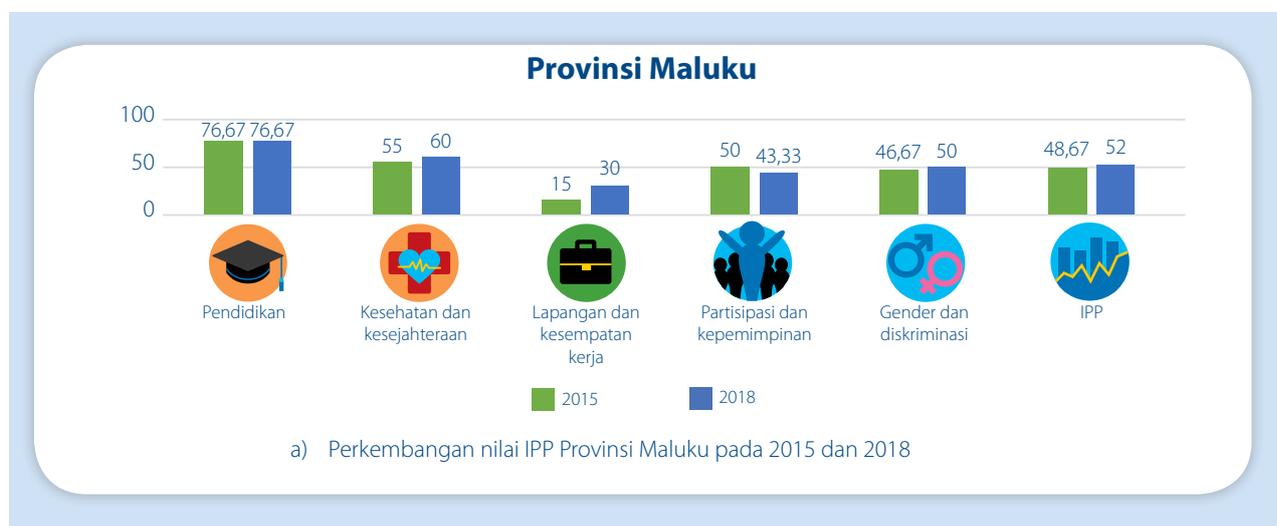
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat perlu memberikan perhatian khusus pada domain gender dan diskriminasi karena nilainya paling rendah di antara semua domain. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat juga perlu memfokuskan perhatiannya pada upaya untuk memperbaiki domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda karena capaiannya menurun, serta domain lapangan dan kesempatan kerja karena capaiannya mengalami stagnasi.

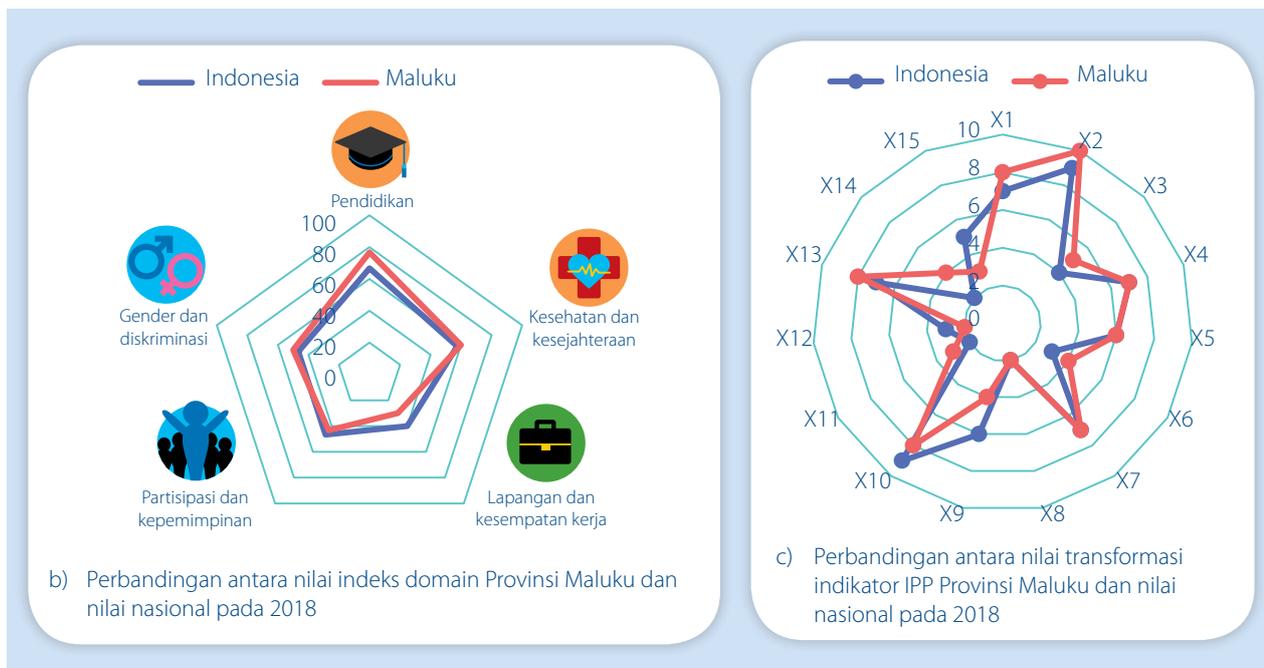
3.31. PROVINSI MALUKU

Nilai IPP Provinsi Maluku meningkat dari 48,67 pada 2015 menjadi 52 pada 2018. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja, kesehatan dan kesejahteraan, serta gender dan diskriminasi. Sebaliknya, nilai indeks domain partisipasi dan kepemimpinan turun. Sementara itu, nilai indeks domain pendidikan tidak berubah. Jika dibandingkan dengan nilai indeks nasional, nilai indeks domain pendidikan Provinsi Maluku lebih unggul. Hal ini terjadi karena APK perguruan tinggi di Provinsi Maluku (48,42%) menempati peringkat kedua tertinggi se-Indonesia pada 2018.

Peningkatan nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja didorong oleh bertambahnya proporsi pemuda wirausaha kerah putih, yaitu dari 0,10% menjadi 0,30%, serta turunnya tingkat pengangguran pemuda, yaitu dari 23,86% menjadi 18,92%. Walaupun demikian, tingkat pengangguran pemuda di Provinsi Maluku masih cukup tinggi; angkanya menempati posisi keempat tertinggi dan berada di atas angka nasional (13,47%). Meskipun nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja meningkat, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku perlu memfokuskan perhatiannya pada upaya memperbaiki domain ini karena nilainya terendah di antara semua domain.

Pada domain kesehatan dan kesejahteraan, peningkatan nilai indeks terjadi seiring dengan menurunnya angka kehamilan remaja dari 23,56% menjadi 16,91%. Sementara itu, perbaikan pada





Gambar 48. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Maluku pada 2018

Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

domain gender dan diskriminasi didorong oleh (i) turunnya angka perkawinan usia anak dari 9,88% menjadi 8,94%, (ii) bertambahnya proporsi pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi dari 48,52% menjadi 49,31%, serta (iii) bertambahnya proporsi pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal dari 11,91% menjadi 15,78%.

Meskipun demikian, indikator pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal perlu mendapat perhatian karena capaiannya masih rendah; angkanya menempati posisi kelima terendah dan berada cukup jauh di bawah angka nasional (24,13%). Perhatian juga perlu diberikan pada domain partisipasi dan kepemimpinan karena nilai indeksnya turun akibat memburuknya capaian semua indikator pembentuk indeks domain, yakni (i) partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang turun sebesar 3 titik persentase menjadi 77,15%, (ii) partisipasi aktif

pemuda dalam organisasi yang turun sebesar 8 titik persentase menjadi 9,53%, dan (iii) proporsi pemuda yang memberi saran dalam rapat yang turun sebesar 2 titik persentase menjadi 2,53%.

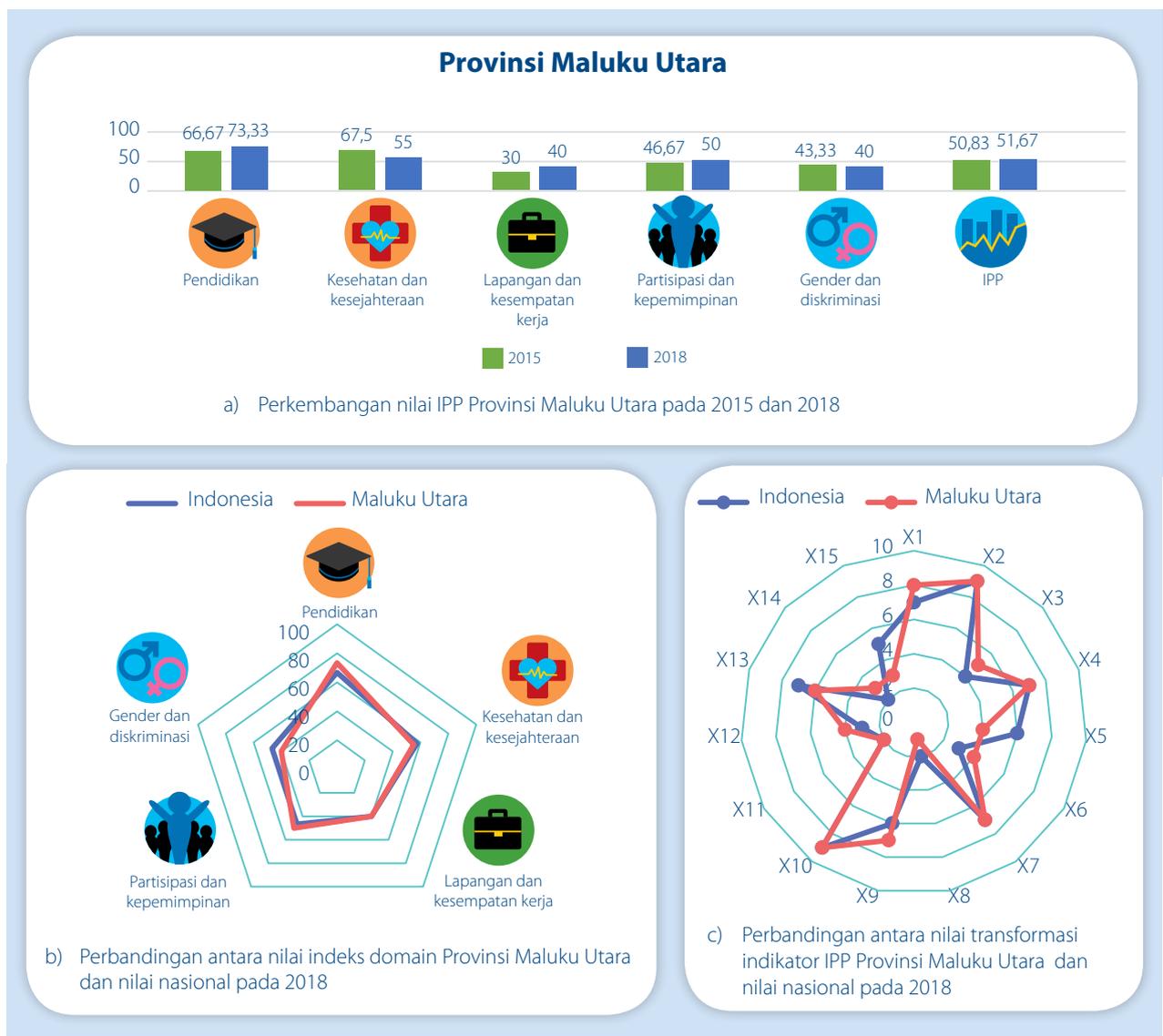
3.32. PROVINSI MALUKU UTARA

Nilai IPP Provinsi Maluku Utara meningkat dari 50,83 pada 2015 menjadi 51,67 pada 2018. Peningkatan ini didorong oleh membaiknya capaian domain pendidikan, lapangan dan kesempatan kerja, serta partisipasi dan kepemimpinan. Namun, capaian dua domain yang lain justru mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan capaian nasional, capaian Provinsi Maluku Utara sedikit lebih baik pada domain pendidikan, tetapi tertinggal pada domain gender dan diskriminasi. Sementara itu, capaian tiga domain yang lain relatif hampir sama dengan capaian nasional.

Perbaikan pada domain pendidikan didorong terutama oleh peningkatan signifikan pada APK perguruan tinggi dari 33,72% menjadi 42,68%. Pada domain lapangan dan kesempatan kerja, perbaikannya dipengaruhi oleh penurunan tingkat pengangguran pemuda dari 14,54% menjadi 10,94%. Namun, domain ini juga memiliki tantangan, yakni proporsi pemuda wirausaha kerah putih yang mengalami penurunan tajam dari 0,16% menjadi 0,02% sehingga peringkatnya menjadi yang terendah se-Indonesia. Pada domain partisipasi dan kepemimpinan, peningkatan nilai indeks didorong oleh capaian dua indikator yang meningkat dan

sedikit lebih tinggi daripada angka nasional. Pertama, tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi naik dari 6,11% menjadi 7,78%. Kedua, proporsi pemuda yang memberikan saran dalam rapat juga bertambah dari 6,54% menjadi 7,66%.

Sementara itu, penurunan nilai indeks domain gender dan diskriminasi disebabkan oleh meningkatnya angka perkawinan usia anak dari 10% menjadi 13,36%; angka ini bahkan melebihi angka nasional (11,21%). Namun, domain ini juga mengalami perbaikan dalam hal peningkatan proporsi pemuda perempuan yang sedang



Gambar 49. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Maluku Utara pada 2018

Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

menempuh pendidikan menengah dan tinggi (46,68%) serta proporsi pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal (17,71%). Meski demikian, proporsi pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal masih lebih rendah daripada angka nasional (24,13%). Sementara itu, nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan mengalami penurunan dari 67,50 pada 2015 menjadi 55 pada 2018. Penurunan ini terjadi seiring dengan meningkatnya proporsi pemuda korban kejahatan (dari 0,85% menjadi 2,09%) dan proporsi remaja hamil (dari 11,34% menjadi 16,17%).

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara perlu memberikan perhatian khusus pada domain yang capaiannya mengalami penurunan, yakni domain kesehatan dan kesejahteraan serta domain gender dan diskriminasi. Perhatian juga perlu diberikan pada domain lain yang capaian indikatornya masih rendah.

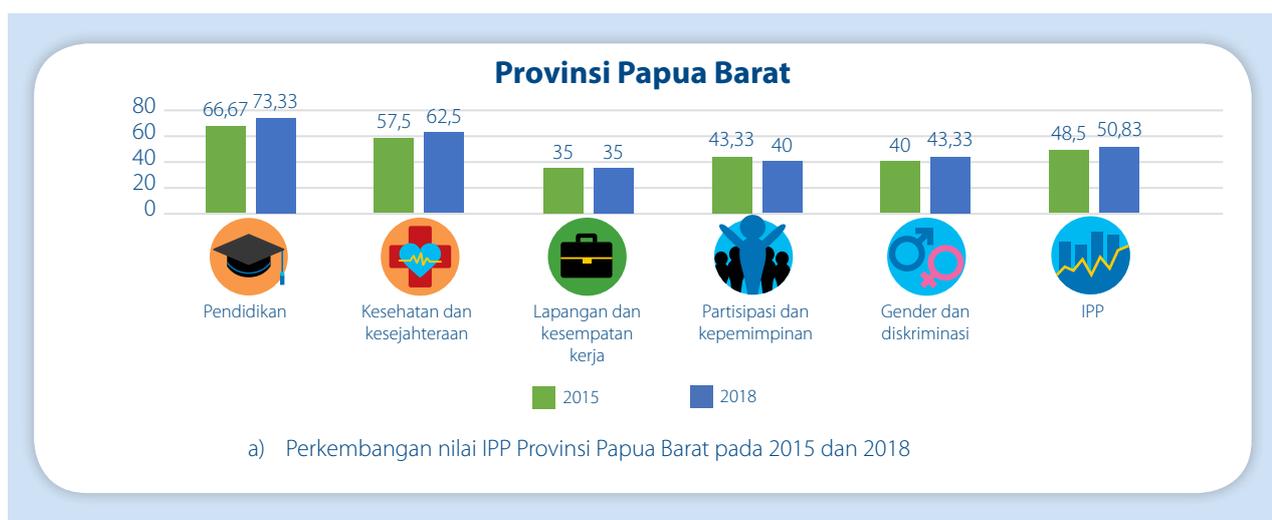
3.33. PROVINSI PAPUA BARAT

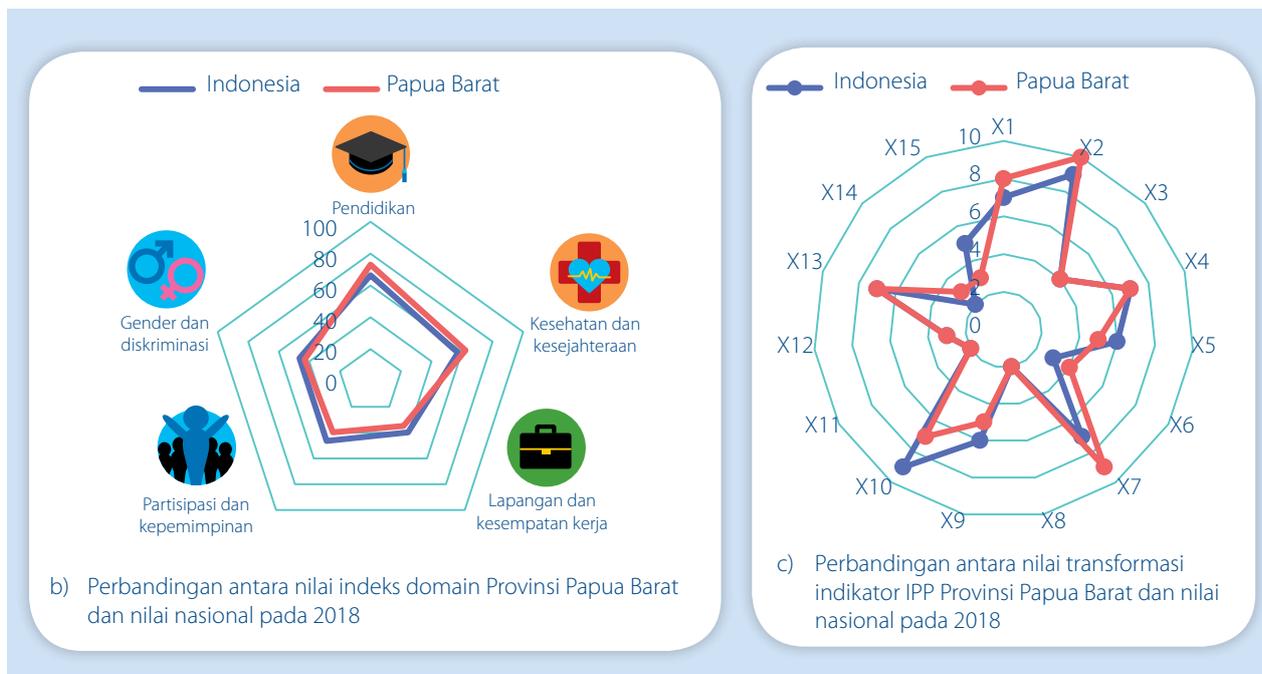
Nilai IPP Provinsi Papua Barat sedikit meningkat dari 48,50 pada 2015 menjadi 50,83 pada 2018. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan nilai indeks domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, serta gender dan diskriminasi. Jika dibandingkan dengan nilai indeks nasional, Provinsi Papua Barat sedikit lebih baik pada domain pendidikan serta kesehatan dan kesejahteraan. Sebaliknya, nilai indeks pada tiga domain yang lain masih berada di bawah angka nasional.

Domain pendidikan memiliki capaian yang baik dengan nilai indikator di atas angka nasional, yaitu rata-rata lama sekolah yang mencapai 10,61 tahun, APK sekolah menengah 90,18%, dan APK perguruan tinggi 35,97%. Sementara itu, peningkatan nilai indeks pada domain kesehatan dan kesejahteraan didorong oleh perbaikan capaian pada dua indikator. Pertama, angka kehamilan remaja turun pesat dari 17,29% menjadi 6,48%. Kedua, proporsi pemuda yang merokok berkurang dari 25,67% menjadi 22,94%.

Tantangan pertama yang dihadapi Provinsi Papua Barat dalam pembangunan pemudanya terdapat pada domain lapangan dan kesempatan kerja, yaitu tingginya tingkat pengangguran pemuda (15,33%) yang melebihi angka nasional (13,47%). Tantangan kedua terdapat pada domain partisipasi dan kepemimpinan. Tantangan pada domain ini mencakup semua indikator yang capaiannya berada di bawah angka nasional. Salah satunya adalah partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang hanya mencapai 66,95%; angka ini merupakan angka terendah se-Indonesia pada 2018. Tantangan ketiga terdapat pada domain gender dan diskriminasi, yakni proporsi pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal (15,77%) yang kecil dan menempati peringkat keempat terendah di antara semua provinsi.

Terlepas dari domain yang capaiannya mengalami peningkatan, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat perlu memberikan perhatian khusus pada





Gambar 49. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Papua Barat pada 2018

Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

upaya memperbaiki domain lapangan dan kesempatan kerja karena nilai indeksnya paling rendah di antara semua domain.

3.34. PROVINSI PAPUA

Pada 2018, nilai IPP Provinsi Papua menempati posisi kedua terendah setelah Provinsi Jawa Barat. Provinsi Papua mengalami penurunan nilai IPP sebesar 0,50 poin, dari 48 menjadi 47,50, dan penurunan peringkat dari ke-20 menjadi ke-33 dalam periode 2015–2018.

Pembangunan pemuda di Provinsi Papua menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Provinsi Papua dalam pembangunan pemudanya terdapat pada domain pendidikan yang nilai indeksnya tidak mengalami perubahan dalam periode 2015–2018. Nilai indeks domain pendidikan Provinsi Papua pun merupakan yang terendah se-Indonesia

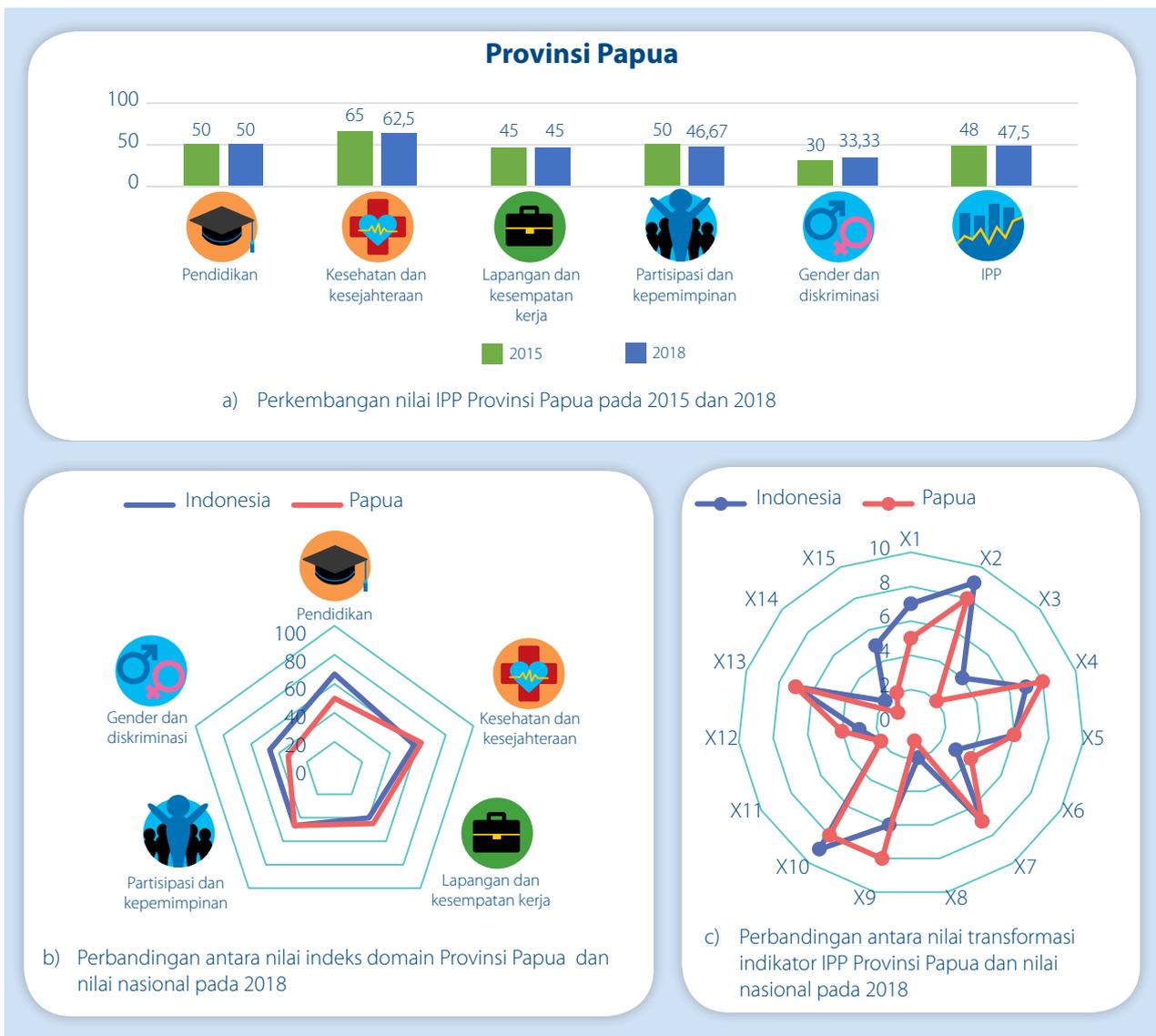
pada 2018. Hal ini terjadi karena capaian indikator-indikator domain ini masih rendah. Angka rata-rata lama sekolah dan APK sekolah menengah Provinsi Papua merupakan yang terendah se-Indonesia, sementara angka APK perguruan tinggi menempati posisi kedua terendah (19,03%). Rendahnya capaian tersebut sangat dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kurangnya motivasi pemuda untuk bersekolah.

Tantangan terbesar yang lain terdapat pada domain gender dan diskriminasi. Proporsi pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi merupakan yang terendah di antara semua provinsi (28,26%). Proporsi perempuan yang bekerja di sektor formal juga merupakan yang terendah, yakni hanya 9,88%. Kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh terbatasnya ketersediaan lapangan kerja formal, baik di sektor industri maupun jasa. Dengan capaian indikator yang rendah ini, nilai indeks domain gender dan diskriminasi Provinsi Papua menjadi nilai yang terendah se-Indonesia.

Tantangan selanjutnya terdapat pada bidang ketenagakerjaan, kesehatan, dan kepemimpinan. Nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja tidak mengalami perubahan sejak 2015 hingga 2018. Sementara itu, nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan serta kepemimpinan dan partisipasi mengalami penurunan dalam periode 2015–2018.

Pemerintah Daerah Provinsi Papua memerlukan strategi pembangunan pemuda yang komprehensif.

Pertama, perhatian perlu diberikan terutama pada upaya memperbaiki domain pendidikan karena capaiannya tidak meningkat. Hal ini diperlukan untuk mengoptimalkan potensi pemuda di Provinsi Papua, baik pemuda laki-laki maupun perempuan. Perbaikan capaian domain pendidikan diharapkan dapat mendorong perbaikan capaian domain lapangan dan kesempatan kerja. Kedua, keterlibatan pemuda dalam proses pembangunan perlu ditingkatkan dengan memperbaiki domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda.



Gambar 51. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Papua pada 2018

Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

4

FOKUS KHUSUS: ANALISIS PEMBANGUNAN PEMUDA DI PROVINSI JAWA BARAT



Bab ini disusun sebagai sebuah studi kasus untuk membangun kerangka analisis terhadap persoalan pembangunan pemuda di daerah. Analisis ini akan menjadi landasan dalam perumusan kebijakan untuk meningkatkan kinerja pembangunan pemuda pada masa depan. Provinsi yang dipilih untuk dianalisis dalam bab ini adalah Jawa Barat.

4.1. PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Barat merupakan tempat bermukim bagi 11,90 juta pemuda. Jumlah ini menempatkan Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan

jumlah pemuda terbesar, yakni mencapai 18,80% dari jumlah keseluruhan pemuda Indonesia. Penduduk usia produktif tersebut tersebar di 9 kota dan 18 kabupaten. Tabel 11 menyajikan jumlah dan distribusi populasi pemuda berdasarkan jenis kelamin di tiap kabupaten/kota. Dari tabel ini, terlihat bahwa komposisi pemuda perempuan dan laki-laki hampir seimbang di semua wilayah. Jumlah pemuda terbesar berada di Kabupaten Bogor, yakni 1,56 juta orang atau 13% dari seluruh populasi pemuda Provinsi Jawa Barat. Jumlah terbesar kedua dan ketiga masing-masing terdapat di Kabupaten Bekasi (8,71%) dan Kabupaten Bandung (7,85%).

Tabel 11. Jumlah dan Distribusi Populasi Pemuda Berdasarkan Jenis Kelamin

Kabupaten/Kota	Total Populasi Pemuda (Dalam Ribu Jiwa)			Distribusi (%)			
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Terhadap Total Populasi di Jawa Barat
Kabupaten Bogor	775	785	1.560	49,68	50,32	100	13,01
Kabupaten Sukabumi	285	291	576	49,48	50,52	100	4,80
Kabupaten Cianjur	263	255	517	50,87	49,32	100	4,31
Kabupaten Bandung	482	459	941	51,22	48,78	100	7,85
Kabupaten Garut	304	302	607	50,08	49,75	100	5,06
Kabupaten Tasikmalaya	166	179	346	47,98	51,73	100	2,89
Kabupaten Ciamis	107	110	218	49,08	50,46	100	1,82
Kabupaten Kuningan	107	106	213	50,23	49,77	100	1,78
Kabupaten Cirebon	287	260	547	52,47	47,53	100	4,56
Kabupaten Majalengka	119	124	243	48,97	51,03	100	2,03
Kabupaten Sumedang	123	125	248	49,60	50,40	100	2,07
Kabupaten Indramayu	207	176	383	54,05	45,95	100	3,19
Kabupaten Subang	165	168	333	49,55	50,45	100	2,78
Kabupaten Purwakarta	124	116	241	51,45	48,13	100	2,01
Kabupaten Karawang	317	287	604	52,48	47,52	100	5,04
Kabupaten Bekasi	522	522	1.044	50,00	50,00	100	8,71
Kabupaten Bandung Barat	204	196	400	51,00	49,00	100	3,34
Kabupaten Pangandaran	35	36	71	49,30	50,70	100	0,59
Kota Bogor	150	146	296	50,68	49,32	100	2,47
Kota Sukabumi	40	38	79	50,63	48,10	100	0,66
Kota Bandung	360	331	691	52,10	47,90	100	5,76
Kota Cirebon	40	38	78	51,28	48,72	100	0,65
Kota Bekasi	394	397	791	49,81	50,19	100	6,60
Kota Depok	297	309	606	49,01	50,99	100	5,06
Kota Cimahi	81	81	162	50,00	50,00	100	1,35
Kota Tasikmalaya	80	77	158	50,63	48,73	100	1,32
Kota Banjar	18	20	38	47,37	52,63	100	0,32
Jawa Barat	6.054	5.935	11.988	50,50	49,51	100	100,00

Sejak 2015, Provinsi Jawa Barat selalu termasuk dalam lima provinsi dengan nilai IPP terendah. Pada 2018, nilai IPP Provinsi Jawa Barat merupakan nilai paling rendah di antara semua provinsi, yakni 46,20. Sebaliknya, nilai IPP Provinsi DI Yogyakarta yang mencapai 70,30 merupakan nilai tertinggi. Provinsi DI Yogyakarta secara konsisten berada pada peringkat pertama dengan nilai IPP tertinggi sejak 2015 (Tabel 12).

yang menempatkan pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan otonom.

Bab ini menyajikan analisis situasi dan tantangan pembangunan pemuda di Jawa Barat, beserta rekomendasi kebijakan untuk mendorong perbaikan pembangunan pemuda agar lebih progresif. Analisis dilakukan dengan menyajikan dinamika IPP Provinsi Jawa Barat di tingkat kabupaten/kota dan melakukan

Tabel 12. Daftar Provinsi dengan IPP Tertinggi dan Terendah, serta Perbandingannya dengan Provinsi Jawa Barat (2015–2018)

Tahun	Kategori	Deskripsi		
		IPP Tertinggi	Posisi Jawa Barat	IPP Terendah
2015	Provinsi	DI Yogyakarta	Jawa Barat	Sumatra Selatan
	IPP	65,50	45,83	42,17
	Peringkat	1	30	34
2016	Provinsi	DI Yogyakarta	Jawa Barat	Lampung
	IPP	66	47,67	46,67
	Peringkat	1	31	34
2017	Provinsi	DI Yogyakarta	Jawa Barat	Gorontalo
	IPP	70,33	45,67	45,67
	Peringkat	1	33	34
2018	Provinsi	DI Yogyakarta	Jawa Barat	Jawa Barat
	IPP	70,33	46,17	46,17
	Peringkat	1	34	34

Jika merujuk pada korelasi antara nilai IPP provinsi pada 2015 dan nilai perubahannya dalam periode 2015–2018 (Gambar 4), dapat dikatakan bahwa provinsi dengan nilai IPP yang rendah pada 2015 selayaknya memiliki tingkat perubahan yang tinggi. Namun, hal ini tidak terjadi pada Provinsi Jawa Barat. Sebagai provinsi dengan nilai IPP tergolong rendah pada 2015 (peringkat ke-30), Provinsi Jawa Barat mengalami perubahan nilai IPP yang lebih lambat jika dibandingkan dengan provinsi lain yang nilai IPP-nya relatif sama pada tahun tersebut. Nilai IPP Jawa Barat hanya meningkat sebesar 0,34 poin (secara absolut) atau 1% (secara relatif) dalam periode 2015–2018.

Mengingat dinamika pembangunan pemuda di tingkat provinsi tidak terlepas dari dinamika kabupaten/kota, penting untuk memahami kondisi pembangunan pemuda di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Perbaikan yang terjadi pada tingkat kabupaten/kota akan secara langsung berdampak pada kondisi pembangunan pemuda di Provinsi Jawa Barat, khususnya pada era desentralisasi

identifikasi terhadap permasalahan kepemudaan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat. Laporan ini juga menyajikan proyeksi nilai indikator IPP Provinsi Jawa Barat pada 2024 yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang lain dalam merancang program dan kegiatan pembangunan pemuda di wilayahnya (Lampiran 4).

4.2. METODOLOGI

Analisis situasi pembangunan pemuda di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan menggunakan data indikator IPP di tingkat kabupaten/kota. Namun, karena keterbatasan data, tidak semua nilai indikator bisa dihasilkan. Terdapat tujuh indikator (dari 15 indikator penyusun IPP) yang nilainya tidak dapat dihasilkan. Indikator-indikator tersebut mencakup:

- a) tiga indikator pada domain partisipasi dan kepemimpinan, yaitu persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan,

- persentase pemuda yang aktif dalam organisasi, dan persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat;
- b) persentase pemuda korban kejahatan;
- c) persentase remaja perempuan berusia 15–18 tahun yang pernah menikah dan sedang hamil;
- d) persentase pemuda wirausaha kerah putih; dan
- e) angka perkawinan usia anak.

Data pada domain partisipasi dan kepemimpinan (poin a) tidak dapat dihasilkan karena Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang merupakan sumber data bagi domain ini hanya representatif di tingkat provinsi. Oleh sebab itu, analisis pada domain partisipasi dan kepemimpinan tidak dapat dilakukan untuk tingkat kabupaten/kota. Sementara itu, empat indikator lain yang nilainya tidak dapat dihasilkan (poin b–e) adalah indikator yang bersumber dari Susenas dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Hasil penghitungan tidak dapat diperoleh karena jumlah sampel untuk tiap kabupaten/kota tidak mencukupi.

Karena hanya ada 8 dari 15 indikator yang datanya bisa diperoleh, penghitungan nilai IPP untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tidak

dapat dilakukan. Oleh karena itu, laporan ini hanya menyajikan hasil analisis tiap indikator IPP. Untuk indikator IPP yang datanya tidak tersedia hingga tingkat kabupaten/kota, analisis capaian akan dilakukan di tingkat provinsi. Selain hasil analisis deskriptif terhadap dinamika indikator setiap domain pembangunan pemuda di Provinsi Jawa Barat, laporan ini menyajikan hasil analisis kualitatif yang datanya diperoleh dari diskusi kelompok terfokus (focus group discussion, FGD) yang melibatkan kelompok pemuda, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, organisasi nonpemerintah, dan akademisi.

4.3. ANALISIS DAN DISKUSI

Tabel berikut menunjukkan perbandingan data IPP beserta komponennya antara DI Yogyakarta, sebagai provinsi dengan nilai indeks tertinggi, dan Provinsi Jawa Barat. Melalui perbandingan ini, terlihat selisih (gap) capaian antara kedua provinsi tersebut. Tabel di bawah ini juga memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan pemudanya. Sebagai pembanding, nilai IPP nasional juga ditampilkan.

Tabel 13. Perbandingan Nilai IPP, Indeks Domain, dan Indikator Pembentuk Indeks antara Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Tingkat Nasional

Indikator	Jawa Barat	DI Yogyakarta	Indonesia
Nilai indeks domain pendidikan	63,33	90,00	66,67
Rata-rata lama sekolah (tahun)	10,37	12,09	10,37
APK sekolah menengah	83,09	91,83	86,11
APK perguruan tinggi	25,14	70,60	30,19
Nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan	52,50	60,00	57,50
Angka kesakitan pemuda	8,13	8,83	7,68
Persentase pemuda korban kejahatan	1,41	2,37	1,30
Persentase pemuda yang merokok	29,80	21,27	26,34
Persentase remaja perempuan hamil	15,48	0,00	16,67
Nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja	25,00	65,00	40,00
Persentase pemuda wirausaha kerah putih	0,33	1,18	0,39
TPT pemuda	19,60	10,68	13,47
Nilai indeks domain partisipasi dan kepemimpinan	46,67	70,00	46,67
Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	80,06	87,99	81,36
Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi	4,75	15,75	6,36
Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat	5,72	19,22	6,72
Nilai indeks domain gender dan diskriminasi	43,33	66,67	46,67
Angka perkawinan usia anak	13,26	6,20	11,21
Persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas	34,75	61,15	38,67
Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	25,89	35,16	24,13
IPP	46,17	70,33	51,50

Dibandingkan dengan angka nasional, Provinsi Jawa Barat sedikit lebih unggul hanya pada dua indikator. Pertama, angka kehamilan remaja Provinsi Jawa Barat (15,48%) lebih kecil daripada angka nasional (16,67%). Kedua, proporsi perempuan yang bekerja di sektor formal (25,89%) lebih besar daripada angka nasional (24,13%). Sementara itu, jika dibandingkan dengan Provinsi DI Yogyakarta, capaian Provinsi Jawa Barat hanya sedikit lebih baik pada indikator angka kesakitan pemuda, yaitu 8,13% berbanding 8,83%, dan proporsi pemuda korban kejahatan, yaitu 1,41% berbanding 2,37%.

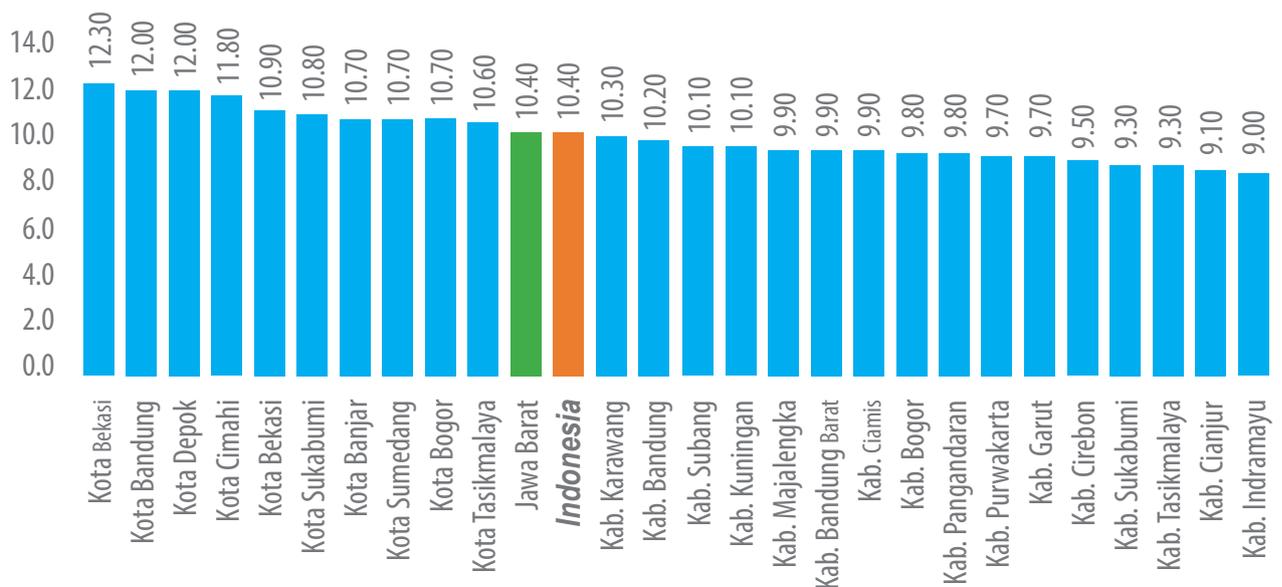
4.3.1. Domain Pendidikan

Capaian indikator rata-rata lama sekolah bervariasi antarkabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Wilayah dengan status kotamadya pada umumnya memiliki capaian rata-rata lama sekolah yang lebih baik daripada wilayah dengan status kabupaten. Kondisi ini bisa jadi dipengaruhi oleh ketakseimbangan antara proporsi luas wilayah dan jumlah serta sebaran sekolah menengah yang tersedia. Wilayah kabupaten pada umumnya jauh lebih luas daripada wilayah kotamadya. Secara berurutan, tiga daerah yang memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi di Provinsi Jawa Barat adalah Kota Bekasi (12,34 tahun), Kota Bandung (12,20 tahun),

dan Kota Depok (12 tahun). Sebaliknya, daerah dengan rata-rata lama sekolah terendah adalah Kabupaten Indramayu (9 tahun), Kabupaten Cianjur (9,10 tahun), serta Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Sukabumi (9,30 tahun). Pada Gambar 51 terlihat bahwa hanya ada tiga kota yang pemudanya secara rata-rata menempuh pendidikan minimal tingkat SMA, sedangkan di kabupaten/kota yang lain pemudanya secara rata-rata hanya merupakan lulusan SMP.

Secara rata-rata, APK sekolah menengah Provinsi Jawa Barat adalah 83,09%. Angka ini berada di bawah angka nasional, yakni 86,11%. Hal ini berarti bahwa masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai APK sebesar 100%. Tiga daerah dengan APK sekolah menengah tertinggi adalah Kota Bekasi (105,30%), Kota Depok (94%), dan Kabupaten Bekasi (94%). Sebaliknya, tiga daerah dengan APK sekolah menengah terendah adalah Kabupaten Bogor (73,80%), Kabupaten Sukabumi (76,20%), dan Kabupaten Cianjur (76,80%). Sama halnya dengan tingkat rata-rata lama sekolah, APK sekolah menengah berkaitan erat dengan jumlah dan sebaran fasilitas pendidikan menengah di suatu wilayah.

Oleh karena itu, penyediaan sekolah menengah secara merata menjadi tantangan besar bagi



Gambar 52. Rata-rata lama sekolah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada 2018



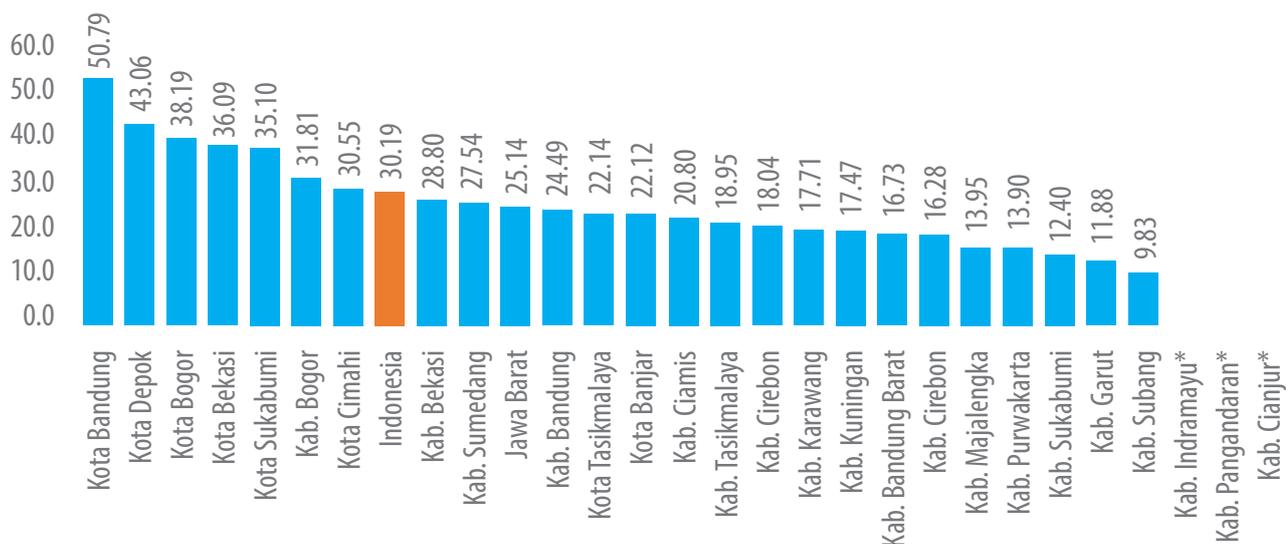
Gambar 53. APK sekolah menengah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada 2018

Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur karena keduanya merupakan dua kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan wilayah terluas (BPS, 2015).

APK perguruan tinggi Provinsi Jawa Barat adalah 25,14%. Capaian ini jauh lebih rendah daripada capaian nasional (30,19%). APK perguruan tinggi antarkabupaten/kota di Jawa Barat juga sangat bervariasi (Gambar 54). Daerah dengan capaian APK perguruan tinggi tertinggi adalah Kota Bandung (50,79%) dan Kota Depok (43,06%), sedangkan daerah dengan capaian terendah adalah Kabupaten Subang (9,83%) dan Kabupaten Garut (11,88%). Ada banyak faktor yang menyebabkan variasi tersebut; salah satunya adalah akses terhadap perguruan

tinggi yang tidak merata di semua daerah. Sebagian besar perguruan tinggi berada di kota sehingga pemuda di daerah ini memiliki akses yang lebih baik dibandingkan dengan pemuda di kabupaten.

Hasil FGD menunjukkan beberapa tantangan yang dihadapi Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan pemudanya pada domain pendidikan. Pertama, orang tua pada umumnya kurang memberikan dukungan bagi anaknya untuk bersekolah. Selain masalah ekonomi, perceraian orang tua, atau orang tua yang menjadi pekerja migran di luar negeri, kurangnya dukungan juga disebabkan oleh minimnya pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak. Kondisi ini



Gambar 54. APK perguruan tinggi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada 2018

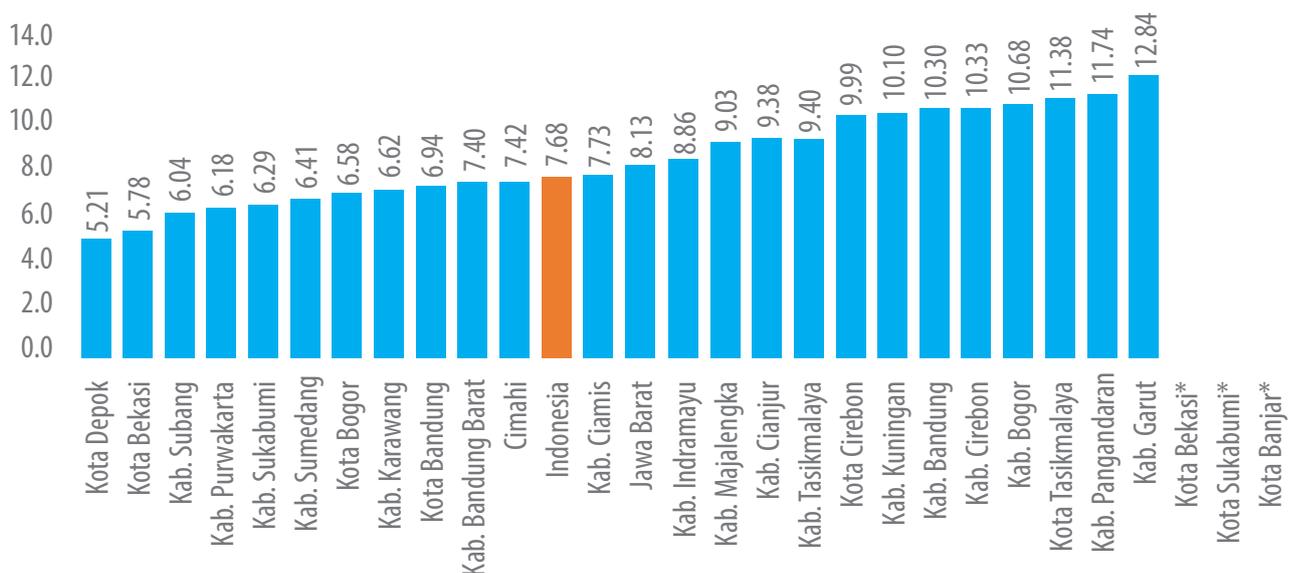
Keterangan: *) Data Kabupaten Indramayu, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Cianjur tidak tersedia.

dipengaruhi, antara lain, oleh rendahnya tingkat pendidikan orang tua, banyaknya anak yang tidak bersekolah di lingkungan sekitar, serta keterbatasan ekonomi dan budaya patriarki dalam masyarakat yang mendorong anak laki-laki untuk bekerja dan anak perempuan untuk segera menikah. Di sentra-sentra nelayan di Kabupaten Indramayu, misalnya, ada banyak anak laki-laki yang mementingkan pekerjaan daripada sekolah. Kemiskinan diduga juga menjadi salah satu pemicu lainnya karena Kabupaten Indramayu merupakan wilayah termiskin ketiga se-Provinsi Jawa Barat (BPS Jawa Barat, 2018). Sementara itu, rendahnya capaian pendidikan di Kabupaten Cianjur diduga juga dipengaruhi oleh tingginya angka perkawinan usia anak. Berdasarkan hasil FGD, mengeluarkan anak perempuan dari pendidikan formal dan menikahkan mereka sedini mungkin merupakan hal umum yang terjadi terutama pada keluarga miskin. Di Kabupaten Cianjur—salah satu kabupaten dari sepuluh wilayah termiskin se-Jawa Barat (BPS Jawa Barat, 2018), hal ini dianggap sebagai upaya orang tua untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.

Tantangan kedua adalah belum meratanya ketersediaan infrastruktur pendidikan terutama di kabupaten yang wilayahnya luas atau kondisi geografisnya sulit. Secara umum, wilayah Provinsi Jawa Barat sangat luas dan mencakup dataran tinggi. Di beberapa wilayah, jarak dari rumah warga ke sekolah terdekat cukup jauh, kondisi geografis wilayah kurang bagus, dan angkutan umum tidak tersedia. Tantangan ketiga adalah masalah pada

sistem pendidikan, seperti zonasi, dan minimnya sekolah inklusif bagi penyandang disabilitas. Kebijakan zonasi menyebabkan beberapa calon siswa tidak bisa bersekolah akibat lokasi tempat tinggalnya yang tidak mendukung. Sekolah inklusif juga dibutuhkan untuk memastikan bahwa pemuda dengan disabilitas dapat mengakses layanan pendidikan dengan setara.

Untuk memperbaiki capaian domain pendidikan di Provinsi Jawa Barat, diperlukan beberapa program atau kebijakan yang menasar berbagai pemangku kepentingan. Pertama, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu membuat program intervensi bagi orang tua yang bertujuan mengubah pola pikir dan menumbuhkan kesadaran mereka akan pentingnya pendidikan bagi anak. Kedua, kebijakan subsidi pendapatan, seperti bantuan sosial pendidikan, diperlukan terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat pekerja anak atau angka putus sekolah yang relatif tinggi. Ketiga, perlu dirancang program penguatan kapasitas remaja, termasuk motivasi terkait rencana masa depan mereka. Keempat, diperlukan regulasi di tingkat desa; misalnya, ada aturan yang mewajibkan setiap orang tua untuk mengutamakan sekolah anaknya dan sanksi sosial bagi keluarga yang tidak menjalankan aturan tersebut. Kelima, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu menyediakan infrastruktur pendidikan di wilayah yang sulit dijangkau dan memperluas sekolah inklusif; hal ini dapat dilakukan, antara lain, dengan menerapkan kebijakan sekolah satu atap di wilayah dengan ketersediaan lahan yang terbatas.



Gambar 55. Angka kesakitan pemuda kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada 2018
Keterangan: *) Data Kota Bekasi, Kota Sukabumi, dan Kota Banjar tidak tersedia.

4.3.2. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan

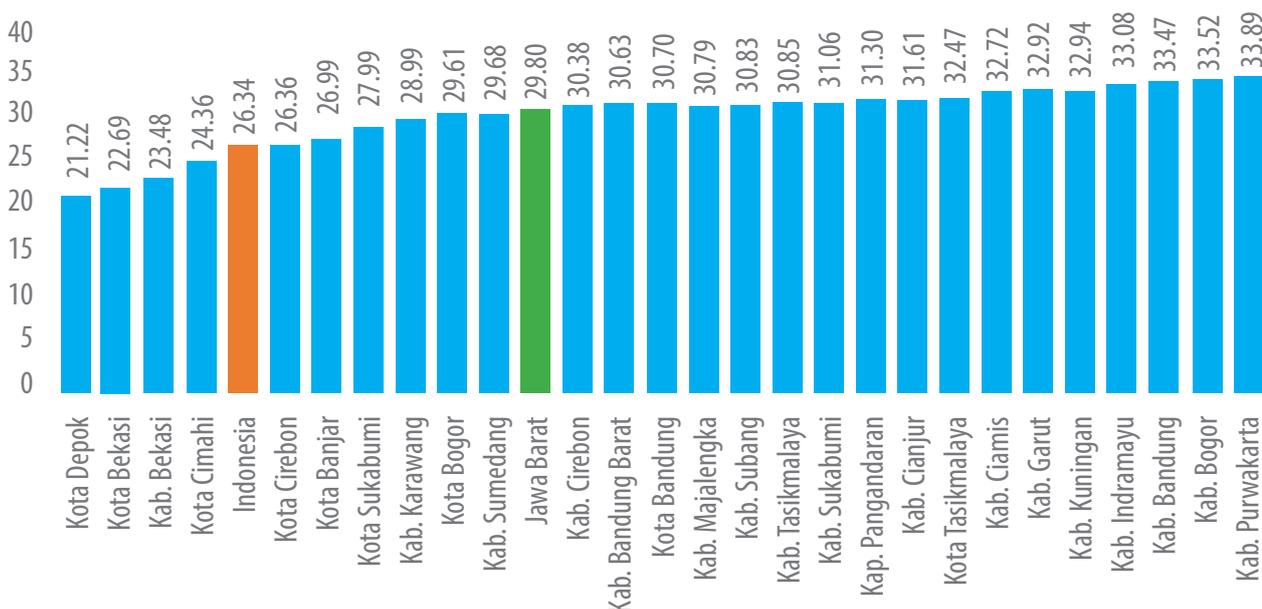
Pada domain kesehatan dan kesejahteraan, tantangan yang dihadapi Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan pemudanya cukup besar. Pertama, di beberapa kabupaten/kota, angka kesakitan pemudanya cukup tinggi. Angka kesakitan pemuda yang makin tinggi menandakan makin besarnya proporsi pemuda dengan keluhan kesehatan yang mengganggu aktivitas sehari-hari mereka. Secara umum, lebih dari setengah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat memiliki angka kesakitan pemuda yang lebih tinggi daripada angka nasional. Daerah dengan angka kesakitan pemuda paling tinggi adalah Kabupaten Garut (12,84%) dan Kabupaten Pangandaran (11,74%). Sebaliknya, daerah dengan angka kesakitan pemuda paling rendah adalah Kota Depok (5,21%) dan Kabupaten Bekasi (5,78%).

Kasus penyakit tidak menular di kalangan pemuda disebabkan oleh gaya hidup tidak sehat, termasuk pola makan yang tidak memenuhi gizi seimbang dan kurangnya aktivitas olahraga. Rendahnya tingkat pendidikan pemuda dan orang tua serta kurangnya wawasan dan pemahaman pemuda terkait pola hidup sehat juga diduga menjadi faktor penyebabnya. Upaya pemeriksaan kesehatan secara rutin juga belum membudaya di kalangan pemuda, padahal pemerintah telah banyak melakukan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan.

Menurut peserta FGD, kegiatan sosialisasi perlu diarahkan ke perubahan perilaku dan tidak sekadar penyampaian informasi. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pada kegiatan sosialisasi agar informasi yang disampaikan lebih mudah diterima oleh pemuda. Inovasi ini dapat berupa penyajian informasi dalam bentuk infografis. Organisasi pemuda, baik di dalam maupun luar sekolah, merupakan pihak potensial yang perannya dapat dioptimalkan untuk kepentingan ini. Selain itu, dalam rangka memengaruhi pemuda untuk berperilaku hidup sehat dan menghindari perilaku berisiko, sosialisasi mengenai perubahan perilaku perlu ditujukan kepada keluarga dan masyarakat secara luas. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung pemuda untuk berperilaku positif.

Tantangan kedua adalah pemuda perokok yang proporsinya di semua kabupaten/kota hampir sama besar, dengan variasi sebesar 21%–34%. Di Provinsi Jawa Barat, hanya ada empat wilayah dengan angka pemuda yang merokok di bawah angka nasional, yaitu Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Cimahi (Gambar 56). Daerah-daerah ini memiliki proporsi pemuda yang merokok paling kecil. Sebaliknya, daerah dengan proporsi pemuda yang merokok paling besar adalah Kabupaten Purwakarta (33,89%) dan Kabupaten Bogor (33,52%).

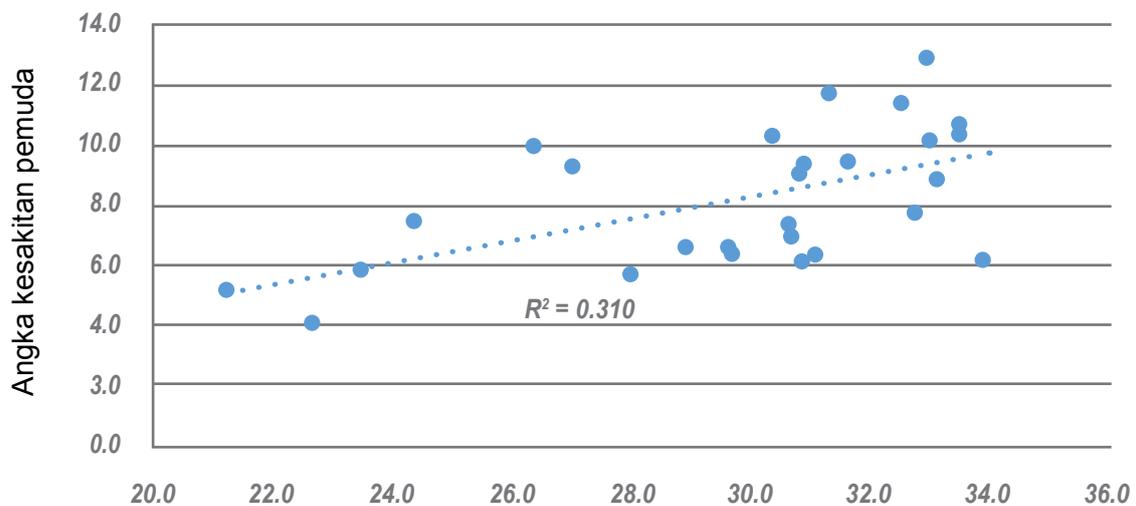
Sebagai salah satu gaya hidup yang tidak sehat, perilaku merokok di antara para pemuda memiliki korelasi positif dengan angka kesakitan pemuda.



Gambar 56. Proporsi pemuda yang merokok di tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat pada 2018

Adanya korelasi positif sebesar 49% mengindikasikan bahwa provinsi dengan proporsi pemuda perokok yang lebih besar pada umumnya memiliki angka kesakitan pemuda yang lebih tinggi pula (Gambar 57).

replikasi tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi setempat. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah upaya untuk membantu perokok agar bisa berhenti merokok. Salah satu hal yang dapat



Gambar 57. Korelasi antara proporsi pemuda yang merokok dan angka kesakitan pemuda berdasarkan data tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada 2018

Iklan rokok yang menampilkan gaya hidup “idaman” pemuda diidentifikasi sebagai faktor kuat yang memengaruhi besarnya proporsi pemuda yang merokok di Provinsi Jawa Barat. Perilaku merokok juga didukung oleh penjualan rokok secara bebas dengan harga murah dan lingkungan pertemanan yang mendorong perilaku ini. Bahkan, ada persepsi yang berkembang di antara pemuda bahwa merokok membuat orang terlihat “keren dan gaul” dan merupakan bentuk kesetiakawanan. Orang tua yang merokok juga diidentifikasi sebagai faktor yang mendukung perilaku merokok di antara pemuda—mereka tidak memiliki teladan di lingkungan rumah dalam upaya menghindari perilaku merokok.

Untuk mengendalikan perilaku merokok di antara pemuda, diperlukan komitmen politik pemerintah untuk meningkatkan cukai rokok, melarang iklan rokok, dan menegakkan aturan yang melarang penjualan rokok kepada anak. Upaya tersebut juga perlu direalisasikan di instansi pemerintahan yang lebih kecil, termasuk desa, dusun, RW, dan RT. Salah satu praktik baik yang terdapat di Buah Batu, Kota Bandung, adalah adanya komitmen bersama seluruh warga untuk mewujudkan kawasan tanpa asap rokok dan melindungi anak dari perilaku merokok. Praktik baik ini perlu direplikasi oleh daerah lain. Namun, karena tiap daerah memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda-beda, pendekatan dalam proses

dilakukan adalah memanfaatkan nilai lokal dalam program Upaya Berhenti Merokok (UBM). Selain itu, keberadaan duta antirokok yang melibatkan idola remaja dan iklan antirokok pada televisi dinilai akan cukup efektif untuk menurunkan perilaku merokok di kalangan pemuda.

Tantangan ketiga adalah kurang tersedianya ruang publik yang aman bagi pemuda. Pada 2018, proporsi pemuda yang menjadi korban kejahatan di Provinsi Jawa Barat lebih besar dibandingkan dengan angka nasional. Masalah ekonomi diidentifikasi sebagai faktor pendorong tingginya tingkat kejahatan di Provinsi Jawa Barat. Untuk meningkatkan ketersediaan ruang publik yang aman bagi pemuda, upaya yang bisa dilakukan adalah menambah jumlah petugas keamanan dan meningkatkan kepedulian masyarakat.

Tantangan keempat adalah masalah kehamilan remaja. Meski data remaja perempuan yang sedang hamil tidak tersedia di tingkat kabupaten/kota, hasil FGD menunjukkan kasus ini terjadi di banyak daerah di Provinsi Jawa Barat. Terdapat sejumlah faktor yang secara langsung dan tidak langsung berkontribusi terhadap terjadinya kehamilan pada usia remaja. Berhubungan seksual pada usia remaja baik di dalam maupun di luar pernikahan merupakan faktor yang secara langsung menyebabkan

terjadinya kehamilan remaja. Dalam konteks hubungan pernikahan, kehamilan remaja terjadi ketika pernikahan tersebut dilakukan sebelum perempuan berusia 19 tahun. Sementara itu, faktor yang secara tidak langsung dianggap menyebabkan terjadinya kehamilan remaja di luar pernikahan adalah (i) faktor keluarga, khususnya terkait dengan kedekatan hubungan dan komunikasi antara orang tua dan anak; (ii) pendidikan kesehatan reproduksi remaja yang masih parsial; (iii) norma lokal yang menabukan diskusi tentang pendidikan kesehatan reproduksi remaja; serta (iv) literasi digital remaja yang masih minim sehingga mendorong mereka untuk mengakses tayangan yang bermuatan pornografi. Dengan mengacu pada faktor-faktor tersebut, perbaikan pola asuh dalam keluarga serta pemberian pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi remaja yang komprehensif kepada berbagai pihak berpeluang untuk mencegah kasus kehamilan remaja.

Pemerintah Pusat sebetulnya telah memiliki berbagai program yang secara langsung atau tidak langsung menjadi sumber informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi. Di antaranya adalah (i) Generasi Berencana (GenRe), Pusat Informasi dan Konseling Remaja, dan Bina Keluarga Remaja dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN); (ii) Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja dari Kementerian Kesehatan; dan (iii) Penguatan Kepemimpinan Pemuda dalam Rumah Tangga dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Namun, hasil FGD menunjukkan masih sedikitnya pemuda yang mengetahui program-program tersebut. Hasil ini sejalan dengan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 yang menunjukkan bahwa hanya ada 10,20% perempuan dan 4,80% laki-

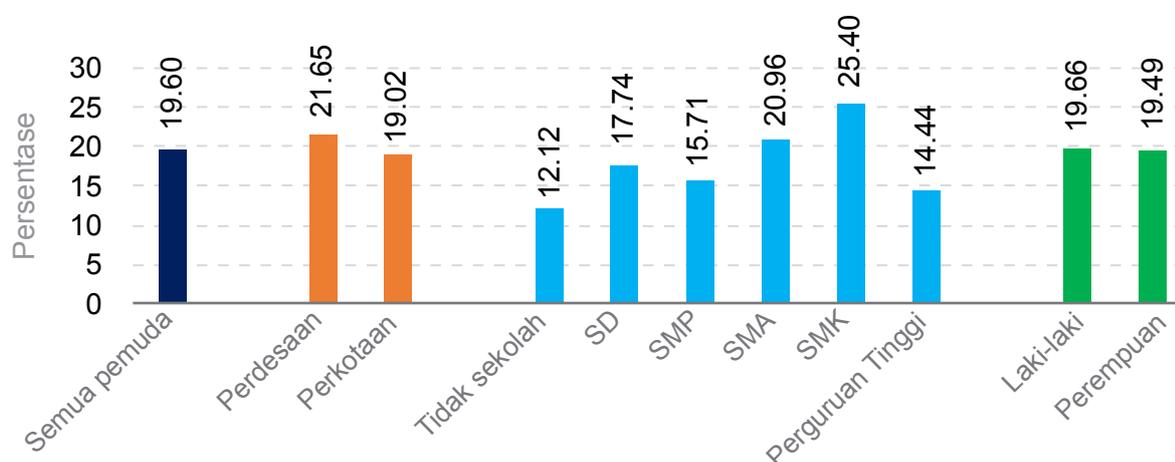
laki yang mengetahui tempat untuk mendapatkan informasi dan konsultasi tentang kesehatan reproduksi. Kondisi tersebut mengindikasikan terbatasnya jangkauan program dan minimnya sosialisasi terkait keberadaan program.

4.3.3. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja

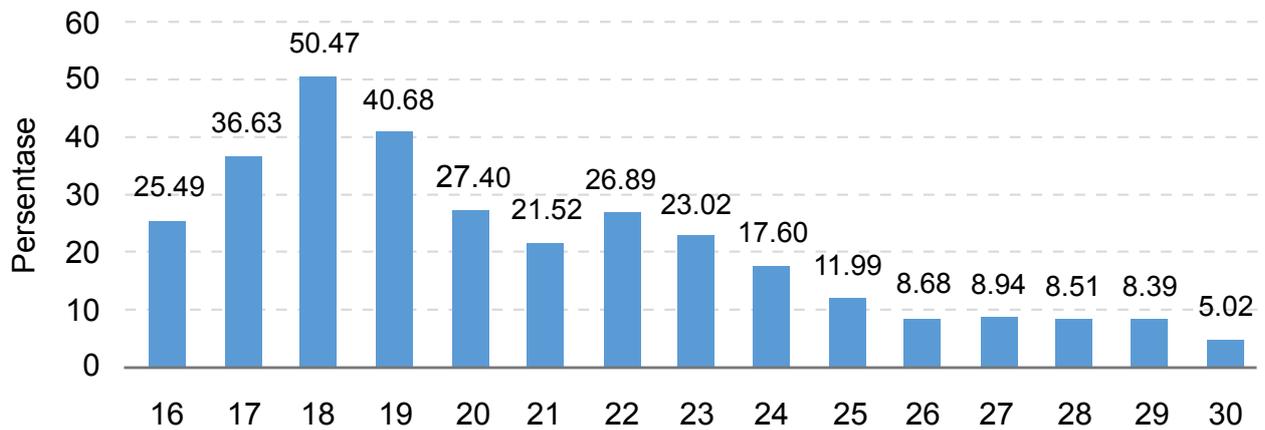
Salah satu indikator yang menyebabkan nilai IPP Provinsi Jawa Barat menjadi nilai paling rendah pada 2018 adalah tingginya tingkat pengangguran pemuda yang mencapai 19,60%, sementara angka nasional hanya sebesar 13,47%. Gambar 57 menunjukkan tingkat pengangguran pemuda di Provinsi Jawa Barat berdasarkan lokasi, pendidikan, dan jenis kelamin. Tingkat pengangguran pemuda di perdesaan sedikit lebih tinggi daripada di perkotaan. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar kasus pengangguran pemuda terjadi pada lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) (25,40%) dan SMA (20,96%). Sementara itu, tidak terdapat perbedaan signifikan antara tingkat pengangguran pemuda laki-laki dan perempuan.

Ketika tingkat pengangguran dilihat berdasarkan usia, terlihat pola yang menunjukkan bahwa kasus pengangguran lebih banyak terjadi pada kelompok usia yang lebih muda (Gambar 58).

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, tingkat pengangguran sangat bervariasi dan trennya cenderung melebihi angka nasional. Dari semua kabupaten/kota, hanya ada dua kabupaten yang tingkat pengangguran pemudanya lebih rendah daripada angka nasional, yakni Kabupaten Pangandaran (11,53%) dan Kabupaten Bandung (11,96%). Kabupaten Bandung merupakan daerah



Gambar 58. Tingkat pengangguran pemuda di Provinsi Jawa Barat berdasarkan kategori wilayah, tingkat pendidikan, dan gender pada 2018



Gambar 59. Tingkat pengangguran pemudadi Provinsi Jawa Barat berdasarkan usia pada 2018

dengan jumlah industri berskala besar dan sedang terbanyak kedua se-Provinsi Jawa Barat (BPS, 2016). Kondisi ini memungkinkan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar, termasuk dari kalangan pemuda. Sementara itu, tingkat pengangguran pemuda tertinggi terdapat di Kabupaten Purwakarta (24,69%), diikuti oleh Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang yang angkanya sama-sama sekitar 24,60%.

Masuknya Kabupaten Karawang ke dalam kelompok kabupaten dengan TPT pemuda tertinggi di Provinsi Jawa Barat sebetulnya agak ironis. Kabupaten ini memiliki cukup banyak industri berskala besar dan sedang. Selain itu, Kabupaten Karawang terletak di sebelah Kabupaten Bekasi yang memiliki industri berskala besar dan sedang terbanyak se-Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, Kabupaten Karawang

seharusnya memiliki peluang kerja yang relatif besar, termasuk bagi kelompok pemuda. Tingginya angka pengangguran di Kabupaten Karawang dipengaruhi oleh ketatnya persaingan kerja di kabupaten ini. Kabupaten Karawang merupakan kabupaten dengan upah minimum kabupaten/kota tertinggi se-Provinsi Jawa Barat pada 2018–berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2018. Kondisi ini menjadi daya tarik bagi calon pekerja dari luar kabupaten sehingga memperketat persaingan kerja antara penduduk Kabupaten Karawang dan pendatang.

Hasil FGD menunjukkan beberapa tantangan yang dihadapi Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan pemudanya pada domain lapangan dan kesempatan kerja. Pertama, kapasitas/kompetensi individu pemuda pada umumnya rendah dan tidak sesuai



Gambar 60. Tingkat pengangguran pemuda di Provinsi Jawa Barat berdasarkan kabupaten/kota pada 2018

dengan kebutuhan dunia usaha. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya penguasaan soft skills, yakni sikap disiplin, ulet, beretos kerja yang tinggi, dan produktif. Rendahnya kompetensi pemuda juga berkaitan dengan kurikulum sekolah menengah, terutama SMK, yang tidak sejalan dengan kebutuhan dunia industri.

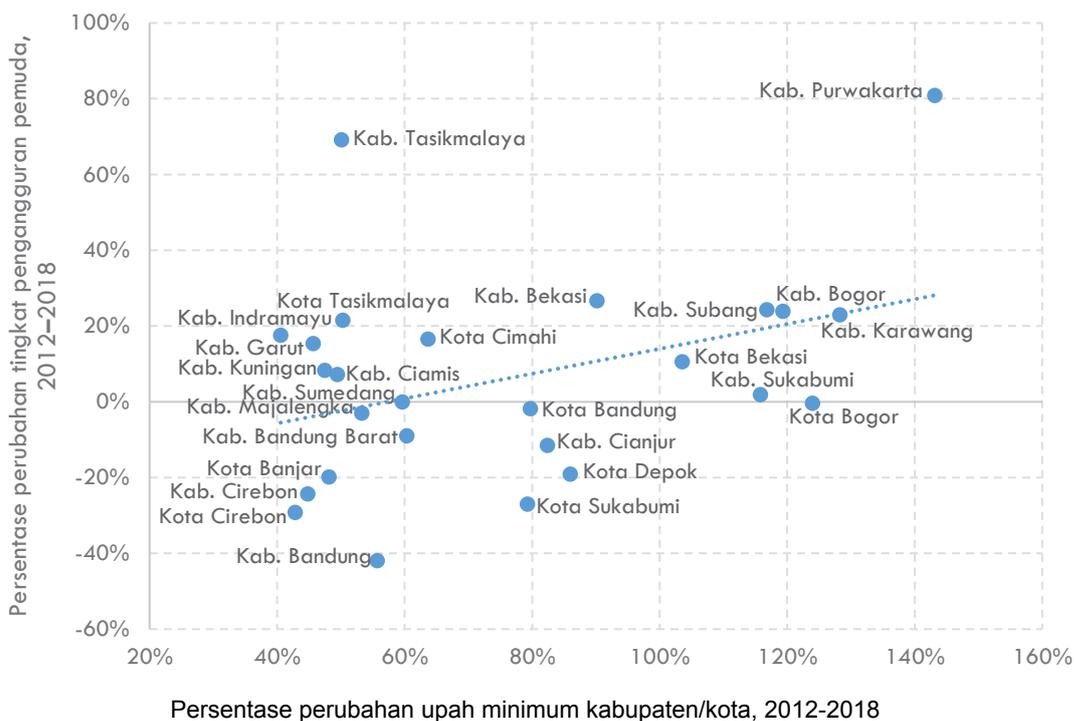
Kedua, tingginya tingkat pengangguran pemuda dipengaruhi oleh faktor eksternal. Tingginya tingkat urbanisasi—banyaknya pemuda dari luar Jawa Barat yang bermigrasi ke provinsi ini—menjadikan persaingan kerja dan usaha makin ketat. Jumlah pemuda yang banyak ini tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia di Provinsi Jawa Barat akibat pertumbuhan ekonomi yang melambat. Persoalan lain adalah informasi lowongan pekerjaan yang sulit diakses atau tidak tersedia secara merata. Akses terhadap permodalan untuk membuka usaha pun terbatas.

Ketiga, kebijakan yang tidak efektif juga menjadi faktor penyebab tingginya tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat. Program pelatihan kewirausahaan tidak efektif karena hanya bersifat sementara (tidak berkelanjutan), serta tidak ada proses pemantauan dan evaluasi terhadap program tersebut. Program pelatihan kewirausahaan pemuda juga sering kali tidak relevan dengan kebutuhan pasar. Sebagai contoh, pelatihan menjahit

seharusnya dilaksanakan selama tiga bulan, tetapi pada kenyataannya hanya berjalan selama tiga minggu. Hal ini terjadi karena peserta tidak tertarik dan menganggap bahwa program tersebut tidak cocok dengan perkembangan dunia usaha.

Kebijakan lain yang menyebabkan makin kecilnya kesempatan kerja di Provinsi Jawa Barat adalah upah minimum kabupaten/kota di provinsi ini yang naik secara signifikan sejak 2012. Peserta FGD berpendapat bahwa beberapa pabrik dan perusahaan direlokasi ke luar Provinsi Jawa Barat, seperti ke Provinsi Jawa Tengah, karena harga buruh di Provinsi Jawa Barat relatif lebih tinggi daripada di Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat keterampilan yang sama. Hal tersebut pada akhirnya berdampak pada penurunan daya serap tenaga kerja, terutama pemuda, di Provinsi Jawa Barat. Gambar 60 menunjukkan adanya korelasi positif antara perubahan relatif TPT pemuda dalam periode 2012–2018 dan perubahan relatif upah minimum kabupaten/kota. Koefisien korelasi kedua indikator ini tidak terlalu kuat, yakni 40%. Namun, ada kecenderungan bahwa kabupaten dengan perubahan upah minimum yang besar mengalami peningkatan TPT yang relatif tinggi.

Beberapa hal positif terkait ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat adalah diberlakukannya izin usaha satu pintu untuk memudahkan investasi, serta munculnya pusat-pusat perusahaan rintisan (startup)



Gambar 61. Korelasi antara perubahan tingkat upah minimum kabupaten/kota dan perubahan tingkat pengangguran pemuda dalam periode 2012-2018

digital yang relevan dengan karakter pemuda seiring dengan kemajuan internet. Perkembangan industri kreatif, seperti pariwisata, yang besar di Provinsi Jawa Barat juga merupakan hal yang menggembirakan.

Dalam rangka menekan angka pengangguran pemuda di Provinsi Jawa Barat, diperlukan beberapa kebijakan untuk meningkatkan kapasitas pemuda dan kemudahan usaha. Pertama, perlu disediakan pelatihan usaha dan pelatihan keterampilan melalui jalur pendidikan nonformal yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri. Kedua, kurikulum SMK dan pendirian SMK baru perlu dievaluasi dan ditingkatkan agar sesuai dengan kebutuhan industri terbaru. Ketiga, program pemagangan di dunia usaha perlu digalakkan untuk meningkatkan kompetensi serta pengalaman kerja pemuda. Keempat, penyedia kerja dan pelaku industri, serta pencari kerja perlu didata untuk memetakan ketersediaan lapangan pekerjaan. Kelima, kebijakan ketenagakerjaan harus dibuat ramah pekerja dan pengusaha untuk mengoptimalkan perkembangan ekonomi daerah. Keenam, pembangunan desa harus melibatkan pemuda, mulai dari perencanaan hingga implementasinya; misalnya, pemuda dapat dilibatkan dalam pengembangan bisnis melalui badan usaha milik desa (BUM desa). Ketujuh, diperlukan peraturan gubernur yang mengatur koordinasi lintas sektor, beserta peraturan turunannya (peraturan bupati atau walikota).

4.3.4. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan

Secara umum, proporsi pemuda di Provinsi Jawa Barat yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan cukup besar. Namun, proporsi pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi dan memberikan saran/pendapat dalam rapat masih kecil. Proporsi pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan mencapai 80% pada 2018. Walaupun demikian, hanya ada 4,75% pemuda yang aktif dalam organisasi dan hanya ada 5,72% pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pemuda masih sebatas menjadi peserta dalam berbagai kegiatan sosial atau aktivitas kepemudaan. Hanya ada sebagian kecil pemuda yang secara aktif menjadi penggerak atau memiliki peran organisatoris dan menyumbang ide.

Hasil FGD menunjukkan beberapa faktor yang menghambat pemuda untuk secara aktif berorganisasi dan berpendapat dalam rapat. Pertama,

terkait dengan kecilnya proporsi pemuda yang memberikan saran dalam rapat, faktor penghambat tidak hanya datang dari penyelenggara rapat, melainkan juga dari individu pemuda sendiri. Dari sisi penyelenggara rapat, kurangnya kesempatan yang diberikan kepada pemuda menjadi salah satu batu sandungan bagi mereka untuk berpendapat dalam rapat. Pemuda sering kali merasa dianggap sebagai 'anak kecil' dan terlalu muda untuk berpendapat. Dari sisi individu pemuda, faktor penghambatnya adalah rendahnya tingkat kepercayaan diri untuk berdiskusi dan berpendapat di depan umum. Perasaan malu jika pendapatnya ditolak juga menjadi faktor yang menghambat pemuda untuk berpendapat dalam rapat.

Kedua, terkait dengan rendahnya partisipasi pemuda dalam organisasi, salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya minat pemuda untuk berorganisasi. Terbatasnya ketersediaan organisasi terutama di daerah perdesaan dan adanya anggapan bahwa budaya berorganisasi tidak sesuai dengan karakter 'kelompok milenial' juga mengurangi daya tarik aktivitas berorganisasi bagi kelompok pemuda. Hal ini diperparah dengan minimnya anggaran sebagian besar organisasi yang menyebabkan terbatasnya jumlah dan jenis kegiatan yang dapat dilakukan. Faktor yang lain adalah pengelolaan waktu. Padatnya aktivitas belajar/bekerja juga menjadi pertimbangan bagi pemuda untuk tidak berorganisasi (secara aktif). Kurangnya dukungan orang tua dan keberadaan teman yang memengaruhi pemuda untuk berorganisasi merupakan faktor-faktor lain yang juga menentukan partisipasi pemuda dalam organisasi.

Menciptakan lingkungan dengan respons positif, seperti aparat pemerintah, orang tua, dan teman, merupakan hal strategis yang diperlukan untuk mendorong partisipasi pemuda baik untuk berpendapat dalam rapat maupun berpartisipasi dalam organisasi. Hal ini dapat diupayakan melalui beberapa langkah berikut. Pertama, kapasitas aparat pemerintah terkait pembangunan yang sensitif terhadap pemuda perlu ditingkatkan. Pemuda harus ditempatkan sebagai salah satu pemangku kepentingan strategis pembangunan. Kedua, pengadaan ruang dan mekanisme yang diformalkan dalam bentuk dokumen kebijakan tertulis untuk menjamin partisipasi pemuda yang bermakna juga perlu diupayakan, misalnya, dengan merancang prosedur operasi standar (standard operating procedure, SOP) atau menciptakan

ruang berpendapat yang berbasis teknologi. Ketiga, mengingat pemuda—terutama yang berusia remaja—masih berada dalam tahap pencarian jati diri, dukungan orang tua merupakan hal yang diperlukan untuk mendorong partisipasi aktif pemuda dalam rapat dan organisasi. Pemahaman mereka tentang manfaat berpartisipasi aktif dalam organisasi dan rapat juga perlu ditingkatkan.

Diperlukan juga upaya pengumpulan data dan penyebaran informasi terkait keberadaan organisasi pemuda, termasuk organisasi kelompok pemuda yang rentan terhadap diskriminasi (pemuda dengan disabilitas, pemuda perempuan, dll.). Hal ini bertujuan menjamin keterlibatan pemuda dengan berbagai karakteristik dalam proses perumusan kebijakan. Terakhir, terkait dengan partisipasi dalam organisasi pemuda, desain organisasi yang ramah generasi milenial—organisasi dengan budaya nontradisional—merupakan aspek penting yang dapat meningkatkan ketertarikan pemuda untuk berorganisasi.

Pemuda juga perlu diberdayakan agar mau dan mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Karakteristik pemuda sebagai kelompok usia yang berada dalam masa aktualisasi dan pengembangan diri dapat dimanfaatkan sebagai pendorong partisipasi aktif mereka dalam organisasi. Hal ini dapat dilakukan, antara lain, melalui kegiatan edukasi di dalam dan di luar sekolah yang bertujuan menginspirasi pemuda untuk terlibat dalam organisasi dan kegiatan pembangunan secara umum.

4.3.5. Domain Gender dan Diskriminasi

Salah satu tantangan terbesar pembangunan pemuda terkait gender adalah tingginya kasus perkawinan usia anak. Pada 2018, angka perkawinan usia anak di tingkat provinsi mencapai 13,26%. Berdasarkan data Susenas 2017, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan persentase perkawinan di bawah usia 16 tahun tertinggi keempat (17,28%) dan provinsi dengan persentase perkawinan usia 17–18 tahun tertinggi ketiga (23,43%) se-Indonesia (Priohutomo, 2018). Dengan demikian, pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, perlu melakukan upaya percepatan untuk mencapai kondisi ideal 0% kasus perkawinan usia anak.

Tingkat pendidikan yang rendah merupakan salah satu faktor yang dapat menjelaskan fenomena

perkawinan usia anak. Namun, hingga saat ini akses pemuda terhadap fasilitas pendidikan menengah belum merata. Di Kabupaten Bandung, misalnya, jumlah SMA/ sederajat relatif terbatas sehingga pada akhirnya orang tua memilih untuk menikahkan anaknya daripada menyekolahkan mereka di luar kabupaten, seperti Kota Bandung, yang memerlukan biaya transportasi cukup besar. Oleh karena itu, bagi pemerintah kabupaten, ketercukupan jumlah dan sebaran SMA/ sederajat—yang kewenangannya berada di tingkat provinsi—merupakan salah satu upaya mencegah perkawinan usia anak.

Perkawinan usia anak juga tidak terlepas dari persoalan ketimpangan dalam relasi gender. Di tingkat keluarga, anak perempuan kerap dianggap sebagai beban dan sekaligus aset ekonomi. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah yang tidak mampu membayar biaya pendidikan pada umumnya melihat anak perempuan sebagai beban ekonomi keluarga yang harus segera ditangani, yakni melalui pernikahan sedini mungkin (International Center for Research on Women dalam BPS, 2018). Hasil FGD juga menunjukkan bahwa, sebagai aset ekonomi keluarga, anak perempuan dinikahkan melalui skema kawin kontrak demi mendapatkan mahar tinggi, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Sementara itu, di tingkat masyarakat, perempuan yang belum menikah ketika berusia 16 tahun akan mendapat cap ‘perawan tua’—norma seperti ini sering dijumpai di Provinsi Jawa Barat. Bahkan, di Kabupaten Cianjur, cap ini disematkan pada perempuan berusia 15 tahun yang belum menikah. Untuk menghindari rasa malu karena dianggap tidak sejalan dengan norma setempat, anak perempuan cenderung menikah atau dinikahkan pada usia muda. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikasi pentingnya pendidikan kesetaraan gender yang komprehensif dan masif agar perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki akses terhadap pengambilan keputusan pada berbagai aspek kehidupannya, terutama kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja.

Masih adanya kasus perkawinan usia anak juga mengindikasikan lemahnya implementasi regulasi tentang pendewasaan usia perkawinan. Pemerintah Indonesia telah merevisi batas usia minimal perempuan untuk menikah dari semula 16 tahun menjadi 19 tahun. Namun, hasil FGD menunjukkan masih banyak pernikahan yang terjadi di bawah batas usia minimal tersebut. Di Kabupaten Cianjur, misalnya, tokoh agama memiliki peran kunci dalam

melanggengkan perkawinan usia anak karena merekalah penghulu bagi pasangan usia muda yang belum memenuhi ketentuan batas usia minimal sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu, tokoh agama merupakan salah satu pihak terpenting yang harus terpapar regulasi tentang batas usia perkawinan.

Di Kabupaten Cianjur, perkawinan usia anak dianggap dapat mempermudah persyaratan untuk menjadi pekerja migran luar negeri. Bagi masyarakat di kabupaten ini, bekerja di luar negeri merupakan peluang untuk keluar dari jerat kemiskinan. Buruknya pola pengasuhan dan kurangnya kedekatan dalam keluarga serta minimnya pendidikan kesehatan reproduksi remaja yang komprehensif juga berperan dalam menyebabkan terjadinya perkawinan usia anak.

Untuk mencegah perkawinan usia anak, pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebetulnya telah mengupayakan sejumlah program atau kebijakan, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Contohnya adalah Tribina Keluarga dari BKKBN yang menasar remaja dan keluarga dengan anak remaja, serta Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita (Sekoper Cinta) yang diinisiasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sejak 2018. Kedua program ini sebetulnya terdapat di semua kabupaten/kota, tetapi pelaksanaannya sangat tergantung pada keaktifan para kader di tingkat lokal. Salah satu wilayah dengan kader-kader lokal yang aktif adalah Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor juga memiliki program inisiatif Sekolah Ibu sejak 2017. Program ini memberikan banyak materi, termasuk materi tentang pengasuhan dan kesehatan reproduksi yang di dalamnya memuat pendewasaan usia perkawinan dan penundaan kehamilan anak pertama. Keaktifan para kader Tribina Keluarga dan keberadaan Sekolah Ibu diduga berperan dalam menekan angka perkawinan usia anak di Kota Bogor.

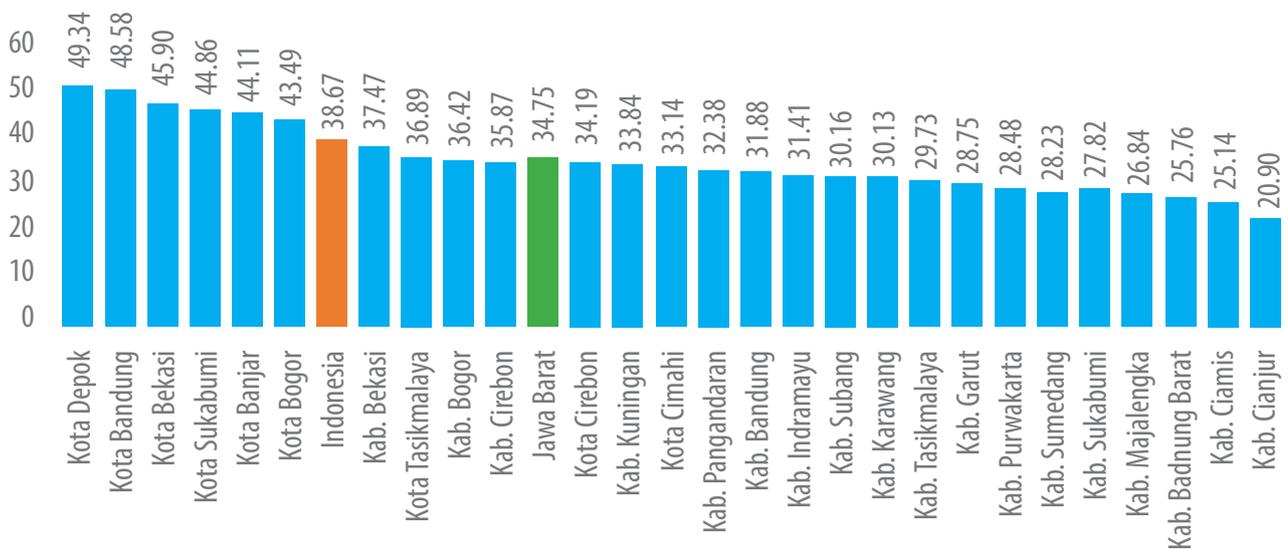
Sementara itu, upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah mengeluarkan kebijakan pendewasaan usia perkawinan melalui Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa usia ideal perkawinan untuk perempuan adalah 20 tahun dan laki-laki 25 tahun. Upaya ini jelas perlu diapresiasi, mengingat usia perkawinan yang ditetapkan dalam perbup tersebut lebih tinggi daripada undang-undang tentang perkawinan, baik Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

yang hanya mensyaratkan usia minimal 16 tahun bagi perempuan maupun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun.

Hasil FGD menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas keluarga agar memiliki pola pengasuhan yang responsif gender, serta sosialisasi pendidikan kesehatan reproduksi remaja yang komprehensif. Sosialisasi harus menasar semua pemangku kepentingan, termasuk anak, orang tua, pihak sekolah, pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Terkait dengan hal ini, pendidikan seks dan kesehatan reproduksi remaja yang komprehensif perlu dimasukkan ke dalam materi pembelajaran di sekolah. Begitu pula halnya dengan penguatan peran guru bimbingan penyuluhan, mereka diharapkan dapat melakukan sosialisasi dan pendampingan tentang kesehatan reproduksi remaja secara berkala–tidak sekadar memfasilitasi tes kecerdasan intelektual siswa.

Sebagai upaya untuk menihilkan angka perkawinan usia anak di Provinsi Jawa Barat, perlu ada kebijakan percepatan pencegahan perkawinan usia anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang di dalamnya memuat pendewasaan usia perkawinan dan penundaan kehamilan anak pertama. Semua peserta FGD sepakat dengan perlu adanya regulasi tentang pendewasaan usia perkawinan dan penundaan kehamilan anak pertama di tingkat provinsi yang bisa diturunkan ke tingkat kabupaten/kota. Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah Pusat harus membangun kolaborasi lintas sektor yang terdiri atas BKKBN, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kolaborasi ini diharapkan juga bisa diimplementasikan di dinas-dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Indikator domain gender dan diskriminasi selanjutnya adalah partisipasi pemuda perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan. Terkait dengan partisipasi pemuda perempuan dalam pendidikan, hanya ada enam daerah yang memiliki proporsi pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi lebih besar daripada angka nasional (Gambar 62). Keenam daerah tersebut berstatus kotamadya. Secara rata-rata, peluang pemuda perempuan untuk



Gambar 62. Proporsi pemuda perempuan berusia 16-24 tahun yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi pada 2018

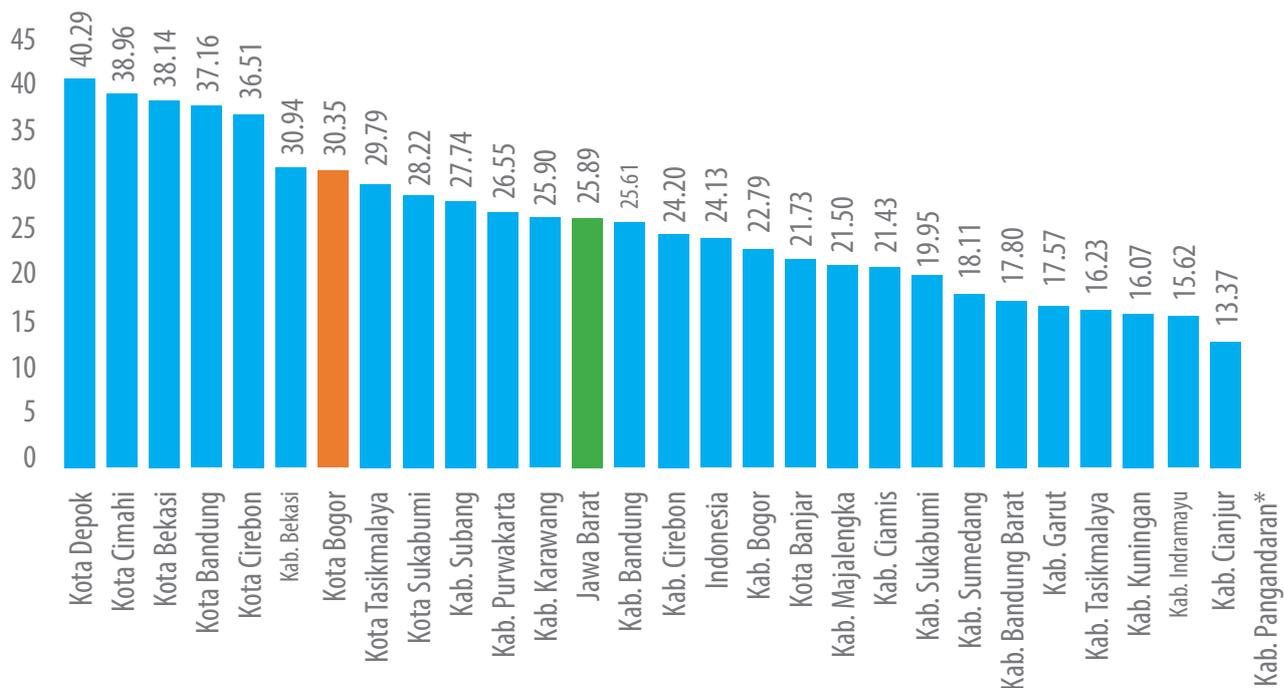
menempuh pendidikan menengah dan tinggi di Provinsi Jawa Barat lebih kecil dibandingkan dengan tingkat nasional. Daerah dengan proporsi pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi terbesar adalah Kota Depok dan yang terkecil adalah Kabupaten Cianjur. Di Kabupaten Cianjur, kondisi ini sejalan dengan masih banyaknya kasus perkawinan usia anak. Pemuda perempuan yang menikah biasanya akan langsung berhenti sekolah. Hal ini berarti bahwa makin dini pemuda perempuan menikah, makin kecil pula peluangnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mencegah perkawinan usia anak serta membangun pola pikir dan meningkatkan kesadaran orang tua/masyarakat akan pentingnya pendidikan merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian pendidikan pemuda perempuan Provinsi Jawa Barat.

Terkait dengan partisipasi pemuda perempuan dalam pekerjaan khususnya di sektor formal, kesempatan pemuda perempuan di Jawa Barat untuk bekerja di sektor formal lebih tinggi daripada angka nasional, yakni 25,89% berbanding 24,13%. Hal ini didorong oleh fakta bahwa, pada 2018, 74% penduduk Provinsi Jawa Barat tinggal di perkotaan—proporsi ini menempati posisi ketiga terbesar setelah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Kepulauan Riau. Jawa Barat juga merupakan salah satu provinsi yang menjadi lokasi industri nasional. Dengan besarnya jumlah penduduk di perkotaan dan adanya industri nasional, sektor

formal di Provinsi Jawa Barat berkembang dengan cukup baik. Meski demikian, kesempatan pemuda perempuan untuk bekerja di sektor formal tidak merata antar kabupaten/kota. Daerah perkotaan memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan daerah kabupaten yang pada umumnya bercirikan perdesaan. Kabupaten/kota dengan proporsi pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal terbesar adalah Kota Depok dan Kota Cimahi, sedangkan daerah dengan proporsi terkecil adalah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Indramayu (Gambar 63).

Hasil FGD menunjukkan beberapa faktor yang menghambat pemuda perempuan untuk bekerja di sektor formal di Provinsi Jawa Barat. Pertama, perempuan masih dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas domestik, seperti mengasuh anak dan mengurus rumah tangga. Perempuan didorong untuk segera menikah sejak usia remaja. Sementara itu, bagi perempuan yang telah menikah, memasuki dunia kerja menjadi hal yang menantang. Hal ini terjadi karena adanya 'kewajiban' menjalankan peran domestik yang muncul dalam bentuk larangan bekerja dari suami.

Di samping itu, kesempatan untuk bekerja di sektor formal dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Individu yang memiliki rata-rata lama sekolah lebih besar atau tingkat pendidikan lebih tinggi akan memiliki peluang yang lebih besar untuk bekerja di sektor formal dibandingkan dengan individu yang

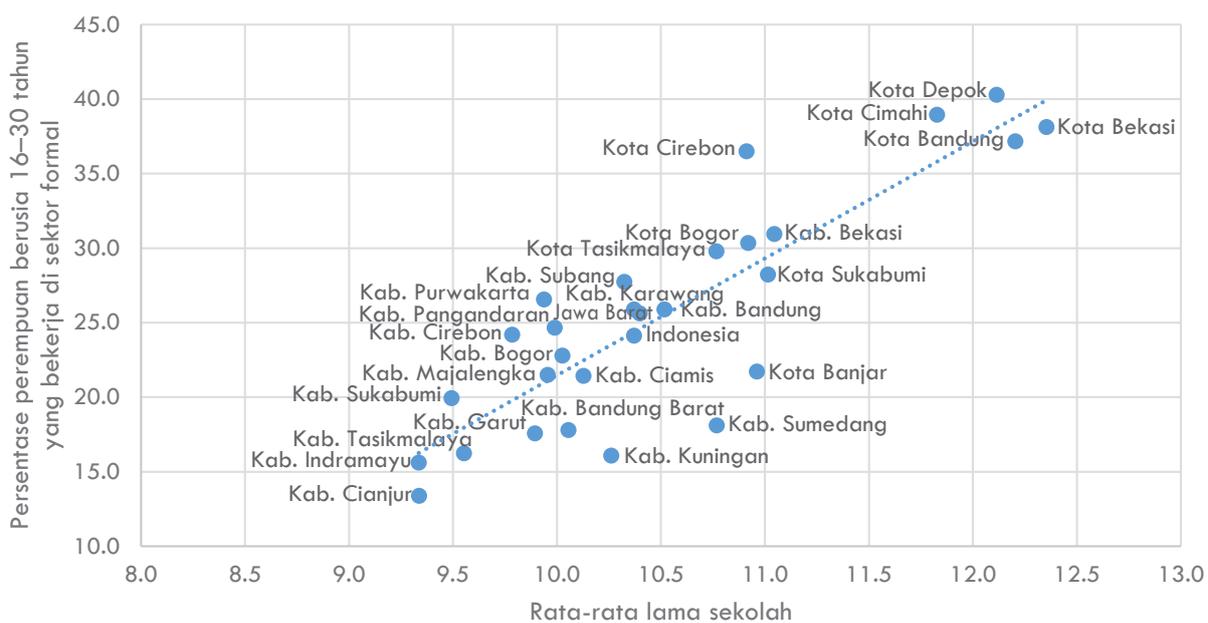


Gambar 63. Proporsi pemuda perempuan berusia 16–30 tahun yang bekerja di sektor formal

Keterangan: *) Data Kabupaten Pangandaran tidak tersedia.

berpendidikan rendah. Sebagai contoh, dengan besarnya proporsi pemuda perempuan yang menempuh pendidikan tinggi, Kota Depok memiliki proporsi pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal terbesar. Sebaliknya, Kabupaten Cianjur memiliki proporsi pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal dan proporsi pemuda perempuan yang menempuh pendidikan menengah dan tinggi yang sama-sama kecil.

Untuk meningkatkan akses pemuda perempuan terhadap pekerjaan di sektor formal, beberapa hal perlu dilakukan. Pertama, akses pemuda perempuan terhadap pendidikan perlu ditingkatkan. Perhatian lebih besar perlu diarahkan pada upaya peningkatan akses terhadap pendidikan formal untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah serta APK sekolah menengah dan perguruan tinggi. Akses pemuda perempuan terhadap pendidikan



Gambar 64. Korelasi antara rata-rata lama sekolah dan proporsi perempuan yang bekerja di sektor formal

nonformal juga perlu diperluas, misalnya, melalui pelatihan keterampilan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka. Kedua, perlu diciptakan program intervensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai kesetaraan gender dalam rumah tangga. Hal ini diperlukan agar akses pemuda perempuan terhadap pekerjaan di sektor formal dapat menjadi kesempatan untuk aktualisasi diri dan tidak menjadi beban tambahan bagi mereka. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah berbagi peran dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan pengasuhan/perawatan tak berbayar (*unpaid carework*). Ketiga, karena pekerja perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan pekerja laki-laki, diperlukan langkah afirmatif untuk mendorong pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut baik oleh pemberi kerja maupun pemerintah daerah. Kebutuhan pekerja perempuan mencakup pengelolaan waktu kerja (misalnya, dengan tidak memberikan jam kerja malam bagi mereka), serta penyediaan ruang menyusui dan tempat penitipan anak yang harganya terjangkau.

4.4. BENANG MERAH LANGKAH KE DEPAN

Sebagai provinsi dengan jumlah pemuda terbesar dan nilai IPP terendah se-Indonesia pada 2018, Provinsi Jawa Barat menghadapi berbagai tantangan. Akar persoalan di tiap domain pembangunan pemuda tidak benar-benar terpisah satu sama lain. Beberapa faktor, yang dapat dianggap sebagai faktor kunci, memengaruhi kinerja lebih dari satu domain. Contohnya adalah budaya patriarki yang mendorong anak laki-laki untuk bekerja dan anak perempuan untuk segera menikah. Hal ini secara langsung berdampak pada rendahnya capaian domain pendidikan serta domain gender dan diskriminasi. Tingkat pendidikan yang rendah menjadi tantangan tersendiri bagi pemuda perempuan untuk masuk ke lapangan kerja di sektor formal, apalagi bagi mereka yang sudah menikah.

Berdasarkan analisis situasi dan tantangan, ditemukan pula benang merah bahwa perkembangan domain tertentu dapat mendukung domain lain untuk berkembang. Domain ini pada umumnya merupakan

domain yang berada pada lapisan pembangunan individu, yaitu domain pendidikan serta domain kesehatan dan kesejahteraan. Intervensi pada domain ini akan mendorong kemajuan domain-domain lain pada lapisan pembangunan di atasnya (pembangunan penghidupan layak dan partisipasi). Dengan kata lain, intervensi pada domain pendidikan serta domain kesehatan dan kesejahteraan menjadi intervensi strategis yang dapat membantu percepatan peningkatan capaian domain-domain yang lain.

Upaya membenahi faktor-faktor kunci bersama dengan membenahi capaian pembangunan individu pemuda perlu mendapat perhatian lebih karena hal ini akan memberikan efek pengganda pada peningkatan nilai IPP Provinsi Jawa Barat. Namun, pada saat yang sama, faktor lain yang secara spesifik memengaruhi domain tertentu juga perlu dibenahi agar tercipta lingkungan yang mendukung pemuda untuk membangun dirinya dan meningkatkan kualitas penghidupan dan kesejahteranya agar mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Catatan lain adalah tidak seragamnya dinamika persoalan pembangunan pemuda di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, prioritas atau penekanan intervensi pembangunan pemuda akan berbeda antarkabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota perlu merumuskan prioritas intervensi pembangunan pemuda ini, antara lain, dengan mengamati capaian indikator yang masih tertinggal.

Daerah-daerah di Indonesia memiliki persoalan pembangunan pemuda yang beragam dengan penyebab yang bervariasi. Oleh karena itu, analisis situasi dan tantangan pembangunan merupakan langkah penting yang perlu diambil agar diperoleh rumusan kebijakan daerah yang tepat untuk mendorong perbaikan pembangunan pemuda di tingkat daerah. Analisis situasi dan tantangan pembangunan pemuda di Provinsi Jawa Barat yang disajikan dalam laporan ini dapat dijadikan acuan dan perlu direplikasi oleh setiap provinsi di Indonesia dalam memetakan persoalan dan tantangan pembangunan pemuda yang dihadapi.

5

PENUTUP



5.1. POTRET KINERJA PEMBANGUNAN PEMUDA INDONESIA

Kinerja pembangunan pemuda Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif meski belum dapat dikatakan memuaskan. Pada 2018, nilai IPP Indonesia baru mencapai angka 51,50 dari nilai maksimum 100. Domain-domain pembentuk IPP juga memiliki kinerja yang beragam, padahal keseluruhan domain ini perlu dibangun secara merata agar dihasilkan pemuda yang berkualitas dan berdaya saing.

Di antara lima domain pembentuk IPP, domain pendidikan memiliki kinerja terbaik dengan nilai indeks di atas 60, diikuti oleh domain kesehatan dan kesejahteraan dengan nilai indeks sebesar 57. Sementara itu, kinerja tiga domain yang lain cukup tertinggal dengan nilai indeks di bawah 50. Domain dengan capaian terendah adalah lapangan dan kesempatan kerja. Dalam periode 2015–2018, tren kenaikan nilai indeks yang masih fluktuatif menunjukkan perlunya upaya lebih besar agar capaian pembangunan pemuda dapat terus meningkat secara konsisten.

Kinerja pembangunan pemuda di berbagai daerah di Indonesia tidaklah seragam, dengan rentang nilai IPP sebesar 24,16 poin–nilai terendah 46,17 dan nilai tertinggi 70,33. Beberapa provinsi berhasil menunjukkan kinerja pembangunan pemuda yang positif. Salah satunya adalah Provinsi DI Yogyakarta. Provinsi ini mampu bertahan sebagai provinsi dengan nilai IPP tertinggi se-Indonesia sejak 2015 dan tetap mengalami perkembangan positif hingga 2018 dengan kenaikan sebesar 4,83 poin. Sementara itu, terdapat pula provinsi dengan perkembangan yang lambat dan tetap bertahan di peringkat bawah. Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan dua dari lima provinsi dengan nilai IPP terendah sejak 2015. Provinsi Jawa Barat mengalami perubahan nilai IPP yang lambat, sementara Provinsi Kalimantan Selatan mengalami dinamika yang berbeda. Nilai IPP Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan yang cukup progresif, yaitu sebesar 4,20 poin dari angka 43,83 pada 2015. Namun, pada 2018, provinsi ini masih merupakan salah satu dari lima provinsi dengan nilai IPP terendah (peringkat ke-32); nilai IPP provinsi ini berada jauh di bawah angka nasional, yaitu sebesar 48. Berbeda halnya dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Papua, keduanya mengalami

penurunan kinerja pembangunan pemuda yang ditandai dengan lebih rendahnya nilai IPP pada 2018 dibandingkan dengan 2015. Penurunan nilai ini menjadi peringatan bagi kedua provinsi tersebut agar melakukan upaya serius untuk mencegah penurunan IPP lebih lanjut pada masa mendatang.

Berita baik dari perkembangan pembangunan pemuda sejauh ini adalah adanya indikasi konvergensi pada hampir semua indikator penyusun IPP. Hal ini berarti bahwa secara rata-rata provinsi dengan pembangunan pemuda yang tertinggal dapat mengejar provinsi dengan capaian lebih baik meskipun dengan kecepatan yang berbeda-beda. Provinsi NTB berhasil memacu peningkatan



nilai IPP dari 44,17 pada 2015 menjadi 51,67 pada 2018. Peningkatan sebesar 7,50 poin ini tercatat sebagai peningkatan terbesar se-Indonesia. Dengan peningkatan sebesar ini, nilai IPP Provinsi NTB meningkat dari posisi ke-34 pada 2015 menjadi ke-16 pada 2018. Pola serupa juga terlihat di Provinsi Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan NTT. Peningkatan nilai IPP sebesar 6,30–7 poin mendorong kenaikan peringkat provinsi-provinsi tersebut secara signifikan.

Dalam RPJMN 2020–2024, meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu agenda pembangunan yang ditetapkan. Untuk mewujudkan hal ini, setiap lapisan domain

pembangunan pemuda, mulai dari pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, hingga partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, perlu menjadi prioritas yang didorong secara merata hingga ke tingkat daerah. Upaya mewujudkan SDM berkualitas dan berdaya saing ini perlu diterjemahkan menjadi program dan aksi yang berbeda-beda, tergantung pada dinamika persoalan pemuda di tiap daerah di Indonesia. Di samping itu, Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi perlu memberikan perhatian dan mendorong kabupaten/kota dengan capaian IPP yang tertinggal untuk meningkatkan pembangunan pemudanya, terutama pada indikator-indikator yang membutuhkan perhatian khusus.



© Lucky Putra/UNFPA

5.2. MEMBANGUN KERANGKA ANALISIS SITUASI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PEMUDA DI TINGKAT DAERAH

Analisis situasi dan tantangan pembangunan pemuda di tingkat daerah merupakan hal yang perlu dilakukan. Tujuannya adalah memperoleh pemahaman yang lengkap terkait persoalan yang dihadapi daerah sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk memperbaiki pembangunan pemudanya pada masa mendatang. Bahkan, dengan analisis yang tepat, pemerintah daerah dapat menjadi lebih rasional dalam menetapkan angka target pembangunan pemudanya.

Provinsi Jawa Barat dijadikan daerah uji coba untuk membangun kerangka analisis situasi dan tantangan pembangunan pemuda. Analisis dilakukan mulai dari penghitungan nilai indikator IPP di tingkat kabupaten/kota hingga rangkaian diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang mencakup kelompok pemuda, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, organisasi nonpemerintah, serta akademisi. Tujuannya adalah menganalisis tantangan yang dihadapi dan hal baik yang sudah dilakukan daerah terkait dengan pembangunan pemuda pada tiap domain. Dengan hasil analisis ini, intervensi kunci dapat dipetakan.

Tantangan pembangunan pemuda yang dihadapi Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut.

- a. Dalam bidang pendidikan, rendahnya partisipasi sekolah pemuda disebabkan oleh kurangnya kepedulian orang tua terhadap pendidikan anaknya serta rendahnya tingkat sosial-ekonomi keluarga. Hal ini juga didorong oleh banyaknya anak di lingkungan sekitar yang tidak bersekolah, serta budaya patriarki yang kental dalam masyarakat—anak laki-laki didorong untuk bekerja dan anak perempuan untuk menikah pada usia dini. Kurangnya ketersediaan infrastruktur pendidikan dan penerapan sistem zonasi sekolah juga teridentifikasi sebagai faktor yang menyebabkan banyak pemuda tidak dapat mengakses sekolah.
- b. Rendahnya capaian pendidikan pemuda dan tingginya angka perkawinan usia anak merupakan faktor yang menghambat pemuda untuk mengakses lapangan kerja di sektor formal. Selain itu, sistem pendidikan yang ada saat ini belum

mampu menghasilkan pemuda dengan kualifikasi yang dibutuhkan dunia kerja. Program pelatihan kewirausahaan masih belum efektif karena tidak berkelanjutan dan efektivitasnya tidak dievaluasi. Ketatnya persaingan kerja akibat urbanisasi serta lebih tingginya tingkat upah di Provinsi Jawa Barat menjadi tantangan bagi pemuda dalam mendapatkan pekerjaan di sektor formal.

- c. Dalam bidang kesehatan, angka kesakitan pemuda Provinsi Jawa Barat termasuk tinggi. Hal ini diduga disebabkan oleh pola makan yang belum memenuhi gizi seimbang. Kurangnya wawasan dan pemahaman mengenai pola hidup sehat menjadi penyebabnya, di samping belum membudayanya pemeriksaan kesehatan rutin. Kebiasaan merokok juga ditemukan berkorelasi dengan angka kesakitan pemuda.
- d. Partisipasi dan kepemimpinan pemuda di Provinsi Jawa Barat masih kurang. Faktor internal, seperti kurangnya minat dan kepercayaan diri pemuda, serta faktor eksternal, seperti kurangnya kesempatan bagi pemuda untuk berpendapat, merupakan hambatan yang dihadapi pemuda untuk terlibat dalam pembangunan.

Persoalan pada tiap domain pembangunan pemuda tidak benar-benar terpisah satu sama lain. Beberapa faktor kunci teridentifikasi memengaruhi capaian lebih dari satu domain. Pembinaan faktor-faktor kunci merupakan hal strategis yang perlu dilakukan karena memiliki daya ungkit yang besar untuk mendorong kinerja lebih dari satu domain pembangunan pemuda. Bersamaan dengan hal tersebut, pembinaan faktor lain yang sifatnya spesifik—hanya memengaruhi domain tertentu—juga perlu dilakukan agar tercipta lingkungan yang mendukung pemuda untuk membangun dirinya, serta meningkatkan kualitas penghidupan dan kesejahteraannya. Dengan demikian, mereka akan dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Setiap daerah di Indonesia, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, memiliki dinamika persoalan kepemudaan yang beragam. Oleh karena itu, setiap daerah perlu mereplikasi analisis situasi dan tantangan pembangunan pemuda seperti yang dilakukan terhadap Provinsi Jawa Barat dalam laporan ini. Langkah ini penting untuk diambil dalam rangka merumuskan kebijakan yang tepat untuk mendorong perbaikan pembangunan pemuda di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Putu Ayu Swandewi, Ni Made Dian Kurniasari, Ketut Hari Mulyawan, Susy K. Sebayang, dan Becky Freeman (2019) 'From Glass Boxes to Social Media Engagement: An Audit of Tobacco Retail Marketing in Indonesia.' *BMJ Journals* 28 (2).
- Badan Pusat Statistik (2018) *Statistik Pemuda Indonesia 2018* [dalam jaringan] <<https://www.bps.go.id/publication/2018/12/21/572f941511d090083dd742d6/statistik-pemuda-indonesia-2018.html>> [6 April 2020].
- Badan Pusat Statistik (2015) *Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2016* [dalam jaringan] <<https://jabar.bps.go.id/statictable/2015/03/12/10/luas-wilayah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-barat-2016.html>> [9 Februari 2020].
- Badan Pusat Statistik (2013) *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035* [dalam jaringan] <<https://www.bps.go.id/publication/2013/10/07/053d25bed2e4d62aab3346ec/proyeksi-penduduk-indonesia-2010-2035.html>> [6 April 2020].
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2020) *Jumlah Industri Besar Sedang Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2003–2014* [dalam jaringan] <<https://jabar.bps.go.id/dynamictable/2016/11/23/18/jumlah-industri-besar-sedang-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-barat-2003-2014.html>> [9 Februari 2020].
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2018) *Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat, 2018* [dalam jaringan] <<https://jabar.bps.go.id/dynamictable/2019/09/08/62/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-barat-2018.html>> [6 April 2020].
- Bank Indonesia (2019) *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Kalimantan Utara Februari 2019* [dalam jaringan] <<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/kaltara/Pages/Kajian-Ekonomi-dan-Kuangan-Regional-Provinsi-Kalimantan-Utara-Februari-2019.aspx>> [4 Maret 2020].
- Hanushek, Eric A. dan Ludger Woessmann (2008) 'The Role of Cognitive Skills in Economic Development.' *Journal of Economic Literature* 46 (3): 607–668.
- Hastuti, Rika Kumala Dewi, dan Rezanti Pramana (akan diterbitkan) 'Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas.' Laporan Penelitian. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Hastuti, Nina Toyamah, dan Syaikhu Usman (2018) 'Sintesis Hasil Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Enam Kabupaten Mitra INOVASI di Provinsi Nusa Tenggara Barat.' Laporan Penelitian [dalam jaringan] <<https://educationnorthwest.org/sites/default/files/resources/factsheet13.pdf>> [6 April 2020].
- Kementerian Kesehatan (2019) 'Laporan Riskesdas 2018.' Laporan Survei [dalam jaringan] <http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf> [6 April 2020].
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2020) 'Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak.' Laporan [dalam jaringan] <<https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf>> [6 April 2020].
- Kurniawati, Sandra, Daniel Suryadarma, Luhur Bima, dan Asri Yusrina (2019) 'Education in Indonesia: A White Elephant?' Working Paper [dalam jaringan] <<https://doi.org/10.1355/ae35-2e>> [6 April 2020].
- Prabandari, Yayi Suryo dan Arika Dewi (2016) 'How do Indonesian Youth Perceive Cigarette Advertising? A Cross-sectional Study among Indonesian High School Students.' *Global Health Action* 9: 30914. DOI: 10.3402/gha.v9.30914.

- Priohutomo, Sigit (2018) 'Mencegah Pernikahan Anak Melalui Program KKBPK.' Salindia dipresentasikan pada Seminar Nasional Kependudukan [dalam jaringan] <https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/2018.03.10.Banjarmasin.MENCEGAH_PERKAWINAN_ANAK_MEL_PROG_KKBPK.pdf> [12 Desember 2019].
- Suryahadi, Asep dan Prio Sambodho (2013) 'An Assessment of Policies to Improve Teacher Quality and Reduce Teacher Absenteeism.' Dalam *Education in Indonesia*. Daniel Suryadarma dan Gavin W. Jones (eds.) Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- United Nations Development Programme (2017) *Magdy Martínez-Solimán: Statement at "Youth, Innovation and SDG Achievement" event* [dalam jaringan] <<https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/presscenter/speeches/2017/02/02/magdy-mart-nez-solim-n-statement-at-youth-innovation-and-sdg-achievement-event.html>> [6 April 2020].
- Yumna, Athia, Elza Elmira, Ridho Al Izzati, dan Rika Kumala Dewi (akan dipublikasikan) 'Laporan Baseline Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pemuda dan Remaja di Indonesia.' Laporan Penelitian. Jakarta: The SMERU Research Institute.

Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.1065-Yanbangsos/2017 tentang Upah Minimum.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

Metode Penghitungan IPP

IPP disusun oleh 5 domain pembangunan yang di dalamnya memuat 15 indikator pembangunan pemuda. Penghitungan IPP dalam Laporan IPP 2019 dilakukan dengan menggunakan metode yang sama dengan penghitungan dalam Laporan IPP 2017. Dalam metadata indikator TPB, terdapat perubahan definisi indikator APK perguruan tinggi dan angka

perkawinan usia anak. Karena kedua indikator ini merupakan indikator penyusun IPP, data IPP dalam Laporan IPP 2019 ini disusun dengan mengikuti definisi baru metadata TPB tersebut (keterangan lengkap mengenai perubahan definisi dapat dilihat pada Tabel A1.1).

Tabel A1.1 Daftar indikator IPP

Variabel		Definisi Lama	Definisi Baru	Sumber Data
Domain Pendidikan				
X1	Rata-rata lama sekolah pemuda	Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berusia 16–30 tahun untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani	Tidak ada perubahan	Susenas Kor
X2	APK sekolah menengah	Persentase siswa di SMP dan SMA dalam kelompok usia 13–18 tahun	Tidak ada perubahan	Susenas Kor
X3	APK perguruan tinggi	Persentase mahasiswa pada jenjang perguruan tinggi (D-1 sampai S-3) dalam kelompok usia 19–24 tahun	Proporsi mahasiswa pada jenjang perguruan tinggi (D-1 sampai S-3) dalam kelompok usia 19–23 tahun	Susenas Kor
Domain Kesehatan dan Kesejahteraan				
X4	Angka kesakitan pemuda	Proporsi pemuda berusia 16–30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16–30 tahun	Tidak ada perubahan	Susenas Kor
X5	Persentase pemuda korban kejahatan	Proporsi pemuda berusia 16–30 tahun yang menjadi korban tindak kejahatan dalam setahun terakhir dalam kelompok usia 16–30 tahun	Tidak ada perubahan	Susenas Kor
X6	Persentase pemuda yang merokok ^d	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang pernah merokok dalam sebulan terakhir dalam kelompok usia 16–30 tahun	Tidak ada perubahan	Susenas Kor
X7	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil ^a	Persentase remaja perempuan berusia 15–18 tahun yang sedang hamil dalam kelompok perempuan pernah kawin berusia 15–18 tahun ^b	Tidak ada perubahan	Susenas Kor
Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja				
X8	Persentase pemuda wirausaha kerah putih	Persentase penduduk berusia 16–30 tahun yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, atau berusaha dengan dibantu buruh tetap dan jenis pekerjaan kerah putih (tenaga profesional atau teknisi, kepemimpinan atau ketatalaksanaan, pejabat pelaksana, atau tenaga tata usaha) yang dibagi dengan jumlah pemuda berusia 16–30 tahun.	Tidak ada perubahan	Sakernas

Variabel		Definisi Lama	Definisi Baru	Sumber Data
X9	TPT pemuda	Persentase jumlah pengangguran pemuda berusia 16–30 tahun terhadap jumlah angkatan kerja pemuda berusia 16–30 tahun	Tidak ada perubahan	Sakernas
Domain Partisipasi dan Kepemimpinan^c				
X10	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	Tidak ada perubahan	Susenas MSBP
X11	Persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi yang memiliki keanggotaan, kepengurusan, dan aturan tertentu selain di tempat kerja dan sekolah dalam tiga bulan terakhir	Tidak ada perubahan	Susenas MSBP
X12	Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang pernah mengikuti kegiatan pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar dalam setahun terakhir dan memberikan saran/pendapat dalam rapat tersebut	Tidak ada perubahan	Susenas MSBP
Domain Gender dan Diskriminasi				
X13	Angka perkawinan usia anak	Persentase pemuda perempuan berusia 20–24 tahun yang saat perkawinan pertamanya berusia di bawah 18 tahun di antara perempuan berusia 20–24 tahun yang pernah kawin	Persentase pemuda perempuan berusia 20–24 tahun yang saat perkawinan pertamanya berusia di bawah 18 tahun di antara seluruh perempuan berusia 20–24 tahun	Susenas Kor
X14	Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas	Persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMA/ sederajat atau lebih tinggi	Tidak ada perubahan	Susenas Kor
X15	Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	Persentase pemuda perempuan berusia 16–30 tahun yang bekerja di sektor formal	Tidak ada perubahan	Sakernas

Keterangan:

^a Ini adalah indikator proksi untuk angka fertilitas remaja.

^b Peraturan Menteri Kesehatan No. 25 Tahun 2014 tentang Kesehatan Anak mendefinisikan remaja sebagai kelompok demografi dalam usia 10–18 tahun. Karena data yang tersedia dimulai dari usia 15 tahun, maka kelompok usia untuk indikator ini adalah 15 sampai 18 tahun.

^c Data Susenas MSBP yang menjadi sumber data indikator penyusun domain partisipasi dan kepemimpinan dikumpulkan setiap tiga tahun. Susenas MSBP terbaru dikumpulkan pada 2015 dan 2018. Untuk kepentingan penghitungan angka IPP, nilai indikator yang berasal dari Susenas MSBP pada tahun tidak dilakukannya pengumpulan data dianggap tidak mengalami perubahan dari nilai indikator pada tahun terdekat sebelumnya.

^d Indikator persentase pemuda yang merokok (indikator X6) dan remaja yang sedang hamil (indikator X7) untuk 2018 menggunakan data 2017 karena data 2018 belum tersedia saat laporan ini ditulis.

Mekanisme Penghitungan Nilai Indeks

Tidak terdapat perbedaan mekanisme penghitungan nilai IPP dalam Laporan IPP 2019 dan Laporan IPP 2017. Penghitungan nilai indeks pada umumnya dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan nilai setiap indikator berdasarkan nilai batas maksimal dan minimal yang ditetapkan. Dalam menentukan

nilai batas maksimal/minimal ini, digunakan standar resmi batas maksimal dan minimal pada beberapa indikator, seperti indikator rata-rata lama sekolah yang ditargetkan oleh PBB yang mencapai angka 15 tahun (bersekolah hingga lulus SMA/ sederajat). Sementara itu, untuk indikator yang tidak memiliki standar, penentuan nilai batas maksimal/minimal dilakukan dengan menggunakan nilai maksimal/ minimal data empiris (sebaran data setiap provinsi)

yang ditambahkan dengan dua kali nilai standar deviasi. Khusus untuk data TPT, penentuan nilai batas dilakukan dengan mengacu pada nilai TPT pemuda Arab Saudi yang merupakan negara

dengan TPT tertinggi di dunia pada 2015. Tabel berikut menampilkan nilai batas maksimal dan minimal untuk setiap indikator penyusun IPP.

Tabel A1.2 Batas Maksimum dan Minimum Indikator IPP

No	Indikator	Batas Minimum	Batas Maksimum	Sumber Data
Domain Pendidikan				
1	Rata-rata lama sekolah	0	15 (target)	Standar PBB, digunakan pada IPM
2	APK sekolah menengah	0	100 (target)	Standar
3	APK perguruan tinggi	0	100 (target)	Standar
Domain Kesehatan dan Kesejahteraan				
4	Angka kesakitan pemuda	0 (target)	20	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
5	Persentase pemuda korban kejahatan	0 (target)	3	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
6	Persentase pemuda yang merokok	0 (target)	36	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
7	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	0 (target)	45	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
Domain Ketenagakerjaan dan Kesempatan kerja				
8	Persentase pemuda wirausaha kerah putih	0	2 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
9	TPT pemuda	0 (target)	28	TPT pemuda Arab Saudi
Domain Partisipasi dan Kepemimpinan				
10	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	0	100 (target)	Standar
11	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi	0	45 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
12	Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat	0	25 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
Domain Gender dan Diskriminasi				
13	Angka perkawinan usia anak	0 (target)	45	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
14	Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi	25	100 (target)	Standar
15	Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	0	60 (target)	Nilai maksimum +2 standar deviasi

Nilai maksimal (atau minimal) ini adalah sasaran yang harus dicapai agar nilai IPP mendekati angka ideal, yaitu 100. Untuk indikator yang capaiannya dianggap makin baik ketika nilainya makin tinggi, nilai maksimal adalah nilai sasaran yang harus dicapai agar dihasilkan angka IPP yang tinggi. Sebaliknya, untuk indikator yang capaiannya dianggap makin baik ketika nilainya makin rendah, nilai minimum adalah nilai sasaran yang harus dicapai.

Dengan menggunakan nilai maksimum dan minimum, nilai indikator penyusun IPP dinormalkan dan distandarkan untuk menghasilkan nilai skor indikator, nilai indeks domain, dan nilai IPP. Tahapan yang dilakukan untuk menghitung nilai IPP adalah sebagai berikut.

1. Menetapkan nilai skor/nilai subindeks setiap indikator (nilai transformasi indikator)

Untuk menghitung nilai IPP, nilai setiap indikator perlu dinormalkan dan distandarkan dengan mengubah nilai indikator menjadi nilai skor indikator. Konfersi ini dilakukan dengan menggunakan nilai maksimum dan minimum yang telah ditetapkan dengan menggunakan persamaan berikut.

$$Skor\ indikator_{ji} = \frac{Nilai\ indikator\ y_{ji} - batas\ minimum_{ji}}{Batas\ maksimum_{ji} - batas\ minimum_{ji}} \quad ①$$

$$Skor\ indikator_{ji} = 1 - \frac{Nilai\ indikator\ y_{ji} - batas\ minimum_{ji}}{Batas\ maksimum_{ji} - batas\ minimum_{ji}} \quad ②$$

Persamaan pertama digunakan untuk menghitung skor indikator yang dianggap makin baik ketika nilainya makin tinggi. Persamaan kedua digunakan untuk menghitung skor indikator yang dianggap makin baik ketika nilainya makin rendah.

2. Mengitung nilai indeks domain

Nilai indeks domain dihitung dengan menggunakan persamaan berikut.

$$\text{Indeks Domain}_j = \frac{\text{skor } X_1 + \text{skor } X_2 \dots + \text{skor } X_n}{n} \times 10$$

dengan n merupakan jumlah indikator setiap domain.

3. Menghitung nilai IPP

Berdasarkan nilai indeks domain di atas, nilai IPP dihitung dengan persamaan berikut.

$$\text{IPP} = \frac{\text{Indeks Domain 1} + \text{Indeks domain 2} + \dots + \text{Indeks Domain 5}}{5}$$



© Lucky Putra/UNFPA

LAMPIRAN 2

Data

Tabel A2.1. Nilai Indikator Penyusun IPP per Provinsi dalam Periode 2015–2018

A. Domain Pendidikan

	Domain Pendidikan											
	Rata-Rata Lama Sekolah				APK Sekolah Menengah				APK Perguruan Tinggi			
	X1				X2				X3			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Aceh	11,06	11,22	11,27	11,28	91,09	93,66	93,16	91,92	41,67	42,06	45,73	43,86
Sumatra Utara	10,48	10,82	10,79	10,80	90,18	91,89	92,16	90,76	25,89	28,93	30,71	31,11
Sumatra Barat	10,36	10,66	10,48	10,72	86,65	88,05	89,43	87,54	38,51	40,54	43,53	44,19
Riau	10,11	10,48	10,39	10,40	85,80	86,80	88,96	89,20	30,00	29,81	33,37	34,15
Jambi	10,04	10,39	10,33	10,59	84,66	85,89	85,01	83,33	26,33	26,98	32,27	33,78
Sumatra Selatan	9,76	10,05	9,96	10,26	84,01	85,79	86,28	82,18	18,60	21,64	23,77	26,23
Bengkulu	10,28	10,61	10,55	10,53	86,03	87,11	88,81	88,95	36,53	41,00	41,52	38,31
Lampung	9,59	9,86	9,87	10,11	88,87	88,62	88,03	87,86	12,46	16,05	18,84	21,32
Kepulauan Bangka Belitung	9,02	9,75	9,53	9,73	82,49	82,00	83,73	84,12	11,13	14,48	15,01	13,20
Kepulauan Riau	11,02	11,14	11,32	11,37	92,73	89,98	92,69	91,80	21,14	22,11	23,08	27,64
DKI Jakarta	11,68	11,62	11,67	11,71	82,55	81,71	86,73	84,24	32,72	33,58	34,94	36,71
Jawa Barat	9,76	9,80	9,82	10,37	81,01	80,59	82,79	83,09	21,31	24,59	25,50	25,14
Jawa Tengah	9,82	10,10	10,03	10,05	87,20	88,26	87,64	87,93	19,28	19,69	21,88	21,96
DI Yogyakarta	11,89	11,88	11,90	12,09	90,35	92,52	94,06	91,83	64,83	65,51	70,10	70,60
Jawa Timur	10,05	10,19	10,26	10,43	85,95	87,15	86,73	86,81	22,14	28,13	30,23	29,99
Banten	9,96	10,20	10,26	10,34	81,74	82,29	83,59	81,62	23,60	29,02	31,40	33,40
Bali	11,06	11,05	11,04	11,00	92,19	91,48	93,24	91,96	32,06	31,61	35,81	36,40
NTB	9,96	10,02	9,96	10,06	90,84	92,38	94,44	91,70	26,30	25,89	28,09	29,75
NTT	8,96	9,18	9,22	9,20	83,25	85,02	85,37	83,61	24,51	26,92	29,21	30,14
Kalimantan Barat	8,87	9,07	9,25	9,44	82,11	83,01	81,82	81,17	19,24	20,98	23,04	22,68
Kalimantan Tengah	9,45	9,78	9,69	9,82	84,50	82,75	84,11	85,63	21,10	23,90	24,89	25,24
Kalimantan Selatan	9,35	9,85	9,83	10,18	78,77	81,68	81,69	80,92	24,56	23,24	26,08	26,41
Kalimantan Timur	10,70	10,81	10,92	10,72	94,55	95,32	95,25	94,35	28,44	31,60	35,58	35,64
Kalimantan Utara	9,95	10,29	10,35	10,86	92,92	93,65	93,40	96,00	18,25	24,35	26,76	21,58
Sulawesi Utara	10,44	10,87	10,78	10,86	88,86	88,01	89,99	85,51	27,68	31,32	31,74	35,00
Sulawesi Tengah	9,71	10,25	10,12	10,14	87,34	86,68	88,47	88,54	31,56	35,30	39,22	40,61
Sulawesi Selatan	9,93	10,20	10,16	10,14	82,15	83,52	83,56	84,39	40,44	40,75	43,00	41,23
Sulawesi Tenggara	10,39	10,65	10,50	10,52	84,71	84,44	84,15	85,04	42,31	45,35	46,98	46,42
Gorontalo	8,85	9,43	9,34	9,28	84,09	86,01	81,31	82,04	30,35	32,23	37,88	35,23
Sulawesi Barat	8,90	9,49	9,44	9,29	82,33	82,11	81,80	83,37	25,51	27,54	29,72	28,90
Maluku	10,95	11,34	11,06	10,95	91,58	91,31	92,31	91,52	44,46	46,38	47,39	48,42
Maluku Utara	10,28	10,58	10,59	10,67	89,81	86,67	89,04	89,66	33,72	40,87	45,01	42,68
Papua Barat	10,07	10,35	10,67	10,61	89,73	91,07	90,32	90,18	32,83	32,37	36,32	35,97
Papua	7,17	7,60	7,73	7,49	70,65	69,70	75,58	77,02	16,01	20,44	20,37	19,03
Indonesia	10,01	10,21	10,21	10,37	85,15	85,79	86,59	86,11	25,26	27,98	29,93	30,19

Keterangan:

Nilai indikator provinsi lebih rendah daripada nilai nasional.

Nilai indikator provinsi lebih tinggi daripada nilai nasional.

B. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan

	Domain Kesehatan dan Kesejahteraan															
	Angka Kesakitan Pemuda				Persentase Pemuda Korban Kejahatan				Persentase Pemuda yang Merokok				Persentase Remaja Perempuan yang Sedang Hamil			
	X4				X5				X6				X7			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Aceh	8,48	6,91	7,12	8,44	0,52	0,53	0,75	0,86	24,28	22,97	24,80	24,80	10,33	14,96	15,34	15,34
Sumatra Utara	5,78	5,87	5,88	6,00	1,02	0,99	1,52	1,08	24,68	22,53	23,34	23,34	16,52	43,31	20,17	20,17
Sumatra Barat	8,81	9,38	10,10	8,08	1,15	1,20	1,41	1,14	29,76	27,46	28,76	28,76	25,50	10,78	17,80	17,80
Riau	9,29	9,33	8,40	7,04	1,49	1,40	1,45	1,37	26,91	24,83	25,53	25,53	29,75	11,19	23,81	23,81
Jambi	7,11	7,79	5,87	5,93	0,97	0,88	1,04	1,20	27,46	25,06	24,93	24,93	24,84	16,89	26,46	26,46
Sumatra Selatan	7,15	6,19	5,14	5,19	1,36	1,25	1,46	1,83	30,19	28,28	29,26	29,26	31,13	10,90	14,55	14,55
Bengkulu	9,29	8,99	7,29	7,21	1,47	1,55	1,93	1,31	29,72	28,36	29,75	29,75	23,83	16,04	16,31	16,31
Lampung	10,36	8,57	8,39	7,55	1,25	0,99	1,64	1,58	31,38	30,65	31,02	31,02	20,64	24,80	17,66	17,66
Kepulauan Bangka Belitung	7,74	8,28	6,50	5,45	1,02	0,30	0,66	0,56	29,16	25,75	28,09	28,09	8,44	25,75	18,80	18,80
Kepulauan Riau	8,25	6,51	6,57	5,58	0,74	0,80	1,90	1,40	27,45	26,27	26,55	26,55	13,30	25,96	0,00	0,00
DKI Jakarta	8,92	8,11	7,30	5,75	1,72	2,04	1,75	1,46	24,67	23,41	22,50	22,50	11,94	9,63	22,18	22,18
Jawa Barat	7,76	8,82	8,35	8,13	1,12	0,96	1,69	1,41	30,02	28,06	29,80	29,80	14,06	9,48	15,48	15,48
Jawa Tengah	10,99	9,50	8,96	8,16	0,94	1,00	1,25	1,11	26,14	24,79	25,76	25,76	25,98	22,33	24,13	24,13
DI Yogyakarta	13,43	11,55	8,87	8,83	2,12	2,14	2,22	2,37	23,39	22,45	21,27	21,27	3,94	0,00	0,00	0,00
Jawa Timur	11,09	8,46	8,47	7,70	0,94	0,89	1,31	1,29	25,83	25,26	24,91	24,91	19,28	16,32	12,97	12,97
Banten	9,74	9,48	7,63	7,84	1,02	0,86	1,12	1,06	30,45	28,22	28,47	28,47	12,25	12,66	8,11	8,11
Bali	12,71	10,56	10,14	8,11	1,11	0,68	1,28	1,06	22,07	20,42	22,33	22,33	14,54	37,43	23,40	23,40
NTB	14,13	14,05	11,30	11,02	1,84	1,45	2,22	1,92	29,02	27,90	28,29	28,29	30,17	27,63	10,90	10,90
NTT	15,29	11,26	12,12	11,88	0,68	0,70	0,94	1,07	24,21	22,07	25,65	25,65	28,44	27,50	19,75	19,75
Kalimantan Barat	7,13	6,47	5,85	7,17	0,74	0,56	0,80	0,65	25,54	23,99	25,09	25,09	4,78	22,89	14,47	14,47
Kalimantan Tengah	7,11	7,89	7,70	7,24	0,74	0,56	0,70	0,58	26,86	24,90	26,06	26,06	13,91	15,21	22,29	22,29
Kalimantan Selatan	11,34	9,98	7,52	6,98	1,20	1,00	1,02	1,16	24,68	23,81	23,81	23,81	18,98	13,34	21,78	21,78
Kalimantan Timur	5,81	4,83	6,15	5,37	0,47	0,97	1,37	0,93	22,09	22,59	20,80	20,80	0,80	4,82	7,99	7,99
Kalimantan Utara	5,99	5,50	9,39	6,83	0,82	0,89	1,72	2,07	25,24	24,51	24,61	24,61	13,02	6,20	24,39	24,39
Sulawesi Utara	10,32	8,18	8,45	8,27	1,06	1,13	1,04	1,16	24,86	24,30	25,85	25,85	24,71	11,02	21,46	21,46
Sulawesi Tengah	10,64	9,08	10,25	10,05	1,22	1,52	1,97	1,75	29,69	28,04	27,86	27,86	30,71	19,47	20,18	20,18
Sulawesi Selatan	8,89	7,63	8,32	7,85	0,85	0,90	1,50	1,45	23,71	22,74	23,76	23,76	14,89	18,03	12,54	12,54
Sulawesi Tenggara	10,16	11,01	8,34	9,17	1,43	1,56	1,85	2,08	24,78	23,35	25,40	25,40	15,44	30,25	25,70	25,70
Gorontalo	14,49	12,66	13,54	11,96	0,93	1,17	1,56	1,08	29,86	27,13	30,17	30,17	8,75	14,06	24,96	24,96
Sulawesi Barat	11,42	8,46	8,60	9,04	0,58	0,72	1,02	0,55	25,57	24,51	24,00	24,00	15,76	14,88	22,18	22,18
Maluku	6,03	4,64	6,10	6,24	1,34	1,32	1,89	1,31	22,90	21,14	22,73	22,73	23,56	5,56	16,91	16,91
Maluku Utara	6,05	5,34	5,91	6,75	0,85	1,20	1,28	2,09	24,42	22,93	24,45	24,45	11,34	3,66	16,17	16,17
Papua Barat	6,35	5,41	7,09	6,94	1,21	0,75	1,86	1,55	25,67	22,06	22,94	22,94	17,29	10,33	6,48	6,48
Papua	5,47	4,80	5,64	5,99	1,20	1,13	2,18	1,27	23,32	19,59	23,99	23,99	11,41	8,43	16,86	16,86
Indonesia	9,34	8,54	8,11	7,68	1,09	1,04	1,44	1,30	27,04	25,51	26,34	26,34	18,92	17,16	16,67	16,67

Keterangan:

Nilai indikator provinsi lebih rendah daripada nilai nasional.

Nilai indikator provinsi lebih tinggi daripada nilai nasional.

C. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja

	Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja							
	Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih				TPT Pemuda			
	X8				X9			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Aceh	0,15	0,14	0,22	0,37	23,59	17,13	16,58	15,16
Sumatra Utara	0,21	0,08	0,38	0,45	16,05	13,41	12,63	12,68
Sumatra Barat	0,33	0,18	0,29	0,40	17,29	12,03	15,46	14,77
Riau	0,23	0,30	0,28	0,38	17,13	15,89	13,92	14,76
Jambi	0,25	0,11	0,31	0,45	9,94	8,63	10,18	10,10
Sumatra Selatan	0,19	0,91	0,25	0,08	14,78	9,91	11,81	11,20
Bengkulu	0,18	0,97	0,28	0,21	11,98	8,60	9,85	9,96
Lampung	0,12	0,25	0,32	0,24	13,68	12,37	11,89	10,15
Kepulauan Bangka Belitung	0,03	0,67	0,26	0,87	13,92	5,76	8,53	8,85
Kepulauan Riau	0,51	0,00	0,75	0,05	10,50	10,87	11,47	15,92
DKI Jakarta	0,56	0,53	0,65	0,54	14,31	12,50	13,98	13,14
Jawa Barat	0,25	0,20	0,36	0,33	20,52	19,84	20,47	19,60
Jawa Tengah	0,29	0,25	0,46	0,48	14,22	12,72	12,59	12,33
DI Yogyakarta	0,93	0,53	1,18	1,18	12,05	8,11	8,91	10,68
Jawa Timur	0,30	0,35	0,44	0,52	13,27	11,26	11,70	11,13
Banten	0,36	0,28	0,37	0,18	19,61	18,10	19,47	19,39
Bali	0,45	0,93	0,43	0,67	5,70	5,99	4,31	4,05
NTB	0,17	0,00	0,23	0,23	13,55	10,27	7,90	8,58
NTT	0,12	0,19	0,28	0,33	10,01	8,40	8,63	7,45
Kalimantan Barat	0,12	0,20	0,24	0,25	11,99	10,73	10,44	10,60
Kalimantan Tengah	0,21	0,15	0,55	0,64	9,72	11,37	10,59	9,01
Kalimantan Selatan	0,24	0,36	0,49	0,31	11,56	13,61	12,16	11,26
Kalimantan Timur	0,24	1,41	0,40	0,24	17,05	16,29	15,78	15,21
Kalimantan Utara	0,38	0,00	0,43	1,41	12,34	11,11	12,55	8,89
Sulawesi Utara	0,15	0,43	0,35	0,21	22,73	17,00	21,24	19,02
Sulawesi Tengah	0,30	0,44	0,34	0,28	10,58	7,23	8,98	8,56
Sulawesi Selatan	0,35	0,04	0,23	0,37	14,71	10,86	13,53	12,73
Sulawesi Tenggara	0,34	0,32	0,63	0,53	12,91	5,92	7,97	7,73
Gorontalo	0,32	0,46	0,10	0,04	11,43	6,75	11,74	11,17
Sulawesi Barat	0,06	0,18	0,14	0,16	7,71	7,80	8,21	7,29
Maluku	0,10	0,23	0,47	0,31	23,86	16,62	23,81	18,92
Maluku Utara	0,16	0,41	0,35	0,02	14,55	10,74	13,47	10,94
Papua Barat	0,32	0,16	0,30	0,37	16,28	15,13	14,84	15,33
Papua	0,04	0,10	0,18	0,19	8,20	7,05	7,80	7,61
Indonesia	0,28	0,30	0,39	0,39	15,38	13,44	14,02	13,47

Keterangan:

Nilai indikator provinsi lebih rendah daripada nilai nasional.

Nilai indikator provinsi lebih tinggi daripada nilai nasional.

D. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan

	Domain Partisipasi dan Kepemimpinan											
	Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan				Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi				Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat			
	X10				X11				X12			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Aceh	86,51	86,51	86,51	87,55	2,81	2,81	2,81	4,37	8,65	8,65	8,65	8,44
Sumatra Utara	79,55	79,55	79,55	76,00	9,51	9,51	9,51	6,64	4,65	4,65	4,65	5,12
Sumatra Barat	72,91	72,91	72,91	67,92	6,95	6,95	6,95	4,68	6,76	6,76	6,76	9,81
Riau	83,89	83,89	83,89	79,41	5,68	5,68	5,68	6,44	7,64	7,64	7,64	6,39
Jambi	87,81	87,81	87,81	85,73	6,62	6,62	6,62	6,62	5,20	5,20	5,20	6,99
Sumatra Selatan	78,61	78,61	78,61	83,76	3,72	3,72	3,72	6,08	4,67	4,67	4,67	5,93
Bengkulu	82,14	82,14	82,14	78,65	4,85	4,85	4,85	7,79	5,83	5,83	5,83	9,90
Lampung	82,79	82,79	82,79	85,17	3,40	3,40	3,40	5,79	2,65	2,65	2,65	4,84
Kepulauan Bangka Belitung	81,94	81,94	81,94	76,40	4,14	4,14	4,14	4,57	2,75	2,75	2,75	2,62
Kepulauan Riau	73,77	73,77	73,77	74,99	5,20	5,20	5,20	4,58	6,05	6,05	6,05	8,99
DKI Jakarta	74,39	74,39	74,39	73,50	3,08	3,08	3,08	4,86	3,43	3,43	3,43	5,32
Jawa Barat	80,77	80,77	80,77	80,06	3,32	3,32	3,32	4,75	5,30	5,30	5,30	5,72
Jawa Tengah	88,31	88,31	88,31	90,22	6,39	6,39	6,39	9,79	7,73	7,73	7,73	10,48
DI Yogyakarta	88,86	88,86	88,86	87,99	13,84	13,84	13,84	15,75	18,10	18,10	18,10	19,22
Jawa Timur	86,56	86,56	86,56	86,32	7,41	7,41	7,41	6,53	6,28	6,28	6,28	6,79
Banten	80,16	80,16	80,16	74,08	3,69	3,69	3,69	2,92	3,74	3,74	3,74	4,00
Bali	78,74	78,74	78,74	78,79	33,55	33,55	33,55	17,68	7,71	7,71	7,71	6,99
NTB	88,77	88,77	88,77	92,85	5,02	5,02	5,02	11,21	8,76	8,76	8,76	11,07
NTT	83,27	83,27	83,27	83,18	6,27	6,27	6,27	5,22	6,49	6,49	6,49	7,55
Kalimantan Barat	70,31	70,31	70,31	75,05	2,53	2,53	2,53	3,08	7,04	7,04	7,04	4,79
Kalimantan Tengah	73,70	73,70	73,70	75,38	2,46	2,46	2,46	4,33	3,88	3,88	3,88	4,72
Kalimantan Selatan	78,44	78,44	78,44	76,31	4,12	4,12	4,12	5,02	4,07	4,07	4,07	3,61
Kalimantan Timur	77,25	77,25	77,25	70,55	3,63	3,63	3,63	4,87	6,21	6,21	6,21	5,12
Kalimantan Utara	69,57	69,57	69,57	68,33	5,62	5,62	5,62	4,63	5,61	5,61	5,61	5,59
Sulawesi Utara	92,65	92,65	92,65	85,84	18,09	18,09	18,09	10,42	9,31	9,31	9,31	6,45
Sulawesi Tengah	78,62	78,62	78,62	79,34	5,46	5,46	5,46	6,19	6,03	6,03	6,03	4,60
Sulawesi Selatan	73,41	73,41	73,41	78,45	3,27	3,27	3,27	3,98	1,68	1,68	1,68	3,70
Sulawesi Tenggara	79,68	79,68	79,68	69,07	3,26	3,26	3,26	2,15	6,72	6,72	6,72	4,60
Gorontalo	88,76	88,76	88,76	78,09	2,92	2,92	2,92	5,76	5,50	5,50	5,50	6,46
Sulawesi Barat	80,63	80,63	80,63	76,96	7,69	7,69	7,69	7,41	2,85	2,85	2,85	3,53
Maluku	80,64	80,64	80,64	77,15	17,68	17,68	17,68	9,53	4,84	4,84	4,84	2,53
Maluku Utara	83,73	83,73	83,73	83,02	6,11	6,11	6,11	7,78	6,54	6,54	6,54	7,66
Papua Barat	75,08	75,08	75,08	66,95	7,57	7,57	7,57	6,18	6,13	6,13	6,13	5,85
Papua	81,94	81,94	81,94	79,55	5,44	5,44	5,44	6,83	8,62	8,62	8,62	9,24
Indonesia	81,97	81,97	81,97	81,36	5,86	5,86	5,86	6,36	5,88	5,88	5,88	6,72

Keterangan:

■ Nilai indikator provinsi lebih rendah daripada nilai nasional.

■ Nilai indikator provinsi lebih tinggi daripada nilai nasional.

E. Domain Gender dan Diskriminasi

	Domain Gender dan Diskriminasi											
	Angka Perkawinan Usia Anak				Persentase Pemuda Perempuan Berusia 16–24 Tahun yang Sedang Menempuh Pendidikan Menengah dan Tinggi				Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja di Sektor Formal			
	X13				X14				X15			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Aceh	4,17	5,12	4,62	5,29	51,04	48,50	50,40	49,50	14,38	17,55	16,79	18,15
Sumatra Utara	6,20	4,61	5,72	4,90	43,41	43,95	44,64	44,97	19,16	20,43	23,97	26,82
Sumatra Barat	5,51	5,99	6,83	6,68	51,93	52,37	53,30	50,28	19,93	22,75	18,93	18,70
Riau	9,40	9,75	10,52	7,93	40,92	39,72	40,99	41,02	21,33	22,12	19,92	20,86
Jambi	14,98	16,74	14,51	12,71	37,95	37,39	40,25	40,29	19,90	18,45	19,09	21,37
Sumatra Selatan	13,95	13,65	13,29	12,07	32,37	35,26	35,82	35,31	18,95	18,71	21,72	19,83
Bengkulu	12,77	14,50	14,61	14,33	46,64	43,27	46,22	45,80	19,07	22,06	17,65	15,89
Lampung	11,48	9,88	11,81	10,70	28,34	32,83	37,42	36,71	14,34	16,16	15,64	18,50
Kepulauan Bangka Belitung	15,58	15,98	18,16	14,22	27,48	30,95	32,85	33,63	21,49	22,82	27,20	26,03
Kepulauan Riau	4,11	5,64	4,00	4,68	35,72	37,28	35,63	37,02	36,01	36,81	41,57	38,66
DKI Jakarta	4,88	4,93	3,18	4,06	34,78	34,48	33,79	36,51	46,81	43,04	40,63	41,96
Jawa Barat	14,14	11,47	12,24	13,26	32,57	33,31	34,70	34,75	23,70	25,38	25,63	25,89
Jawa Tengah	11,47	11,72	10,37	11,04	34,82	36,63	37,17	35,73	27,01	26,90	28,69	25,61
DI Yogyakarta	4,73	4,76	2,21	6,20	56,24	57,20	60,47	61,15	32,01	30,62	34,36	35,16
Jawa Timur	14,68	12,14	13,32	12,71	35,00	36,95	38,12	37,20	22,32	24,24	23,76	22,19
Banten	8,78	7,78	9,06	6,78	32,60	35,10	34,83	34,58	28,17	32,14	31,05	26,84
Bali	8,52	10,45	9,17	8,55	35,49	39,42	43,28	46,61	38,87	36,67	41,47	44,45
NTB	14,68	15,38	16,02	15,48	39,44	40,44	42,15	39,57	14,98	21,53	17,71	17,06
NTT	9,34	10,22	10,53	8,78	37,29	37,56	38,75	40,66	11,94	16,43	13,76	14,14
Kalimantan Barat	17,28	16,95	19,07	17,46	33,02	33,03	36,70	34,44	17,66	16,84	18,05	18,47
Kalimantan Tengah	21,90	19,67	20,94	19,13	30,76	33,20	34,89	34,43	21,66	17,81	20,75	23,64
Kalimantan Selatan	23,19	22,26	23,12	17,63	34,26	35,40	35,50	34,88	21,47	19,10	20,48	22,29
Kalimantan Timur	14,78	14,85	13,90	11,54	42,28	40,35	44,83	44,39	23,99	23,82	24,21	25,29
Kalimantan Utara	14,93	17,29	16,57	12,42	34,83	38,34	35,79	40,26	26,17	32,19	27,18	27,02
Sulawesi Utara	16,32	12,78	15,34	14,88	38,58	41,17	38,12	40,78	18,43	18,03	19,82	20,24
Sulawesi Tengah	19,32	18,09	16,65	15,84	40,77	38,04	41,11	42,72	17,13	21,30	18,20	20,70
Sulawesi Selatan	13,80	14,48	14,76	14,10	44,33	44,71	45,67	47,10	17,59	16,89	16,63	20,31
Sulawesi Tenggara	16,88	15,03	19,08	18,96	45,34	44,87	45,67	44,19	13,61	15,78	20,59	19,53
Gorontalo	15,90	14,74	14,51	15,29	41,20	41,45	42,15	42,18	17,67	22,36	19,41	21,70
Sulawesi Barat	21,37	15,67	19,37	19,43	36,64	35,93	36,85	40,55	14,87	16,17	14,57	14,07
Maluku	9,88	8,99	10,81	8,94	48,52	49,30	51,32	49,31	11,91	19,36	12,31	15,78
Maluku Utara	10,01	11,97	17,21	13,36	44,73	46,05	45,59	46,68	13,79	14,73	17,54	17,71
Papua Barat	14,67	15,86	12,80	11,16	42,52	42,30	41,37	43,34	13,59	19,38	15,73	15,77
Papua	14,20	11,99	12,34	11,52	27,24	28,18	29,61	28,26	7,43	8,06	7,81	9,88
Indonesia	12,14	11,11	11,54	11,21	36,61	37,71	38,90	38,67	22,99	24,07	24,36	24,13

Keterangan:

Nilai indikator provinsi lebih rendah daripada nilai nasional.

Nilai indikator provinsi lebih tinggi daripada nilai nasional.

Tabel A2.2 Data Transformasi Penyusun IPP 2015

A. Domain Pendidikan

	Domain Pendidikan											
	Rata-Rata Lama Sekolah				APK Sekolah Menengah				APK Perguruan Tinggi			
	X1				X2				X3			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Aceh	8	8	8	8	10	10	10	10	5	5	5	5
Sumatra Utara	7	8	8	8	10	10	10	10	3	3	4	4
Sumatra Barat	7	8	7	8	9	9	9	9	4	5	5	5
Riau	7	7	7	7	9	9	9	9	4	3	4	4
Jambi	7	7	7	8	9	9	9	9	3	3	4	4
Sumatra Selatan	7	7	7	7	9	9	9	9	2	3	3	3
Bengkulu	7	8	8	8	9	9	9	9	4	5	5	4
Lampung	7	7	7	7	9	9	9	9	2	2	2	3
Kepulauan Bangka Belitung	7	7	7	7	9	9	9	9	2	2	2	2
Kepulauan Riau	8	8	8	8	10	9	10	10	3	3	3	3
DKI Jakarta	8	8	8	8	9	9	9	9	4	4	4	4
Jawa Barat	7	7	7	7	9	9	9	9	3	3	3	3
Jawa Tengah	7	7	7	7	9	9	9	9	2	2	3	3
DI Yogyakarta	8	8	8	9	10	10	10		7	7	8	8
Jawa Timur	7	7	7	7	9	9	9	9	3	3	4	3
Banten	7	7	7	7	9	9	9	9	3	3	4	4
Bali	8	8	8	8	10	10	10	10	4	4	4	4
NTB	7	7	7	7	10	10	10	10	3	3	3	3
NTT	6	7	7	7	9	9	9	9	3	3	3	4
Kalimantan Barat	6	7	7	7	9	9	9	9	2	3	3	3
Kalimantan Tengah	7	7	7	7	9	9	9	9	3	3	3	3
Kalimantan Selatan	7	7	7	7	8	9	9	9	3	3	3	3
Kalimantan Timur	8	8	8	8	10	10	10	10	3	4	4	4
Kalimantan Utara	7	7	7	8	10	10	10	10	2	3	3	3
Sulawesi Utara	7	8	8	8	9	9	9	9	3	4	4	4
Sulawesi Tengah	7	7	7	7	9	9	9	9	4	4	4	5
Sulawesi Selatan	7	7	7	7	9	9	9	9	5	5	5	5
Sulawesi Tenggara	7	8	8	8	9	9	9	9	5	5	5	5
Gorontalo	6	7	7	7	9	9	9	9	4	4	4	4
Sulawesi Barat	6	7	7	7	9	9	9	9	3	3	3	3
Maluku	8	8	8	8	10	10	10	10	5	5	5	5
Maluku Utara	7	8	8	8	9	9	9	9	4	5	5	5
Papua Barat	7	7	8	8	9	10	10	10	4	4	4	4
Papua	5	6	6	5	8	7	8	8	2	3	3	2
Indonesia	7	7	7	7	9	9	9	9	3	3	3	4

B. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan

	Domain Kesehatan dan Kesejahteraan															
	Angka Kesakitan Pemuda				Persentase Pemuda Korban Kejahatan				Persentase Pemuda yang Merokok				Persentase Remaja Perempuan yang Sedang Hamil			
	X4				X5				X6				X7			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Aceh	6	7	7	6	9	9	8	8	4	4	4	4	8	7	7	7
Sumatra Utara	8	8	8	7	7	7	5	7	4	4	4	4	7	1	6	6
Sumatra Barat	6	6	5	6	7	6	6	7	2	3	3	3	5	8	7	7
Riau	6	6	6	7	6	6	6	6	3	4	3	3	4	8	5	5
Jambi	7	7	8	8	7	8	7	7	3	4	4	4	5	7	5	5
Sumatra Selatan	7	7	8	8	6	6	6	4	2	3	2	2	4	8	7	7
Bengkulu	6	6	7	7	6	5	4	6	2	3	2	2	5	7	7	7
Lampung	5	6	6	7	6	7	5	5	2	2	2	2	6	5	7	7
Kepulauan Bangka Belitung	7	6	7	8	7	9	8	9	2	3	3	3	9	5	6	6
Kepulauan Riau	6	7	7	8	8	8	4	6	3	3	3	3	8	5	10	10
DKI Jakarta	6	6	7	8	5	4	5	6	4	4	4	4	8	8	6	6
Jawa Barat	7	6	6	6	7	7	5	6	2	3	2	2	7	8	7	7
Jawa Tengah	5	6	6	6	7	7	6	7	3	4	3	3	5	6	5	5
DI Yogyakarta	4	5	6	6	3	3	3	3	4	4	5	5	10	10	10	10
Jawa Timur	5	6	6	7	7	8	6	6	3	3	4	4	6	7	8	8
Banten	6	6	7	7	7	8	7	7	2	3	3	3	8	8	9	9
Bali	4	5	5	6	7	8	6	7	4	5	4	4	7	2	5	5
NTB	3	3	5	5	4	6	3	4	2	3	3	3	4	4	8	8
NTT	3	5	4	5	8	8	7	7	4	4	3	3	4	4	6	6
Kalimantan Barat	7	7	8	7	8	9	8	8	3	4	4	4	9	5	7	7
Kalimantan Tengah	7	7	7	7	8	9	8	9	3	4	3	3	7	7	6	6
Kalimantan Selatan	5	6	7	7	6	7	7	7	4	4	4	4	6	8	6	6
Kalimantan Timur	8	8	7	8	9	7	6	7	4	4	5	5	10	9	9	9
Kalimantan Utara	8	8	6	7	8	8	5	4	3	4	4	4	8	9	5	5
Sulawesi Utara	5	6	6	6	7	7	7	7	4	4	3	3	5	8	6	6
Sulawesi Tengah	5	6	5	5	6	5	4	5	2	3	3	3	4	6	6	6
Sulawesi Selatan	6	7	6	7	8	7	5	6	4	4	4	4	7	6	8	8
Sulawesi Tenggara	5	5	6	6	6	5	4	4	4	4	3	3	7	4	5	5
Gorontalo	3	4	4	5	7	7	5	7	2	3	2	2	9	7	5	5
Sulawesi Barat	5	6	6	6	9	8	7	9	3	4	4	4	7	7	6	6
Maluku	7	8	7	7	6	6	4	6	4	5	4	4	5	9	7	7
Maluku Utara	7	8	8	7	8	6	6	4	4	4	4	4	8	10	7	7
Papua Barat	7	8	7	7	6	8	4	5	3	4	4	4	7	8	9	9
Papua	8	8	8	8	6	7	3	6	4	5	4	4	8	9	7	7
Indonesia	6	6	6	7	7	7	6	6	3	3	3	3	6	7	7	7

C. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja

	Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja							
	Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih				TPT Pemuda			
	X8				X9			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Aceh	1	1	2	2	2	4	5	5
Sumatra Utara	2	1	2	3	5	6	6	6
Sumatra Barat	2	1	2	2	4	6	5	5
Riau	2	2	2	2	4	5	6	5
Jambi	2	1	2	3	7	7	7	7
Sumatra Selatan	1	5	2	1	5	7	6	7
Bengkulu	1	5	2	2	6	7	7	7
Lampung	1	2	2	2	6	6	6	7
Kepulauan Bangka Belitung	1	4	2	5	6	8	7	7
Kepulauan Riau	3	1	4	1	7	7	6	5
DKI Jakarta	3	3	4	3	5	6	6	6
Jawa Barat	2	2	2	2	3	3	3	3
Jawa Tengah	2	2	3	3	5	6	6	6
DI Yogyakarta	5	3	6	6	6	8	7	7
Jawa Timur	2	2	3	3	6	6	6	7
Banten	2	2	2	1	3	4	4	4
Bali	3	5	3	4	8	8	9	9
NTB	1	1	2	2	6	7	8	7
NTT	1	1	2	2	7	7	7	8
Kalimantan Barat	1	2	2	2	6	7	7	7
Kalimantan Tengah	2	1	3	4	7	6	7	7
Kalimantan Selatan	2	2	3	2	6	6	6	6
Kalimantan Timur	2	8	3	2	4	5	5	5
Kalimantan Utara	2	1	3	8	6	7	6	7
Sulawesi Utara	1	3	2	2	2	4	3	4
Sulawesi Tengah	2	3	2	2	7	8	7	7
Sulawesi Selatan	2	1	2	2	5	7	6	6
Sulawesi Tenggara	2	2	4	3	6	8	8	8
Gorontalo	2	3	1	1	6	8	6	7
Sulawesi Barat	1	1	1	1	8	8	8	8
Maluku	1	2	3	2	2	5	2	4
Maluku Utara	1	3	2	1	5	7	6	7
Papua Barat	2	1	2	2	5	5	5	5
Papua	1	1	1	1	8	8	8	8
Indonesia	2	2	2	2	5	6	5	6

D. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan

	Domain Partisipasi dan Kepemimpinan											
	Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Masyarakat				Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi				Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat			
	X10				X11				X12			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Aceh	9	9	9	9	1	1	1	1	4	4	4	4
Sumatra Utara	8	8	8	8	3	3	3	2	2	2	2	3
Sumatra Barat	8	8	8	7	2	2	2	2	3	3	3	4
Riau	9	9	9	8	2	2	2	2	4	4	4	3
Jambi	9	9	9	9	2	2	2	2	3	3	3	3
Sumatra Selatan	8	8	8	9	1	1	1	2	2	2	2	3
Bengkulu	9	9	9	8	2	2	2	2	3	3	3	4
Lampung	9	9	9	9	1	1	1	2	2	2	2	2
Kepulauan Bangka Belitung	9	9	9	8	1	1	1	2	2	2	2	2
Kepulauan Riau	8	8	8	8	2	2	2	2	3	3	3	4
DKI Jakarta	8	8	8	8	1	1	1	2	2	2	2	3
Jawa Barat	9	9	9	9	1	1	1	2	3	3	3	3
Jawa Tengah	9	9	9	10	2	2	2	3	4	4	4	5
DI Yogyakarta	9	9	9	9	4	4	4	4	8	8	8	8
Jawa Timur	9	9	9	9	2	2	2	2	3	3	3	3
Banten	9	9	9	8	1	1	1	1	2	2	2	2
Bali	8	8	8	8	8	8	8	4	4	4	4	3
NTB	9	9	9	10	2	2	2	3	4	4	4	5
NTT	9	9	9	9	2	2	2	2	3	3	3	4
Kalimantan Barat	8	8	8	8	1	1	1	1	3	3	3	2
Kalimantan Tengah	8	8	8	8	1	1	1	1	2	2	2	2
Kalimantan Selatan	8	8	8	8	1	1	1	2	2	2	2	2
Kalimantan Timur	8	8	8	8	1	1	1	2	3	3	3	3
Kalimantan Utara	7	7	7	7	2	2	2	2	3	3	3	3
Sulawesi Utara	10	10	10	9	5	5	5	3	4	4	4	3
Sulawesi Tengah	8	8	8	8	2	2	2	2	3	3	3	2
Sulawesi Selatan	8	8	8	8	1	1	1	1	1	1	1	2
Sulawesi Tenggara	8	8	8	7	1	1	1	1	3	3	3	2
Gorontalo	9	9	9	8	1	1	1	2	3	3	3	3
Sulawesi Barat	9	9	9	8	2	2	2	2	2	2	2	2
Maluku	9	9	9	8	4	4	4	3	2	2	2	2
Maluku Utara	9	9	9	9	2	2	2	2	3	3	3	4
Papua Barat	8	8	8	7	2	2	2	2	3	3	3	3
Papua	9	9	9	8	2	2	2	2	4	4	4	4
Indonesia	9	9	9	9	2	2	2	2	3	3	3	3

E. Domain Gender dan Diskriminasi

	Domain Gender dan Diskriminasi											
	Angka Perkawinan Usia Anak				Persentase Pemuda Perempuan Berusia 16-24 Tahun yang Sedang Menempuh Pendidikan Menengah dan Tinggi				Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja di Sektor Formal			
	X13				X14				X15			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Aceh	9	9	9	9	4	4	4	4	3	3	3	4
Sumatra Utara	9	9	9	9	3	3	3	3	4	4	4	5
Sumatra Barat	9	9	8	8	4	4	4	4	4	4	4	4
Riau	8	8	7	8	3	2	3	3	4	4	4	4
Jambi	6	5	6	7	2	2	3	3	4	4	4	4
Sumatra Selatan	6	6	6	7	1	2	2	2	4	4	4	4
Bengkulu	7	6	6	6	3	3	3	3	4	4	3	3
Lampung	7	8	7	7	1	2	2	2	3	3	3	4
Kepulauan Bangka Belitung	6	6	5	6	1	1	2	2	4	4	5	5
Kepulauan Riau	9	9	9	9	2	2	2	2	7	7	7	7
DKI Jakarta	9	9	10	9	2	2	2	2	8	8	7	7
Jawa Barat	6	7	7	6	2	2	2	2	4	5	5	5
Jawa Tengah	7	7	7	7	2	2	2	2	5	5	5	5
DI Yogyakarta	9	9	10	9	5	5	5	5	6	6	6	6
Jawa Timur	6	7	6	7	2	2	2	2	4	5	4	4
Banten	8	8	8	8	2	2	2	2	5	6	6	5
Bali	8	7	8	8	2	2	3	3	7	7	7	8
NTB	6	6	6	6	2	3	3	2	3	4	3	3
NTT	8	7	7	8	2	2	2	3	2	3	3	3
Kalimantan Barat	5	5	5	5	2	2	2	2	3	3	4	4
Kalimantan Tengah	4	5	4	5	1	2	2	2	4	3	4	4
Kalimantan Selatan	3	4	3	5	2	2	2	2	4	4	4	4
Kalimantan Timur	6	6	6	7	3	3	3	3	4	4	5	5
Kalimantan Utara	6	5	5	7	2	2	2	3	5	6	5	5
Sulawesi Utara	6	7	6	6	2	3	2	3	4	4	4	4
Sulawesi Tengah	5	5	5	6	3	2	3	3	3	4	4	4
Sulawesi Selatan	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	4
Sulawesi Tenggara	5	6	5	5	3	3	3	3	3	3	4	4
Gorontalo	6	6	6	6	3	3	3	3	3	4	4	4
Sulawesi Barat	4	6	5	5	2	2	2	3	3	3	3	3
Maluku	8	8	7	8	4	4	4	4	2	4	3	3
Maluku Utara	7	7	5	6	3	3	3	3	3	3	3	3
Papua Barat	6	6	7	7	3	3	3	3	3	4	3	3
Papua	6	7	7	7	1	1	1	1	2	2	2	2
Indonesia	7	7	7	7	2	2	2	2	4	5	5	5

Tabel A2.3. Perkembangan Nilai Indeks Domain dalam Periode 2015–2018

Provinsi	Indeks D1				Indeks D2				Indeks D3				Indeks D4				Indeks D5			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Aceh	76,67	76,67	76,67	76,67	67,50	67,50	65,00	62,50	15,00	25,00	35,00	35,00	46,67	46,67	46,67	46,67	53,33	53,33	53,33	56,67
Sumatra Utara	66,67	70,00	73,33	73,33	65,00	50,00	57,50	60,00	35,00	35,00	40,00	45,00	43,33	43,33	43,33	43,33	53,33	53,33	53,33	56,67
Sumatra Barat	66,67	73,33	70,00	73,33	50,00	57,50	52,50	57,50	30,00	35,00	35,00	35,00	43,33	43,33	43,33	43,33	56,67	56,67	53,33	53,33
Riau	66,67	63,33	66,67	66,67	47,50	60,00	50,00	52,50	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00	50,00	43,33	50,00	46,67	46,67	50,00
Jambi	63,33	63,33	66,67	70,00	55,00	65,00	60,00	60,00	45,00	40,00	45,00	50,00	46,67	46,67	46,67	46,67	40,00	36,67	43,33	46,67
Sumatra Selatan	60,00	63,33	63,33	63,33	47,50	60,00	57,50	52,50	30,00	60,00	40,00	40,00	36,67	36,67	36,67	46,67	36,67	40,00	40,00	43,33
Bengkulu	66,67	73,33	73,33	70,00	47,50	52,50	50,00	55,00	35,00	60,00	45,00	45,00	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	43,33	40,00	40,00
Lampung	60,00	60,00	60,00	63,33	47,50	50,00	50,00	52,50	35,00	40,00	40,00	45,00	40,00	40,00	40,00	43,33	36,67	43,33	40,00	43,33
Kepulauan Bangka Belitung	60,00	60,00	60,00	60,00	62,50	57,50	60,00	65,00	35,00	60,00	45,00	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00	36,67	36,67	60,00	60,00
Kepulauan Riau	70,00	70,00	70,00	70,00	62,50	57,50	60,00	67,50	50,00	40,00	50,00	30,00	43,33	43,33	43,33	46,67	60,00	60,00	60,00	60,00
DKI Jakarta	70,00	70,00	70,00	70,00	57,50	55,00	55,00	60,00	40,00	45,00	50,00	45,00	36,67	36,67	36,67	46,67	63,33	63,33	63,33	60,00
Jawa Barat	63,33	63,33	63,33	63,33	57,50	60,00	50,00	52,50	25,00	25,00	25,00	25,00	43,33	43,33	43,33	46,67	40,00	46,67	46,67	43,33
Jawa Tengah	60,00	60,00	63,33	63,33	50,00	57,50	50,00	52,50	35,00	40,00	45,00	45,00	50,00	50,00	50,00	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67
DI Yogyakarta	83,33	83,33	86,67	90,00	52,50	55,00	60,00	60,00	55,00	55,00	65,00	65,00	70,00	70,00	70,00	66,67	66,67	70,00	66,67	66,67
Jawa Timur	63,33	63,33	66,67	63,33	52,50	60,00	60,00	62,50	40,00	40,00	45,00	50,00	46,67	46,67	46,67	46,67	40,00	46,67	40,00	43,33
Banten	63,33	63,33	66,67	66,67	57,50	62,50	65,00	65,00	25,00	30,00	30,00	25,00	40,00	40,00	40,00	36,67	50,00	53,33	50,00	50,00
Bali	73,33	73,33	73,33	73,33	55,00	50,00	50,00	55,00	55,00	65,00	60,00	65,00	66,67	66,67	66,67	50,00	56,67	53,33	60,00	63,33
NTB	66,67	66,67	66,67	66,67	32,50	40,00	47,50	50,00	35,00	40,00	50,00	45,00	50,00	50,00	50,00	60,00	36,67	43,33	40,00	36,67
NTT	60,00	63,33	63,33	66,67	47,50	52,50	50,00	52,50	40,00	40,00	45,00	50,00	46,67	46,67	46,67	50,00	40,00	40,00	40,00	46,67
Kalimantan Barat	56,67	63,33	63,33	63,33	67,50	62,50	67,50	65,00	35,00	45,00	45,00	45,00	45,00	40,00	40,00	36,67	33,33	33,33	36,67	36,67
Kalimantan Tengah	63,33	63,33	63,33	63,33	62,50	67,50	60,00	62,50	45,00	35,00	50,00	55,00	36,67	36,67	36,67	36,67	30,00	33,33	33,33	36,67
Kalimantan Selatan	60,00	63,33	63,33	63,33	52,50	62,50	60,00	60,00	40,00	40,00	45,00	40,00	36,67	36,67	36,67	40,00	30,00	33,33	30,00	36,67
Kalimantan Timur	70,00	73,33	73,33	73,33	77,50	70,00	67,50	72,50	30,00	65,00	40,00	35,00	40,00	40,00	40,00	43,33	43,33	43,33	46,67	50,00
Kalimantan Utara	63,33	66,67	66,67	70,00	67,50	72,50	50,00	50,00	40,00	40,00	45,00	75,00	40,00	40,00	40,00	40,00	43,33	43,33	40,00	50,00
Sulawesi Utara	63,33	70,00	70,00	70,00	52,50	62,50	55,00	55,00	15,00	35,00	25,00	30,00	63,33	63,33	63,33	50,00	40,00	46,67	40,00	43,33
Sulawesi Tengah	66,67	66,67	66,67	70,00	42,50	50,00	45,00	47,50	45,00	55,00	45,00	45,00	43,33	43,33	43,33	40,00	36,67	40,00	43,33	43,33
Sulawesi Selatan	70,00	70,00	70,00	70,00	62,50	60,00	57,50	62,50	35,00	40,00	40,00	40,00	33,33	33,33	33,33	36,67	40,00	40,00	40,00	43,33
Sulawesi Tenggara	70,00	73,33	73,33	73,33	55,00	45,00	45,00	45,00	40,00	50,00	60,00	55,00	40,00	40,00	40,00	33,33	36,67	40,00	40,00	40,00
Gorontalo	63,33	66,67	66,67	66,67	52,50	52,50	40,00	47,50	40,00	55,00	35,00	40,00	43,33	43,33	43,33	40,00	40,00	43,33	43,33	43,33
Sulawesi Barat	60,00	63,33	63,33	63,33	60,00	62,50	57,50	62,50	45,00	45,00	45,00	45,00	43,33	43,33	43,33	40,00	30,00	36,67	33,33	36,67
Maluku	76,67	76,67	76,67	76,67	55,00	70,00	55,00	60,00	15,00	35,00	25,00	30,00	50,00	50,00	50,00	46,67	53,33	53,33	46,67	50,00
Maluku Utara	66,67	73,33	73,33	73,33	67,50	70,00	62,50	55,00	30,00	50,00	40,00	40,00	46,67	46,67	46,67	50,00	43,33	43,33	36,67	40,00
Papua Utara	66,67	70,00	73,33	73,33	57,50	70,00	62,50	62,50	35,00	30,00	35,00	35,00	43,33	43,33	43,33	40,00	40,00	43,33	43,33	43,33
Papua Barat	66,67	70,00	73,33	73,33	57,50	70,00	62,50	62,50	30,00	30,00	35,00	35,00	43,33	43,33	43,33	40,00	40,00	43,33	43,33	43,33
Papua	50,00	53,33	56,67	50,00	65,00	72,50	55,00	62,50	45,00	45,00	45,00	45,00	50,00	50,00	50,00	46,67	30,00	33,33	33,33	33,33
Indonesia	63,33	63,33	63,33	66,67	55,00	57,50	55,00	57,50	35,00	40,00	35,00	40,00	46,67	46,67	46,67	46,67	43,33	46,67	46,67	46,67

Keterangan:

■ Nilai indeks domain provinsi yang paling rendah pada setiap tahun.

■ Nilai indeks domain provinsi yang paling tinggi pada setiap tahun.

Tabel A2.4 IPP dan Peringkat Provinsi

No	Provinsi	Nilai IPP				Pringkat IPP			
		2015	2016	2017	2018	Peringkat 2015	Peringkat 2016	Peringkat 2017	Peringkat 2018
1	Aceh	51,83	53,83	55,33	55,50	7	9	4	6
2	Sumatra Utara	52,67	50,33	53,50	55,67	5	22	6	4
3	Sumatra Barat	49,33	53,17	50,83	52,50	11	11	16	14
4	Riau	48,83	51,00	50,67	49,50	12	17	20	23
5	Jambi	50,00	50,33	52,33	54,67	10	21	8	9
6	Sumatra Selatan	42,17	52,00	47,50	49,17	34	14	30	28
7	Bengkulu	48,50	55,17	51,00	51,33	14	7	15	18
8	Lampung	43,83	46,67	46,00	49,50	33	34	32	25
9	Kepulauan Bangka Belitung	46,83	50,83	49,00	53,67	26	19	22	10
10	Kepulauan Riau	57,17	53,50	56,67	54,83	3	10	3	7
11	DKI Jakarta	53,50	54,00	55,00	55,67	4	8	5	5
12	Jawa Barat	45,83	47,67	45,67	46,17	30	31	34	34
13	Jawa Tengah	48,33	50,83	51,00	53,50	17	18	14	11
14	DI Yogyakarta	65,50	66,00	70,33	70,33	1	1	1	1
15	Jawa Timur	48,50	51,33	51,67	53,17	15	15	10	13
16	Banten	47,17	49,83	51,00	48,67	24	25	12	30
17	Bali	61,33	61,67	62,00	61,33	2	2	2	2
18	NTB	44,17	48,00	50,83	51,67	31	30	17	16
19	NTT	46,83	48,50	49,00	53,17	25	29	23	12
20	Kalimantan Barat	46,50	48,83	50,50	49,33	29	27	21	26
21	Kalimantan Tengah	47,50	47,17	48,67	50,83	23	32	24	19
22	Kalimantan Selatan	43,83	47,17	47,00	48,00	32	33	31	32
23	Kalimantan Timur	52,17	58,33	53,50	54,83	6	3	7	8
24	Kalimantan Utara	50,83	52,50	48,33	57,00	9	12	26	3
25	Sulawesi Utara	46,83	55,50	50,67	49,67	28	6	19	22
26	Sulawesi Tengah	46,83	50,33	48,00	49,17	27	23	28	29
27	Sulawesi Selatan	48,17	48,67	48,17	50,50	19	28	27	21
28	Sulawesi Tenggara	48,33	49,67	51,67	49,33	18	26	11	27
29	Gorontalo	47,83	52,17	45,67	48,17	21	13	33	31
30	Sulawesi Barat	47,67	50,17	48,50	49,50	22	24	25	24
31	Maluku	48,67	57,00	50,67	52,00	13	4	18	15
32	Maluku Utara	50,83	56,67	51,83	51,67	8	5	9	17
33	Papua Barat	48,50	51,33	51,00	50,83	16	16	13	20
34	Papua	48,00	50,83	48,00	47,50	20	20	29	33
	Indonesia	48,67	50,83	49,33	51,50				

Keterangan:

- Peringkat 1-11
- Peringkat 12-22
- Peringkat 23-34

Data Jawa Barat

Tabel A11. Data Awal Indikator IPP Jabar

	Domain 1. Pendidikan			Domain 2. Kesehatan dan Kesejahteraan		Domain 3. Kesempatan dan Lapangan Kerja	Domain 5. Gender dan Diskriminasi	
	Rata-Rata Lama Sekolah	APK Sekolah Menengah	APK Perguruan Tinggi	Angka Kesakitan Pemuda	Pemuda Merokok	TPT Pemuda	Pemuda Perempuan yang Sedang Menempuh Pendidikan Tingkat SMA ke Atas	Pemuda Perempuan yang Bekerja di Sektor Formal
Kabupaten Bogor	9,8	73,8	31,8	10,7	33,5	21,8	36,4	22,8
Kabupaten Sukabumi	9,3	76,2	12,4	6,3	31,1	20,7	27,8	19,9
Kabupaten Cianjur	9,1	76,8	n.a.	9,4	31,6	23,8	20,9	13,4
Kabupaten Bandung	10,2	80,0	24,5	10,3	33,5	12,0	31,9	25,6
Kabupaten Garut	9,7	79,3	11,9	12,8	32,9	19,4	28,7	17,6
Kabupaten Tasikmalaya	9,3	80,6	18,9	9,4	30,9	24,1	29,7	16,2
Kabupaten Ciamis	9,9	80,2	20,8	7,7	32,7	17,6	25,1	21,4
Kabupaten Kuningan	10,1	84,6	17,5	10,1	32,9	20,3	33,8	16,1
Kabupaten Cirebon	9,5	86,1	16,3	10,3	30,4	24,6	35,9	24,2
Kabupaten Majalengka	9,9	83,5	13,9	9,0	30,8	15,8	26,8	21,5
Kabupaten Sumedang	10,7	79,2	27,5	6,4	29,7	19,9	28,2	18,1
Kabupaten Indramayu	9,0	79,2	n.a.	8,9	33,1	21,2	31,4	15,6
Kabupaten Subang	10,1	80,3	9,8	6,0	30,8	24,6	30,2	27,7
Kabupaten Purwakarta	9,7	82,0	13,9	6,2	33,9	24,7	28,5	26,6
Kabupaten Karawang	10,3	81,1	17,7	6,6	28,9	24,6	30,1	25,9
Kabupaten Bekasi	10,9	94,0	28,8	5,8	23,5	18,8	37,5	30,9
Kabupaten Bandung Barat	9,9	78,0	16,7	7,4	30,6	19,8	25,8	17,8
Kabupaten Pangandaran	9,8	93,4	n.a.	11,7	31,3	11,5	32,4	n.a.
Kota Bogor	10,7	79,1	38,2	6,6	29,6	19,4	43,5	30,3
Kota Sukabumi	10,8	85,6	35,1	n.a.	28,0	20,2	44,9	28,2
Kota Bandung	12,2	90,2	50,8	6,9	30,7	15,2	48,6	37,2
Kota Cirebon	10,7	81,8	18,0	10,0	26,4	17,5	34,2	36,5
Kota Bekasi	12,3	105,3	36,1	n.a.	22,7	19,8	45,9	38,1
Kota Depok	12,0	94,0	43,1	5,2	21,2	14,0	49,3	40,3
Kota Cimahi	11,8	87,9	30,5	7,4	24,4	16,2	33,1	39,0
Kota Tasikmalaya	10,6	92,3	22,1	11,4	32,5	15,5	36,9	29,8
Kota Banjar	10,8	87,3	22,1	n.a.	27,0	13,7	44,1	21,7
Indonesia	10,4	83,1	25,1	8,1	29,8	19,6	34,7	25,9
Jawa Barat	10,4	86,1	30,2	7,7	26,3	13,5	38,7	24,1

Tabel A12. Proyeksi Nilai Indikator IPP Jabar pada 2024

A. Proyeksi Nilai Indikator

Indikator	Tahun Dasar Proyeksi	Jawa Barat		Indonesia		Metode Proyeksi
		2018	2024 (proyeksi)	2018	2024 (proyeksi)	
Pendidikan						
Rata-rata lama sekolah	2011-2018	10,37	11,01	10,37	10,54	Ekspensial
APK Sekolah Menengah	2011-2018	83,09	94,69	86,11	96,46	Ekspensial
APK Perguruan Tinggi	2011-2018	25,14	29,73	30,19	33,15	Power
Kesehatan & Kesejahteraan						
Angka Kesakitan	2011-2018	8,13	7,33	7,68	6,87	Linier
Pemuda Korban Kejahatan	2011-2018	1,41	1,19	1,30	1,50	Power
Pemuda Merokok	2015-2017	29,80	28,34	26,34	19,80	Ekspensial
Remaja Hamil	2015-2017	15,48	13,11	16,67	15,02	Power
Lapangan dan Kesempatan Kerja						
Pemuda Wirausaha (Kerah Putih)	2013-2018	0,33	0,75	0,33	0,43	Ekspensial
Tingkat Pengangguran Pemuda	2013-2018	19,60	18,62	13,47	12,86	Linier
Partisipasi dan Kepemimpinan						
Pemuda di Kegiatan Sosial	Tidak dilakukan proyeksi karena data MSBP hanya tersedia tahun 2015 dan 2018 sehingga untuk kepentingan penghitungan IPP tahun 2019-2024, digunakan nilai tahun 2018	80,06	80,06	81,36	81,36	Tidak bisa diproyeksi
Pemuda di Organisasi		4,75	4,75	6,36	6,36	Tidak bisa diproyeksi
Pemuda berpendapat dalam rapat		5,72	5,72	6,72	6,72	Tidak bisa diproyeksi
Gender dan Diskriminasi						
Perkawinan usia anak	2011-2018	13,26	8,19	11,21	8,74	Ekspensial
Pemuda bersekolah SMA+Perguruan Tinggi	2011-2018	34,75	39,15	38,67	44,12	Logaritma
Pemuda bekerja di sektor formal	2011-2018	25,89	30,36	24,13	25,50	Ekspensial

B. Proyeksi Nilai Indeks Domain

Domain	Nilai Bobot	Jawa Barat							
		2018	2019*	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*	
Pendidikan	0,2	63,33	63,33	63,33	66,67	70,00	70,00	70,00	70,00
Kesehatan dan Kesejahteraan	0,2	52,50	57,50	60,00	60,00	62,50	62,50	62,50	62,50
Lapangan dan Kesempatan Kerja	0,2	25,00	25,00	35,00	35,00	35,00	40,00	40,00	40,00
Partisipasi dan Kepemimpinan	0,2	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67
Gender dan Diskriminasi	0,2	43,33	56,67	56,67	63,33	63,33	63,33	63,33	66,67
Nilai IPP Jawa Barat		46,17	49,83	52,33	54,33	55,50	56,50	57,17	57,67
Nilai IPP Indonesia		51,50							57,67

Keterangan: *) angka proyeksi

Didukung oleh:



INDONESIA

